



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Bagian Kesatu huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 1):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode selanjutnya.

Pasal 3

- (1) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategis, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Uraian RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi Bupati atau Penjabat Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari RPD yang harus dicapai pada tahun 2026 yang diambil dari indikator tujuan, sasaran, dan strategis pembangunan Daerah;
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 73,85;
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar <2 persen;
 - c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 2,82 persen;
 - d. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,62 persen;
 - e. Indeks Gini pada angka 0,255;
 - f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada angka 73,38;
 - g. Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Usual* (BAU) sebesar 25,5 persen;
 - h. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada angka 65,50 (B);
 - i. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada angka 2,42 (Cukup);
 - j. Prevalensi Stunting pada angka 10,05 persen;
 - k. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada angka 87,85; dan
 - l. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 70.
- (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini merupakan indikator makro pembangunan yang perlu diselaraskan dengan pencapaian target nasional setiap tahunnya.
- (4) Target indikator makro pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan target indikator makro pembangunan antara Daerah dengan provinsi setiap tahunnya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dengan dana yang bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Dalam pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati atau Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD, dan
 - c. evaluasi terhadap RPD.

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026;
2. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 9

- (1) RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 Juli 2023
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 11.



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008 ;

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten Petajam Paser Utara
Tahun 2024 – 2026

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 disusun dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 disusun dan disempurnakan melalui beberapa tahapan yang meliputi kegiatan koordinasi dan konsultasi yang melibatkan semua komponen, baik masyarakat dan Perangkat Daerah melalui wadah Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Forum Perangkat Daerah (FPD). Dalam penyusunan RPD Tahun 2024 – 2026 didukung dengan pembahasan secara intensif bersama dengan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten penajam Paser Utara.

Terwujudnya Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam penyusunan dokumen RPD Tahun 2024 – 2026 ini.

Besar harapan kami bahwa dokumen RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Penajam Paser Utara sebagai **PPU Serambi Nusantara**.

Penajam, 3 Juli 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.4. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	6
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	12
2.1. Aspek Demografi Dan Geografi	12
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	29
2.3. Aspek Pelayanan Umum	51
2.3.1. Urusan Pelayanan Dasar	51
2.3.2. Urusan Non Pelayanan Dasar.....	74
2.3.3. Urusan Pilihan	102
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	112
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	112
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	116
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	118
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	121
BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH.....	124
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	124
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	124
3.1.2 Neraca Daerah.....	135
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	139
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	139
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	140
3.2.3 Anggaran Pencapaian TPB di Kabupaten Penajam Paser Utara	143
3.3 Kerangka Pendanaan.....	144
3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024-2026.....	144
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	149
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	162
4.1. Permasalahan Pembangunan	162
4.1.1 Permasalahan Terkait Indikator Makro Daerah	162
4.1.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	163
4.2 Isu Strategis	175
4.2.1 Isu Strategis Internasional	175

4.2.2	Isu Strategis Nasional.....	177
4.2.3	Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur	183
4.2.4	Isu Strategis Kabupaten/Kota Berbatasan	185
4.2.5	Isu Strategis Lokal.....	190
4.2.6	Perumusan Isu Strategis	192
BAB V TUJUAN DAN SASARAN		203
5.1.	Tujuan	203
5.2.	Sasaran.....	209
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 219		
6.1.	Strategi Pembangunan	219
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan	224
6.3.	Program Prioritas Daerah	230
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN		259
PROGRAM PERANGKAT DAERAH		259
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan	259
7.2.	Program Perangkat Daerah.....	262
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH.....		289
8.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	289
8.2.	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	289
8.2.1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	289
8.2.2.	Aspek Daya Saing Daerah	289
8.2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	289
BAB IX PENUTUP		303

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Topografi Kabupaten Penajam Paser Utara	15
Gambar 2. 2 Peta Curah Hujan Kabupaten Penajam Paser Utara	18
Gambar 2. 3 Peta Hidrologi.....	20
Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Penajam Paser Utara	21
Gambar 2. 5 Peta Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor.....	23
Gambar 2. 6 Jumlah Kasus Kebakaran Bangunan Gedung Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022	24
Gambar 2. 7 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	26
Gambar 2. 8 Jumlah Kasus Bencana Banjir Tahun 2018 – 2022	26
Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 – 2022	28
Gambar 2. 10 Jumlah Penduduk Teregristrasi Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten PPU Tahun 2018-2022 (jiwa)	28
Gambar 2. 11 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha	33
Gambar 2. 12 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran	34
Gambar 2. 13 PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)	34
Gambar 2. 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2022 (%)	35
Gambar 2. 15 Laju Inflasi Tahun 2018 – 2022 (%).....	37
Gambar 2. 16 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 – 2022 (%)..	38
Gambar 2. 17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Tahun 2018 – 2022	40
Gambar 2. 18 Indeks Gini Tahun 2018 – 2022	41
Gambar 2. 19 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 – 2022.....	42
Gambar 2. 20 Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2018 – 2022 (Tahun)	44
Gambar 2. 21 Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 – 2022 (Tahun).....	45
Gambar 2. 22 Usia Harapan Hidup Tahun 2018 – 2022 (Tahun)	46
Gambar 2. 23 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2018 – 2022.....	47
Gambar 2. 24 Prevalensi Stunting Tahun 2018 – 2022 (%)	63
Gambar 2. 25 Angka Kematian Bayi Neonatal Tahun 2018 – 2022 (Kasus)	63
Gambar 2. 26 Jumlah Bangunan Gedung Terbangun Tahun 2018 – 2022	67
Gambar 2. 27 Status Kepemilikan Rumah Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022	71
Gambar 2. 28 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Mandi/Cuci Tahun 2022	71
Gambar 2. 29 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas BAB Tahun 2022	72
Gambar 2. 30 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	74
Gambar 2. 31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 – 2022	75
Gambar 2. 32 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	76

Gambar 2. 33 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2022	76
Gambar 2. 34 Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan	77
Gambar 2. 35 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018 – 2022	77
Gambar 2. 36 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018 – 2022.....	81
Gambar 2. 37 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2018 – 2022	81
Gambar 2. 38 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	83
Gambar 2. 39 Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2018 – 2022	84
Gambar 2. 40 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018 – 2022	84
Gambar 2. 41 Desa Mandiri Pangan Tahun 2018 – 2022.....	85
Gambar 2. 42 Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2019–2022.....	86
Gambar 2. 43 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2022.....	88
Gambar 2. 44 Jumlah Penduduk Ber-KTP Elektronik Menurut	90
Gambar 2. 45 Jumlah Penduduk Memiliki Akte Kelahiran Menurut Kecamatan Tahun 2021 (Jiwa).....	90
Gambar 2. 46 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara	91
Gambar 2. 47 Perkembangan Indeks Desa Membangun Tahun 2019 – 2022.....	92
Gambar 2. 48 Persentase Kesadaran Masyarakat Untuk Ber-KB.....	93
Gambar 2. 49 Jumlah Penumpang Moda Angkutan Darat dan Perairan.....	94
Gambar 2. 50 Jumlah Angkutan Darat dan Perairan Tahun 2018-2022	95
Gambar 2. 51 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan <i>Gadget</i> Tahun 2022.....	98
Gambar 2. 52 Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Tahun 2022	98
Gambar 2. 53 Jumlah UMKM Tahun 2019 – 2022.....	99
Gambar 2. 54 Jumlah UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	99
Gambar 2. 55 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2018 – 2022	100
Gambar 2. 56 Daya Serap Tenaga Kerja Pada Proyek PMDN dan PMA.....	101
Gambar 2. 57 Jumlah Proyek PMDN dan PMA Tahun 2018 – 2022.....	101
Gambar 2. 58 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	105
Gambar 2. 59 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	106
Gambar 2. 60 Jumlah <i>Miniranch</i> Aktif Tahun 2019 – 2022.....	107
Gambar 2. 61 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 – 2022 (Orang)	110
Gambar 2. 62 Presentase Jumlah PNS Laki – Laki dan Perempuan	111
Gambar 2. 63 Jumlah PNS Menurut Eselon	111
Gambar 2. 64 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan.....	112
Gambar 2. 65 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Sebulan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022	113
Gambar 2. 66 Kondisi dan Panjang Jalan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022	116
Gambar 2. 67 Kasus Kriminalitas yang Dilaporkan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022	118

Gambar 2. 68 Rata – Rata Penduduk Terkena Tindak Kejahatan Per 100.000 Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2022	119
Gambar 2. 69 Persentase Penyelesaian Masalah Kriminalitas Terlapor di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2022	119
Gambar 2. 70 Realisasi Investasi PMDN	120
Gambar 2. 71 Realisasi Investasi PMA.....	120
Gambar 2. 72 Rasio Lulusan SDM.....	121
Gambar 2. 73 Rasio Ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara.....	122
Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah	125
Gambar 3. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah	126
Gambar 3. 3 Pendapatan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara.....	127
Gambar 3. 4 Pendapatan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	127
Gambar 3. 5 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 – 2022	129
Gambar 3. 6 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 – 2022	130
Gambar 3. 7 Realisasi Belanja Bunga Tahun 2018 – 2022	131
Gambar 3. 8 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 – 2022	131
Gambar 3. 9 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 – 2022.....	132
Gambar 3. 10 Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 – 2022	133
Gambar 3. 11 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018 – 2022	134
Gambar 3. 12 Realisasi Belanja Transfer Tahun 2018 – 2022.....	134
Gambar 5. 1 Tujuan dan Sasaran 1	205
Gambar 5. 2 Tujuan dan Sasaran 2.....	206
Gambar 5. 3 Tujuan dan Sasaran 3.....	207
Gambar 5. 4 Tujuan dan Sasaran 4.....	208
Gambar 5. 5 Tujuan dan Sasaran 5.....	209
Gambar 7. 1 Kerangka alternatif Pendanaan yang dapat di implementasikan pada kurun waktu 2024 – 2026	261

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi	12
Tabel 2. 2 Curah Hujan Kabupaten Penajam Paser Utara.....	15
Tabel 2. 3 Jumlah Hari Hujan Kabupaten Penajam Paser Utara Per	16
Tabel 2. 4 Hasil Pengamatan Unsur Iklim.....	17
Tabel 2. 5 Persebaran Sungai di Kabupaten Penajam Paser Utara	18
Tabel 2. 6 Persebaran Waduk di Kabupaten Penajam Paser Utara	19
Tabel 2. 7 Kasus Bencana Pergerakan Tanah Tahun 2019 – 2022	22
Tabel 2. 8 Jumlah Kasus Kebakaran Lahan dan Luas Lahan Terbakar Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022	24
Tabel 2. 9 Jumlah Penyelamatan Tahun 2018 – 2022	25
Tabel 2. 10 Jumlah Kasus Angin Puting Beliung Tahun 2018 – 2022	26
Tabel 2. 11 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara	30
Tabel 2. 12 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	31
Tabel 2. 13 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Milliar Rupiah)	32
Tabel 2. 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	35
Tabel 2. 15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022	36
Tabel 2. 16 Angka Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022	39
Tabel 2. 17 Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018- 2022	42
Tabel 2. 18 <i>Event</i> Kebudayaan di Kabupaten Penajam Paser Utara	48
Tabel 2. 19 Prestasi Kesenian dan Kebudayaan Jenjang Sekolah Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2022	48
Tabel 2. 20 Prestasi Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022	49
Tabel 2. 21 Persebaran Sarana Pendidikan Tahun 2018 – 2022	53
Tabel 2. 22 Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022	54
Tabel 2. 23 Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2018 – 2022	55
Tabel 2. 24 Jumlah Ruang Kelas Belajar (RKB) Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara	58
Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara yang Pernah Melahirkan 4 Tahun Terakhir	59
Tabel 2. 26 Persebaran Fasilitas Kesehatan Tahun 2022	59
Tabel 2. 27 Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Tahun 2018 – 2022	61
Tabel 2. 28 Jumlah Dokter, Tenaga Paramedis dan Sarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022	61
Tabel 2. 29 Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Tahun 2018 – 2022	62
Tabel 2. 30 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022	64
Tabel 2. 31 Realisasi Pekerjaan UPT. PU Kecamatan yang Terintegrasi Dengan ADD Tahun 2022	65

Tabel 2. 32 Jumlah Sambungan Rumah dan Cakupan Pelayanan Air Minum Perpipaan Tahun 2018 – 2022.....	66
Tabel 2. 33 Panjang Saluran Irigasi Tahun 2022	67
Tabel 2. 34 Jumlah <i>Backlog</i> Perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni.....	68
Tabel 2. 35 Jenis Bantuan Pemerintah Bidang Perumahan dan Permukiman	69
Tabel 2. 36 Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Penajam Paser Utara	70
Tabel 2. 37 Jumlah Gangguan Kamtibmas dan Pelanggaran Peraturan Daerah/Kepala Daerah Tahun 2018 – 2022	73
Tabel 2. 38 Status Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2022.....	78
Tabel 2. 39 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar 2018-2022.....	78
Tabel 2. 40 Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Jenjang Tamatan Pendidikan 2022....	79
Tabel 2. 41 Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Jenjang Tamatan Pendidikan 2022....	79
Tabel 2. 42 Banyaknya Pasar Rakyat dan Pengelola Pasar di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022.....	92
Tabel 2. 43 Jumlah Kendaraan yang Diuji KIR Tahun 2022	96
Tabel 2. 44 Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018– 2022.....	97
Tabel 2. 45 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2018 – 2022	103
Tabel 2. 46 Jumlah Produksi Komoditas Palawija Tahun 2018 - 2022.....	103
Tabel 2. 47 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2018 – 2022.....	104
Tabel 2. 48 Jumlah Populasi Ternak Tahun 2018 – 2022	106
Tabel 2. 49 Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2020 – 2022.....	108
Tabel 2. 50 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022	114
Tabel 2. 51 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha	114
Tabel 2. 52 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022.....	115
Tabel 3. 1 Persentase Realisasi terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022.....	124
Tabel 3. 2 Persentase Realisasi terhadap Rencana Belanja Daerah.....	128
Tabel 3. 3 Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2022.....	135
Tabel 3. 4 Neraca Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022.....	137
Tabel 3. 5 Analisis Neraca Daerah Kabupaten	138
Tabel 3. 6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan	139
Tabel 3. 7 Surplus Defisit Pembiayaan Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp).....	141
Tabel 3. 8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2020 (Rp).....	141
Tabel 3. 9 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	142
Tabel 3. 10 Anggaran Pencapaian TPB.....	143

Tabel 3. 11 Proyeksi Pendapatan	146
Tabel 3. 12 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 – 2022	129
Tabel 3. 13 Proyeksi Pengeluaran Wajib Mengikat Tahun 2024 – 2026.....	151
Tabel 3. 14 Proyeksi Kapasitas Riil Daerah.....	153
Tabel 3. 15 Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik	153
Tabel 3. 16 Proyeksi Pendapatan DAK Fisik dan Non Fisik.....	156
Tabel 3. 17 Tren Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2018 - 2023.....	156
Tabel 3. 18 Proyeksi Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2024 - 2026.....	157
Tabel 3. 19 Kapasitas Riil dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Bankeu Tahun 2024 – 2026	157
Tabel 4. 1 Permasalahan Terkait Indikator Makro Daerah	162
Tabel 4. 2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah...	164
Tabel 4. 3 Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten.....	191
Tabel 4. 4 Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis	197
Tabel 4. 5 Konsep Perumusan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026	201
Tabel 6. 2 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan sebagai Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran tahun 2024 – 2026.....	226
Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026	211
Tabel 6. 1 Analisis SWOT.....	219
Tabel 6. 3 Program Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara..	231
Tabel 7. 1 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023-2026.....	261
Tabel 7. 2 Target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.....	263
Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026.....	290

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumberdaya daerah yang tersedia. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam konteks ini menyatakan bahwa perencanaan yang dilaksanakan harus adanya sinkronisasi dan terintegrasi.

Adapun amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan paket peraturan perundangan lain terkait menjadi proses penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah. Sebelumnya telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa setiap daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 wajib untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini sebagai respon dari akan dilaksanakannya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dimana dokumen RPD akan menjadi instrumen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah selama masa transisi Pemilihan Kepala Daerah. Serupa seperti daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 dan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022, bahwa daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun

2023 juga diwajibkan untuk menyusun dokumen RPD Tahun 2024 – 2026 sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan selama masa transisi.

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023, sehingga Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara wajib untuk menyusun RPD Tahun 2024 – 2026. Dalam hal penyusunannya, dokumen RPD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berpedoman pada visi dan misi dikarenakan berada pada masa transisi pemilihan Kepala Daerah, namun tetap memperhatikan tujuan pembangunan pada RPJMN, RPJPD dan RPD Provinsi Kalimantan Timur, serta RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain memperhatikan hirarki dokumen perencanaan nasional dan regional, penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara juga perlu pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis. Dengan memperhatikan isu – isu strategis terkini, diharapkan dokumen RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya dalam hal penyiapan SDM guna menghadapi pemindahan IKN dan juga pelayanan dasar terkait pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pendukung lainnya yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain memperhatikan isu – isu strategis, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 juga perlu menjadi perhatian dalam menyusun RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 akan menjadi informasi penting terkait hambatan – hambatan dan ketercapaian pelaksanaan program, sehingga dapat lebih optimal dalam pengimplementasian dokumen RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026. Selanjutnya, RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian akan dijabarkan ke dalam RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD dilakukan dengan memetakan kebijakan tahunan yang telah dilaksanakan yaitu pada tahapan RKPD tahun 2019 dan 2020 dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021 sebagai rujukan utama perubahan dan dilanjutkan dengan analisis konsistensinya pada rumusan kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2022 dan 2023 dengan memerhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan tahunan yang direncanakan sampai dengan tahun 2026.

Dokumen RPD Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk menyelaraskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan dengan kondisi terkini yang akan dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada periode transisi pembangunan yaitu pada RKPD 2024, RKPD 2025 dan RKPD 2026. Dalam menetapkan penyelarasan strategi dan arah kebijakan serta penentuan program pembangunan daerah, dilakukan atas dasar hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Sasaran penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, APBN dan sumber dana lainnya;
2. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan dalam menghadapi isu – isu strategis pembangunan.
3. Menyediakan instrumen kebijakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 terdiri dari sejumlah regulasi operasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
7. Undang-undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 41 Tahun 2022);
 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 122 Tahun 2022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017



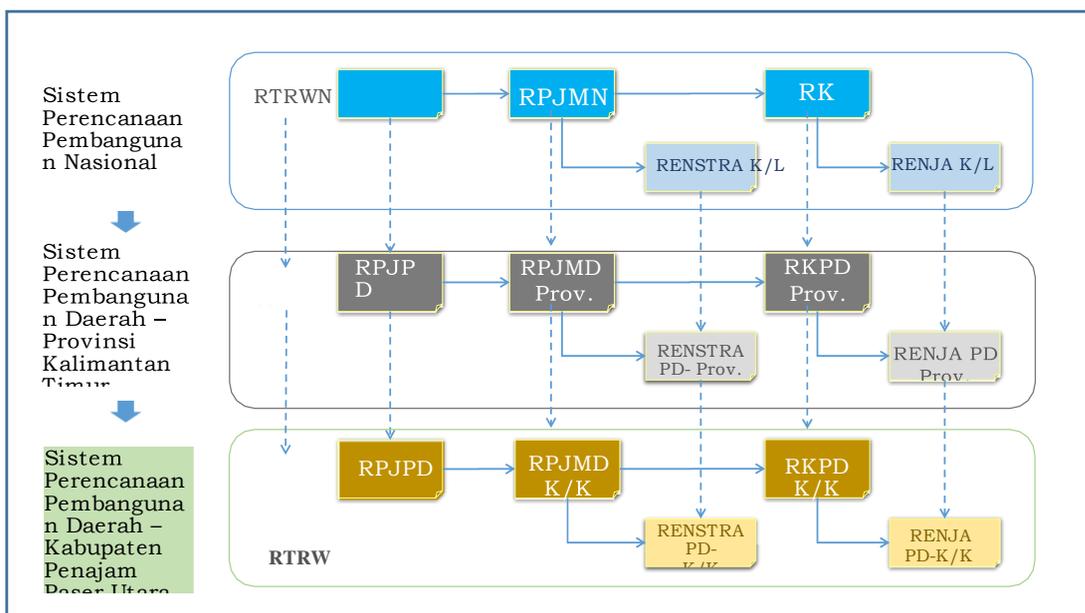
- tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1).
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2023
 30. Peraturan Daerah Kabupaten PPU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PPU Tahun 2013 - 2033
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019

- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023
32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026
 35. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026
 36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

1.4. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perubahan RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional. Hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4.1 Hubungan Antara RPD dengan RPJPN dan RPJMN

RPD memedomani RPJMN untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat dampak (*impact*) maupun manfaat (*outcome*) pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

1.4.2 Hubungan Antara RPD dengan RPJPD dan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara

RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2005 - 2025 tahap keempat. Secara substantif, RPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2024 - 2026 telah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 - 2025. Evaluasi RPJMD dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2024.

RPD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas dalam menjawab isu strategis RPD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya.

1.4.3 Hubungan Antara RPD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

RPD Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama periode RPD. Implementasi dari RPD Kabupaten Penajam Paser Utara dituangkan didalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun. Keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam RPD.

1.4.4 Hubungan Antara RPD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan RPD Provinsi

Kalimantan Timur

RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPD dan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara. Keberhasilan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam RPD dan RKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam RPD Provinsi.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antar para pemangku kepentingan.

1.4.5 RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026

Selain mempertimbangkan hubungan dengan dokumen perencanaan di atasnya, diperlukan pula pertimbangan terkait daerah yang berbatasan langsung seperti Kota Balikpapan. Sehingga menjadi perlu untuk dilakukan peninjauan arah kebijakan Kota Balikpapan agar dapat menciptakan kebijakan pembangunan yang selaras dan saling berkesinambungan.

Hubungan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan saling terkait dalam bidang infrastruktur, industri dan pelestarian sumber daya alam. Pada bidang infrastruktur, Kota Balikpapan menjadi salah satu gerbang untuk masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pengembangan pelabuhan Ferry, speed boat dan klotok dengan atingkat mobilisasi yang cukup tinggi setiap harinya. Selain itu, pengembangan jembatan pulau balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara juga diperkirakan menjadi salah satu sarana mobilisasi masyarakat di kedua daerah. Pada bidang industri, kawasan industri di Kota Balikpapan diharapkan dapat menunjang adanya kegiatan Ibu Kota Negara kedepannya. Keterkaitan lain Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah pengembalian kawasan konservasi yang dimana direncanakan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KKP3K) pada KKP3K Teluk Balikpapan – Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.4.6 RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser selain berbatasan langsung secara administrasi, terdapat keterikatan antar daerah dalam berbagai sektor. Adanya IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merencanakan kawasan food estate Selain itu, terdapat juga rencana pengembangan mini ranch di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara serta 3 Kabupaten lainnya yaitu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, terdapat pula rencana pembangunan Lambakan dan Telake di Kecamatan Long Kali. Pembangunan bendungan lambakan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air di sekitar khususnya untuk aliran irigasi yang dimaksudkan untuk mendukung ketahanan

pangan. Bendungan ini juga direncanakan menjadi salah satu destinasi pariwisata. Sementara itu, Bendungan Telake yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara berpotensi untuk mengairi sawah seluas 21.000 Ha dan 15 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Bendungan ini direncanakan dibangun pada lahan seluas 166.415 Ha dengan biaya berkisar dia angka Rp 1,7 Triliun yang bersumber dari APBN.

1.4.7 RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat memiliki keterikatan dalam beberapa sektor salah satunya infrastruktur. Kedua daerah tersebut direncanakan dapat terhubung melalui jalur perkeretaapian berupa jaringan perkeretaapian yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan, layanan kereta api lintas antar kota yang menghubungkan dengan wilayah potensi batubara serta jaringan dan layanan kereta api perintis. Adanya jalur – jalur tersebut diperkirakan dapat berdampak kepada aktivitas ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu, melalui MoU antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paaser Utara dan Kabupaten Kutai Barat No.197/211/Tu-pimp/4/Pem dan 130/484/Hk-TU.P/III/2019 yang menyebutkan bahwan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat bekerjasama dalam lingkup: 1) Infrastruktur; 2) Kebudayaan dan Pariwisata; 3) Tata Batas Wilayah; 4) Transportasi jasa kepelabuhan Buluminung yang mencakup bongkar muat barang, pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan lain lain.

1.4.8 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tidak hanya itu, hubungan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara juga berkaitan erat dengan ditetapkannya kedua kawasan tersebut menjadi Ibu Kota Nagara baru, dimana perlu adanya sinergitas perencanaan diantar keduanya. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara juga menjadi koridor pertumbuhan ekonomi bersama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

1.4.9 RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasafkan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara memeiliki beberapa kebijakan penataan ruang wilayah antara lain:

- a) Pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal
- b) Pengembangan industri lokal dan agroindustri yang berdaya saing dan berpotensi yang berwawasan lingkungan



- c) Pengembangan perikanan tangkap dengan mempertimbangkan aspek ekologia
- d) Pengembangan potensi pertambangan yang berlandaskan pada aspek keseimbangan lingkungan dan sosial budaya lingkungan sekitar
- e) Pengembangan pengarturan risiko pada kawasan rawan bencana
- f) Pengembangan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan
- g) Pengendalian secara ketat pada kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan
- h) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Balikpapan melalui berbagai aspek yaitu: 1) Aspek geografi dan demografi, 2) Aspek kesejahteraan masyarakat, 3) Aspek pelayanan umum, 4) Aspek daya saing daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil pengolahan data terhadap keuangan daerah. Adapun yang dibahas pada bagian ini diantaranya adalah kinerja masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini membahas mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi dasar dalam penentuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran Kabupaten Penajam Paser Utara

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan kedepannya. Bagian ini juga menguraikan tentang tema pembangunan dan program prioritas pembangunan daerah beserta penganggarannya

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan terkait kerangka pendanaan pembangunan beserta program pembangunan setiap perangkat daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan terkait indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

BAB IX PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Demografi Dan Geografi

Secara umum, gambaran geografis merupakan bagian yang memuat gambaran terkait letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan kenyataan posisi pada bola bumi. Gambaran mengenai letak geografis dari suatu daerah menjadi penting untuk disajikan sebagai gambaran secara fisik dan sebagai gambaran potensi – potensi yang dapat dikembangkan dari daerah tersebut yang dapat meliputi letak geografi, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi hidrologi, dan gambaran lain yang dibutuhkan. Gambaran demografi suatu daerah juga menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk disajikan. Kondisi demografi suatu wilayah akan memberikan gambaran terkait pertumbuhan kependudukan selama kurun waktu tertentu yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan – pengambilan kebijakan strategis bagi daerah.

2.1.1 Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00°48'29" - 01°36'37" Lintang Selatan (LS) dan 116°19'30" dan 116°56'35" Bujur Timur (BT). Secara administratif, Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 3.333,06 Km² yang terbagi menjadi 3.060,82 Km² wilayah daratan dan 272,24 Km² wilayah laut. Jika dibandingkan dengan luas Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten/Kota terkecil Keempat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan dengan beberapa daerah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kota Balikpapan dan Selat Makassar
- Sebelah Barat : Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat
- Sebelah Utara : Kawasan IKN Nusantara dan Kabupaten Kutai Kartanegarap
- Sebelah Selatan : Kabupaten Paser dan Selat Makassar

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi
Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
Penajam	19 Kelurahan 4 Desa	1.207,37
Waru	1 Kelurahan 3 Desa	553,88
Babulu	0 Kelurahan 12 Desa	399,45
Sepaku	4 Kelurahan 11 Desa	1.172,36

Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi menjadi 4 (empat) wilayah administrasi kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan

Babulu dan Kecamatan Sepaku, dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Penajam yaitu seluas 1.207,37 Km² dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Babulu dengan luas 399,45 Km². Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 54 desa/kelurahan dengan rincian 24 kelurahan dan 30 desa, dimana desa terbanyak terletak pada Kecamatan Babulu dengan jumlah desa sebanyak 12 desa. Kabupaten Penajam Paser Utara juga memiliki beberapa pulau – pulau kecil yang terletak di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Penajam 6 pulau kecil dan Kecamatan Sepaku 16 pulau kecil.

Dengan ditetapkannya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang baru oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 dan terbitnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengalami pengurangan luas wilayah khususnya pada Kecamatan Sepaku. Dalam Lampiran II Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdapat 6 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku yang secara eksisting masuk dalam deliniasi Kawasan IKN (KIKN) yaitu Desa Sukaraja, Tengin Baru, Karang Jinawi, Argomulyo, Sukomulyo dan Semoi Dua. Selain itu, ada 3 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku yang terdeliniasi dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yaitu Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya. Dengan demikian, dari total 15 desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku terdapat 9 desa/kelurahan yang masuk dalam deliniasi IKN Nusantara.

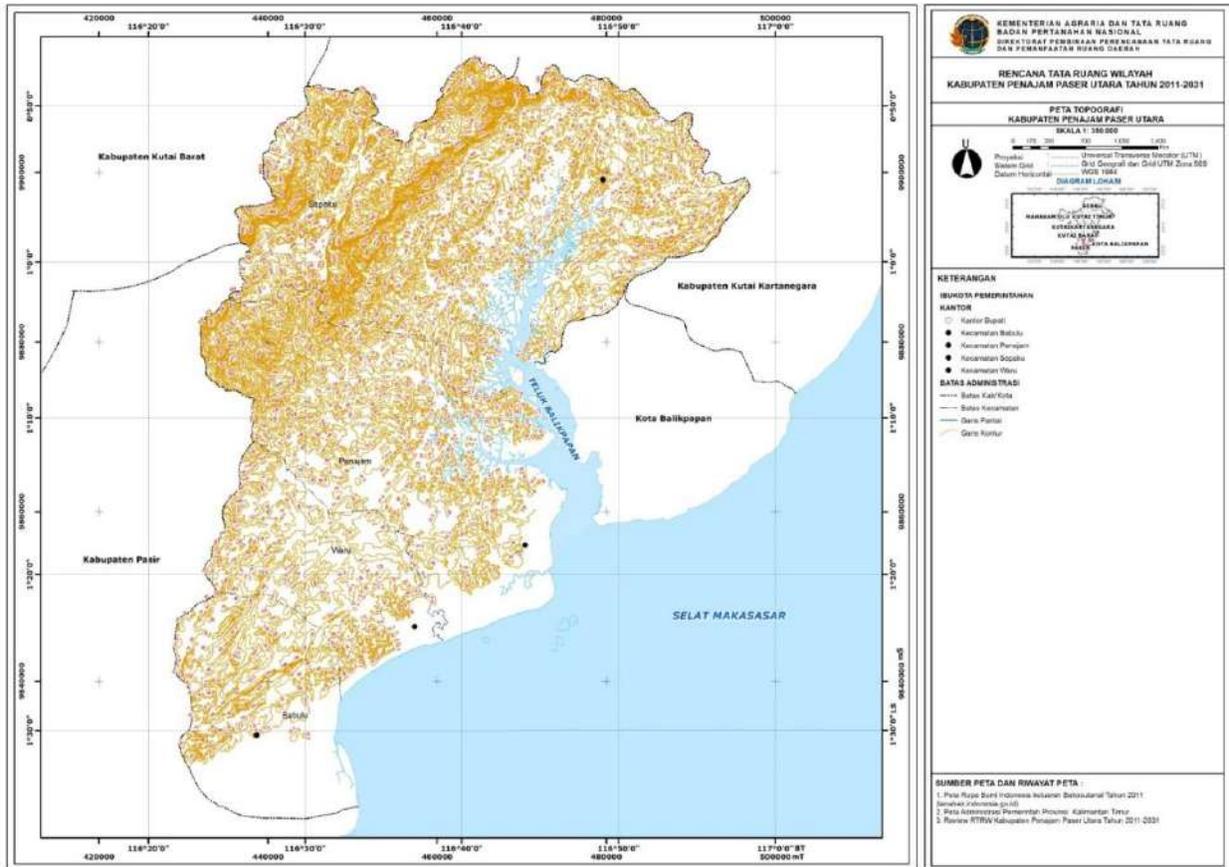
2.1.2 Kondisi Topografi

Pada umumnya ketinggian wilayah Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl), dimana Kecamatan Babulu dan Kecamatan Waru memiliki ketinggian yang relatif rendah, yaitu kisaran 0 – 250 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan Kecamatan Penajam serta Kecamatan Sepaku memiliki ketinggian yang relatif tinggi, yaitu pada kisaran 500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas wilayah berupa daratan dan wilayah yang berupa perairan laut. Wilayah perairan laut ini tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru dan Kecamatan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Ditinjau dari kondisi topografi, dapat diketahui bahwa wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas dataran dan perbukitan.

Wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berupa dataran rendah dan perbukitan tersebut memiliki potensi dalam hal pengembangan pemanfaatan hasil produksi pertanian, perkebunan maupun usaha budidaya tanaman pangan lainnya. Selain itu dengan wilayah yang memiliki garis pantai yang relatif panjang sekitar 272 Km, menyimpan potensi komoditas hasil laut yang bisa dikembangkan.



Gambar 2. 1 Peta Topografi Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Dari sisi kondisi klimatologi, Kabupaten Penajam Paser Utara berada dalam pantauan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan. Berdasarkan hasil pengamatan Stasiun Meteorologi tersebut, kondisi klimatologi Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya berbeda – beda tiap kecamatannya. Berikut kondisi klimatologi Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2. 2 Curah Hujan Kabupaten Penajam Paser Utara
Per Kecamatan (mm) Tahun 2022

Bulan	Kecamatan			
	Babulu	Waru	Penajam	Sepaku
Januari	428	370	310	212
Februari	445	281	244	205
Maret	480	199	190	351
April	161	282	152	279
Mei	239	143	166	144
Juni	312	231	240	303
Juli	138	250	230	206
Agustus	167	252	233	283
September	142	270	235	347
Oktober	339	279	144	364
November	287	284	276	262
Desember	250	198	286	196
Total	3188	2968	2686	3152

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2023

Secara umum, curah hujan di Kabupaten Penajam Paser Utara berbeda – beda di setiap kecamatannya. Curah hujan Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada kisaran 2.700 – 3.300 mm, dimana Kecamatan Sepaku menjadi wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan curah hujan tertinggi yaitu sebesar 3.152 mm dan Kecamatan Penajam menjadi wilayah dengan curah hujan terendah yaitu 2.686 mm. Setiap wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki puncak curah hujan yang berbeda pula, dimana puncak curah hujan tertinggi di Kecamatan Sepaku berada pada bulan Januari dengan curah hujan 310 mm dan Kecamatan Penajam berada pada bulan pada bulan Oktober dengan curah hujan 364 mm. Kemudian puncak curah hujan di Kecamatan Waru pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 370 mm dan Kecamatan Babulu adalah pada bulan Maret dengan curah hujan 480 mm. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa puncak curah hujan tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada tiga periode, yaitu periode bulan Januari, Maret dan Oktober. Melihat tingginya curah hujan di wilayah Kecamatan Babulu dan Waru, maka kedua wilayah ini cukup berpotensi untuk dikembangkan menjadi wilayah pertanian atau perkebunan karena dengan curah hujan yang tinggi diharapkan kesediaan sumber air untuk pertanian dan perkebunan di kedua kecamatan mampu terpenuhi. Selain diharapkan mampu untuk memenuhi kesediaan air untuk pertanian dan perkebunan, dengan curah hujan yang cukup tinggi juga diharapkan mampu untuk memberikan kesediaan air baku bagi masyarakat disetiap kecamatan.

Tabel 2. 3 Jumlah Hari Hujan Kabupaten Penajam Paser Utara Per Kecamatan Tahun 2022

Bulan	Kecamatan			
	Babulu	Waru	Penajam	Sepaku
Januari	21	14	16	22
Februari	15	14	17	17
Maret	18	15	18	15
April	13	13	16	16
Mei	12	8	10	17
Juni	15	12	14	17
Juli	11	12	15	18
Agustus	15	16	19	22
September	10	13	18	19
Oktober	18	18	17	20
November	16	12	15	20
Desember	16	10	18	20
Total	180	157	193	223
Rata – Rata	15	13	16	19

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selain memiliki curah hujan yang berbeda, wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara juga memiliki jumlah hari hujan yang berbeda. Dalam kurun waktu 1 tahun yaitu selama tahun 2022, Kecamatan Sepaku menjadi wilayah yang paling sering hujan yaitu selama 223 hari dalam setahun atau rata – rata selama 19 hari/bulan yang mana wilayah ini juga memiliki curah hujan kedua tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kecamatan

Waru menjadi wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tergolong jarang diguyur hujan, yaitu hanya 157 hari selama setahun atau jika dirata – rata hanya 13 hari setiap bulannya. Sedangkan Kecamatan Babulu memiliki rata – rata jumlah hari hujan selama 13 hari dan Kecamatan Penajam memiliki rata – rata jumlah hari hujan selama 16 hari setiap bulannya.

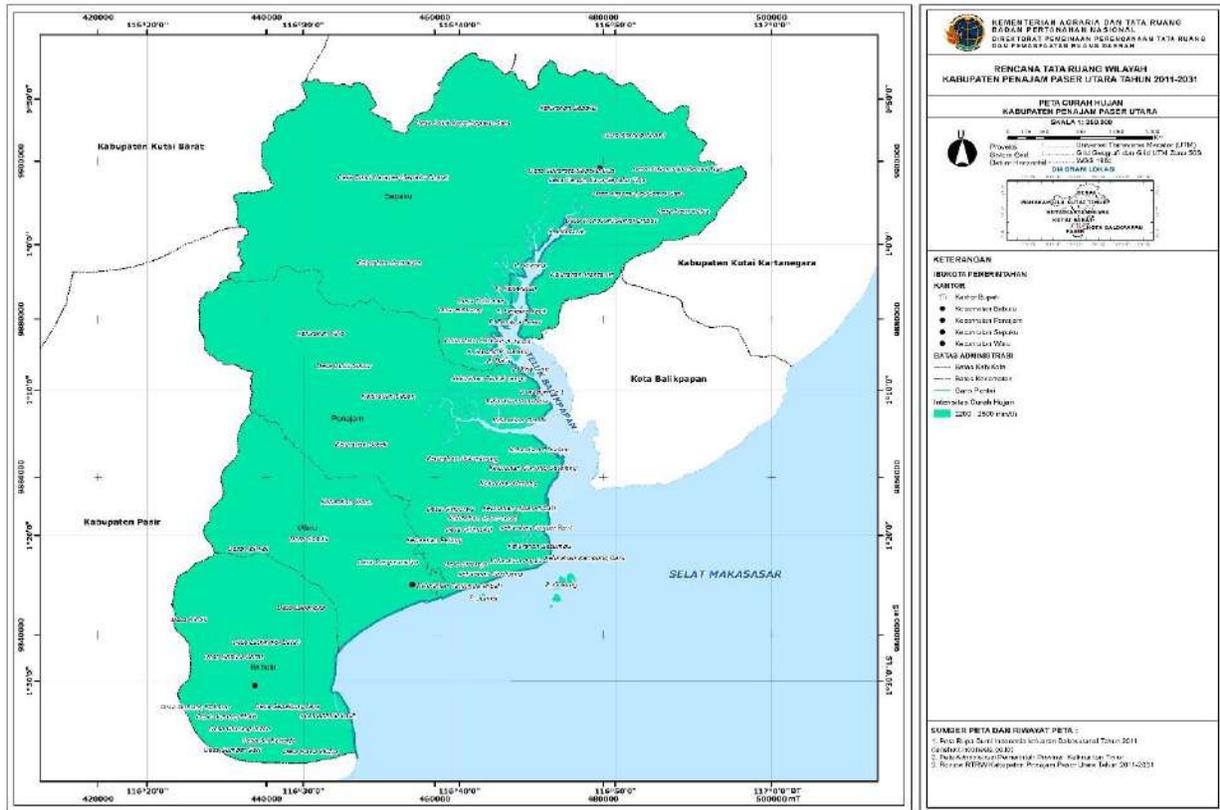
Tabel 2. 4 Hasil Pengamatan Unsur Iklim
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022

Bulan	Rata – Rata Suhu Udara (°C)	Rata – Rata Kelembapan (%)	Rata – Rata Tekanan Udara (mb)	Rata – Rata Kecepatan Angin (Knot)
Januari	26.8	84	1.010,7	2
Februari	26,8	83	1.010,0	3
Maret	27,2	84	1.009,7	3
April	27,7	82	1.009,7	3
Mei	27,8	82	1.009,9	3
Juni	27,3	83	1.010,0	3
Juli	27,2	84	1.009,5	3
Agustus	26,9	85	1.010,1	3
September	26,8	86	1.011,0	3
Oktober	27,4	83	1.010,4	3
November	27,3	83	1.010,6	2
Desember	27,4	82	1.009,4	2
Rata -Rata	27,2	83	1.010,1	3

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2023

Berdasarkan hasil pengamatan unsur iklim di Kabupaten Penajam Paser Utara, didapatkan hasil bahwa rata – rata suhu di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 27,2 °C dengan suhu tiap bulan berada pada kisaran 26 – 27 °C. Rata – rata suhu tersebut masih tergolong normal dan ideal untuk melakukan berbagai aktivitas keseharian masyarakat. Rata – rata tingkat kelembapan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga cukup tinggi, yaitu mencapai 83% dengan tingkat kelembapan tiap bulan berkisar 82% - 86%. Rata – rata tekanan udara Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 1.010,1 mb dengan rata – rata setiap bulan berkisar antara 1.009 mb – 1.011 mb. Secara teori, tingkat kelembapan tersebut masih dalam batas normal, dimana tekanan udara masih dikatakan normal hingga 1.013 mb. Sedangkan untuk rata – rata kecepatan angin Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3 knot. Kecepatan angin tersebut juga masih dikatakan normal karena menurut BMKG, kecepatan angina maksimum idealnya adalah 15 knot.

Gambar 2. 2 Peta Curah Hujan Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah pesisir, sehingga banyak sungai yang bermuara pada selat Makasar antara Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. Potensi air permukaan tanah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar untuk kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, keberadaannya di dukung dengan keberadaan sungai yang berfungsi sebagai daerah imbunan air bawah tanah. Terdapat 16 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Persebaran Sungai di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Babulu	Ambalut
		Labangka Satu
		Terjun
		Sarangalang
		Rintik
		Babulu
		Sembilang
		Sebakung
		Masappa
		Labangka Dua
2.	Waru	Muan
		Limaukembang
		Api-api besar
		Api-api kecil
		Serungsangbanjai
		Tunan
3.	Penajam	Riko
		Kernaen
		Saloloang
		Sesumpu

No.	Kecamatan	Nama Sungai
4.	Sepaku	Gunung Hantu
		Nenang Besar
		Nenang Kecil
		Gersik Besar
		Gersik Kecil
		Serungsang
		Lentup
		Slimbung
		Lembotolang
		Lemboterusan
		Lembo
		Minyangu
		Sepaku
		Bugis (Bukit)
		Maridan
		Juno
		Sapipanggung
		Ananggambus
		Seluang
		Beruang
Kemantis		
Sejaung		
Sangai		
Mangkuliu		
Tempadung		

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2022

Ketersediaan sumber air di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari keberadaan sungai – sungai yang mengalir di wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan data di atas, terdapat kurang lebih 70 sungai yang mengalir di wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan umumnya mengalir menuju Selat Makassar. Selain memanfaatkan sungai, Kabupaten Penajam Paser Utara juga memanfaatkan beberapa waduk dan bendungan sebagai sumber air masyarakat dan pertanian.

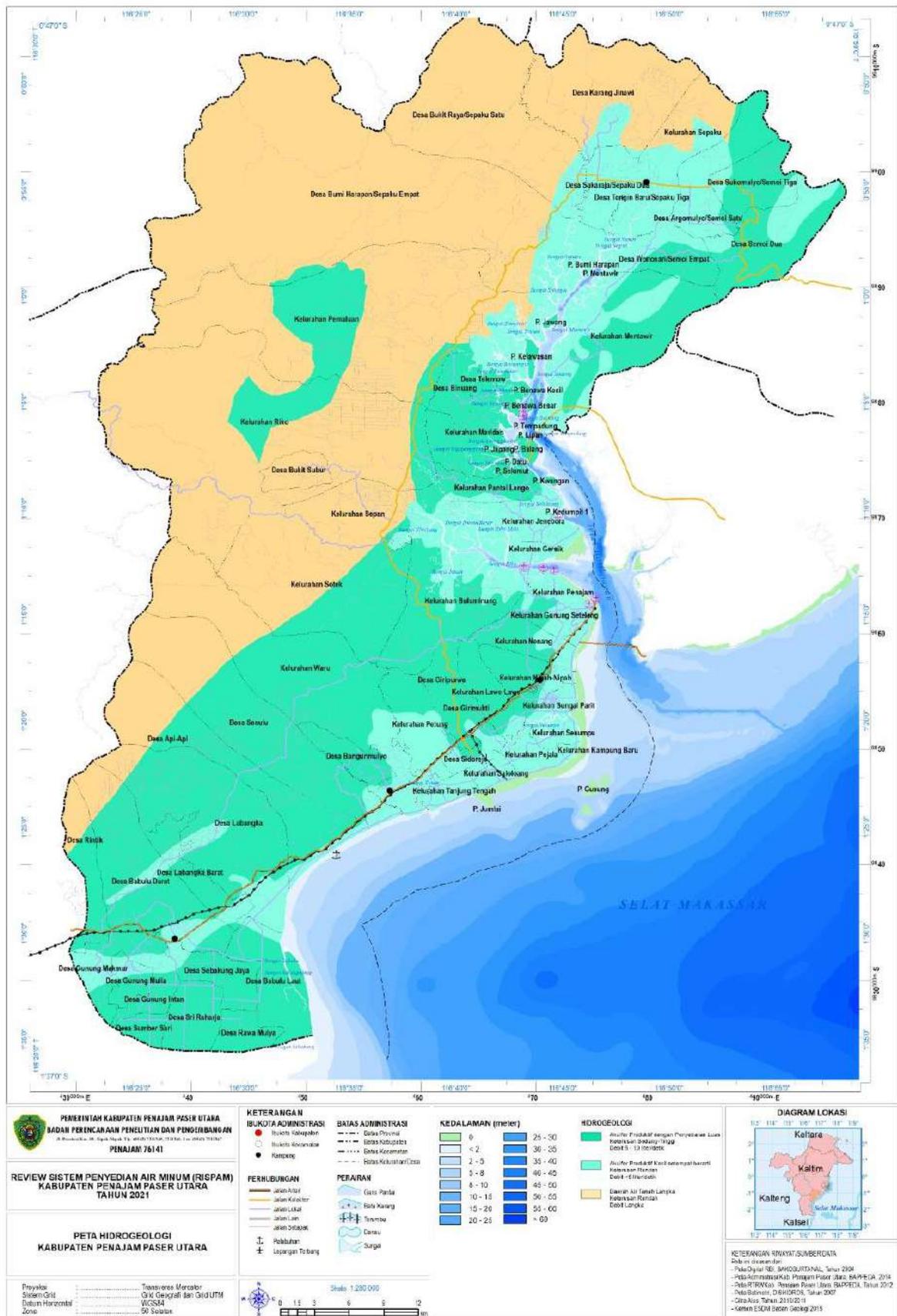
Tabel 2. 6 Persebaran Waduk di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kecamatan	Nama Waduk	Luas (Ha)
Penajam	Bendung Lawe – Lawe	233,21
	Dam Korindo	8,01
Waru	Bendung Waru	8,01
Babulu	Waduk Babulu Darat	27,94
Sepaku	Waduk PT. ITCI	11,83
	Waduk PT. ITCI	76,44
	Waduk PT. ITCI	14,93

Sumber : Kabupaten Penajam Dalam Angka, 2022

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 8 unit waduk yang tersebar di 4 kecamatan yang digunakan untuk berbagai pemenuhan kebutuhan air. Pada Kecamatan Penajam terdapat 2 unit bendungan, Kecamatan Waru terdapat 1 unit bendungan, Kecamatan Babulu terdapat 1 unit waduk dan Kecamatan Sepaku terdapat 4 unit waduk. Dengan keberadaan waduk – waduk tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku masyarakat dan diharapkan dapat menjadi sarana pengendali banjir sebagai tampungan air hujan maupun luapan sungai ketika musim hujan tiba.

Gambar 2. 3 Peta Hidrologi



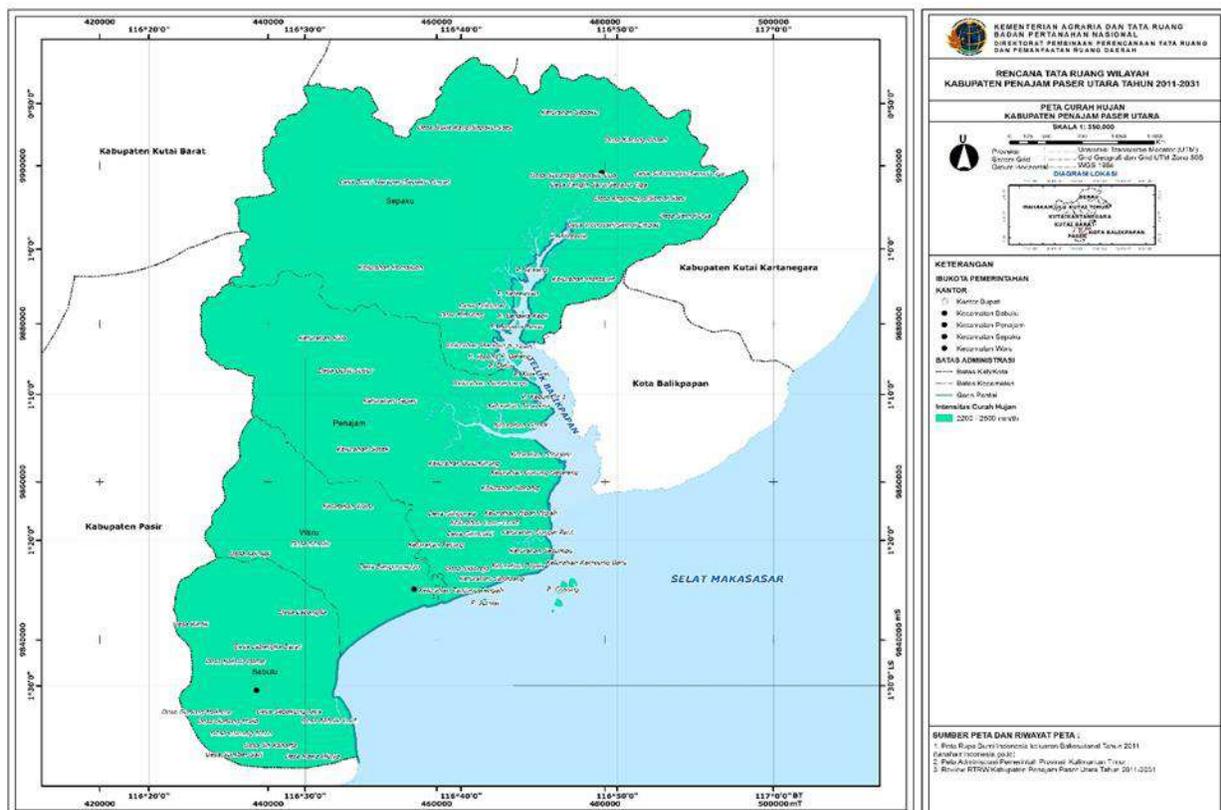
Sumber : BAPPELITBANG PPU, 2021

2.1.5 Kondisi Geologi

Daerah Penajam Paser Utara terdapat pada Lembar Balikpapan. Hampir semuanya mengalami deformasi, mulai dari Pra-Tersier sampai Tersier Akhir. Akibat proses tersebut terbentuklah antiklin, sinklin dan sesar. Struktur Geologi daerah

Penajam Paser Utara didominasi oleh bentukan antiklin, sinklin dan sesar yang merupakan produk dari proses deformasi Pra-Tersier sampai Tersier Akhir. Akibat proses tersebut terbentuklah antiklin, sinklin dan sesar. Perlipatan pada batuan Tersier membentuk kemiringan antara 10-60 derajat dan pada PraTersier lebih besar dari 40 derajat. Bentuk lipatan pada umumnya kemiringan lapisan bagian dalam lebih terjal dari pada bagian luar. Arah sumbu lipatannya mulai utara-selatan sampai timurlaut-baratdaya.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.6 Kebencanaan

Secara umum, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki beberapa potensi kebencanaan. Dengan letak geografis di pesisir Selatan Pulau Kalimantan, maka potensi kejadian tsunami dan abrasi pantai sangat mungkin terjadi. Selain itu untuk wilayah daratan, karena masih banyaknya tutupan lahan berupa vegetasi semak, tanaman perdu, dan tanaman keras lainnya, maka ada pula potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, dengan kondisi area lahan yang memiliki struktur gambut, maka cukup menambah resiko potensi kebakaran hutan/lahan tersebut. Sementara itu, beberapa area juga memiliki konsentrasi pemukiman yang padat dan kecenderungan material bangunan pemukiman yang sebagian besar masih banyak menggunakan kayu, sehingga potensi kebakaran di area pemukiman juga cukup besar. Bencana yang perlu diwaspadai karena beberapa kali pernah terjadi yaitu tanah longsor dan banjir, mengingat topografi wilayah yang berbukit dengan sungai, dan curah hujan yang cukup tinggi.

2.2.6.1 Bencana Tanah Longsor

Daerah rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar berada di wilayah utara, meliputi Kecamatan Sepaku dan sebagian Kecamatan Penajam. Hal ini disebabkan kondisi geografis yaitu topografi wilayah yang cenderung berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan yang cukup bervariasi. Kondisi ini cenderung menimbulkan potensi pergerakan tanah/*landslide* terlebih jika ditambah dengan kondisi curah hujan dengan intensitas tinggi. Area yang diperkirakan memiliki kerawanan bencana tanah longsor seluas ±8.400 Ha. Berikut merupakan rekam jejak kasus bencana tanah longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam beberapa tahun terakhir:

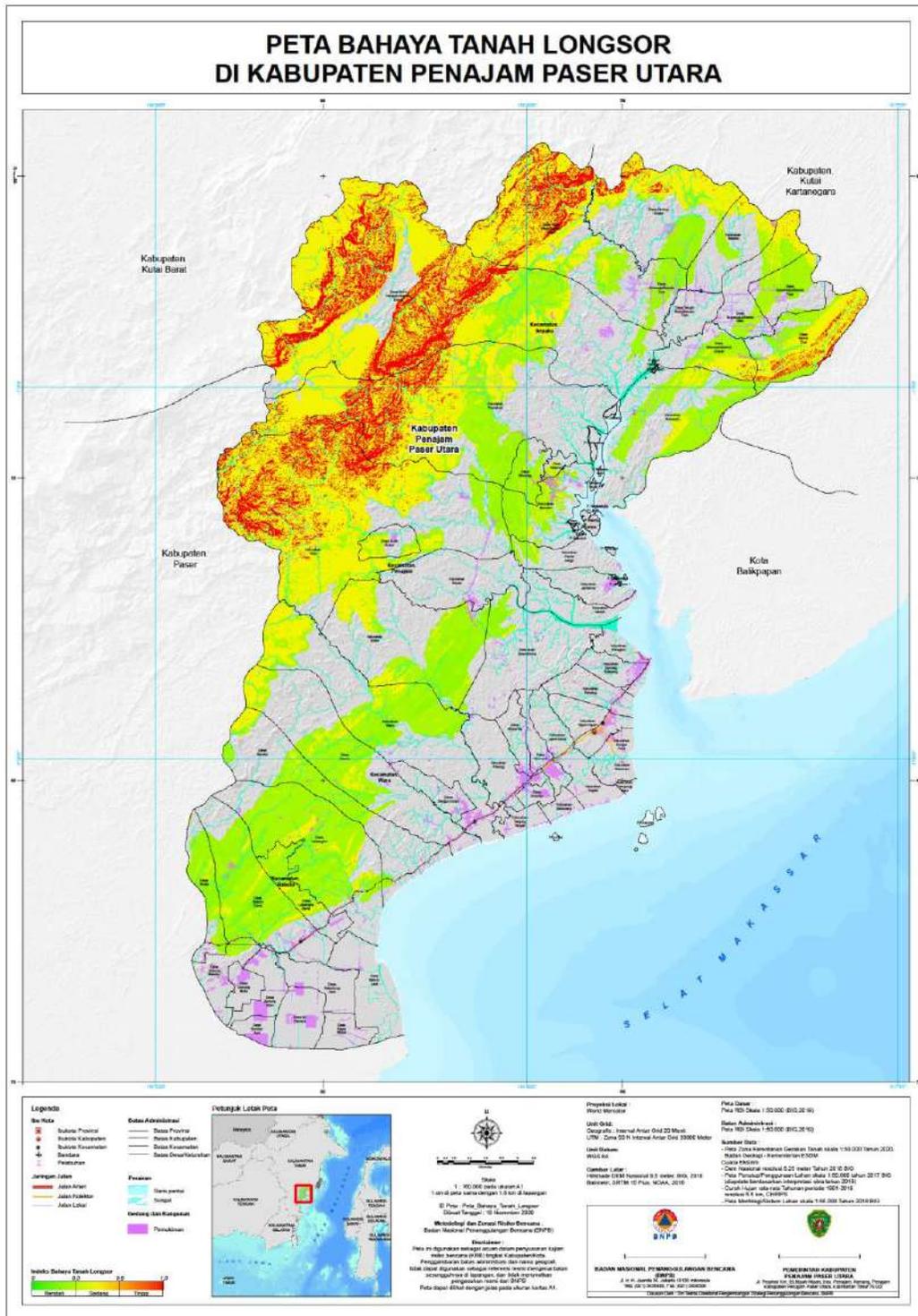
Tabel 2. 7 Kasus Bencana Pergerakan Tanah Tahun 2019 – 2022

Kecamatan	Total Kejadian (Kasus)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penajam	0	0	0	0	0
Waru	0	0	0	0	0
Sepaku	0	2	1	4	0
Babulu	0	0	0	0	0
Jumlah	0	2	1	4	0

Sumber: BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Berdasarkan data di atas, pada kurun waktu tahun 2018 – 2022 wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami bencana pergerakan tanah atau tanah longsor hanya di Kecamatan Sepaku. Berdasarkan data yang dihimpun, kasus pergerakan tanah atau tanah longsor di Kecamatan Sepaku selalu mengalami penambahan kasus. Jika merujuk pada data fisik berupa kelerengan dan klimatologi, wilayah Kecamatan Sepaku dapat dikatakan sangat rawan mengalami bencana tanah longsor. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Sepaku terolong wilayah dengan kelerengan tinggi, yaitu berkisar pada 500 mdpl dan curah hujan di Kecamatan Sepaku cukup tinggi yaitu 2.727 mm dengan jumlah hari hujan yang cukup sering yaitu 224 hari selama setahun. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu untuk menyusun langkah – langkah mitigasi bencana tanah longsor pada wilayah – wilayah rentan mengalami tanah longsor khususnya wilayah Kecamatan Sepaku yang selama 3 tahun terakhir selalu mengalami bencana tanah longsor. Sedangkan pada tahun 2022 diketahui tidak ada kejadian pergerakan tanah atau tanah longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gambar 2. 5 Peta Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

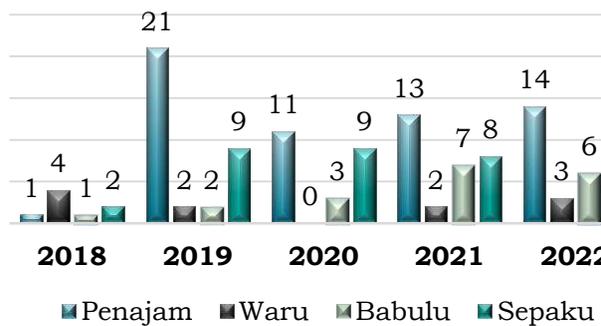


Sumber: BNPB, 2021

2.2.6.2 Bencana Kebakaran Bangunan, Hutan dan Lahan

Kebakaran juga merupakan salah satu bencana yang berpotensi muncul di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di beberapa lokasi seperti di Kelurahan Penajam dan Kelurahan Petung, terdapat konsentrasi pemukiman padat penduduk yang merupakan salah satu kondisi rawan bencana kebakaran bangunan. Selain kebakaran bangunan, Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih memiliki lahan gambut dan semak belukar yang cukup luas juga berpotensi untuk terjadi kebakaran lahan khususnya pada saat musim kemarau.

Gambar 2. 6 Jumlah Kasus Kebakaran Bangunan Gedung Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022



Sumber: DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Potensi terjadinya kebakaran bangunan cukup tinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibuktikan dengan tingginya jumlah kasus kebakaran bangunan. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang sangat sering terjadi kebakaran gedung adalah wilayah Kecamatan Penajam.

Wilayah Kecamatan Penajam merupakan wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga potensi kebakaran bangunan gedung di kecamatan ini dapat digolongkan sangat tinggi. Sedangkan wilayah dengan potensi kebakaran bangunan terkecil ada di Kecamatan Waru, dimana jika dilihat dari kepadatan bangunannya bahwa di Kecamatan Waru memang memiliki kepadatan bangunan yang tergolong rendah. Kecamatan Sepaku adalah wilayah dengan resiko kebakaran bangunan tertinggi kedua setelah Kecamatan Penajam. Wilayah Kecamatan Sepaku dan sekitarnya perlu sangat memperhatikan mitigasi kebakaran bangunan, karena lokasi ini ditetapkan sebagai lokasi pemindahan IKN sehingga kepadatan bangunan ke depan akan meningkat. Ketika meningkatnya kepadatan bangunan, maka potensi kebakaran bangunan juga akan meningkat. Rata – rata penyebab terjadinya kebakaran bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih disebabkan oleh adanya korsleting arus listrik, sehingga masyarakat harus lebih waspada dan memperhatikan kondisi jaringan – jaringan elektronik dan kelistrikan di rumah masing – masing untuk menghindari kebakaran bangunan.

Tabel 2. 8 Jumlah Kasus Kebakaran Lahan dan Luas Lahan Terbakar Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus Kebakaran Lahan (Kasus)					
Penajam	N/A	70	27	7	4
Waru	N/A	4	-	1	-
Babulu	N/A	10	-	1	1
Sepaku	N/A	7	2	2	-
Total		91	29	11	5
Luas Lahan Terbakar (Ha)					
Penajam	17,25	158	42,76	11,6	3,05
Waru	0,5	7,5	0	0,5	0
Babulu	3	50,5	0	1	0,5
Sepaku	1	13,5	1,5	0,5	0
Total	21,75	229,5	44,26	13,6	3,55

Sumber: DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Total kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu 2018 – 2022 menurun dengan cukup signifikan. Tahun 2019, total kejadian kebakaran lahan mencapai 91 kasus dengan total luas terbakar 229,5 Ha. Total kejadian dan luas lahan terbakar ini menjadi yang terbesar selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2020 total kejadian kebakaran lahan menurun yaitu menjadi 29 kasus dengan luas lahan terbakar juga menurun menjadi 44,26 Ha. Tahun 2021 – 2022 terus menurun secara berturut – turut yaitu menjadi 11 kasus dan 5 kasus dengan luas terbakar yang juga terus menurun secara berturut – turut menjadi 13,6 Ha dan 3,55 Ha. Penurunan jumlah kasus dan luas lahan terbakar ini perlu diapresiasi karena kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar meningkat.

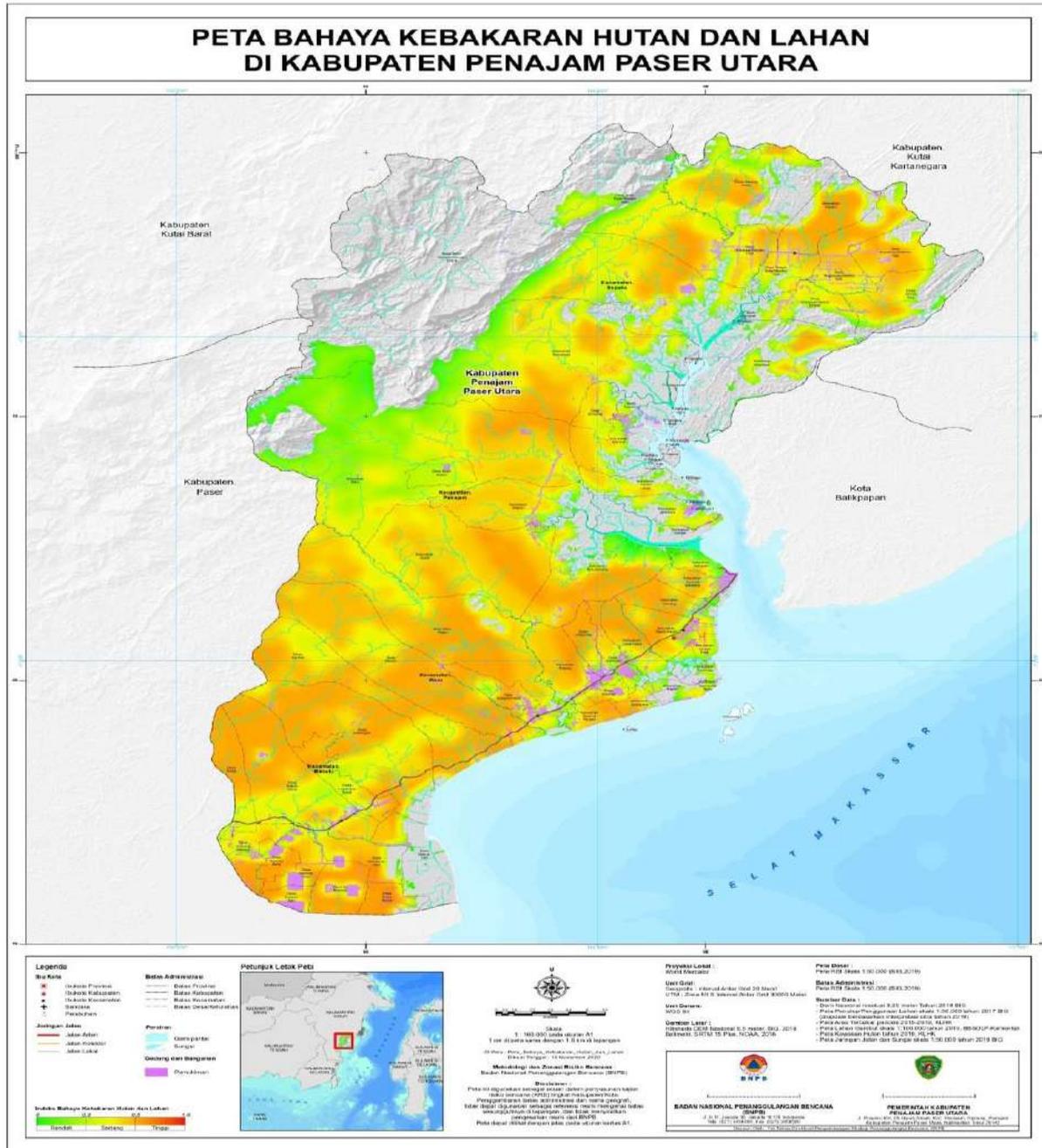
Tabel 2. 9 Jumlah Penyelamatan Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Penyelamatan	Jumlah Penyelamatan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelamatan Ular	-	0	35	65	109
2	Penyelamatan Sarang Tawon	-	35	92	117	104
3	Penyelamatan Buaya	-	0	0	1	3
4	Penyelamatan Hewan Berbahaya Lainnya	-	0	0	2	1
5	Penyelamatan Pohon Tumbang	-	0	4	8	7
6	Orang Hilang/ Tenggelam	-	1	0	0	2
7	Lain- Lain	-	0	4	15	13
Total		-	36	135	208	239

Sumber: DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Selain penanggulangan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan juga memiliki tugas untuk melakukan penyelamatan dalam keadaan – keadaan genting dan membahayakan masyarakat. Total penyelamatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kejadian membahayakan di lingkungan masyarakat. Secara umum, penyelamatan paling sering dilakukan adalah penyelamatan sarang tawon yaitu sebanyak 104 penyelamatan selama tahun 2022. Keberadaan sarang tawon memang cukup meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan masyarakat keberadaannya. Masyarakat terkadang memindahkan sarang tawon dengan cara yang kurang *safety*, sehingga peran DPKP dalam memindahkan sarang tawon sangat diperlukan. Selain penyelamatan sarang tawon, penyelamatan terbanyak juga dilakukan untuk penyelamatan ular. Kejadian paling jarang terjadi adalah penyelamatan terhadap hewan buas dan orang hilang atau tenggelam.

Gambar 2. 7 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: BNPB, 2021

2.2.6.3 Daerah Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada umumnya berada di wilayah sekitar sungai. Area ini memiliki potensi tersebut, karena secara geografis, jika curah hujan meningkat maka akan ada kenaikan volume debit sungai sehingga akan meluap ke area daratan sekitarnya. Selain itu, beberapa area memiliki potensi genangan akibat topografinya yang rendah dengan belum terdukung oleh sistem aliran pembuangan/drainase yang baik.

Gambar 2. 8 Jumlah Kasus Bencana Banjir Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa semua wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara setiap tahunnya selalu mengalami bencana banjir. Kecamatan Penajam menjadi wilayah dengan kasus bencana banjir terbesar selama 3 tahun terakhir, meskipun curah hujan di Kecamatan Penajam tidak setinggi wilayah lain di Kabupaten Penajam Paser Utara. Mitigasi bencana banjir perlu menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat melalui peningkatan atau penyediaan infrastruktur saluran pembuangan atau drainase. Selain itu perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup yang berkesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan rencana pemanfaatan ruang yang ada.

2.2.6.4 Bencana Angin Puting Beliung

Perubahan iklim yang cukup ekstrim memicu adanya ancaman bencana lain selain banjir dan tanah longsor, yaitu ancaman angin puting beliung. Kondisi angin yang cukup kencang memicu adanya kerusakan yang cukup parah. Umumnya satu – satunya wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang relatif aman dari ancaman angin puting beliung adalah Kecamatan Babulu. Berikut total kejadian angin puting beliung di Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2. 10 Jumlah Kasus Angin Puting Beliung Tahun 2018 – 2022

Kecamatan	Jumlah Kejadian Bencana Angin Puting Beliung				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penajam	-	1	11	8	7
Waru	-	-	-	1	1
Sepaku	-	1	-	2	0
Babulu	-	-	-	-	-
Jumlah	0	2	11	11	8

Sumber: BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

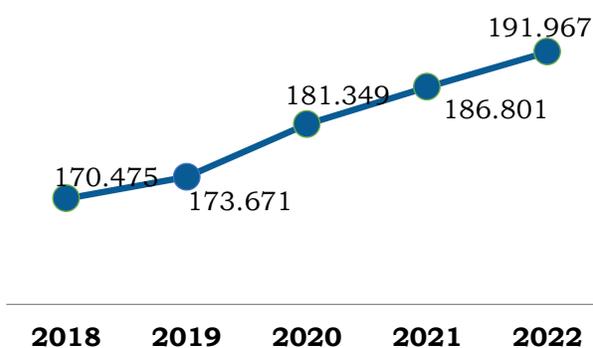
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Kecamatan Babulu merupakan wilayah yang dapat dikatakan aman dari ancaman angin puting beliung. Total kejadian angin puting beliung pada tahun 2022 sebanyak 8 kasus, dimana total ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kecamatan Penajam mengalami 7 kali angin puting beliung selama tahun 2022 dan Kecamatan Waru sebanyak 1 kali. Kecamatan Penajam merupakan wilayah yang paling rawan terkena angin puting beliung, kemudian Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Waru juga tergolong cukup rawan.

2.1.7 Kondisi Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara teregistrasi yaitu sebesar 191.967 jiwa pada tahun 2022. Jumlah ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.166 jiwa. Dengan komposisi 99.423 jiwa jumlah laki-laki dan 92.544 jiwa jumlah perempuan. Lebih lanjut mengenai komposisi kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada grafik



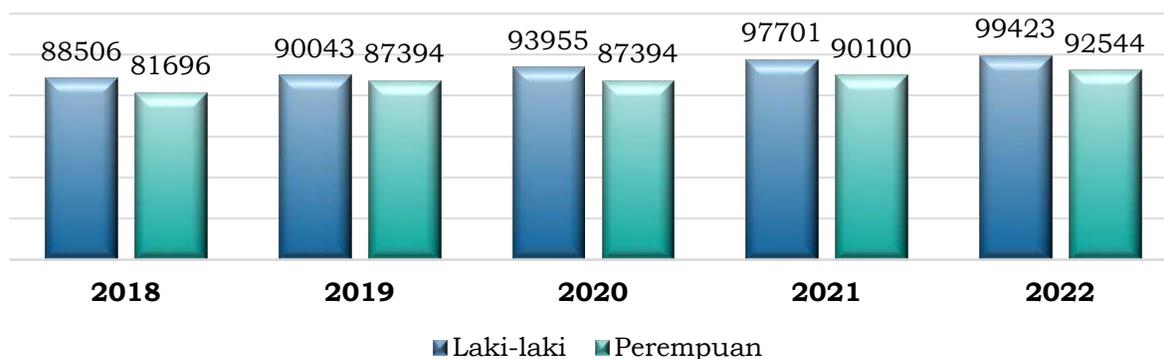
Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 - 2022



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara hingga Semester I Tahun 2022 adalah sebesar 191.867 jiwa atau bertambah 5.166 jiwa dari tahun 2021. Pertambahan penduduk ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan pertambahan penduduk pada tahun - tahun sebelumnya yang dapat mencapai 5.000 - 8.000 penduduk per tahun.

Gambar 2. 10 Jumlah Penduduk Teregristrasi Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten PPU Tahun 2018-2022 (jiwa)



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Dari grafik diatas, dapat dilihat perkembangan komposisi penduduk dari tahun ketahun, sehingga dapat terlihat laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

Tabel 2.6 Komposisi Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	88.506	90.043	93.955	96.701	99.423
Perempuan	81.969	83.628	87.394	90.100	92.544
Jumlah Penduduk Penajam Paser Utara	170.475	173.671	181.349	186.801	191.967
Laju Pertumbuhan	0,17%	1,87%	4,42%	3,01%	2,76%
Kepadatan Penduduk	51	52,11	54,41	56,04	57,60

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Laju pertumbuhan penduduk didapatkan dengan melihat tren pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk setiap tahunnya, sedangkan kepadatan penduduk akan didapatkan melalui perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk wilayah. Laju pertumbuhan penduduk akan memberikan informasi terakrit kecepatan pertumbuhan atau penambahan penduduk dalam suatu wilayah, sedangkan kepadatan penduduk akan memberikan informasi berupa rata - rata

jumlah penduduk yang berdomisili per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sebesar 2,76% dengan kepadatan penduduk rata – rata sebesar 56,68 jiwa/Km².

Pertambahan penduduk di tahun 2022 dapat dikatakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap harus mewaspadai adanya lonjakan jumlah penduduk yang akan semakin bertambah. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memikirkan dan merumuskan strategi dalam pengendalian pertumbuhan penduduk sebelum terjadi lonjakan jumlah penduduk yang tinggi dan tidak terkendali mulai dikerjakannya proyek pembangunan IKN Nusantara dan proses pemindahan pegawai Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat yang tentu akan segera dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Jika strategi pengendalian penduduk tidak mulai dirumuskan, maka dikhawatirkan ke depannya kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya kecamatan – kecamatan disekitar IKN akan

meningkat pesat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali (*urban sprawl*).

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0 – 4	6.533	6.095	12.628
5 – 9	9.546	8.797	18.343
10 – 14	9.699	8.942	18.641
15 – 19	8.014	7.553	15.567
20 – 24	8.594	8.115	16.947
25 – 29	7.878	7.215	15.093
30 – 34	7.269	7.077	14.346
35 – 39	7.380	7.217	14.597
40 – 44	8.169	7.639	15.862
45 – 49	6.857	6.339	13.196
50 – 54	5.946	5.644	11.590
55 – 59	4.773	4.312	9.085
60 – 64	3.520	3.079	5.599
65 – 69	2.366	1.942	4.306
70 – 74	1.366	1.220	2.306
75+	1.250	1.304	2.554
Total	99.423	92.544	191.967

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 didominasi oleh penduduk usia 5 – 9 tahun atau usia anak – anak sebanyak 18.343 jiwa dan usia 10 – 14 tahun atau usia remaja sebanyak 18.641 jiwa. Usia – usia yang mendominasi tersebut akan menjadi modal penting dalam perkembangan Kabupaten Penajam Paser Utara menyambut perpindahan IKN yang diproyeksikan akan benar – benar rampung pada tahun 2045. Pada tahun 2045 juga Indonesia akan berada dalam fase Bonus Demografi, dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja lebih banyak dibanding penduduk usia tidak produktif. Sehingga penduduk usia 5 – 14 tahun ini perlu sangat dipersiapkan kualitas dan daya saingnya untuk menyambut Bonus Demografi tersebut pada tahun 2045 atau ketika usia penduduk 5 – 14 tahun tersebut telah memasuki usia produktif atau usia angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk yang tergolong penduduk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 – 64 tahun, dimana berdasarkan data di atas jumlah

penduduk usia angkatan kerja Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebanyak 128.489 jiwa atau sebanyak 68,01% dari total penduduk tahun 2022. Kondisi ini tentu merupakan peluang bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyediakan tenaga kerja lokal yang diperlukan oleh industri yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022

Kecamatan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	≤SD	SMP	SMA	Diploma	S1	≥S2	
Babulu	25.947	5.471	5.475	482	903	34	38.312
Waru	13.141	2.613	3.773	293	499	11	20.330
Penajam	58.416	10.947	16.792	1637	3541	168	91.501
Sepaku	25.304	5.455	6.552	490	942	37	38.780
Total	122.808	24.486	32.592	2.902	5.885	250	188.923

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Jika meninjau tabel jumlah penduduk menurut kelompok usia, maka akan terlihat bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi untuk menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja diberbagai sektor usaha yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan penduduknya, maka akan terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Penajam Paser Utara merupakan tamatan pendidikan SD/Sederajat. Jumlah penduduk tamatan SD/Sederajat sebanyak 122.808 jiwa, dimana jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk tamatan Diploma dan Sarjana serta Pasca Sarjana. Melihat kondisi ini, maka tergambar bahwa kualitas SDM Kabupaten Penajam Paser Utara masih menjadi permasalahan utama untuk dapat mendukung penyediaan tenaga kerja berkualitas. Pada tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat antusias untuk meningkatkan kompetensi penduduknya melalui program – program pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan angkatan kerja dengan memperhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekitarnya. Selain fokus untuk menyiapkan tenaga kerja untuk industri, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga fokus untuk menyiapkan masyarakat yang siap berwirausaha melalui pelatihan – pelatihan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk membuka usaha dari rumah, seperti pelatihan menjahit, membuat kue, dan lain sebagainya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan bagian untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, baik kondisi perekonomian makro Kabupaten Penajam Paser Utara maupun gambaran umum kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain dari sektor ekonomi, gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat juga dapat ditinjau berdasarkan kondisi pendidikan dan kesehatan.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator – indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu: Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Tingkat Kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah secara makro pada tahun tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana PDRB ADHB tahun 2018 – 2019 terus mengalami kenaikan setiap tahun namun tahun 2020 mengalami penurunan dan tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2022, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada nilai Rp13.187,39 miliar atau meningkat sekitar kurang lebih Rp3 miliar dibanding tahun 2021. Kondisi PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 – 2019 terus mengalami peningkatan, sedangkan sejak tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Akan tetapi kembali meningkat di tahun 2022. PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 berada pada nilai Rp7.433,74 miliar, dimana nilai tersebut mengalami meningkat hampir Rp1 Miliar juta dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2. 11 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto	
	Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rp)
2018	8.877,83	6.590,45
2019	9.141,60	6.762,54
2020	9.052,13	6.604,22
2021	10.087,32	6.492,34
2022	13.187,39	7.433,74

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara
Dalam Angka, 2023



Tabel 2. 12 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.800.297,07	1.855.123,52	1.982.299,39	2.308.774,15	2.559.860.000
B	Pertambangan dan Penggalian	2.733.279,04	2.680.287,67	2.290.696,10	2.371.194,28	2.982.880.000
C	Industri Pengolahan	1.410.829,33	1.413.227,75	1.467.386,85	1.635.316,88	1.768.700.000
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.125,03	6.585,04	7.489,72	8.113,63	8.760.000
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.882,30	8.333,01	8.529,68	8.950,59	10.030.000
F	Konstruksi	939.693,95	1.038.607,44	1.131.471,77	1.440.618,95	3.179.540.000
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	783.392,00	840.751,52	867.188,09	913.825,73	1.117.960.000
H	Transportasi dan Pergudangan	136.738,08	146.916,24	149.956,25	164.397,43	198.460.000
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49.829,45	52.125,64	49.994,56	51.463,67	56.920.000
J	Informasi dan Komunikasi	107.847,83	121.139,49	131.085,78	141.936,97	152.910.000
K	Jasa Keuangan	68.364,99	73.837,89	77.731,84	82.974,15	95.180.000
L	<i>Real Estate</i>	104.371,10	110.339,02	116.334,12	123.505,99	129.220.000
M,N	Jasa Perusahaan	1.632,24	1.689,73	1.643,54	1.717,93	1.880.000
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	345.634,57	363.769,65	332.929,62	352.015,31	398.680.000
P	Jasa Pendidikan	294.917,92	319.707,16	347.369,16	383.557,06	415.580.000
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.554,15	2.723,50	3.291,45	4.038,43	4.460000
R,S,T,U	Jasa Lainnya	84.445,04	89.777,81	86.773,38	94.917,26	106.380.000
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		8.877.834,09	9.124.942,08	9.052.171,30	10.087.318,41	13.187.390.000

Sumber: BPS, 2023

Sejak tahun 2018 – 2019 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan nilai. Namun pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara menurun sekitar Rp 72 Miliar menjadi sebesar Rp9.052.171.300.000,-. Penurunan ini sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang juga menurun akibat dari Pandemi Covid-19 yang juga berimbas pada perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2021, kondisi PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara kembali meningkat. Terjadi peningkatan nilai PDRB cukup signifikan sebesar kurang lebih Rp 1 Triliun menjadi sebesar Rp10.087.318.410.000,-. Kondisi ini kembali meningkat pada tahun 2022 dimana meningkat lebih dari Rp3 Triliun menjadi Rp13.187.390.000. Peningkatan ini juga sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang perlahan semakin membaik karena pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat.

Jika dilihat secara lebih rinci, peningkatan nilai PDRB ini juga tidak terlepas dari peningkatan nilai di semua lapangan usaha pembentuk PDRB. Sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan nilai yang cukup besar adalah sektor lapangan usaha pertanian dan konstruksi, dimana lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan kurang lebih Rp 300 Miliar dan lapangan usaha konstruksi sebesar kurang lebih Rp 1,1 Triliun yang menjadikan sektor konstruksi sebagai nilai PDRB tertinggi dengan peningkatan tertinggi pula.

Tabel 2. 13 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Milliar Rupiah)
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.644,36	3.831,13	3.873,12	4.071,43	4.509,64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	55,13	58,36	58,20	63,10	68,12
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	995,44	1.107,50	1.115,02	1.107,60	1.342,26
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.960,92	3.389,07	3.439,67	4.086,06	7.277,80
5	Perubahan Inventori	30,79	25,65	23,17	9,49	10,03
6	Net Ekspor	1.191,20	729,90	539,45	749,61	-20,46
	PDRB	8.877,83	9.141,60	9.052,13	10.087,31	13.187.39

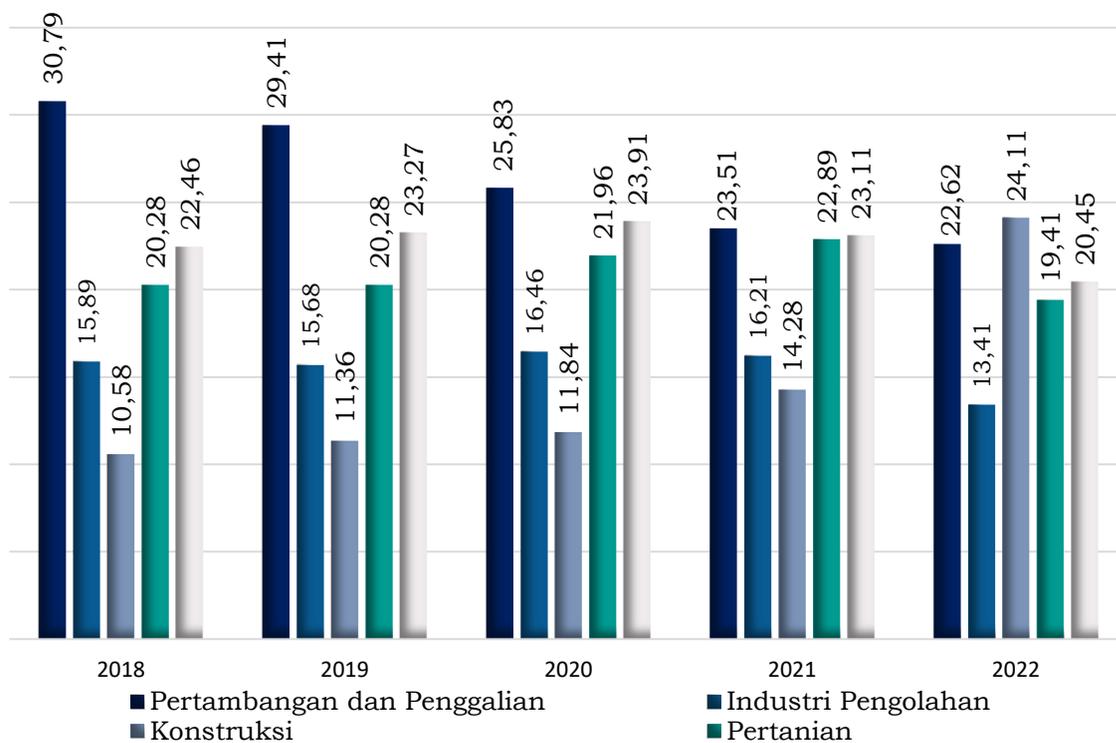
Sumber: BPS, 2023

Kondisi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya selaras dengan kondisi PDRB menurut lapangan usaha. PDRB menurut pengeluaran juga mengalami peningkatan sejak tahun 2018 – 2019, lalu menurun pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan PDRB menurut pengeluaran ini juga dipengaruhi oleh PDRB menurut lapangan usaha. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi Rp 4,5 miliar. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga pada tahun 2022 sebesar Rp 650 juta, dimana

pengeluaran ini meningkat dibandingkan tahun 2021. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2022 meningkat lebih dari Rp200 juta.

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh Lapangan Usaha Kontruksi yang mana berubah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pertambangan dan penggalian. Akan tetapi, Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 20 persen dari total PDRB PPU sejak tahun 2018 - 2022. Namun dalam 4 tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun.

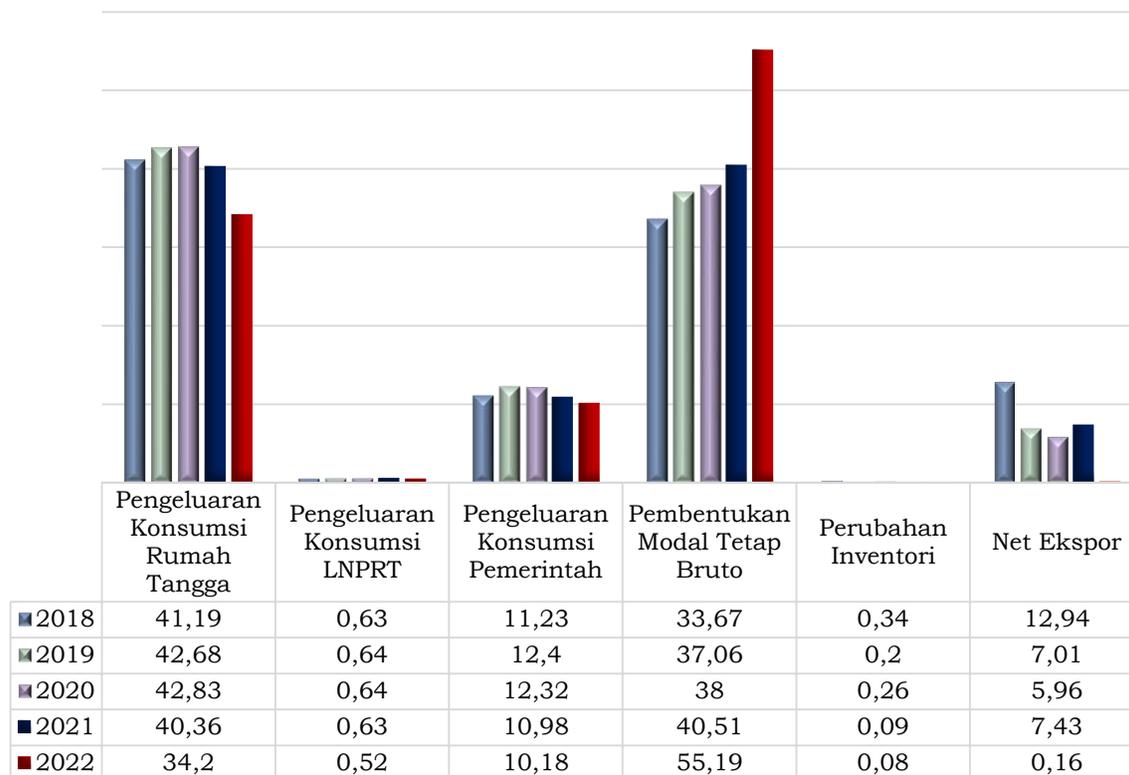
Gambar 2. 11 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2022 (Persen)



Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2023

Sejak tahun 2018 struktur penggerak perekonomian utama masih didominasi oleh 4 lapangan usaha, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Sektor industri pengolahan serta penggalian dan pertambangan dan pertanian mengalami penurunan pada tahun 2022 meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar. Sedangkan sektor konstruksi mengalami peningkatan pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi tersebut, maka ada potensi bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendorong sektor pertanian dan konstruksi sebagai tumpuan perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara di masa yang akan datang karena tren PDRB kedua sektor tersebut secara konsisten mengalami peningkatan.

Gambar 2. 12 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 (Persen)



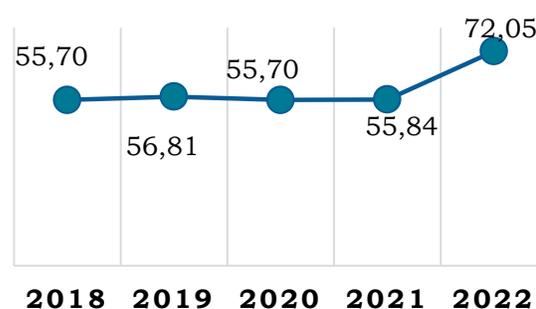
Sumber: BPS, 2023

Distribusi pada komponen pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 55,19, Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 34,2% dan Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 10,18%.

B. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita adalah nilai pendapatan per satu orang penduduk pada suatu daerah. Nilai PDRB per kapita dapat ditinjau berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan perorangan dalam satu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita atau per orang dalam satu daerah.

Gambar 2. 13 PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

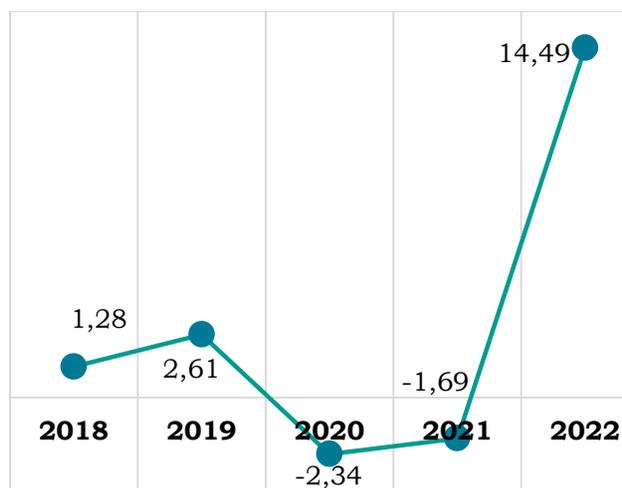
PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kondisi fluktuatif. Naik dan turunnya PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir tidak begitu signifikan. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar

Rp72,05 juta/tahun. Nilai PDRB per kapita tersebut menggambarkan pendapatan perorangan selama kurun waktu 1 tahun, sehingga jika dirata – ratakan maka pendapatan perorangan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp4,65 juta/bulan. Nilai PDRB per kapita tersebut meningkat Rp0,14 juta dibanding tahun 2021 atau meningkat sebesar Rp140.000,00.

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat ditinjau melalui data pertumbuhan PDRB. Secara global, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup parah akibat dari Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara. Namun pada tahun 2021, kondisi Pandemi Covid-19 perlahan mulai dapat dikendalikan penyebarannya dan tahun 2022 kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat semakin merangsang geliat ekonomi masyarakat dengan harapan ekonomi dapat kembali tumbuh dan semakin membaik. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara:

Gambar 2. 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

LPE Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 perlahan mulai membaik setelah tahun 2020 terkena dampak dari kontraksi perekonomian

global dan nasional akibat Pandemi Covid-19. Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 tumbuh sebesar 14,49% dibandingkan capaian tahun 2021 yang mengalami penurunan kinerja sebesar minus 1,69 % Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2022 tercatat sebesar 5,72%, dimana capaian tersebut meningkat 2,48% dari triwulan III tahun 2021 yang sebesar 3,24%. Dengan meningkatnya perekonomian nasional, harapannya diimbangi dengan peningkatan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,69	3,14	-2,08	0,44	-0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,88	0,04	-5,25	-14,09	3,29
C	Industri Pengolahan	-2,55	2,31	-7,01	-1,68	0,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,52	5,78	13,52	7,10	4,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	5,37	3,91	2,43	4,26	7,35



Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
	Ulang					
F	Konstruksi	8,06	6,98	7,10	22,64	89,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,70	4,27	1,51	2,56	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	4,49	4,04	-1,31	2,74	7,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,85	3,92	-4,42	2,57	8,02
J	Informasi dan Komunikasi	7,23	9,08	10,09	7,72	6,13
K	Jasa Keuangan	3,69	6,29	5,65	1,66	5,79
L	<i>Real Estate</i>	6,45	3,62	2,17	-0,93	1,52
M,N	Jasa Perusahaan	2,61	1,82	-3,37	1,32	4,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,18	4,06	-6,26	-3,56	7,11
P	Jasa Pendidikan	4,19	2,56	2,27	2,96	3,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,11	3,59	19,25	18,56	4,3
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,94	4,22	-3,47	0,25	6,64
Laju Pertumbuhan Ekonomi		1,28	2,61	-2,34	-1,69	14,49

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 semakin membaik dari pada tahun 2021. Jika dijabarkan menurut lapangan usaha, maka kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara hamper semuanya bergerak positif. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 89,82 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 52,98 persen. Dari sisi produksi, pelonjakan ekonomi selain terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi, juga terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 8,02 persen dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 7,83 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada komponen Impor yaitu sebesar 26,30 persen dan komponen Pengeluaran Pemerintah yaitu sebesar 20,01 persen. Pada tahun 2024, diharapkan sektor – sektor dengan pertumbuhan negatif di tahun 2022 dapat meningkat dan sektor yang telah tumbuh secara positif diharapkan dapat terus tumbuh secara positif agar dapat menopang perekonomian daerah.

Tabel 2. 15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,28	2,85	-0,11	1,13	3,21
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,76	7,29	-0,87	0,54	2,25
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,69	8,91	-5,20	-2,33	20,01
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,29	6,10	3,39	12,53	52,98
5	Perubahan Inventori	-14,53	-14,44	-0,60	-64,66	1,47
6	Net Ekspor	-7,32	-6,08	-17,78	-38,72	-102,06
Laju Pertumbuhan		1,28	2,61	-2,34	-1,69	14,49

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

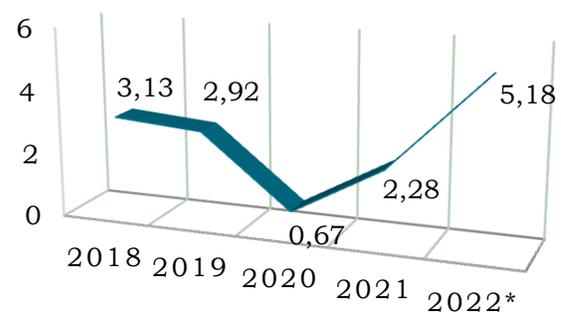
Laju pertumbuhan ekonomi menurut kelompok pengeluaran menggambarkan kontribusi pengeluaran masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2022 komponen pembentukan modal tetap bruto menjadi komponen dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan besaran 52,98%. Pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak termasuk barang konsumsi, seperti kendaraan, barang elektronik, properti dan lain sebagainya. Dengan ini maka masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 cukup konsumtif dalam membeli barang – barang modal. Komponen pembentukan modal tetap bruto ini juga menjadi komponen dengan pertumbuhan pengeluaran tertinggi, lebih dari 40% dibandingkan tahun 2021.

D. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga dari satu periode ke periode berikutnya. Suatu daerah dapat dikatakan mengalami inflasi apabila kenaikan harga terjadi secara terus menerus atau di setiap periode. Perhitungan laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sampel daerah perhitungan adalah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, sedangkan untuk mengetahui laju inflasi daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan asumsi nilai inflasi di daerah yang berdekatan dengan daerah yang menjadi sampel perhitungan. Pada tahun 2023, BPS Provinsi Kalimantan Timur berencana untuk memperluas daerah yang akan menjadi sampel perhitungan inflasi menjadi total 5 daerah dan salah satu daerah tersebut

adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk mengetahui nilai inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022, maka nilai inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan asumsi yang sama dengan nilai Kota Balikpapan. Berikut nilai inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara hingga tahun 2022:

Gambar 2. 15 Laju Inflasi Tahun 2018 – 2022 (%)

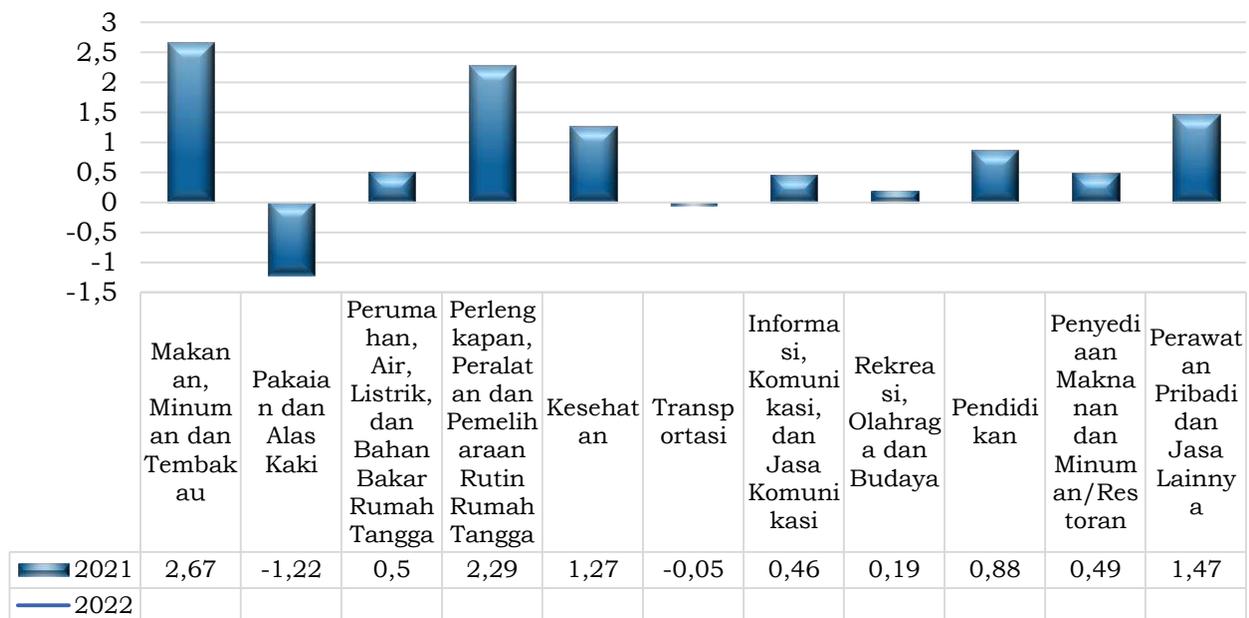


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Laju inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir diasumsikan sama dengan laju inflasi di Kota Balikpapan. Laju inflasi selama 5 tahun terakhir dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2022 hingga periode November, inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 5,18%. Jika dibandingkan dengan inflasi tahunan pada tahun 2021, maka kondisi inflasi pada tahun 2022 meningkat sangat signifikan. Inflasi pada tahun 2022 meningkat tinggi disebabkan oleh naiknya harga

kebutuhan akibat dari naiknya harga BBM. Antisipasi terhadap melonjaknya inflasi di daerah telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, melalui pengalokasian belanja – belanja Pemerintah Daerah yang dapat memberikan dampak langsung terhadap penurunan inflasi. Meskipun laju inflasi tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan, namun nilai inflasi tersebut tergolong dalam inflasi ringan karena masih di bawah 10%.

Gambar 2. 16 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 – 2022 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Laju inflasi menurut kelompok pengeluaran menampilkan laju inflasi untuk setiap komponen pengeluaran masyarakat. Melalui laju inflasi menurut kelompok pengeluaran akan diketahui inflasi dan deflasi dari jenis – jenis kelompok pengeluaran tersebut. Berdasarkan kelompok pengeluaran tersebut, pada tahun 2021 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah komponen makanan, minuman dan tembakau (kebutuhan pokok) sebesar 2,67%. Inflasi untuk komponen pengeluaran dibidang kesehatan juga mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,27%. Inflasi dibidang kesehatan tersebut juga dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya proses pemeriksaan kesehatan baik untuk perjalanan maupun pemeriksaan kesehatan umum.

E. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dan tidak terkecuali di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tantangan untuk terus menekan dan menurunkan angka kemiskinan di daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara regional Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Kemiskinan adalah suatu kondisi individu atau rumah tangga yang sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan tergolong dalam masalah sosial karena dapat menimbulkan banyak

permasalahan baru, seperti tindak kejahatan, penyimpangan sosial, dan ketimpangan di kalangan masyarakat.

Tabel 2. 16 Angka Kemiskinan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2018 – 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	448.000	11.760	7,40
2019	466.918	11.520	7,18
2020	447.539	11.930	7,36
2021	513.666	12.130	7,61
2022	538.022	11.590	7,25

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2020 – 2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat, dimana pada tahun 2020 meningkat sebesar 410 jiwa dan 2021 meningkat sebesar 200 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyerang perekonomian negara dan individu di setiap negara.

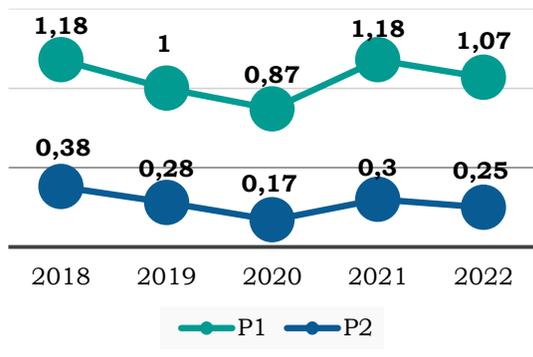
Jika dilihat berdasarkan jumlah peningkatannya, maka peningkatan kemiskinan tahun 2021 lebih kecil 50% dibandingkan peningkatan pada tahun 2020. Menurunnya jumlah peningkatan penduduk miskin tersebut mengisyaratkan bahwa mulai adanya perbaikan perekonomian masyarakat walaupun jumlah penduduk miskin tetap bertambah. Kondisi kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 turun 0,35% (130 jiwa) dibanding tahun 2021, dimana total penduduk miskin turun menjadi 12.000 jiwa. Penurunan ini semakin menegaskan bahwa sejak diberlakukannya pelonggaran kegiatan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 serta upaya – upaya lain yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Penurunan angka kemiskinan ini juga tidak terlepas dari adanya berbagai proyek – proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga merangsang geliat ekonomi masyarakat.

Angka kemiskinan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan garis kemiskinannya. Garis kemiskinan merupakan cerminan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama sebulan. Jika seseorang tidak mampu memenuhi garis kemiskinan, maka individu tersebut dikatakan penduduk miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 meningkat sekitar Rp25.000,- dibandingkan tahun 2021 menjadi Rp538.022,-. Garis kemiskinan yang meningkat ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara minimal harus mengeluarkan Rp538.022,- untuk memenuhi kebutuhan pokok termasuk kebutuhan pokok non makanan. Meningkatnya garis kemiskinan dan menurunnya angka kemiskinan menandakan bahwa adanya peningkatan kemampuan masyarakat yang tergolong masyarakat miskin pada tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan pokok pada tahun 2022, sehingga mampu memenuhi batas bawah garis kemiskinan.

Secara lebih spesifik, kondisi kemiskinan suatu daerah dapat dicermati dengan mengetahui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran masing – masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata – rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2. 17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Kondisi P1 Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 menurun menjadi 1,07. Penurunan kondisi P1 menandakan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin mengecil, artinya kemampuan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok semakin membaik walaupun belum mampu menyentuh batas garis kemiskinan.

Dengan demikian, penurunan P1 menandakan bahwa adanya kondisi yang kian membaik dalam hal perekonomian masyarakat. Program – program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk terus menekan kondisi P1 sehingga kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga dapat semakin menurun.

Penyerapan tenaga kerja lokal terhadap proyek – proyek pembangunan dan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan kondisi P1. Selain melalui penyerapan tenaga kerja lokal, konsumsi terhadap produk – produk UMKM, termasuk didalamnya stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar juga dapat memberikan dampak positif bagi kondisi kemiskinan khususnya dari segi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Selain melalui P1, kondisi kemiskinan suatu wilayah juga dapat ditinjau melalui kondisi P2. Kondisi P2 Kabupaten Penajam Paser Utara juga menurun seiring dengan menurunnya P1. Kondisi P2 Kabupaten Penajam Paser Utara menurun besar 0,05 dibandingkan tahun 2021 yaitu menjadi 0,25. Menurunnya P2 menandakan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga menurun, artinya pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2022 memiliki ketimpangan yang tidak begitu tinggi. Turunnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin ini disebabkan oleh adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk miskin walaupun masih belum dapat memenuhi batas bawah garis kemiskinan. Perbaikan kondisi P2 ini perlu terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar

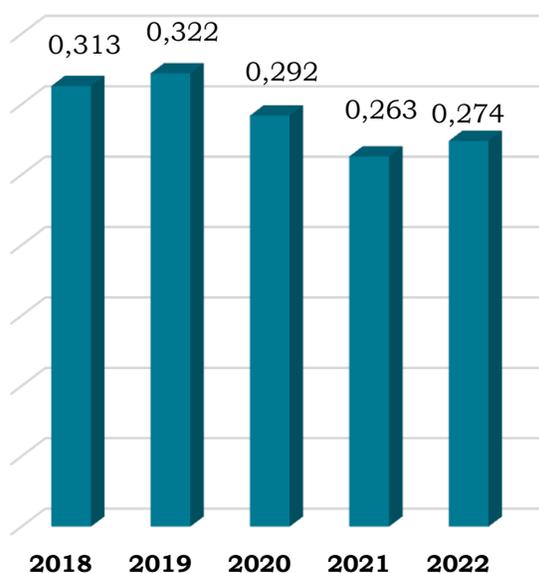
ketimpangan ini terus menurun, sehingga kondisi keparahan kemiskinan tidak kian meninggi setiap tahunnya.

Pemerintah Pusat menetapkan target terkait kemiskinan ekstrim di Indonesia sebesar 0% pada tahun 2024. Kemiskinan Ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dimana kebutuhan dasar yang dimaksud dalam kemiskinan ekstrim meliputi makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan namun juga akses pada layanan sosial.

F. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh dalam satu wilayah. Melalui Indeks Gini, akan diketahui pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam perhitungan Indeks Gini, akan didapatkan hasil kisaran antara 0 - 1. Nilai Indeks Gini 0 menggambarkan pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama dan kemampuan pengeluaran yang sama. Nilai Indeks Gini 1 menggambarkan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang dapat memiliki segalanya namun orang lainnya tidak memiliki apapun. Oleh karena itu, dalam hal pembangunan daerah bertujuan untuk mengecilkan nilai Indeks Gini atau mengecilkan ketimpangan kemampuan pengeluaran masyarakat sehingga ketimpangan sosial dapat lebih kecil dari tahun ke tahun.

Gambar 2. 18 Indeks Gini Tahun 2018 - 2022



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

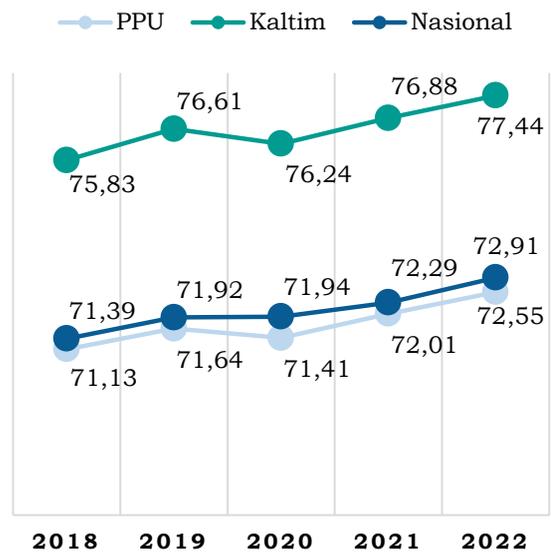
Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara terus menurun sejak tahun 2020 - 2022. Kondisi terakhir pada tahun 2022, Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,274. Penurunan Indeks Gini ini menggambarkan adanya keberhasilan dalam upaya penurunan ketimpangan, meskipun penurunan yang terjadi tidak begitu signifikan. Mulai tahun 2022, proyek - proyek strategis nasional terkait pembangunan infrastruktur guna mendukung pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilakukan.

Dengan adanya kegiatan - kegiatan persiapan pemindahan IKN tersebut, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga ketimpangan pendapatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menurun.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menjadi perhatian dalam menilai perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan utama dalam hal pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Perkembangan kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui kondisi pendidikan, kesehatan, perekonomian atau secara umum melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur peningkatan kualitas hidup manusia.

Gambar 2. 19 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS, 2023

IPM Kabupaten Penajam Paser Utara kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022. Peningkatan ini terus konsisten terjadi sejak tahun 2020 – 2022, dimana tahun 2022 IPM Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 72,55 atau meningkat 0,54 dibandingkan tahun 2021. Kondisi IPM Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi yang terendah ke-2 atau urutan ke-9 dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur, maka IPM Kabupaten Penajam Paser Utara berada jauh di bawahnya. Namun jika dibandingkan dengan IPM nasional, capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlalu jauh berbeda dimana IPM nasional sebesar 72,91. IPM Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mulai dari perbaikan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan perekonomian. Perhatian serius terhadap IPM Kabupaten Penajam Paser Utara ini sudah seharusnya dilakukan oleh setiap tingkatan Pemerintahan, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, sebab Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan sebagai lokasi IKN Nusantara perlu untuk mempersiapkan diri dari segi kapasitas SDM agar mampu bersaing dengan pendatang dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara dan luar Kalimantan Timur sehingga kesejahteraan sosial masyarakat dapat tumbuh pada tahun – tahun selanjutnya. Untuk melihat kondisi pertumbuhan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilihat untuk setiap komponen pembentuk IPM.

Tabel 2. 17 Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018- 2022

No	Indikator	Satuan	Jumlah				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55
2	Angka (AHH)	Tahun	71,05	71,3	71,68	71,68	71,74
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,54	12,56	12,57	12,57	12,7

No	Indikator	Satuan	Jumlah				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Rata-rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,03	8,28	8,36	8,36	8,51
5	Pengeluaran Per Kapita	Rp	11.492	11,231	11.651	11.651	11.890

Sumber: BPS Kaltim dan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam aspek pendidikan, angka Rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan, ini mengindikasikan terjadi peningkatan rata-rata waktu lama penduduk diatas usia 25 tahun dalam mengenyam pendidikan yaitu 8,51 tahun. Selain itu, harapan lamanya pendidikan yang dilihat dari Harapan Lama Sekolah juga meningkat, yang menandakan bahwa harapan lamanya tahun yang bisa dihabiskan penduduk dalam mengenyam pendidikan yaitu selama 12,7 tahun. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS yaitu dengan terus memperluas kesempatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperoleh akses mendapat pendidikan disekolah formal. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan layanan pendidikan termasuk sarana dan prasarana utama penunjangnya.

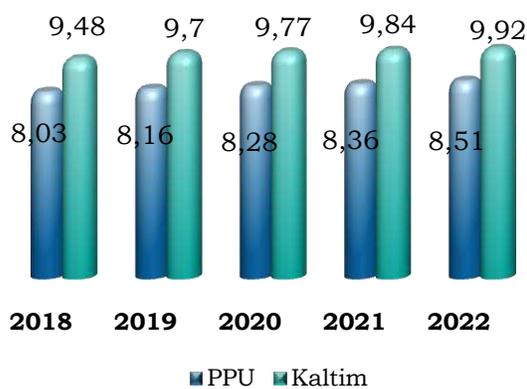
Untuk aspek kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Penajam Paser Utara juga meningkat dibanding tahun 2021. UHH pada tahun 2022 ini yaitu sebesar 71,71 tahun, artinya secara rata-rata harapan untuk hidup penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara selama sekitar 71,71 tahun. Angka ini, sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor kesehatan seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian penduduk akibat penyakit menular/tidak menular, serta penyebab masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan dalam arti luas kepada masyarakat, maka diharapkan jumlah kejadian kematian akibat hal-hal tersebut dapat ditekan sehingga meningkatkan Usia Harapan Hidup.

Dalam aspek kesejahteraan atau penghidupan yang layak, digunakan angka pengeluaran per kapita sebagai indikator pengukurannya. Angka pengeluaran per kapita ini berkaitan dengan aspek ekonomi, yaitu angka ini menunjukkan rata-rata rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memperoleh hidup layak. Pada tahun 2022 angka pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp11,89 juta per tahun. Angka ini meningkat dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp11,65 juta. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga masyarakat PPU selama setahun (2022) yaitu sebesar Rp11,89 juta. Untuk dapat meningkatkan nilai ini, upaya yang dilakukan yaitu dengan berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat contohnya lewat perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan produksi sektor usaha masyarakat, dan lainnya.

A. Pengetahuan

Mengutip laman Badan Pusat Statistik (BPS), dalam menghitung capaian IPM diperlukan komponen pengetahuan guna mengetahui kualitas pendidikan pada suatu wilayah. Pada awalnya BPS menggunakan indikator angka melek huruf untuk mengetahui kualitas pendidikan, namun indikator tersebut diganti karena dinilai sudah tidak relevan untuk mengukur kualitas pendidikan. Persentase melek huruf di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 98,9%, tahun 2021 sekitar 99,3%, serta 2020 sekitar 98,9%. Saat ini perhitungan IPM dari segi pengetahuan menggunakan indikator Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dinilai lebih relevan dalam mengukur kualitas pendidikan secara makro. RLS merupakan gambaran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal tanpa memperhitungkan individu tersebut pernah tinggal kelas atau tidak. Sedangkan HLS merupakan gambaran lamanya waktu sekolah yang diharapkan dirasakan oleh anak usia sekolah di masa yang akan datang.

Gambar 2. 20 Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2018 – 2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

RLS Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat 0,15 tahun pada

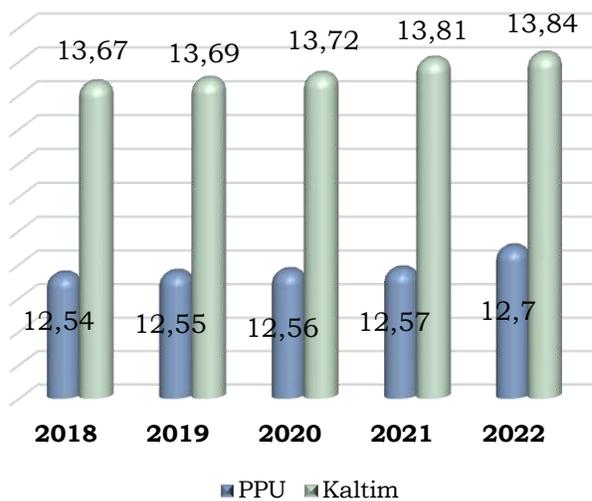
Jika dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Kalimantan Timur, terdapat selisih yang tidak terlalu jauh yaitu sekitar 1,41 tahun. Capaian RLS Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 9,92 tahun mengindikasikan bahwa rata – rata masyarakat Provinsi Kalimantan Timur hanya mengenyam pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas 3 SMP).

Melihat realisasi tersebut, maka rata – rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara masih tergolong rendah yaitu hanya sampai tingkat SMP kelas VIII (kelas 2 SMP). Realisasi RLS yang masih cenderung rendah ini pula yang menjadi salah satu faktor rendahnya realisasi IPM Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam perencanaan pembangunan ke depan, sisi realisasi lama pendidikan masyarakat perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga dengan harapan masyarakat dapat mengenyam pendidikan lebih

tahun 2022 atau menjadi 8,51 tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa rata – rata lama sekolah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara adalah selama 8,51 tahun atau setara dengan kelas VIII (kelas 2 SMP). Meskipun capaian RLS mengalami peningkatan, namun capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 15,07 tahun atau setara dengan Diploma III (D-III).

tinggi lagi yang akan berdampak pada kualitas SDM yang dapat dinilai salah satunya melalui capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun selanjutnya.

Gambar 2. 21 Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 – 2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Capain HLS Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 mengalami peningkatan layaknya RLS. Realisasi HLS tahun 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 12,70 tahun, dimana capaian ini meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun 2021. Capain HLS sebesar 12,70 tahun pada tahun 2022, mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki harapan untuk dapat bersekolah atau mengenyam pendidikan selama 12,70 tahun atau dapat mengenyam pendidikan hingga lulus jenjang SMA/SMK/Sederajat.

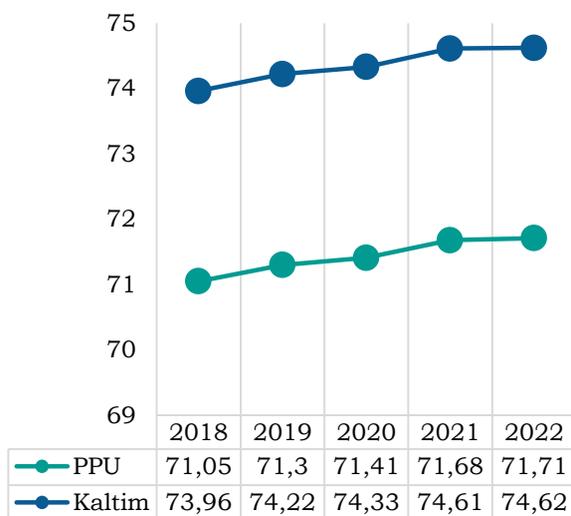
Peningkatan HLS ini tidak terlepas dari adanya program – program penunjang pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, seperti Program Beasiswa Seribu Sarjana, Reguler Berprestasi untuk pelajar dan mahasiswa, Tahfiz Qur’an dan lain sebagainya untuk di tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara. Tidak dapat dipungkiri, program – program beasiswa tersebut dapat menstimulasi harapan masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Peningkatan capaian HLS juga terjadi untuk Provinsi Kalimantan Timur. Capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 13,84 tahun atau setara dengan jenjang Diploma I (D-I). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Penajam Paser Utara. Meningkatnya capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur juga tidak lepas dari program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang dilaksanakan setiap tahun untuk pelajar jenjang SD – SMA dan mahasiswa. Peningkatan capaian pada komponen HLS juga menjadi stimulasi bagi peningkatan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara, namun perlu menjadi perhatian Pemerintah bahwa HLS sepatutnya juga dibarengi dengan capaian RLS minimal mendekati angka HLS atau melebihi target RLS yang telah ditetapkan agar kualitas SDM Kabupaten Penajam Paser Utara lebih baik lagi untuk menghadapi tantangan dan tuntutan lapangan kerja yang ada.

B. Kesehatan

Mengutip laman Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa salah satu komponen pembentuk IPM adalah sektor kesehatan dengan indikator yang diukur adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Dengan menggunakan indikator UHH maka dinilai cukup untuk menggambarkan secara makro kualitas pelayanan kesehatan pada suatu

wilayah, dengan asumsi semakin tinggi atau semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan suatu wilayah maka akan memberikan kesehatan yang semakin baik pula kepada masyarakat dengan harapan masyarakat memiliki usia yang lebih Panjang. Kesehatan menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan kualitas SDM dan peningkatan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang sehat akan memberikan pengaruh yang baik bagi peningkatan kualitas SDM dan perekonomian, begitu pula sebaliknya. Untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan masyarakat yang pintar dan masyarakat yang sehat.

Gambar 2. 22 Usia Harapan Hidup Tahun 2018 – 2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

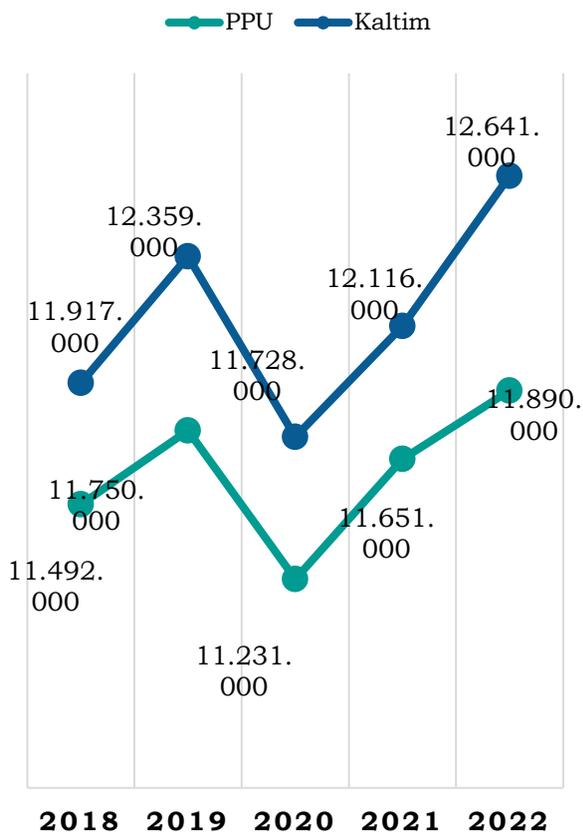
UHH Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sedikit meningkat sebesar 0,03 tahun. Rata - rata peningkatan UHH di Kabupaten Penajam Paser Utara berkisar antara 0,1 – 0,2 tahun setiap tahunnya. Tentu

peningkatan tersebut tidak begitu signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan UHH Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara. Peningkatan yang tidak begitu signifikan ini menandakan pula bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara kurang berkembang secara signifikan pula. Perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan secara komprehensif, mulai dari pelayanan administrasi hingga pelayanan penanganan penyakit untuk masyarakat sehingga harapan hidup dan kesehatan masyarakat dapat meningkat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak merupakan indikator yang digunakan untuk melihat secara makro kondisi perekonomian masyarakat. Dalam menghitung IPM, perlu diketahui pula kondisi makro perekonomian masyarakat pada suatu wilayah. Standar hidup layak dapat diketahui melalui pengeluaran per kapita dalam suatu wilayah. Mengutip laman resmi BPS, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota keluarga yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Indikator ini dapat dijadikan untuk mengasumsikan ukuran tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Gambar 2. 23 Pengeluaran Per Kapita
Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur,
2023

Pengeluaran per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 naik sebesar Rp239.000,- dibandingkan tahun 2021, dimana posisi tahun 2022 adalah sebesar Rp11.890.000,- per tahun. Jika berdasarkan grafik di atas,

pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat per tahun terus meningkat sejak tahun 2021. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita yang menggambarkan pendapatan rata-rata masyarakat Penajam Paser Utara selama setahun seperti yang tertera pada Gambar 2.22, maka peningkatan pengeluaran masyarakat diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Namun peningkatan pendapatan yang terjadi tidak sebanding kuantitasnya dengan peningkatan pengeluaran masyarakat. Hal serupa juga terjadi untuk skala yang lebih luas lagi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan pengeluaran per kapita ini tidak lepas dari adanya peningkatan harga-harga di pasaran khususnya harga kebutuhan pokok atau bahan-bahan makanan. Perlu adanya pemantauan dan pengendalian harga pasar untuk kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komoditi utama sektor pertanian seharusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya sehingga harga di pasaran dapat lebih stabil lagi.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga menjadi komponen yang dapat menjadi identitas suatu daerah. Seni dan kebudayaan dari suatu daerah bahkan jika dimanfaatkan atau dikelola dengan baik dapat menjadi *brand* bagi daerah. Demikian pula dengan bidang olahraga yang dapat menjadi media pengenalan daerah dilingkup regional maupun nasional. Bidang olahraga tidak jarang menjadi ajang untuk menaikkan reputasi daerah. Sehingga bidang seni budaya dan olahraga tidak kalah penting untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dikelola dengan baik agar kebudayaan daerah tidak luntur oleh waktu dan bakat-bakat olahragawan daerah dapat terus bermunculan dan mengharumkan nama daerah.

A. Bidang Seni dan Budaya

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki khasanah kesenian yang merupakan produk adat istiadat atau budaya yang didominasi berakar dari Suku Paser. Pemerintah Daerah terus berupaya untuk turut serta melestarikan warisan kebudayaan ini agar tetap menjadi penguat identitas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa hal yang dilakukan yaitu menyelenggarakan pagelaran atau festival seni dan budaya sebagai upaya pelestarian dan juga ajang promosi keunikan daerah, dimana salah satunya melalui *event* kebudayaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Berikut beberapa *event* kebudayaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2. 18 *Event* Kebudayaan di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Nama Event	Estimasi Pelaksanaan Tiap Tahun
1	Pesta Adat Nondoio	2
2	Festival Pesta Laut	1
3	Buen Festival	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Melalui *event* kebudayaan yang rutin dilaksanakan tersebut dapat menjadi peluang Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengenalkan budaya lokal yang dapat menjadi daya Tarik wisata, khususnya wisata budaya. Namun tentunya perlu didukung melalui promosi secara intens agar informasi pelaksanaan dapat tersebar luas. dengan penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai calon Ibu Kota Negara, maka pelestarian tradisi lokal selain sebagai penguat identitas juga menjadi atraksi daya tarik wisatawan yang diharapkan juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain seni yang terkait dengan budaya dan adat istiadat tradisional daerah, juga dilakukan pembinaan terhadap kegiatan kesenian yang lebih modern lainnya seperti puisi, olah vokal, drama, dan seni teater. Pembinaan ini dilakukan untuk siswa jenjang sekolah dasar dan menengah. Beberapa prestasi yang diraih yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Prestasi Kesenian dan Kebudayaan Jenjang Sekolah Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2022

NO	NAMA SEKOLAH/TIM	JENIS LOMBA TINGKAT PROVINSI	JUARA
Sekolah Dasar (SD)			
1	SDN 013 Penajam	Menyanyi (Tunggal)	2
2	SDN 023 Sepaku	Seni Tari	Harapan I
3	SDN 020 Sepaku	Pantomim	Harapan I
4	SD Muhammadiyah Penajam	Pantomim	Harapan II
Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
1	SMPN 6 PPU	Vokal Solo	2
2	SMPN 1 PPU	Vokal Solo	Harapan I
3	SMPN 10 PPU	Kreativitas Tari	Harapan I
NO	NAMA SEKOLAH/TIM	JENIS LOMBA TINGKAT NASIONAL	JUARA
Sekolah Dasar (SD)			
1	SDN 013 Penajam	Menyanyi (Tunggal)	2
Sekolah Menengah Pertama (SMP)			

Sumber: Disdikpora, 2023

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan perhatian terhadap pembinaan kreativitas siswa melalui pembinaan di sekolah. Perlombaan bidang kesenian juga rutin dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai ajang tolok ukur perkembangan pembinaan kreativitas siswa dibidang seni. Hasil dari pembinaan kreativitas siswa ini dibuktikan dengan raihan prestasi seni jenjang sekolah pada perlombaan tingkat Provinsi maupun Nasional. Pada tahun 2022 untuk perlombaan kesenian jenjang SD, Kabupaten Penajam Paser Utara mampu meraih 4 penghargaan yaitu bidang olah vocal (Juara 2), bidang tari (Juara Harapan I) dan bidang kesenian pantomime (Juara Harapan I dan Harapan II). Sementara untuk perlombaan seni jenjang SMP, Kabupaten Penajam Paser Utara mampu meraih 3 penghargaan yaitu vocal solo (Juara 2 dan Juara Harapan I) serta bidang tari (Juara Harapan I). Pada tahun 2022 juga terdapat sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara juga terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga Provinsi Kalimantan Timur. Untuk jenjang SD, yang terpilih menjadi perwakilan Kalimantan Timur adalah SDN 013 Penajam dalam lomba Menyanyi dan mampu meraih Juara 2 Tingkat Nasional. Sedangkan untuk jenjang SMP, yang menjadi perwakilan Kalimantan Timur adalah SMPN 6 PPU dalam lomba vocal solo dan mampu meraih Juara 2 Tingkat Nasional. Prestasi – prestasi yang diraih tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara karena mampu membawa nama baik daerah di kancah nasional dalam perlombaan bidang kesenian khususnya olah vokal.

B. Bidang Olahraga

Pembinaan olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara juga merupakan salah satu prioritas dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan dan karakter pembangunan manusia. Pembinaan olahraga diharapkan mampu melahirkan prestasi-prestasi yang membanggakan daerah, sehingga menjadi salah satu penguat identitas daerah skala regional maupun nasional. Pembinaan olahraga dilakukan sejak usia dini, terutama untuk jenis cabang olahraga potensial yang menjadi unggulan prestasi daerah. Pembinaan ini berhasil menorehkan beberapa prestasi seperti dicabang Sepak bola junior, Judo, Renang, Hoki, Binaraga, dan lainnya. Berikut prestasi dibidang olahraga untuk Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2. 20 Prestasi Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022

NO	NAMA SEKOLAH/TIM	JENIS PERTANDINGAN TINGKAT PROVINSI	JUARA
Sekolah Dasar (SD)			
1	SDN 026 Penajam	POPDA (CABOR TAEKWONDO)	3
Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
1	SMPN 21 PPU	POPDA (CABOR TINJU)	3
2	SMPN 21 PPU	POPDA (CABOR TINJU)	1



NO	NAMA SEKOLAH/TIM	JENIS PERTANDINGAN TINGKAT PROVINSI	JUARA
3	SMPN 21 PPU	POPDA (CABOR TINJU)	1
4	SMPN 21 PPU	POPDA (CABOR TAEKWONDO)	3
5	SMPN 1 PPU	POPDA (CABOR TAEKWONDO)	2
6	SMPN 21 PPU	POPDA (CABOR TAEKWONDO)	3
7	SMPN 5 PPU	POPDA (CABOR TAEKWONDO)	3
8	SMPIT Nurul Hikmah PPU	POPDA (CABOR PANAHAH)	3
9	SMPIT Nurul Hikmah PPU	POPDA (CABOR PANAHAH)	2
10	SMPIT Nurul Hikmah PPU	POPDA (CABOR PANAHAH)	2
11	SMPIT Nurul Hikmah PPU	POPDA (CABOR PANAHAH)	2
12	SMPIT Nurul Hikmah PPU	POPDA (CABOR PANAHAH)	2
13	SMPN 21 PPU	PIALA GUBERNUR KALTIM (CABOR TAEKWONDO)	2
14	SMPN 21 PPU	PIALA GUBERNUR KALTIM (CABOR TAEKWONDO)	1
15	SMPN 21 PPU	PIALA GUBERNUR KALTIM (CABOR TAEKWONDO)	3
16	SMPN 21 PPU	KEJURPROV (CABOR TINJU)	1
17	SMPN 21 PPU	KEJURPROV (CABOR TINJU)	1
18	SMPN 21 PPU	KEJURPROV (CABOR TINJU)	1
19	SMPN 21 PPU	KEJURPROV (CABOR TINJU)	1
20	SMPN 21 PPU	KEJURPROV (CABOR TINJU)	3
21	SMPN 21 PPU	Kejuaran tingkat pelajar FOPSSI Kaltim U 12 - U14 Sekaltim (SEPAKBOLA)	1
22	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	1
23	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	1
24	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	2
25	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	3
26	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	1
27	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	2
28	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	3
29	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	1
30	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	1
31	SMPN 21 PPU	Piala XPON 03 Kaltim (CABOR TAEKWONDO)	3
32	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAH)	3
33	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAH)	3
34	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAH)	3
35	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAH)	3
36	SMPN 21 PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAH)	1
37	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAH)	2

NO	NAMA SEKOLAH/TIM	JENIS PERTANDINGAN TINGKAT PROVINSI	JUARA
38	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAN)	1
39	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAN)	2
40	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAN)	1
41	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAN)	2
42	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAN)	1
43	SMPIT Nurul Hikmah PPU	PPU ARCHERY OPEN & KALTIM SERIES I (CABOR PANAHAN)	2

Sumber: Disdikpora, 2022

Presatasi keolahragaan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk jenjang sekolah sedikit berbeda dengan prestasi dibidang kesenian. Jika dibidang kesenian terlihat cukup seimbang antara prestasi jenjang SD dan SMP, pada prestasi bidang olahraga terlihat sangat menonjol prestasi yang ditunjukkan jenjang SMP. Meskipun dari SD dan SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara belum ada yang mewakili Provinsi Kalimantan Timur dalam ajang pertandingan olahraga ditingkat nasional, namun prestasi yang diraih pada tingkat Provinsi tidak kalah membanggakan. Prestasi jenjang SD untuk bidang olahraga di tingkat Provinsi adalah Juara 3 pertandingan POPDA Cabor Taekwondo yang diraih oleh SDN 026 Penajam. Sedangkan prestasi keolahragaan jenjang SMP untuk pertandingan olahraga tingkat Provinsi didominasi oleh prestasi cabor seni bela diri Taekwondo dan olahraga panahan. Selain itu terdapat pula prestasi cabor Sepak Bola dan Tinju namun tidak sebanyak prestasi cabor Taekwondo dan Panahan. Olahraga Taekwondo dan Panahan memang sedang menjadi cabang olahraga yang mulai banyak digemari oleh masyarakat khususnya anak – anak. Ada banyak club Taekwondo dan Panahan yang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun belum sebesar Sepak Bola, namun prestasi cabor Panahan dan Taekwondo terbukti mampu menyumbangkan medali lebih banyak untuk Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan jenis pelayanan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat. Pelayanan umum Pemerintah Daerah dibagi menjadi beberapa jenis pelayanan yaitu urusan pelayanan dasar, urusan non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pendukung pemerintahan. Penjabaran terkait pelayanan umum ini menjadi penting untuk mengetahui capaian dari kinerja pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

2.3.1. Urusan Pelayanan Dasar

Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk urusan pelayanan dasar umumnya dibagi menjadi beberapa bidang urusan, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman



dan ketertiban umum serta sosial. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melaksanakan urusan pelayanan tersebut dibagi menjadi beberapa Perangkat Daerah dengan harapan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan fokus.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan pelayanan utama dan sangat strategis yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat melalui pendidikan menjadi penting dan strategis dikarenakan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula. Akses masyarakat untuk mendapat pendidikan harus sama. Gambaran keterjangkauan akses masyarakat terhadap pendidikan dalam suatu daerah dapat dilihat berdasarkan beberapa kondisi, seperti persebaran sarana pendidikan, angka partisipasi anak usia sekolah, jumlah guru dan lain sebagainya.



Tabel 2. 21 Persebaran Sarana Pendidikan Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah	2018			2019			2020			2021			2022		
		SD (Unit)	SMP (Unit)	SMA/SMK (Unit)												
1	Penajam	43	17	5	43	17	8	43	17	8	43	17	10	45	22	12
2	Waru	11	3	2	11	3	2	11	3	2	11	3	2	11	4	2
3	Babulu	24	5	2	24	5	3	24	5	3	24	6	3	27	10	5
4	Sepaku	27	7	5	27	7	5	27	7	5	28	8	5	28	9	6
Total		105	32	14	105	32	18	105	32	18	106	34	20	111	45	25

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara , 2023

Berdasarkan data di atas, terlihat persebaran sarana pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai jenjang SD – SMA/SMK. Persebaran sarana pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah cukup merata di setiap kecamatan. Hingga tahun 2022, total sarana pendidikan jenjang SD berjumlah 111 unit, sarana pendidikan jenjang SMP berjumlah 45 unit dan sarana pendidikan jenjang SMA berjumlah 25 unit. Jika dilihat berdasarkan jumlah persebaran sarana pendidikan per kecamatan, sarana pendidikan terbanyak tersebar di Kecamatan Kecamatan dan kecamatan dengan persebaran sarana pendidikan paling sedikit ada pada Kecamatan Waru. Berdasarkan jumlah persebaran tersebut, dapat diindikasikan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian maka secara ketersediaan sarana pendidikan, maka masyarakat dapat mengakses pendidikan hingga jenjang SMA/SMK dengan mudah.

Tabel 2. 22 Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	96	19.166	1.119	17:1	200:1
Swasta	15	2.492	170	15:1	166:1
Total	111	21.658	1.289	17:1	195:1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	30	7.384	488	15:1	246:1
Swasta	15	2.245	164	14:1	150:1
Total	45	9.629	652	15:1	214:1

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Jumlah fasilitas gedung sekolah jenjang SD di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 adalah sebanyak 111 unit dengan total jumlah murid jenjang SD sebanyak 21.658 siswa dan total guru SD sebanyak 1.289 guru. Jumlah fasilitas dan murid serta guru tersebut termasuk di dalamnya untuk sekolah negeri dan swasta. Berdasarkan data di atas, Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh sekolah negeri untuk jenjang SD. Jika dirata – ratakan, rasio murid-guru jenjang SD di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 1:17 yang menandakan bahwa 1 guru mampu atau mengajar sebanyak 17 siswa. Sedangkan pada tahun 2021 dalam 1 unit sekolah jenjang SD baik swasta maupun negeri, rata – rata menampung 198 siswa. Jika merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, bahwa jumlah peserta didik dalam 1 kelas untuk jenjang SD adalah antara 20 – 28 siswa. Artinya, 1 orang guru secara ideal mengajar sebanyak 20 – 28 siswa per kelas. Dan dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tersebut juga mengatur secara ideal, bahwa 1 unit sekolah jenjang SD minimal terdiri dari 6 dan maksimal terdiri dari 24 ruang kelas (setiap tingkatan kelas terdiri dari maksimal 4 kelas). Sekolah dengan jenjang SD di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar terdiri dari 2 kelas dalam setiap tingkatan kelas atau setara dengan 12 kelas dalam 1 sekolah SD. Dengan demikian, maka jumlah

ketersediaan sekolah dan ruang kelas untuk jenjang SD di Kabupaten Penajam Paser Utara masih dalam kondisi ideal atau belum melampaui batas maksimal daya tampung.

Untuk jenjang SMP, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 34 unit sekolah jenjang SMP yang terdiri dari 27 unit sekolah berstatus negeri dan 7 unit sekolah berstatus swasta. Jumlah siswa jenjang SMP lebih sedikit dibanding siswa jenjang SD, dimana jumlah siswa SMP sebanyak 9.629 siswa yang terdiri dari 7.384 siswa SMP negeri dan 2.245 siswa SMP swasta. Jumlah guru SMP pada tahun 2022 sebanyak 652 guru yang terdiri dari 488 guru SMP negeri dan 164 guru SMP swasta. Secara keseluruhan, 1 guru SMP mengajar sebanyak 16 siswa dan 1 unit sekolah SMP menampung 226 siswa. Mengacu Permendikbud No. 17 Tahun 2017, secara ideal 1 ruang kelas jenjang SMP minimal menampung 20 siswa dan maksimal 32 siswa yang dapat diasumsikan 1 guru secara ideal mengajar antara 20 – 32 siswa. Dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tersebut juga mengatur jumlah ideal ruang kelas jenjang SMP, dimana minimal 3 unit kelas dan maksimal 33 unit kelas. Sebagian besar sekolah jenjang SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 – 5 unit kelas untuk setiap tingkatan kelas. Sehingga jika dirata – ratakan, maka daya tampung ruang kelas dan guru jenjang SMP masih berada dalam batas ideal.

Parameter lain untuk mengetahui kondisi partisipasi sekolah masyarakat di suatu wilayah dapat ditinjau melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Dengan mengetahui APS maka akan memberikan gambaran proporsi penduduk kelompok usia sekolah yang sedang bersekolah tanpa memandang jenjang pendidikan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai APS maka menandakan semakin banyak pula penduduk usia sekolah pada kelompok usia tersebut yang sedang bersekolah. Secara lebih rinci, dengan mengetahui APK maka akan didapatkan informasi terkait proporsi jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia penduduk tersebut. Artinya APK akan memberikan informasi partisipasi sekolah masyarakat untuk setiap jenjang pendidikan tanpa memperhatikan batasan usia seharusnya pada jenjang pendidikan tersebut. Lebih rinci lagi, kondisi partisipasi sekolah masyarakat dapat ditinjau melalui APM yang memberikan gambaran proporsi penduduk kelompok usia sekolah yang sedang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan yang seharusnya.

Tabel 2. 23 Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2018 – 2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
Usia Sekolah (Tahun)	2018	2019	2020	2021	2022
7 – 12	100	99,80	99,59	99,16	99,91
13 – 15	97,28	97,40	96,85	96,46	97,91
16 – 18	85,72	84,73	85,74	86,19	86,08
Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)					
Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD	112,12	106,84	106,83	106,07	106,15
SMP	95,51	91,03	97,46	99,33	93,69
SMA	86,52	94,96	88,76	86,04	85,73

Angka Partisipasi Murni (APM) (%)

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD	100	99,46	99,26	98,88	99,91
SMP	80,10	82,73	82,43	82,74	83,07
SMA	69,17	69,82	70,03	70,14	70,11

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

APS umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok usia sekolah, yaitu kelompok usia 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun. Dengan mengetahui APS hanya akan memberikan gambaran proporsi kelompok usia sekolah tersebut yang masih bersekolah tanpa mengetahui jenjang pendidikan yang saat ini ditempuh. APS usia 7 – 12 tahun pada tahun 2018 terdata 100% yang menandakan bahwa anak usia 7 -12 di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 semua sedang aktif bersekolah. Namun APS ini terus menurun sejak tahun 2019 – 2021. Meskipun masih tergolong tinggi, yaitu berada pada kisaran 99% namun hal ini menandakan bahwa masih ada anak usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum atau tidak bersekolah. Pada tahun 2022 ini, partisipasi sekolah anak usia 7 – 12 tahun kembali meningkat 99,91%. Walaupun masih menandakan bahwa masih ada anak usia 7 – 12 tahun yang belum bersekolah, namun peningkatan APS ini perlu di apresiasi yang menandakan bahwa terjadi peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia 7 – 12 tahun. APS untuk anak usia 13 – 15 tahun pada tahun 2022 mencapai pada partisipasi tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 97,91%. Meskipun berada pada capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir, namun hal ini masih sangat perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena masih ada sekitar 3% anak usia 13 – 15 tahun yang belum atau tidak sekolah. Berbeda dengan APS kelompok usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun, APS kelompok usia 16 – 18 tahun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 86,08%. APS kelompok usia 16 – 18 tahun ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, selain masih ada sekitar 14% anak usia 16 – 18 tahun yang tidak bersekolah juga terjadi penurunan capaian APS yang menandakan ada anak pada kelompok usia ini yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pekerjaan yang berat dibidang pendidikan ditanggung Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk terus menjalankan program – program beasiswa dan bantuan lainnya dibidang pendidikan agar merangsang partisipasi sekolah anak pada setiap kelompok usia agar mencapai 100%. APS yang tinggi akan berdampak pada kualitas dan daya saing SDM Kabupaten Penajam Paser Utara.

APK jenjang SD Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 sebesar 112,12% yang menandakan bahwa terdapat 112,12% anak usia sekolah yang masih menempuh pendidikan jenjang SD. Dari data tersebut diketahui terdapat 12,12% anak usia sekolah yang seharusnya telah menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi namun pada kenyataannya masih menempuh jenjang pendidikan SD. Namun APK jenjang SD semakin tahun semakin membaik dibanding tahun 2018, dimana pada tahun 2022 ini APK jenjang SD sebesar 106,15% atau naik 0,07%

dibanding tahun 2021. Kondisi ini menandakan bahwa hingga tahun 2022 ini masih ada 6,15% anak usia sekolah yang seharusnya telah menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi namun saat ini masih menempuh pendidikan jenjang SD. Berbeda dengan APK jenjang SD yang mencapai lebih dari 100%, pada APK jenjang SMP tahun 2022 sebesar 93,69% yang menandakan ada 93,69% anak usia sekolah menempuh pendidikan pada jenjang SMP. Jika dikorelasikan dengan APK jenjang SD, maka dapat diasumsikan bahwa 6,15% anak usia sekolah yang masih menempuh pendidikan jenjang SD tersebut adalah anak usia sekolah yang seharusnya saat ini telah menempuh pendidikan di jenjang SMP. APK jenjang SMA di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 85,73%. APK jenjang SMA tahun 2022 ini menurun dibandingkan tahun 2021. Capaian APK jenjang SMA ini terus menurun sejak tahun 2019 – 2022. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi capaian APK, dimana jika APK pada jenjang tertentu melebihi 100% seperti capaian APK jenjang SD Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 106,15% dapat diasumsikan bahwa masih ada anak usia sekolah yang tinggal kelas atau mengalami keterlambatan untuk masuk jenjang SD. Sedangkan jika APK pada jenjang tertentu kurang dari 100%, maka dapat diasumsikan bahwa masih terdapat siswa yang tinggal kelas pada jenjang sebelumnya atau dapat disebabkan juga oleh adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya atau siswa putus sekolah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar proporsi APK di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ideal, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik agar kasus anak tinggal kelas dapat berkurang serta dorongan Pemerintah Daerah agar anak usia sekolah tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

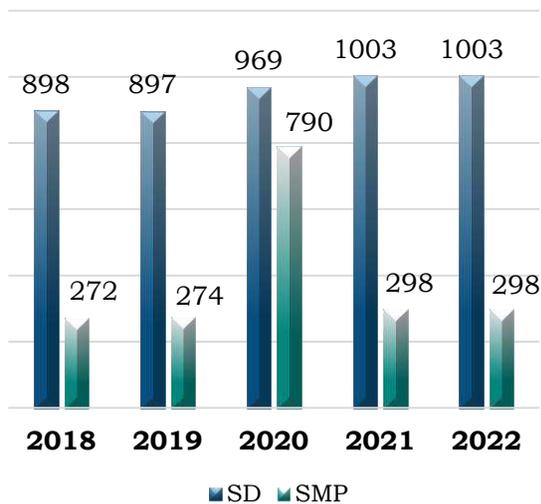
APM jenjang SD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 meningkat 1,03% dibanding tahun 2021 menjadi 99,91%. APM ini menandakan bahwa ada 99,91% anak usia sekolah SD yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, artinya secara usia memang siswa tersebut seharusnya masih menempuh pendidikan SD. APM jenjang SMP juga mengalami peningkatan pada tahun 2022, dimana capaian APM jenjang SMP Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 83,07%. Capaian tersebut menandakan bahwa ada 83,07% anak usia sekolah jenjang SMP yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMP. APM jenjang SMA Kabupaten Penajam Paser Utara jauh lebih kecil dibanding APM jenjang SD dan SMP, dimana APM jenjang SMA Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 hanya sebesar 70,11%. APM dihitung berdasarkan banyaknya anak usia sekolah yang sedang menempuh pendidikan sesuai dengan usianya, sehingga dengan mengetahui nilai APM maka Pemerintah dapat mengetahui jumlah anak usia sekolah yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu sesuai dengan usianya. Melihat capaian APM Kabupaten Penajam Paser Utara mulai jenjang SD – SMA tahun 2022, maka tidak ada yang mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa masih ada anak usia sekolah yang tidak atau belum sekolah dan ada anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah pada jenjang tertentu sehingga tidak melanjutkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang SMP dan terlebih jenjang SMA perlu mendapat perhatian khusus

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan APM jenjang SMP dan SMA yang masih belum mencapai 90% yang menandakan masih banyak anak dengan usia seharusnya jenjang SMP dan SMA yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Angka Partisipasi ini, baik APK maupun APM adalah indikator yang menunjukkan kepedulian penduduk terhadap pentingnya mengikuti pendidikan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidupnya. Partisipasi bersekolah anak merupakan tanggung jawab banyak pihak terutama orang tua dan lingkungan serta pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan.

Pencapaian nilai pada beberapa indikator diatas sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan akses pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memajukan bidang pendidikan dengan cara peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pengajar dan murid. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari grafik berikut:

Tabel 2. 24 Jumlah Ruang Kelas Belajar (RKB) Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara



2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menetapkan bidang pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut, kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pelayanan minimal bidang pendidikan terdiri dari pelayanan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

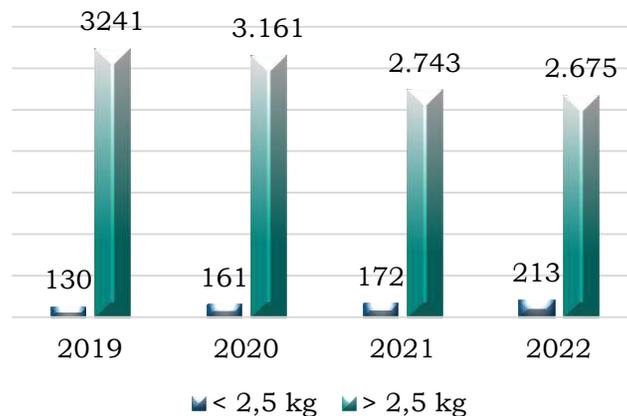
B. Kesehatan

Usia Harapan Hidup yang menjadi faktor pembentuk IPM dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kondisi lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi, dan faktor bidang kesehatan lainnya. Usia Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 yaitu 71,71 Tahun mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yaitu 71,68 tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara yang terus meningkat tiap tahunnya menunjukkan bahwa ada peningkatan derajat hidup sehat masyarakat serta upaya pemerintah dalam bidang kesehatan berdampak positif bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas maupun jumlah fasilitas

dan tenaga kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, jaminan kesehatan bagi masyarakat, dan usaha preventif lainnya.

Angka penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir menurut berat badan bayi dipengaruhi asupan ibu hamil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menunjukkan sebagian besar bayi dilahirkan dengan berat diatas 2,5 kg.

Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara yang Pernah Melahirkan 4 Tahun Terakhir



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Kesehatan menjadi modal penting bagi pembangunan daerah. Kesehatan juga menjadi salah satu parameter keberhasilan dalam kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia. Perkembangan pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai hal dibidang kesehatan, seperti persebaran fasilitas dan tenaga kesehatan, capaian penurunan penyakit menular dan lain sebagainya. Berikut merupakan persebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2. 26 Persebaran Fasilitas Kesehatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes	Posyandu
1	BABULU	Babulu Laut	0	1	1	5
		Babulu Darat	1	0	1	11
		Labangka	0	1	1	5
		Rintik	0	1	0	3
		Labangka Barat	0	1	0	3
		Gunung Makmur	0	1	1	4
		Gunung Intan	1	0	0	4
		Sumber Sari	0	1	1	4
		Gunung Mulia	0	0	1	3
		Sri Raharja	1	1	1	4
		Rawa Mulia	0	1	1	3
		Sebakung Jaya	1	0	0	4
Jumlah Kec. Babulu			4	8	8	53
2	WARU	Api - Api	0	1	0	3
		Sesulu	0	1	0	4



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes	Posyandu
		Waru	1	2	0	10
		Bangun Mulya	0	1	0	7
		Jumlah Kec. Waru	1	5	0	24
		Sesumpu	0	1	0	2
		Sungai Parit	0	1	1	4
		Nipah-Nipah	0	1	1	3
		Nenang	0	1	0	5
		Gunung Seteleng	0	1	1	12
		Penajam	1	0	0	29
		Pantai Lango	0	0	1	3
		Gersik	0	1	1	5
		Jenebora	0	1	1	5
		Tanjung Tengah	0	1	0	6
		Saloloang	0	1	0	4
3	PENAJAM	Petung	1	0	0	8
		Giri Mukti	0	2	0	6
		Lawe-Lawe	0	1	0	4
		Pejala	0	1	0	3
		Kampung Baru	0	1	0	2
		Sidorejo	0	1	0	2
		Giri Purwa	0	1	0	5
		Buluminung	0	1	2	5
		Sotek	1	0	0	6
		Sepan	0	1	1	3
		Riko	0	1	1	2
		Bukit Subur	0	1	1	2
		Jumlah Kec. Penajam	3	20	11	126
		Bumi Harapan	0	1	0	2
		Sukaraja	0	1	1	8
		Bukit Raya	0	0	0	6
		Sepaku	1	0	0	3
		Karang Jinawi	0	1	1	4
		Argo Mulyo	0	1	1	7
		Suko Mulyo	0	1	1	4
4	SEPAKU	Tengin baru	1	0	0	8
		Maridan	1	1	0	8
		Pemaluan	0	2	0	2
		Telemow	0	0	0	3
		Binuang	0	0	1	4
		Mentawir	0	1	1	2
		Wonosari	0	1	1	4
		Semoi Dua	1	0	0	7
		Jumlah Kec. Sepaku	4	10	7	72

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan tersebar cukup merata. Persebaran puskesmas disetiap kecamatan tidak hanya terpusat pada satu titik, melainkan tersebar di beberapa desa/kelurahan. Persebaran puskesmas ini disesuaikan dengan luas wilayah kecamatan sehingga memudahkan

masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan tingkat pertama. Total terdapat 12 unit puskesmas di Kabupaten Penajam Paser Utara yang disediakan untuk melayani 4 kecamatan. Pada Kecamatan Penajam terdapat 3 unit puskesmas yang terletak di Kelurahan Penajam, Petung dan Sotek. Kecamatan Waru tersedia 1 unit puskesmas yang terletak di Kelurahan Waru. Kecamatan Sepaku dan Babulu masing – masing memiliki 4 unit yang terletak di Kelurahan Sepaku, Maridan, Desa Tengin Baru dan Desa Semoi II untuk Kecamatan Sepaku sedangkan di Kecamatan Babulu terletak di Desa Babulu Darat, Desa Sebakung Jaya, Desa Gunung Intan dan Desa Sri Raharja. Untuk fasilitas puskesmas pembantu berjumlah 43 unit di Kabupaten Penajam, dimana untuk Kecamatan Penajam berjumlah 20 unit, Kecamatan Waru 5 unit, Kecamatan Babulu 8 unit dan Kecamatan Sepaku 10 unit. Polindes dan posyandu juga menyebar hampir di setiap desa/kelurahan. Berdasarkan persebaran fasilitas kesehatan tersebut, menandakan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlalu terganggu.

Dalam hal ketersediaan fasilitas kesehatan, Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pemerintah berjumlah 1 unit, Rumah Sakit Umum Tipe D Sepaku 1 unit, puskesmas sejumlah 65 unit yang terdiri dari 9 puskesmas rawat inap dan 2 puskesmas biasa, serta puskesmas pembantu 43 unit, puskesmas keliling 11 unit, 150 posyandu aktif, dan 19 polindes. Selain rumah sakit pemerintah juga terdapat klinik yang dikelola oleh Swasta sebanyak 15 unit dan 7 praktek dokter gigi mandiri dan 10 praktek dokter umum mandiri.

Tabel 2. 27 Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Tahun 2018 – 2022

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C	1
2	Rumah Sakit Umum Tipe D Sepaku	1
3	Puskesmas Rawat Inap	9
4	Puskesmas Biasa	2
5	Puskesmas Pembantu	43
6	Puskesmas Keliling	11
7	Posyandu Aktif	250
8	Polindes	19
9	Klinik Swasta	15
10	Praktek Dokter Umum Mandiri	10
11	Praktek Dokter Gigi Mandiri	7
12	Praktek Dokter Hewan Mandiri	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Dengan kondisi geografis wilayah yang relatif luas, topografi yang beragam, hingga pemukiman yang tersebar hingga ke pelosok wilayah, maka hal ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam usaha penyediaan akses kesehatan bagi warganya. Selain pemenuhan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga kesehatan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat perkembangan dan dinamika penduduk yang menuntut adanya peningkatan layanan bidang kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 28 Jumlah Dokter, Tenaga Paramedis dan Sarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022

Jenis Pekerjaan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter/Medis(Orang)	66	59	40	39	49
Tenaga Paramedis (Orang)	372	422	535	494	657
Rumah Sakit Umum Daerah (Unit)	1	1	1	2	2
Puskesmas, Pusban dan Puskesmas Keliling (Unit)	391	348	65	65	65
Rasio Dokter Per Puskesmas	3	25	25	15	49
Rasio Dokter Umum Per 10000 Penduduk	4	4	3	2	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah yang salah satunya ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran untuk penanganan biaya rujuk masyarakat kurang mampu yang diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.

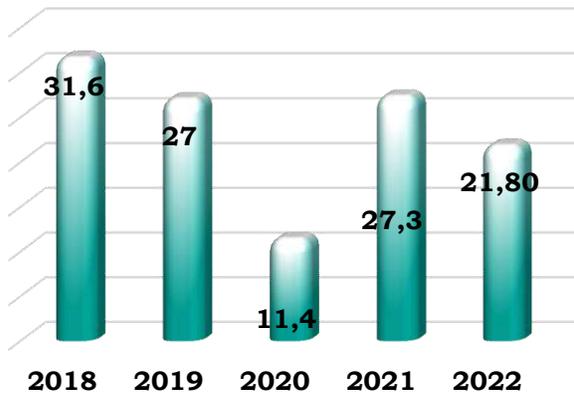
Tabel 2. 29 Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jenis Imunisasi					Jumlah
	BCG	DPT	Polio 3	Campak	Hepatitis B	
2018	3.039	3.016	3.066	1.694	3.227	14.042
2019	3,123	3,216	3,226	3,071	-	12,636
2020	3,029	2,795	2,864	-	62	8,750
2021	2.917	2.586	2.548	2.526	2.848	13.425
2022	112,78	109,71	110,86	106,07	109,10	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Imunisasi pada bayi dilakukan guna memberikan kekebalan tubuh terhadap infeksi virus sejak dini agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Umumnya terdapat 5 jenis imunisasi yang diberikan kepada bayi dengan kegunaan berbeda, seperti imunisasi BCG (mencegah tuberculosis), imunisasi DPT (mencegah difteri, pertussis dan tetanus), imunisasi Polio 3 (mencegah virus Polio), imunisasi Campak (mencegah virus Campak dan Rubella) dan imunisasi Hepatitis B (mencegah virus Hepatitis B pada liver). Total bayi yang diimunisasi setiap tahunnya tidak selalu meningkat dan tidak selalu menurun atau berfluktuasi. Selama tahun 2022 terdapat 13.425 bayi yang mendapat imunisasi. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mengimunisasi 8.750 bayi. Dari total bayi yang diimunisasi pada tahun 2021, imunisasi BCG diberikan lebih banyak dibandingkan imunisasi lainnya yaitu sebanyak 2.917 bayi. Diharapkan pada tahun – tahun selanjutnya imunisasi pada bayi dapat diberikan kepada seluruh bayi yang ada, sehingga penyakit berbahaya yang rawan menyerang bayi dapat dihindari dan bayi dapat tumbuh dengan baik.

Gambar 2. 24 Prevalensi Stunting Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, 2022

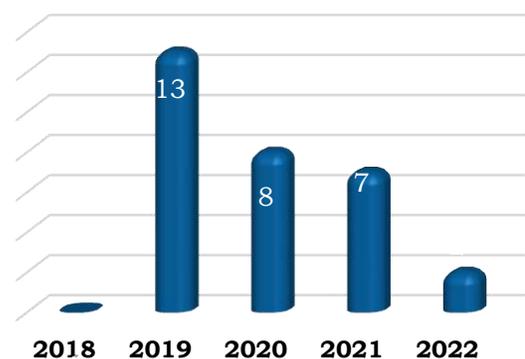
Prevalensi stunting Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 menjadi persentase prevalensi tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 27,3%. Namun pada tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 21,8%. Peningkatan kasus stunting yang terjadi selama kurun waktu 2018 – 2021 tidak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu untuk pemeriksaan dan pemberian imunisasi kepada bayi dan balita.

Ketika kesadaran masyarakat untuk membawa bayi dan balita ke posyandu rendah, maka *tracing* terhadap kesehatan bayi dan balita termasuk observasi terhadap kemungkinan stunting pada balita menjadi rendah pula. Kesadaran masyarakat untuk membawa bayi atau balita ke posyandu semakin membaik di tahun 2022 sehingga penanganan prevalensi stunting dapat dilakukan sejak dini.

Angka kematian bayi neonatal adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun berkenaan dan meninggal pada periode 28 hari pertama kelahiran. Angka kematian bayi neonatal Kabupaten Penajam Paser Utara terus membaik selama kurun waktu tahun 2018 – 2022. Pada tahun 2019, angka kematian bayi neonatal sebanyak 13 kasus kematian dan terus menurun tiap tahun hingga pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus kematian. Pada tahun 2022 di targetkan maksimal 12 kasus kematian bayi neonatal, namun ternyata mampu melampaui target yang ditentukan. Capaian ini menandakan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Pelayanan prima dibidang kesehatan ini, khususnya kepada ibu melahirkan dan bayi baru lahir wajib dipertahankan sehingga angka kematian bayi neonatal dapat terus ditekan jumlah kasusnya.

Prevalensi stunting menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan kesehatan di daerah. Prevalensi stunting ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Pusat untuk mengurangi angka stunting di daerah. Jika berdasarkan tren prevalensi stunting maka kasus stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung fluktuatif sejak tahun 2018 – 2022.

Gambar 2. 25 Angka Kematian Bayi Neonatal Tahun 2018 – 2022 (Kasus)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bidang kesehatan juga tergolong dalam urusan pemerintah wajib yang tergolong dalam pelayanan dasar. Dalam peraturan tersebut, pelayanan yang tergolong dalam pelayanan dasar bidang kesehatan kewenangan Pemerintah Kabupaten 12 jenis pelayanan dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 30 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Layanan	Target Penerima layanan (Orang)	Realisasi penerima layanan (Orang)	Persentase (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	2841	2312	81,38%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2712	2585	95,32%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	2583	2604	100,81%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	12774	8754	68,53%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30671	29469	96,08%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	102638	28219	27,49%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	18090	13778	76,16%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	10250	7334	71,55%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	2825	2153	76,21%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	175	171	97,71%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	3022	2102	69,56%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV(Human immunodeficiency Virus)	3784	4500	118,92%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Pelayanan dasar dibidang kesehatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat seperti yang tercantum dalam tabel di atas. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 realisasi pelayanan Kesehatan yang mencapai target adalah Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (*Human immunodeficiency Virus*), Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yaitu sebesar 100,81%, 118,92%, 97,71%.

C. Pekerjaan Umum

Pelayanan dasar pemerintah dibidang Pekerjaan Umum adalah pelayanan yang berbentuk fisik berupa penyediaan infrastruktur, sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Beberapa pelayanan bidang Pekerjaan Umum meliputi pelayanan infrastruktur sektor penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyelenggaraan sumber daya air (irigasi dan drainase), penyelenggaraan air minum dan air limbah dan lain – lain. Beberapa pelayanan infrastruktur di kewilayahan dapat dikerjakan melalui UPT. PU yang terletak dimasing – masing kecamatan. Berikut beberapa pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan oleh UPT. PU selama tahun 2021.



Tabel 2. 31 Realisasi Pekerjaan UPT. PU Kecamatan yang Terintegrasi Dengan ADD Tahun 2022

No	ITEM PEKERJAAN	UPT-PU KEC. PENAJAM		UPT-PU KEC. WARU		UPT-PU KEC. SEPAKU		UPT-PU KEC. BABULU		TOTAL
		DPA UPT	ADD	DPA UPT	ADD	DPA UPT	ADD	DPA UPT	ADD	
1	Pembangunan jalan (m1)	16.931	1.940	860	0	0	1900	50	0	21.681
2	Pemeliharaan badan jalan (m1)	0	0	6.690	0	0	0	500	0	7.190
3	Perbaikan/Penanganan jalan (m1)	74.113	0	0	500	24.650	17955	34.350	2335	153.903
4	Peningkatan jalan (m1)	0	0	3721	1000	0	0	1450	1150	7.321
5	Normalisasi pemeliharaan parit/Drainase/saluran (m1)	795	1.205	300	1050	680	500	-	1036	5.566
6	Pembuatan parit/drainase saluran(m1)	675	0	0	0	0	0	2.152	0	2.827
7	Landclearing(m2)	185.552	4.55	23.073	0	13850	21444	18.875	0	267.348
8	Cut and Fit/Pematangan lahan (m2)	16.532	0	0	0	0	0	0	0	16.532
9	Pembuatan embung/kolam (m2)	1.551	0	4932	0	0	0	1640	160	8.283
10	Pembuatan tanggul (m1)	0	0	850	900	0	0	0	0	1750
11	Pebongkaran Jembatan	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Pemeliharaan jembatan (unit)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13	Pembuatan jembatan (Unit)	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	Galian (m3)	2.383	1460	0	0	22388	0	0	0	3.843
15	Hampan Tanah/ agregat(M3)	83.015	0	2374,2	0	9,450	0	0	0	85.389
16	Urugaan (m3)	18	0	120	0	10440	0	0	0	138

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

UPT-PU yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disetiap kecamatan bertujuan untuk memudahkan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait infrastruktur di setiap kecamatan. Dalam mengerjakan kewenangannya, UPT-PU dapat didukung oleh berbagai jenis sumber pendanaan salah satunya adalah melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Sepanjang tahun 2022, UPT-PU yang ada disetiap kecamatan paling banyak mengerjakan pekerjaan *landclearing* atau pembukaan lahan yaitu seluas 267.348 m² dengan rincian UPT-PU Kecamatan Penajam melaksanakan *landclearing* seluas 185.552m², UPT-PU Kecamatan Waru seluas 23.073m² dan UPT-PU Kecamatan Babulu seluas 13850 m². Selain pembukaan lahan, UPT-PU juga mengerjakan pematangan lahan seluas 16.532 m² yang dilakukan oleh UPT-PU Kecamatan Penajam.

Tabel 2. 32 Jumlah Sambungan Rumah dan Cakupan Pelayanan Air Minum Perpipaan Tahun 2018 – 2022

Jumlah Sambungan Rumah (SR)		Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan (%)	
2018	5.470	2018	15,87
2019	7.845	2019	34,79
2020	10.399	2020	30,13
2021	10.813	2021	25,67
2022	12.829	2022	30.13%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya memperluas jangkauan sambungan air minum perpipaan. Terlihat pada tabel di atas bahwa jumlah sambungan rumah jaringan air minum perpipaan terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2018 jumlah sambungan air minum perpipaan hanya sebanyak 5.470 SR, namun dalam kurun waktu 3 tahun atau pada tahun 2022 jumlah sambungan bertambah 2 kali lipat menjadi 12.829 SR. Sedangkan pelayanan air minum perpipaan fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 cakupan layanan hanya sebesar 30,13%. Cakupan tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2021, dimana hanya mencapai angka 25,67%. Peningkatan cakupan layanan air minum menandakan bahwa pelayanan kepada masyarakat terkait jaringan air minum perpipaan menjadi lebih maksimal. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui dinas teknis terkait terus memaksimalkan dan mencari solusi terbaik guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sehingga cakupan pelayanan air minum perpipaan dapat meningkat pada tahun – tahun berikutnya.

Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 adalah sebanyak 110 sambungan. Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat pada tahun 2020 sebanyak 10.588 sambungan. Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat pada tahun 2021 sebanyak 557 sambungan. Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 36 sambungan. Jumlah SPAM pada tahun 2022 yang dikelola

masyarakat melampaui target yang diproyeksikan hanya sebanyak 2 sambungan atau jumlah SPAM tahun 2022 tercapai. Dengan ketersediaan SPAM tersebut mengartikan bahwa penyediaan air bersih kepada masyarakat atau konsumen dalam jumlah yang cukup sebagai sumber air baku berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan domestik masyarakat. Selain upaya pencapaian target SPM, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak. Akses air minum layak merupakan kemudahan/kemampuan penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah penduduk. Kabupaten Penajam Paser Utara aksesnya baru mencapai 30.08%.

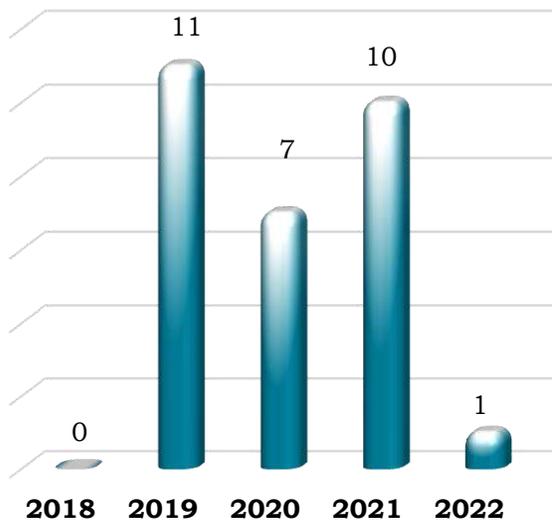
Tabel 2. 33 Panjang Saluran Irigasi Tahun 2022

No	Wilayah	Panjang saluran pembawa (m)			
		Saluran Utama	Primer	Sekunder	Tersier
1	Babulu	-	2.900	45.743	46.122,0
2	Waru	-	10.000	30.326	13.562,5
3	Penajam	-	-	-	-
4	Sepaku	-	1.000	4.750	1050,0
TOTAL		-	13.900	80.819	60.734,5

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Irigasi di Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bagi para pelaku pertanian. Total panjang saluran irigasi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 155.453,5 meter dengan panjang irigasi dominan terdapat pada Kecamatan Waru sepanjang 53.888,5 meter disusul dengan daerah irigasi Kecamatan Babulu dan Sepaku. Sebagian besar jaringan irigasi tersebut dalam kondisi baik hingga rusak sedang. Jaringan irigasi didominasi oleh jaringan tersier dengan panjang 60.734,5 meter, kemudian jaringan irigasi sekunder sepanjang 80.819 meter, dan paling kecil adalah saluran primer sepanjang 13.900 meter. Perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan terbaik dibidang pengairan salah satunya melalui jaringan irigasi yang baik dan mantap.

Gambar 2. 26 Jumlah Bangunan Gedung Terbangun Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Pembangunan bangunan gedung khususnya bangunan gedung pemerintahan terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser

Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mampu menyelesaikan pembangunan gedung sebanyak 11 unit gedung. Tahun 2020 7 unit bangunan gedung mampu diselesaikan dan pada tahun 2021 sebanyak 10 unit gedung. Jumlah bangunan/Gedung yang terbangun pada Tahun 2022, target 3 dan terealisasi 1, yaitu Kegiatan di Dinas Pembedayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu pembangunan 1 unit Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Waru.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa bidang Pekerjaan Umum wajib memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat dalam bentuk pemenuhan air minum sehari – hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat baik dalam berupa penyediaan tempat tinggal, pelayanan sanitasi, dan lain – lain. Dalam hal pemenuhan tempat tinggal khususnya pada masyarakat berpenghasilan rendah, masih menjadi salah satu permasalahan umum bagi Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 34 Jumlah *Backlog* Perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Masalah Perumahan	Jumlah Unit				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	<i>Backlog</i> Perumahan	8570	8.912	10.290	14.198	21.960

2	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2579	2.579	2.091	2.556	2.616
---	-------------------------------	------	-------	-------	-------	-------

Sumber: DPKPP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Permasalahan bidang perumahan rakyat yang hingga saat ini masih terus dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah *Backlog* perumahan. *Backlog* perumahan adalah jumlah kekurangan perumahan yang didapat dari hasil perhitungan antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang telah tersedia saat ini. Dengan kata lain, *Backlog* perumahan adalah jumlah rumah yang dibutuhkan saat ini agar seluruh masyarakat dapat memiliki rumah. *Backlog* yang terjadi adalah backlog hunian. Pada tahun 2022, total *Backlog* perumahan Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 21.960 unit rumah. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 14.198 unit rumah atau bertambah sekitar kurang lebih 7.762 unit rumah. Sejak tahun 2019, angka kekurangan rumah terus bertambah. Peningkatan angka *Backlog* perumahan salah satu penyebab tingginya adalah rendahnya pembiayaan sector perumahan dari pemerintah ataupun swasta sehingga diperlukan peran pemerintah dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain permasalahan *Backlog* perumahan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini juga dihadapkan dengan permasalahan terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Penilaian RTLH ini didasarkan pada rumah – rumah yang tidak memenuhi standar minimal rumah sehat. Pada tahun 2022, total RTLH yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 2.616 unit rumah. Total RTLH ini juga meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 2.556 unit rumah atau meningkat sekitar 60 unit rumah. Peningkatan total RTLH ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, dimana sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat untuk menjangkau perumahan sehat dan letak tempat tinggal yang berada di kawasan kumuh dapat menjadi faktor pendorong munculnya RTLH.

Dalam hal pemenuhan hak dasar masyarakat atas tempat tinggal layak, Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Pusat memberikan perhatian yang cukup serius melalui berbagai jenis metode pendanaan dalam menangani permasalahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 2. 35 Jenis Bantuan Pemerintah Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Kegiatan Bantuan Perumahan	Tahun (unit)					Sumber Pendanaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Rumah Khusus (Rusus)	-	50	-	-	-	APBN
		-	-	15	-	-	APBD KAB
2	Rumah Susun (Rusun)	-	1 Tower	-	-	-	APBN
3	Prasarana dan Sarana Umum (PSU)	-	-	1 kawasan Perumahan	-	-	1 kawasan Perumahan APBN



No	Jenis Kegiatan Bantuan Perumahan	Tahun (unit)					Sumber Pendanaan	
		2017	2018	2019	2020	2021		2022
4	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	343	140	200	840	131	-	APBN
	Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	-	-	60	60	100	100	APBD PROV
	Rehab Rumah Tidak Layak Huni				10	25	-	APBD KAB

Sumber: DPKPP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) jenis bantuan perumahan yang diberikan pemerintah. Ketiga bantuan tersebut ada yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara. Bantuan yang berasal dari APBN adalah dalam bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui peningkatan kualitas rumah dengan realisasi 131 unit rumah mendapatkan bantuan ini. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah berupa Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya. Bantuan ini disalurkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) berupa penyediaan tangki septik tank dengan total bantuan kepada 100 unit rumah. Sedangkan untuk bantuan perumahan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 adalah berupa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Total terdapat 25 unit RTLH yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini. Sedangkan pada tahun 2022, bantuan yang diberikan adalah 1 kawasan perumahan dengan pendanaan yang bersumber dari APBN serta Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya sebanyak 100 unit dengan sumber pendanaan APBD Provinsi.

Tabel 2. 36 Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Penajam Paser Utara

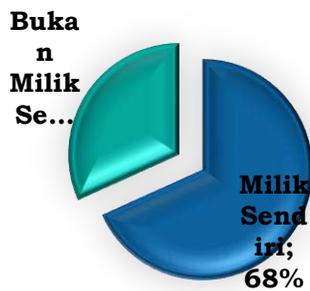
No	Lokasi	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Nilai Kekumuhan	Legalitas Tanah
1	Kecamatan Penajam (Kelurahan Penajam)	18,41	57 (sedang)	Legal
2	Kecamatan Sepaku (Kelurahan Maridan Masuk Kedalam Kawasan Ibu Kota Negara)	30,66	51 (sedang)	Legal

Sumber: SK. Bupati No. 593.33/270/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 593.33/270/2017, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 2 (dua) lokasi permukiman kumuh dengan status legalitas lahan legal. Dua lokasi tersebut terletak pada Kecamatan Sepaku tepatnya di Kelurahan Maridan dan Kecamatan Penajam tepatnya di Kelurahan Penajam. Total luas kawasan kumuh tersebut seluas 49,07 Ha yang terdiri dari 18,41 Ha pada Kelurahan Penajam dan 30,66 Ha pada Kelurahan Maridan. SK tersebut menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Hingga

saat ini belum ada Surat Keputusan terbaru terkait pembaharuan data kawasan kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kawasan kumuh yang terdapat di Kelurahan Maridan saat ini termasuk dalam kawasan Ibu Kota Negara sehingga untuk penanganannya sendiri lebih diprioritaskan pada kawasan kumuh di Kelurahan Penajam akan tetapi kawasan kumuh di Kelurahan Maridan tetap ditangani hingga tahun 2024 dengan porsi yang lebih sedikit.

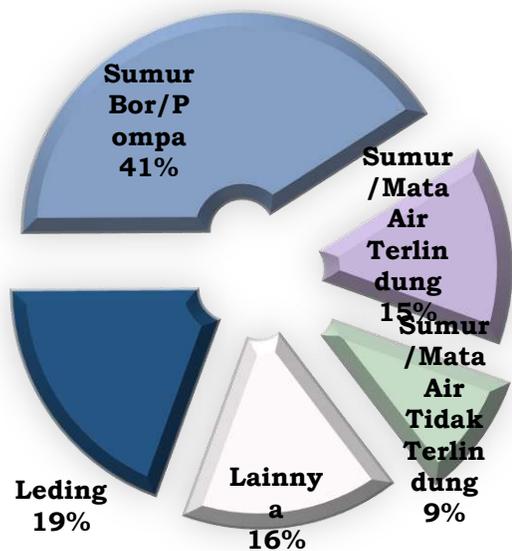
Gambar 2. 27 Status Kepemilikan Rumah Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2022 menunjukkan

Gambar 2. 28 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Mandi/Cuci Tahun 2022



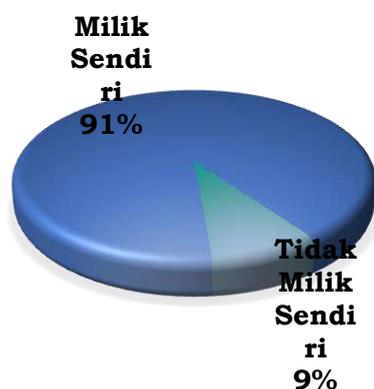
Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

hasil seperti pada diagram di atas. Kondisi kepemilikan rumah masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa 68% status kepemilikan rumah adalah milik sendiri, sedangkan 32% lainnya bukan milik sendiri. Melalui statistik ini maka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dari segi kepemilikan aset rumah dapat dikatakan sejahtera karena merupakan milik sendiri. Meskipun demikian masih ada masyarakat yang menempati rumah yang bukan milik sendiri, dimana Rumah bukan milik sendiri ini termasuk di dalamnya adalah rumah kontrakan, rumah dinas, rumah adat dan lainnya.

Berdasarkan hasil sensus BPS Kabupaten Penajam Paser Utara pada Sensus Regsosek BPS Tahun 2022 di Kabupaten Penajam Paser Utara, diketahui bahwa sebagian besar atau sebanyak 41% rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan air yang bersumber dari sumur bor untuk keperluan mandi dan mencuci. Sebagian rumah tangga lainnya juga banyak yang

Dominasi penggunaan air sumur bor/pompa ini lebih dikarenakan oleh nilai ekonomis dari sumber air tersebut, karena sumber mata air tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih cukup mudah didapatkan sehingga masyarakat lebih banyak memilih menggunakan air sumur bor yang dapat digunakan kapanpun tanpa harus takut pelayanan air bersih terganggu karena pemeliharaan dan alasan lainnya.

Gambar 2. 29 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas BAB Tahun 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

yang menggunakan fasilitas BAB selain milik pribadi, baik itu penggunaan secara komunal maupun rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB pribadi. Rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB pribadi ini berpotensi menyumbang pencemaran lingkungan melalui BABS. Kondisi 9% rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB pribadi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah guna meningkatkan tingkat kesejahteraannya melalui bantuan penyediaan sanitasi layak, mengingat penyediaan sanitasi layak ini juga menjadi amanat Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

menggunakan air leding untuk keperluan mencuci dan mandi. Selain menggunakan air yang bersumber dari sumur bor, masih cukup banyak juga rumah tangga yang memanfaatkan air sungai/danau/air hujan/sumber air permukaan lainnya untuk mencuci dan mandi, yaitu sebanyak 16% rumah tangga menggunakan sumber air tersebut.

Berdasarkan diagram di atas, tercatat bahwa sebagian besar (91%) rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki fasilitas BAB pribadi atau milik sendiri. Kepemilikan fasilitas BAB secara pribadi ini akan lebih menjamin tingkat kesehatan masyarakat dari penyakit – penyakit yang disebabkan bakteri atau kuman yang dapat ditularkan melalui penggunaan fasilitas BAB komunal atau umum. Tercatat masih ada 9% rumah tangga

E. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) menjadi jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Melalui terciptanya kondisi trantibum yang kondusif, maka aktivitas masyarakat dan aktivitas perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan aman dan damai. Kondisi trantibum yang wajib dijamin oleh Pemerintah Daerah adalah keamanan dan ketertiban dari sektor penanganan bencana dan kondusifitas pelaksanaan peraturan perundang – undangan, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2. 37 Jumlah Gangguan Kamtibmas dan Pelanggaran Peraturan Daerah/Kepala Daerah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Jumlah Kasus				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	0	0	0	0	0
2	Pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah		21	11	34	27

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah mendapatkan gangguan kamtibmas. Dengan kondisi ini, maka dapat dikatakan kondisi kamtibmas Kabupaten Penajam Paser Utara terbilang kondusif. Kondusifitas yang tinggi ini sangat berpeluang untuk mengundang minat investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun, masih ada kasus – kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelanggaran Perda dan Perkada ini selalu ada tiap tahun, dimana jumlah kasus pelanggaran terbanyak ada pada tahun 2021 sebanyak 34 kasus. Pada tahun 2022 ini kasus pelanggaran Perda dan Perkada menurun 7 kasus menjadi 27 kasus. Kasus pelanggaran Perda dan Perkada ini tidak lepas dari kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah terhadap terbitnya Perda maupun Perkada baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti adanya peraturan yang mengatur beberapa hal melalui Perda maupun Perkada.

Dari segi kebencanaan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus melakukan sinergitas dalam melakukan respon cepat terhadap kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, respon cepat Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana pada tahun 2022 telah cukup cepat yaitu <4 jam (kurang dari 4 jam).

F. Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan dasar minimal pada bidang sosial. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tersebut, diamanatkan bentuk kehadiran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota melalui beberapa kegiatan berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

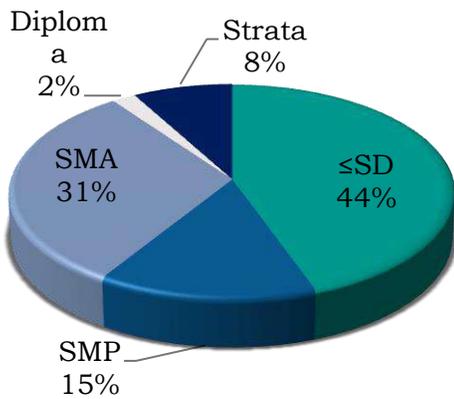
2.3.2. Urusan Non Pelayanan Dasar

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah umumnya memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat. Selain bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat yang berarti pelayanan tersebut merupakan pelayanan paling minimal yang harus diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, ada juga pelayanan pemerintah yang cukup strategis namun tergolong dalam non pelayanan dasar. Meskipun tergolong non pelayanan dasar, Pemerintah tetap harus hadir dalam memberikan pelayanan pada urusan ini sebagai bentuk dukung Pemerintah kepada aktivitas masyarakat.

A. Ketenagakerjaan

Pemerintah Daerah memiliki peran dalam hal ketenagakerjaan bagi tenaga kerja lokal di daerahnya. Perhatian Pemerintah Daerah bagi kondisi ketenagakerjaan di daerah dapat dilakukan melalui pelatihan – pelatihan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja dan lain sebagainya peningkatan skill atau kemampuan tenaga kerja baik secara teknis maupun non teknis serta jenjang pendidikan tenaga kerja. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi berbagai program peningkatan sumber daya manusia seperti pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jika melihat data statistik ketenagakerjaan, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara sedang berada dalam kondisi yang cukup baik.

Gambar 2. 30 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022



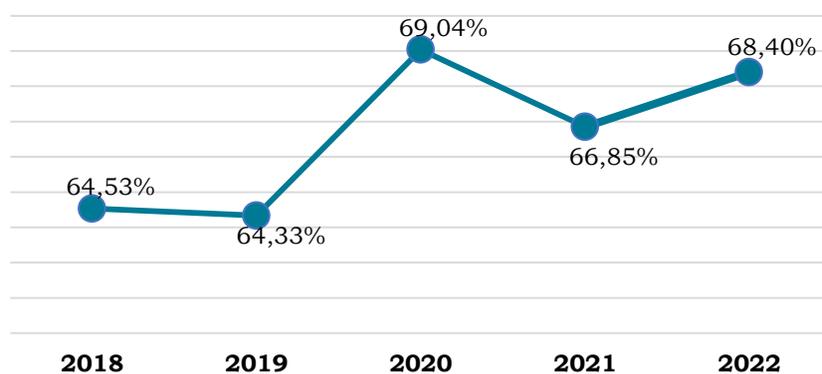
Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait ketersediaan atau kemampuan pasokan tenaga kerja secara umum pada suatu wilayah dapat diketahui melalui TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). TPAK akan memberikan gambaran pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk mendukung produksi barang dan jasa dalam suatu kegiatan perekonomian.

yang telah bekerja, penduduk yang bekerja namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dengan kata lain, angkatan kerja adalah seluruh penduduk yang telah memasuki usia kerja baik yang telah bekerja maupun belum bekerja. Angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 terdiri dari angkatan kerja lulusan SD sebanyak 44%, SMA 31%, SMP 15, Strata 8% dan Diploma 2%. Melihat persentase angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan ini, dapat terlihat ketersediaan angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh pekerja lulusan SD.

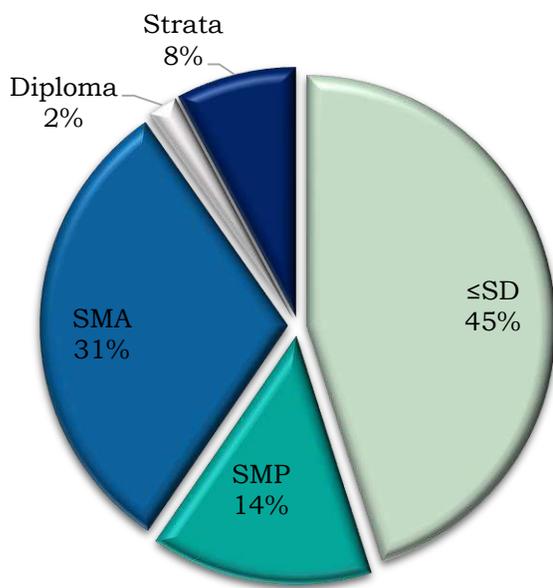
Gambar 2. 31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Dengan total angkatan kerja yang ada, Kabupaten Penajam Paser Utara mampu memasok tenaga kerja sebesar 68,40% untuk kegiatan produksi barang dan jasa atau kegiatan perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Besaran pasokan ini meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 66,85%. TPAK ini memperhatikan kualifikasi angkatan kerja yang tersedia dengan lapangan pekerjaan yang ada di dalam suatu daerah.

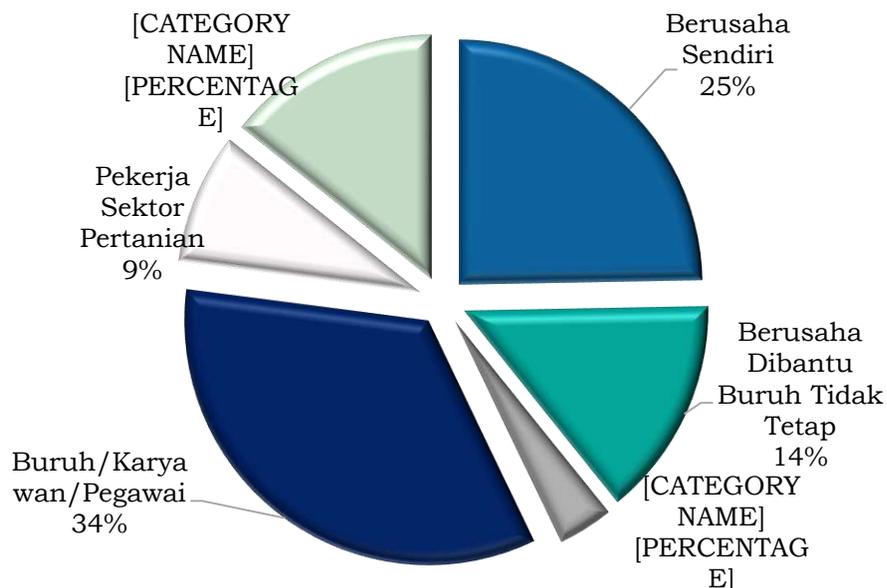
Gambar 2. 32 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Berdasarkan data statistik di atas, terlihat bahwa sebanyak 45%

Gambar 2. 33 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2022

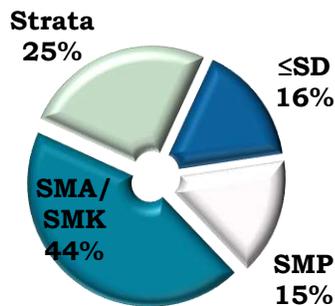


pekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD. Sedangkan pekerja tamatan Diploma dan Strata hanya sebanyak 10% dalam lapangan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan data statistik ini dapat diasumsikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terbilang rendah karena masih didominasi oleh pekerja tamatan SD. Kesadaran dan kemampuan perekonomian masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi penyebab utama dalam rendahnya pendidikan tenaga kerja lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagian besar didominasi oleh penduduk yang bekerja menjadi buruh/karyawan/pegawai perusahaan dan pemerintahan. Selain sebagai karyawan dan pegawai, penduduk bekerja juga di sektor wirausaha atau berusaha sendiri. Sedangkan pekerja di sektor pertanian cenderung lebih kecil, yaitu sekitar 9%. Bidang wirausaha juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, terlihat bahwa sebanyak 4% wirausaha mempekerjakan buruh. Meskipun tidak terlalu besar, namun wirausaha seperti ini perlu untuk didorong perkembangan dan pertumbuhannya agar dapat menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi.

Gambar 2. 34 Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022



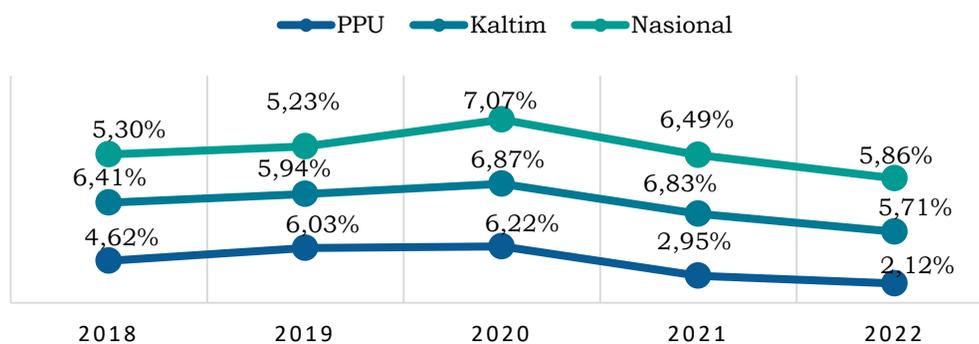
Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Data statistik terkait pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup berbanding terbalik dengan kondisi penduduk bekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK, yaitu sebanyak 44%.

Jika dibandingkan dengan pekerja dengan tamatan SMA/SMK, persentase ini tidak begitu berbeda jauh walaupun persentase pekerja lulusan SMA/SMK lebih kecil dibanding pengangguran lulusan SMA/SMK. Hal menarik adalah jumlah pekerja lulusan SD lebih tinggi dibandingkan pengangguran lulusan SD yang hanya 16%. Sedangkan untuk angkatan kerja lulusan Diploma tidak ada yang menanggur, artinya seluruh lulusan Diploma di Kabupaten Penajam Paser Utara semua bekerja. Dan sebanyak 25% angkatan kerja lulusan Strata masih menganggur.

Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa lapangan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh lapangan kerja kasar dan praktisi lapangan, sehingga kualifikasi pendidikan jenjang SD dan Diploma terbuka peluang yang cukup besar. Di lain sisi, Pemerintah Daerah perlu untuk mendorong investasi dalam negeri maupun asing untuk menciptakan lapangan kerja dibidang pekerjaan lain untuk dapat menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan Strata dan SMA/SMK lebih besar.

Gambar 2. 35 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018 - 2022



Sumber: BPS, 2023

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ini, menunjukkan kinerja positif sektor ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Mulai berjalannya pembangunan kawasan IKN, membuat lapangan kerja sektor konstruksi meningkat, hal ini dapat dilihat dari presentase lapangan kerja sektor konstruksi yang meningkat menjadi 7,03% pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebesar 6,55%. Selain itu, penyerapan tenaga kerja formal juga meningkat, yaitu menjadi 49,46% pada tahun 2021 yang pada tahun 2020 sebelumnya hanya sebesar 47,43%. Ini bisa diartikan bahwa ada peningkatan penduduk yang diterima di dunia kerja/dunia industri sebesar 2,03% selama tahun 2021. Secara umum, data status ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 38 Status Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	2020	2021	2022
Penduduk Usia Kerja (orang)	118.784	119.864	120.871
Angkatan Kerja (orang)	82.006	80.130	82.670
Bekerja (orang)	76.902	77.765	80.910
Pengangguran (orang)	5.104	2.365	1.755
Bukan Angkatan Kerja (orang)	36.778	39.734	38.201
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,22	2,95	2,12
Tingkat Partisipasi Angkatan (%)	69,04	66,85	68,40

Sumber: BPS, tahun 2023

Pencari kerja terdaftar di Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalami peningkatan. Tahun 2022, jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja yaitu sebesar 1.149 orang, lebih besar dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 897.

Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk yang melakukan upaya mencari kerja, karena pada umumnya pendaftaran pencari kerja ini dilakukan sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui informasi jumlah pencari

kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 39 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar 2018-2022

No	Tahun	Pencari Kerja Terdaftar		Jumlah
		L	P	

1	2018	1759	528	2.287
2	2019	780	362	1.142
3	2020	733	452	1.185
4	2021	714	183	897

5	2022	921	228	1.149
---	------	-----	-----	-------

Sumber: Dinas tenaga kerja & Transmigrasi, 2023.

Jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya, pencari kerja terdaftar di Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh pencari kerja lulusan SMA sebesar 836 orang pada tahun 2022. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40 Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Jenjang Tamatan Pendidikan 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja
1	Tidak Tamat SD	23
2	SD	23
3	SMP	49
4	SMA	836
5	D1	0
6	D2	2
7	D3	39
8	S1	176
9	S2	-
10	S3	-
Total		1149

Sumber: Dinas tenaga kerja & Transmigrasi, 2023.

Tabel 2. 41 Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Jenjang Tamatan Pendidikan 2022

No	Jenjang Kegiatan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Bekerja	49.756	50,04	8.762	9,47	58.518	30,48
2	Belum/Tidak Bekerja	37.486	37,7	31.741	34,30.00	69.227	36
3	Mengurus Rumah Tangga	0	0	42.715	46,16	42.715	22,25
4	Pelajar/Mahasiswa	11.873	11,94	9.244	9,99	21.117	11
5	Pensiunan	308	0,31	82	0,09	390	0,2
Total		99.423	100	92.544	100	191.967	100

Sumber: Dinas tenaga kerja & Transmigrasi, 2023.

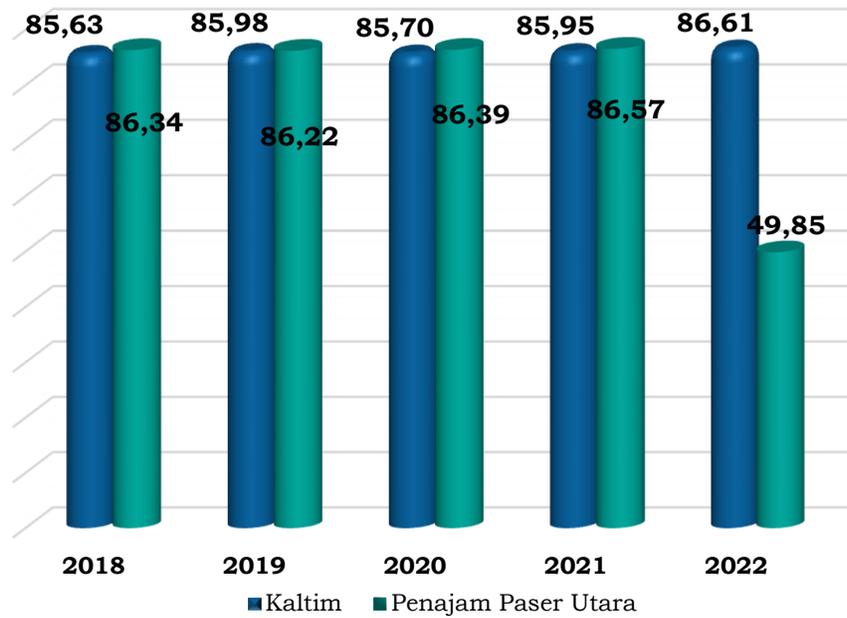
Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa jumlah penduduk belum/tidak bekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar dengan total 34,72% dari total penduduk. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja yaitu sebesar 30,82% dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan kerentanan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dikarenakan tidak dimilikinya penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu diperlukan adanya intervensi pemerintah khususnya dalam menyediakan layanan dasar upaya peningkatan keterampilan dan mendorong terciptanya lapangan kerja.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, wajib untuk memperhatikan pemberdayaan dan pembangunan perempuan. Perempuan mendapatkan peran strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mewajibkan dalam setiap pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender atau pelibatan seluruh gender, tidak hanya laki - laki namun juga perempuan. Dalam hal pemberdayaan perempuan, terdapat beberapa indikator yang dapat diperhatikan seperti melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Penghitungan IPM terpisah gender ini membuat analisis kualitas pembangunan, baik pada laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. IPG dan IDG merupakan indikator komposit yang kompleks dan cukup menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta partisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Untuk itu, jika didapatkan angka IPG atau IDG yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya, pemerintah setempat diharapkan dapat mengamati dan mengidentifikasi indikator tunggal/pembentuk mana yang masih rendah. IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dengan komposit pendukung yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Adapun komposit pendukungnya yaitu, keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan Sumbangan Pendapatan.

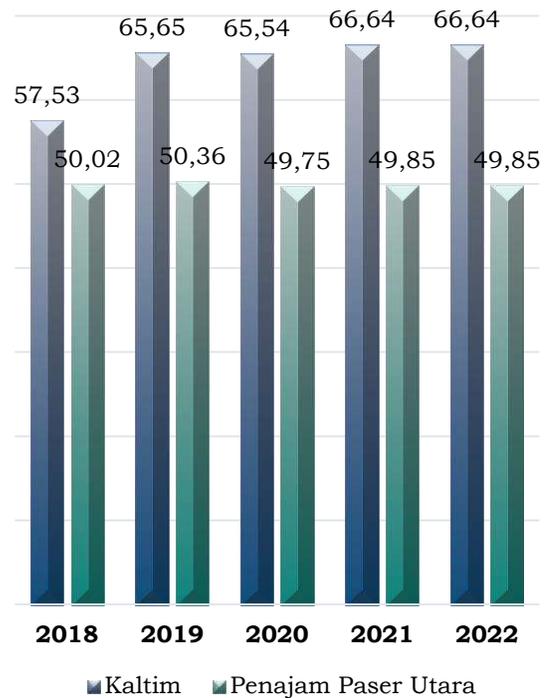
Gambar 2. 36 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa IPG Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 berada pada poin 86,57. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2020 yang berada pada poin 86,39. Selama 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2018 – 2022 capaian IPG Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur, dengan rata – rata selisih capaian 1 poin antara capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Capaian IPG yang meningkat pada tahun 2021 menandakan bahwa kesenjangan pembangunan kualitas antara laki – laki dan perempuan semakin kecil.

Gambar 2. 37 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

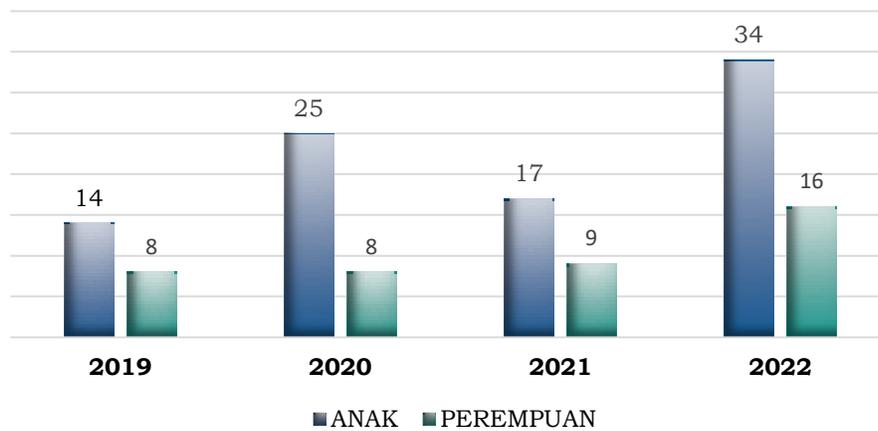
Secara garis besar, sejak tahun 2018 – 2022, IDG mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2018, IDG Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 50.02. Pada tahun 2021 IDG Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, dimana pada tahun 2021 nilai IDG Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 49.85 atau meningkat 0.10 dari tahun 2020. Capaian IDG Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 menandakan bahwa adanya

peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan untuk daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Peningkatan peran perempuan ini diharapkan terus meningkat setiap tahun sebagai bukti adanya kesetaraan antara laki – laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan di lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara umum, selama 5 tahun terakhir nilai IDG Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berada di bawah nilai IDG Provinsi Kalimantan Timur, dimana nilai IDG Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 66.64.

Pemerintah Daerah juga wajib hadir dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak dan perempuan, dengan mendorong pembangunan manusia berbasis gender diantaranya:

1. Menciptakan ruang – ruang publik yang ramah dan layak anak menjadi salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menyediakan berbagai macam infrastruktur.
2. Selain infrastruktur yang layak anak, Pemerintah Daerah juga wajib untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga khususnya perempuan dan anak yang mengalami berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menjamin persamaan perlakuan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
4. Meningkatkan akses perempuan terhadap pembangunan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan kemampuan perempuan, sehingga dalam memasuki dunia kerja tidak kalah dengan laki-laki.
6. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi perempuan yang secara kodrati mempunyai kekhususan seperti menyusui, melahirkan, haid, hamil; yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan perempuan dan memberikan peran serta laki-laki dalam ikut serta meningkatkan kualitas kesehatan bagi perempuan.
7. Semakin memberdayakan peran perempuan dalam memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dengan mengerakkan ekonomi untuk skala mikro dan kecil (usaha rumah tangga) menjadi basis partisipasi perempuan dalam perekonomian, seperti kegiatan simpan pinjam, industri berbasis hasil pertanian dan perkebunan (agroindustri), kelompok usaha perempuan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang mampu menambah kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendapatan yang layak.
8. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.
9. Memberikan edukasi kepada perempuan tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan, terutama pendidikan usia dini bagi anak-anaknya.
10. Memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dari segala macam tindak pelecehan dan kriminalisasi dalam dunia pekerjaan.

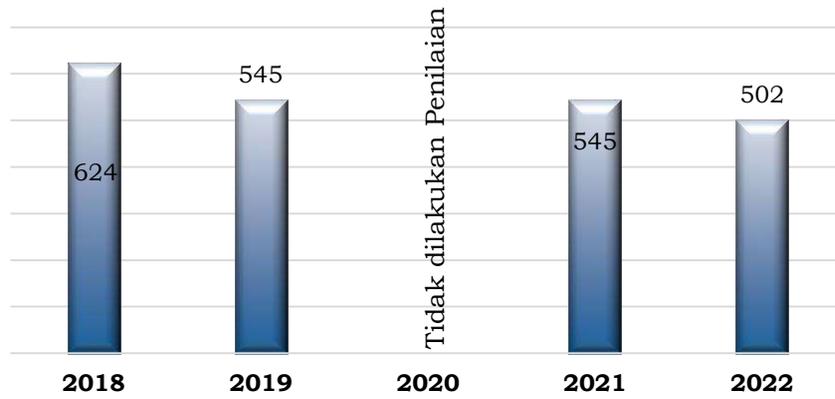
Gambar 2. 38 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2019 – 2022



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Kasus kekerasan kepada perempuan dari 2021 terjadi peningkatan dari 9 kasus menjadi 16 kasus di tahun 2022, demikian pula dengan kasus kekerasan terhadap anak di periode yang sama, ini disebabkan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat dan peran serta masyarakat terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 50 kasus. Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pendampingan terhadap korban yang mengalami kasus kekerasan sangat dibutuhkan dalam kondisi kasus yang meningkat signifikan ini. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak Kepolisian telah dilakukan untuk mencegah dan memberikan pendampingan. Dari total 50 kasus kekerasan pada tahun 2022 ini didominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA), kemudian juga kasus kekerasan fisik dan psikis, serta KDRT. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus melakukan pendampingan kepada korban baik yang menjalani proses hukum maupun tidak, serta melakukan *trauma healing* terhadap korban kekerasan yang mengalami gangguan psikologis. Selain melakukan pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga melakukan langkah antisipatif seperti sosialisasi kepada masyarakat melalui media sekolah maupun media lainnya. Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan di lingkungannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk melaporkan kasus – kasus kekerasan yang terjadi disekitar atau kepada diri sendiri ke pihak – pihak yang dinilai memiliki kewenangan terhadap penanganan kasus tersebut.

Gambar 2. 39 Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2018 – 2022



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

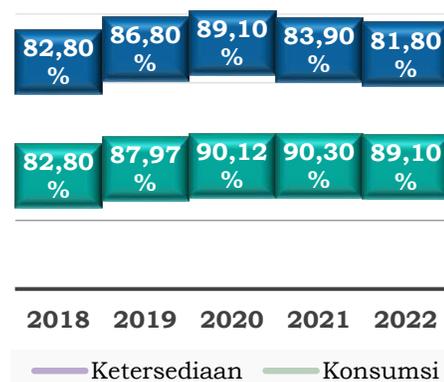
Skor KLA Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 tergolong tinggi, yaitu 545 poin. Skor tersebut mampu bertahan hingga tahun 2021, meskipun di tahun 2020 tidak dilakukan perhitungan skor KLA oleh Pemerintah Pusat dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga fokus terhadap penanganan penyebaran Covid-19. Pada tahun 2022, skor KLA Kabupaten Penajam Paser Utara menurun menjadi 502 poin atau turun 43 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu memberikan indikasi bahwa penyediaan ruang – ruang layak dan ramah anak menurun kualitas. Perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam hal memberikan pelayanan di infrastruktur publik yang layak anak, sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara dapat meningkatkan skor KLA dan memberikan citra keramahan Kabupaten Penajam Paser Utara kepada anak – anak.

C. Pangan

Urusan pangan menjadi urusan yang wajib dipenuhi atau dipastikan ketersediaannya oleh Pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat. Perhatian dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan petani lokal akan menghasilkan jaminan ketersediaan pasokan pangan lokal yang baik. Pembentukan Desa Mandiri Pangan oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu bukti keseriusan Pemerintah Daerah dalam memenuhi ketersediaan pangan lokal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan indikator mutu gizi yang didasarkan pada keberagaman konsumsi pangan

dapat menjadi salah satu indikator ketersediaan keberagaman pangan di suatu daerah untuk memenuhi gizi masyarakat.

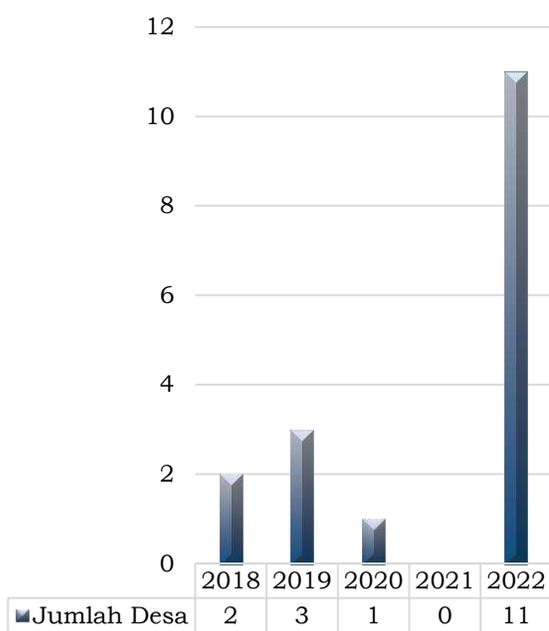
Gambar 2. 40 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Skor PPH Kabupaten Penajam Paser Utara jika dilihat berdasarkan ketersediaan dan konsumsi pangan menunjukkan bahwa ketersediaan berbagai jenis pangan terus meningkat tiap tahunnya, bahkan mencapai 90% ketersediaan pangan yang ada. Namun ketersediaan pangan ini tidak diiringi dengan meningkatnya konsumsi pangan oleh masyarakat, dimana konsumsi pangan masyarakat pada tahun 2021 menurun hingga 6% dibanding tahun 2020. Menurunnya konsumsi pangan masyarakat dapat berpengaruh pada pemenuhan nutrisi dan energi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari – hari. Perlu adanya dorongan dari Pemerintah Daerah untuk mengajak masyarakat memenuhi kebutuhan gizi hariannya melalui konsumsi beragam jenis pangan yang tersedia sehingga bahan pangan lokal yang tersedia dapat terserap dengan optimal. Selain melakukan dorongan, Pemerintah Daerah juga perlu untuk memastikan distribusi bahan pangan yang ada berjalan dengan baik dan merata serta memastikan harga jual yang terjangkau oleh masyarakat.

Gambar 2. 41 Desa Mandiri Pangan
Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Desa mandiri pangan adalah desa yang memiliki kemampuan

Melalui data di atas juga diketahui bahwa ada desa lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih belum mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desanya sendiri. Melihat desa – desa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebuah subsistem tanaman pangan, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas desa untuk dapat berkembang di sektor pangan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan desanya dan menyediakan kebutuhan pangan wilayah lainnya di lingkungan Kabupaten

untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakatnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal desa setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2019, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 3 Desa Mandiri Pangan. Namun pada tahun 2022, Kabupaten Penajam Paser Utara berhasil mencapai 11 Desa Mandiri Pangan yang mana jauh meningkat disbanding tahun 2020 yang hanya ada 1 desa. Hal ini menandakan bahwa ada peningkatan kemampuan sumber daya desa yang sebelumnya tergolong dalam desa mandiri pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desanya sendiri.

Penajam Paser Utara. Jika seluruh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mencapai desa mandiri pangan, maka Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjadi lumbung pangan skala regional dan swasembada pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat terwujud.

Catatan: Desa Mandiri Pangan sudah tidak dilaksanakan sejak Tahun 2021 karna perubahan nomenklatur program dan kegiatan diganti menjadi Desa Rawan Pangan. Data yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan adalah:

Indikator	Target Tahun Ke							
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	2019		2020		2021		2022	
Desa mandiri pangan	2 Desa	-	2 Desa	4 Desa	-	-	-	-
Desa rawan pangan	-	-	-	-	1	1	10	0

D. Lingkungan Hidup

Pelayanan Pemerintah terhadap lingkungan hidup menjadi salah satu poin yang penting. Jaminan terjaganya kualitas lingkungan hidup sangat memerlukan peran serta Pemerintah melalui kebijakan – kebijakan penguatan lingkungan hidup. Selain melalui kebijakan penguatan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah juga berperan dalam pelayanan persampahan kepada masyarakat. Lingkungan yang bersih dari persampahan juga merupakan bentuk dukungan dalam kesehatan lingkungan.

Gambar 2. 42 Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2019–2022



Sumber: DLH Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengetahui secara umum terhadap baku mutu air. Dengan mengetahui nilai IKA, maka akan didapatkan asumsi tingkat cemaran terhadap air di suatu wilayah. Pengambilan sampel air biasanya dilakukan terhadap air permukaan, seperti sungai, danau dan air permukaan lainnya yang biasa digunakan masyarakat.

Mengutip laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat beberapa klasifikasi kualitas air berdasarkan nilai IKA yaitu:

- IKA 81% - 100% tergolong memenuhi baku mutu;
- IKA 61% - 80% tergolong tercemar ringan;
- IKA 41% - 60% tergolong tercemar sedang;
- IKA $\leq 40\%$ tergolong tercemar berat;

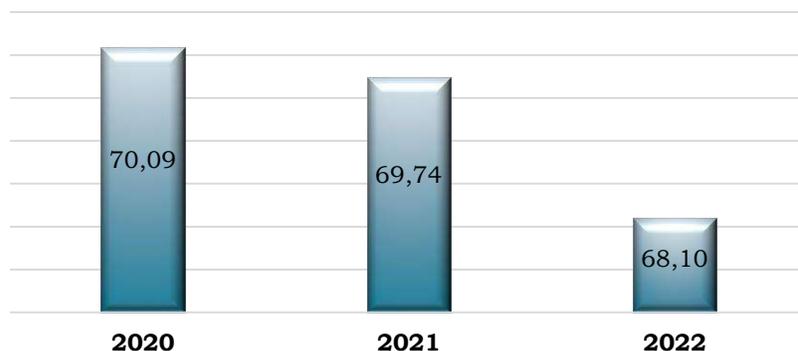
Jika memperhatikan hasil penilaian IKA Kabupaten Penajam Paser Utara pada grafik (grafik berwarna biru) di atas, terlihat bahwa IKA Kabupaten Penajam Paser Utara terus menurun dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa pada tahun 2019 hingga 2021 nilai IKA masih berada dalam rentang tercemar ringan, tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan karena nilai IKA berada dalam rentang tercemar sedang. Hal ini bisa terjadi karena adanya indikasi penurunan kualitas sungai yang dilakukan pemantauan dan terbatasnya jumlah parameter uji yang di analisa pada masing-masing titik pengambilan sampel serta adanya penambahan jumlah sungai yang di pantau. Kondisi penurunan kualitas air di Kabupaten Penajam Paser Utara ini perlu mendapat perhatian serius diantaranya perlu adanya penambahan anggaran Pemantauan Kualitas Air Permukaan dengan melakukan pengembangan berupa adanya penambahan sungai yang dipantau serta penambahan parameter uji. Hal ini akan berpengaruh langsung pada kenaikan nilai IKA dikarenakan variabel penambahan lokasi akan berdampak pada jumlah titik pengambilan sampel termasuk juga adanya penambahan parameter uji yang secara signifikan akan berpengaruh pada perhitungan nilai IKA. Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu melakukan analisa KLHS yang tepat, sehingga dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dapat diketahui dan diantisipasi sejak awal. Selain itu, perizinan terhadap berdirinya kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu kualitas lingkungan hidup khususnya terhadap mutu air permukaan harus dapat dikendalikan dengan baik. Terlebih Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah ditetapkan secara hukum menjadi lokasi Ibukota Negara yang baru perlu menyediakan dan memenuhi kebutuhan air baku bagi pembangunan dan masyarakat IKN ke depan, sehingga kualitas air yang tersedia harus terjaga dengan baik.

Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan IKA, yaitu untuk mengetahui kualitas udara yang ada dalam suatu wilayah. Perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) saat ini untuk Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan data hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara hanya sebatas pada proses pemasangan passive sampler yang difungsikan sebagai alat pengambilan contoh. Udara yang menjadi bagian tidak kalah penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup perlu dijaga kualitasnya agar seluruh makhluk hidup yang ada bisa menghirup udara yang bersih.

Perkembangan sebuah daerah tidak lepas dari kekhawatiran terhadap kualitas udara yang akan didapatkan. Dampak pembangunan yang tidak memperhatikan KLHS dapat sangat merugikan masyarakat. Nilai IKU yang semakin tinggi, menandakan bahwa kualitas udara di suatu daerah semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Pada grafik di atas, IKU Kabupaten Penajam Paser Utara masih tergolong sangat baik karena masih berada dalam rentang $>80\%$. Namun kondisi IKU Kabupaten Penajam Paser Utara perlu diwaspadai karena berdasarkan penilaian terakhir tahun 2021 menunjukkan bahwa IKU Kabupaten Penajam Paser Utara menurun dibanding tahun sebelumnya. Meskipun hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2022 mengalami peningkatan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pengembangan serta perbaikan. Salah satunya terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kelas Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Kemudian juga terkait dengan pengembangan pelaksanaan pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi hasil yang lebih representatif. Dampak-dampak terhadap pembangunan yang cukup massif dan besar akibat dari pemindahan IKN ke Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara perlu untuk terus berada pada koridor memperhatikan lingkungan hidup. Peran Pemerintah Daerah dalam mengawal kelancaran pembangunan dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup sangat diperlukan.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan sebuah parameter hasil dari penyempurnaan Indeks Tutupan Lahan (ITL). IKTL akan memberikan gambaran terhadap seberapa besar lahan hijau yang ada di suatu daerah. Jika memperhatikan nilai IKTL Kabupaten Penajam Paser Utara maka akan terlihat sedikit berbeda dengan IKA dan IKU, dimana IKTL Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang kian membaik dari tahun ke tahun. Meskipun kondisi IKTL tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun peningkatan ini perlu terus dipertahankan untuk memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gambar 2. 43 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2022



Sumber: DLH Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

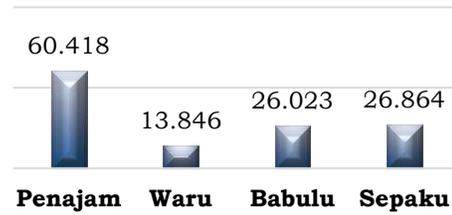
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan parameter yang akan memberikan gambaran terkait kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan dalam periode tertentu. IKLH tidak terlepas atau sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter lain, yaitu IKA, IKU dan IKTL. Jika ketiga komponen tersebut berada dalam kondisi yang baik, maka IKLH secara keseluruhan juga akan berada dalam kondisi yang baik. Pada tahun 2019, Kabupaten Penajam Paser Utara tidak melakukan perhitungan IKLH. Pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong tinggi walaupun belum tergolong sangat tinggi. Kondisi IKLH yang tinggi pada tahun 2020 ini tidak terlepas dari berkurangnya kegiatan masyarakat, pembangunan dan lainnya akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara menurun. Penurunan ini seiring dengan menurunnya IKA dan IKU Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan pada tahun 2022 masih terjadi penurunan nilai IKLH, meskipun tidak signifikan tetapi penurunan ini juga sangat dipengaruhi dengan adanya penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sehingga diperlukan respon positif untuk memperbaiki hal tersebut. Mulai pada tahun 2022 juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan identifikasi serta inventarisasi terkait Indeks Respon pemerintah Daerah (IRKD) sebagai respon terhadap capaian nilai IKLH yang diperoleh. Hal ini tentunya menjadi respon positif bagi daerah untuk melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah. Perhatian terhadap lingkungan hidup dan segala komponen pembentuknya perlu untuk dijamin oleh seluruh *stakeholder* baik Pemerintah, swasta, masyarakat dan lain – lain.

E. Kependudukan dan Catatan Sipil

Layanan administrasi kependudukan adalah salah satu bentuk layanan Pemerintah Daerah dibidang legalitas status kependudukan. Data diri setiap masyarakat terdata dalam *database* kependudukan yang saat ini telah terintegrasi oleh seluruh tingkatan Pemerintahan dari Pusat hingga Daerah. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya bertanggungjawab dalam menerbitkan dokumen – dokumen kependudukan masyarakat, namun juga bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk tanpa terkecuali. Pelayanan kependudukan saat ini juga telah berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah bertransformasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui aplikasi GISA. Melalui aplikasi GISA tersebut, masyarakat dapat mengajukan pembuatan dokumen kependudukan dan melakukan pengaduan terkait keluhan kependudukan. Pihak Disdukcapil akan merespon serta menindaklanjuti pengajuan dan aduan masyarakat yang terlampir pada aplikasi tersebut.

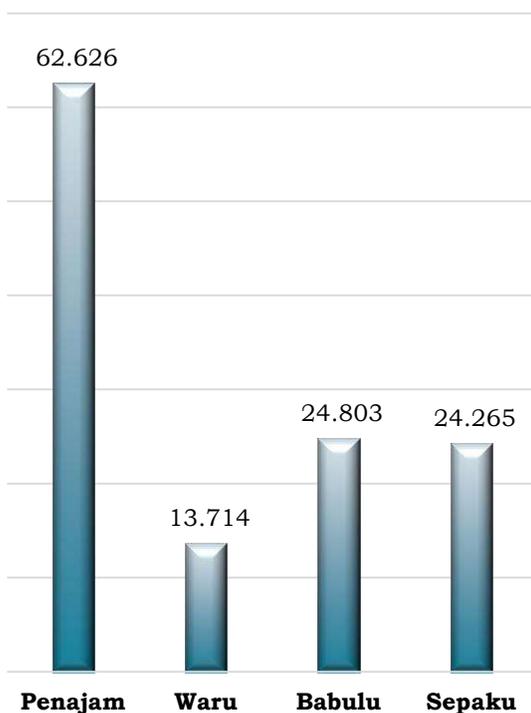
Gambar 2. 44 Jumlah Penduduk Ber-KTP Elektronik Menurut Kecamatan Tahun 2021 (Jiwa)



Sumber: Disdukcapil, 2022

Dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki seluruh masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun. Saat ini KTP di Indonesia telah diseragamkan dan terkoneksi dengan *database* yang ada di Pemerintah Pusat melalui KTP-El (KTP Elektronik). Tujuan dari penerbitan KTP-El adalah untuk memudahkan proses administrasi masyarakat, dimana masyarakat hanya perlu melakukan *scan* terhadap KTP-El tersebut untuk mendapatkan informasi secara lengkap terkait data diri dan tidak perlu melakukan fotocopy. Total penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 berjumlah 186.801 jiwa, dimana dari total tersebut sebanyak 128.092 penduduk atau sekitar 68,57% penduduk telah memiliki KTP-El. Dari total penduduk yang memiliki KTP-El tersebut, terdiri dari 60.418 jiwa penduduk di Kecamatan Penajam, 13.846 jiwa penduduk di Kecamatan Waru, 26.023 jiwa penduduk di Kecamatan Babulu dan 26.864 jiwa penduduk di Kecamatan Sepaku. Data ini merupakan data terbaru yang didapatkan.

Gambar 2. 45 Jumlah Penduduk Memiliki Akte Kelahiran Menurut Kecamatan Tahun 2021 (Jiwa)



Sumber: Disdukcapil, 2022

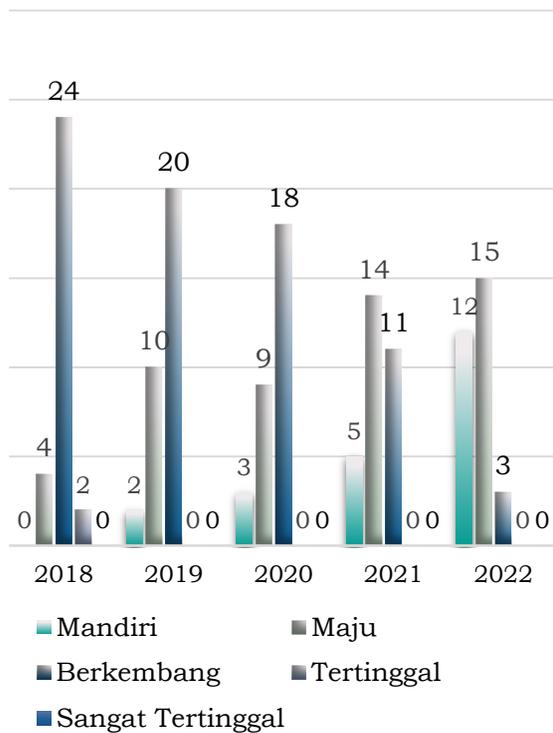
Akte kelahiran merupakan salah satu bentuk dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai bukti tanda kelahiran secara negara. Seluruh penduduk wajib memiliki dokumen akte kelahiran tanpa terkecuali. Pada tahun 2023, total terdapat 133.273 jiwa penduduk yang memiliki akte kelahiran. Jika dibandingkan dengan total penduduk yang mencapai 183.043 jiwa, maka total tersebut menandakan bahwa ada sekitar 49.770 jiwa penduduk yang belum memiliki akte kelahiran. Data ini merupakan data terbaru yang didapatkan. Diperlukan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen catatan sipil seperti akte kelahiran, dimana dokumen ini biasanya akan digunakan

untuk keperluan ibadah haji dan lain sebagainya.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Desa yang menjadi satu bagian Pemerintah terkecil di lingkup Kabupaten, wajib memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Pemerintah Desa yang berbeda dengan Kelurahan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk didorong lebih berkembang. Pemerintah Desa diberikan otonomi khusus untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja sendiri yang dapat berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maupun dana transfer dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Dengan diberikannya otonomi khusus bagi Pemerintah Desa untuk mengelola keuangannya sendiri, diharapkan Pemerintah Desa mampu mendorong kemajuan desa lebih cepat dibandingkan kewilayahan lain yang ada di dalam Kabupaten. Sebagai bentuk penilaian keberhasilan Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan dan pembangunan di desa, maka status desa dibedakan menjadi 5 yaitu Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Status desa ini dinilai dari kemampuan suatu desa dalam membangun dan menjalankan roda pemerintahannya.

Gambar 2. 46 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara



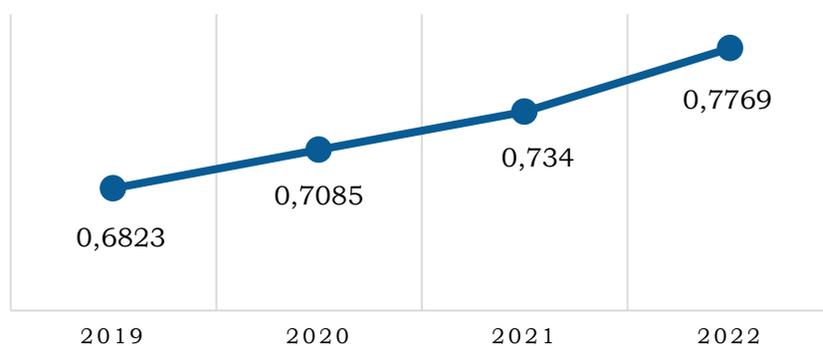
Sumber: DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Dalam perkembangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, setiap tahunnya memberikan hasil yang positif. Sejak tahun 2018 – 2022, selalu ada desa di Kabupaten Penajam Paser Utara yang naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2018, dari total 30 desa masih terdapat 2 desa yang tertinggal dan belum ada desa dengan status mandiri. Namun setiap tahunnya, jumlah desa mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu meningkat dan pada tahun 2022 telah ada 12 desa mandiri dan sudah tidak ada lagi desa tertinggal maupun sangat tertinggal. Pada tahun 2022 juga desa berkembang sudah semakin sedikit hanya menyisakan 3 desa dengan status berkembang.

Hal ini menunjukkan bahwa ada keseriusan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membina dan membentuk serta membangun desa yang ada agar menjadi lebih baik dan lebih mandiri dalam

melaksanakan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Namun meskipun saat ini sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap memiliki tugas yang berat untuk mempertahankan status desa ini agar tidak turun kelas lagi. Kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa sebagai pelaksana dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pembina diharapkan mampu menciptakan sinergitas yang solid untuk menjadikan seluruh desa yang ada menjadi mandiri dan tidak turun kelas lagi pada masa yang akan datang.

Gambar 2. 47 Perkembangan Indeks Desa Membangun Tahun 2019 – 2022



Sumber: DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan gambaran secara keseluruhan terkait pembangunan di desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Nilai IDM Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat seiring dengan peningkatan jumlah desa yang naik kelas ke tingkatan yang lebih tinggi. Sejak tahun 2020 – 2022, IDM Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong dalam kriteria Maju dengan nilai ada di rentang 0,7 – 0,8. Nilai yang didapatkan ini juga seiring dengan dominasi desa dengan status Maju yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berjumlah 15 desa atau 50% dari total desa di kabupaten Penajam Paser Utara. Diharapkan nilai IDM Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat sehingga dapat mendapat predikat Mandiri seiring dengan meningkatnya jumlah desa mandiri yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jumlah BUMDEs dan pengelola Pasar pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 4 menjadi 2 BumDes , berikut banyaknya pasar rakyat dan pengelola pasar

Tabel 2. 42 Banyaknya Pasar Rakyat dan Pengelola Pasar di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Pemerintah Daerah	Desa	BUMDES	LPMD	Koperasi/Swasta	Belum ada
1	Babulu	1	5	2	-	2	-
2	Waru	1	-	-	-	-	-
3	Penajam	1	-	1	2	2	2

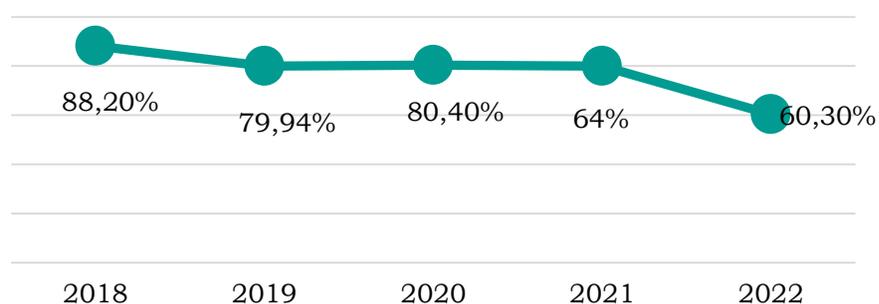
4 Sepaku	-	12	3	-	-	-
2022	3	17	6	2	4	2
2021	3	11	4	3	5	2

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program – program dalam upaya pengendalian penduduk sangat perlu untuk menjadi program prioritas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini mengingat akan terjadinya perpindahan penduduk dengan skala yang cukup besar ke daerah Kabupaten Penajam Paser Utara seiring dengan perpindahan IKN. Pegawai – pegawai dari Kementerian dan Lembaga Negara yang sebelumnya berdomisili di kawasan Jabodetabek, akan berpindah ke kawasan IKN dan kawasan sekitar IKN yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain pegawai pemerintah, perpindahan penduduk yang besar juga berpotensi terjadi pada sektor tenaga kerja konstruksi yang akan mengerjakan proyek pembangunan fisik IKN. Perpindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara bukan tidak mungkin menarik minat investasi yang cukup besar, sehingga masuknya penduduk untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat meningkat. Program dan strategi pengendalian penduduk menjadi penting untuk mulai diperhatikan Pemerintah Daerah agar pertumbuhan penduduk terkendali dan dapat meminimalisir *urban sprawl*.

Gambar 2. 48 Persentase Kesadaran Masyarakat Untuk Ber-KB



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Salah satu upaya Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Melalui program ini diharapkan pengendalian penduduk dari fertilitas dapat ditekan. Namun program ini perlu untuk lebih digiatkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara karena melihat tren kesadaran masyarakat untuk ber-KB, turun sejak tahun 2021. Pada tahun 2022 ini kesadaran masyarakat untuk ber-KB menurun cukup signifikan dibanding tahun 2021, dimana tingkat kesadaran menurun 16%. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah, untuk lebih giat lagi melakukan sosialisasi baik melalui pertemuan, brosur, media cetak atau lainnya sebagai upaya meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk ber-KB dengan harapan pertumbuhan penduduk melalui fertilitas dapat terkendali.

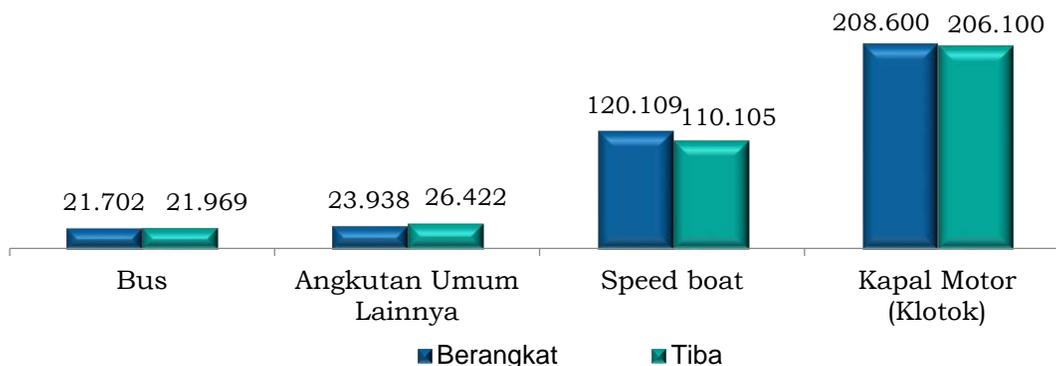
H. Perhubungan

Terminal di Kabupaten Penajam Paser Utara menurut RTRW Provinsi Kalimantan Timur diarahkan menjadi terminal tipe B pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu di Perkotaan Petung. Sedangkan untuk terminal tipe C diarahkan pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu di Perkotaan Penajam, Perkotaan Kecamatan Waru, Perkotaan Kecamatan Babulu, dan Perkotaan Kecamatan Sepaku. Angkutan umum yang di manfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara adalah bus yang melayani trayek Tanah Grogot – Penajam. Selain itu juga terdapat angkutan umum pedesaan berupa mini bus (L300) yang beroperasi melayani masyarakat dari satu desa ke desa lainnya. Adapun angkutan umum pedesaan ini melayani masyarakat dengan trayek :

- Wilayah Perkotaan;
- Penajam – Waru;
- Waru – Babulu;
- Petung – Sepaku.

Selain moda transportasi darat, Kabupaten Penajam Paser Utara juga ditunjang dengan moda transportasi perairan guna melayani mobilitas masyarakat dan barang dari Kota Balikpapan menuju Kabupaten Penajam Paser Utara ataupun sebaliknya. Untuk mendukung mobilitas menggunakan moda transportasi perairan tersebut, Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjang dengan keberadaan pelabuhan penyeberangan yang terletak di Kecamatan Penajam dan pelabuhan ini juga tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Gambar 2. 49 Jumlah Penumpang Moda Angkutan Darat dan Perairan Tahun 2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Penumpang yang tiba dan berangkat melalui Terminal Penajam pada tahun 2022 secara berurutan berjumlah 48.391 orang dan 45.640 orang. Dari total 48.391 orang yang tiba di Terminal Penajam, sebanyak 26.422 orang tiba menggunakan angkutan umum selain bus, seperti angkutan pedesaan, L300 dan

sebagainya, sedangkan 21.969 lainnya menggunakan bus. Untuk penumpang yang berangkat atau meninggalkan Terminal Penajam berjumlah 45.640 orang, dengan rincian 21.702 orang berangkat menggunakan bus dan 23.938 orang lainnya menggunakan angkutan umum selain bus. Bagi penumpang yang tiba dan berangkat menggunakan bus, maka dapat diasumsikan bahwa penumpang tersebut berasal atau akan menuju wilayah di luar Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti Kabupaten Paser. Sedangkan untuk penumpang yang menggunakan angkutan umum selain bus, maka dapat diasumsikan bahwa penumpang tersebut hanya melakukan pergerakan di dalam daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kondisi mobilitas pada transportasi perairan sedikit berbeda dibandingkan dengan moda transportasi darat. Mobilitas melalui moda transportasi perairan lebih tinggi dibandingkan transportasi darat. Dengan kondisi ini maka dapat diasumsikan bahwa masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara lebih banyak melakukan mobilitas antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan dibandingkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Paser. Total penumpang yang tiba di Dermaga Klotok dan Speed Boat sebanyak 316.205 penumpang dengan rincian 206.100 penumpang tiba menggunakan kapal motor (klotok) dan 110.105 menggunakan speed boat. Sedangkan total penumpang yang berangkat melalui Dermaga Klotok dan Speed Boat sebanyak 328.709 penumpang dengan rincian 208.600 penumpang berangkat menggunakan klotok dan 120.109 penumpang menggunakan speed boat. Penumpang yang melakukan mobilitas melalui moda transportasi perairan lebih didominasi oleh penumpang yang menggunakan klotok dibandingkan speed boat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh daya tampung moda transportasi yang berbeda – beda, dimana daya tampung penumpang klotok lebih banyak dibandingkan speed boat. Umumnya penumpang yang menggunakan speed boat adalah penumpang yang ingin segera tiba karena waktu tempuh speed boat lebih singkat.

Gambar 2. 50 Jumlah Angkutan Darat dan Perairan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Kendaraan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya di bagi menjadi 2 moda angkutan, yaitu moda angkutan darat dan moda angkutan perairan. Moda angkutan darat terdiri dari bus dan mobil penumpang, sedangkan

moda angkutan perairan terdiri dari speed boat dan kapal motor (klotok). Moda angkutan darat didominasi oleh mobil penumpang selama 5 tahun terakhir, dimana total mobil penumpang yang beroperasi pada tahun 2022 sebanyak 169 unit, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 4 unit dari tahun sebelumnya, sedangkan bus hanya 11 unit. Jenis kendaraan mobil penumpang ini umumnya melayani masyarakat untuk pergerakan atau perpindahan dalam kota, meskipun untuk jenis mobil penumpang tipe L300 melayani perpindahan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Paser. Untuk moda angkutan perairan, selama 5 tahun terakhir didominasi oleh speed boat, dimana total speed boat yang beroperasi berjumlah 51 unit sedangkan klotok berjumlah 27 unit. Seluruh moda angkutan perairan, baik *speed boat* maupun klotok melayani mobilitas masyarakat untuk menyeberang Teluk Balikpapan menuju Kota Balikpapan maupun sebaliknya.

Untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan berlalulintas baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, maka kendaraan – kendaraan yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara wajib untuk melakukan pengujian KIR. Uji KIR dilakukan guna mengetahui kelayakan teknis sebuah kendaraan untuk digunakan berlalulintas. Uji KIR umumnya dilakukan pada kendaraan angkutan penumpang maupun Barang. Uji KIR untuk kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dirincikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Tabel 2. 43 Jumlah Kendaraan yang Diuji KIR Tahun 2022

No	Jenis Kendaraan	Banyaknya Kendaraan (Unit)
1	MPU/Mini Bus	109
2	Bus/Mikro Bus	81
3	Bus	52
4	Mobil Barang/Pick Up	1.080
5	Mobil Barang/Truck	1.021
6	Mobil Khusus	2
Total		2.345

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Pada tahun 2022, total kendaraan yang melakukan uji KIR di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 2.345 unit kendaraan. Dari total kendaraan yang melakukan uji KIR, sebagian besar uji KIR dilakukan oleh pemilik kendaraan mobil barang berupa pick up sebanyak 1.080 unit kendaraan kemudian mobil barang berupa truck sebanyak 1.021 unit kendaraan. Selain mobil barang, uji KIR juga

dilakukan pemilik kendaraan angkutan penumpang. Total kendaraan mini bus yang melakukan uji KIR sebanyak 109 unit kendaraan, sedangkan untuk kendaraan jenis mikro bus sebanyak 81 unit kendaraan dan jenis bus sebanyak 52 unit kendaraan. Uji KIR umumnya dilakukan setiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun. Dengan taat dilakukannya uji KIR oleh pemilik kendaraan angkutan umum dan angkutan barang diharapkan dapat menjadi pengendalian terhadap kelayakan kendaraan, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman.

Tabel 2. 44 Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018– 2022

Tahun	Jumlah Kecelakaan (Kasus)	Kondisi Korban			Total Korban (Jiwa)
		Meninggal Dunia (Jiwa)	Luka Berat (Jiwa)	Luka Ringan (Jiwa)	
2018	76	-	-	-	-
20-19	43	22	12	23	57
2020	31	20	12	13	45
2021	52	35	15	22	72
2022	82	28	72	33	133

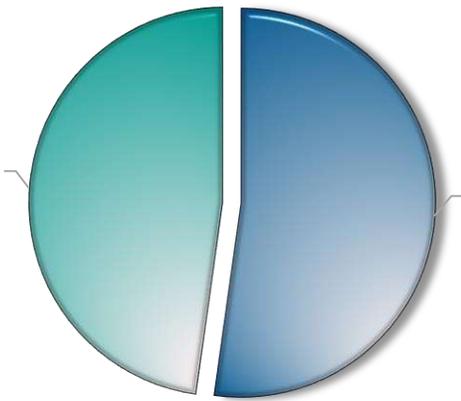
Sumber: Polres Penajam Paser Utara, 2023

Kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 meningkat 30 kasus. Jumlah korban laka lantasi tahun 2022 juga meningkat sebesar 61 korban. Jika ditinjau berdasarkan jumlah peningkatannya, maka jumlah peningkatan laka lantasi dan korban laka lantasi tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2021. Dari total kasus laka lantasi yang terjadi, jumlah korban meninggal dunia menurun 7 jiwa dibanding tahun 2021, jumlah korban luka berat meningkat 57 jiwa dan jumlah korban luka ringan meningkat 11 jiwa sehingga total korban pada tahun 2022 sebanyak 133 jiwa. Total peningkatan kasus lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun jumlah korban meninggal dunia menurun. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan jajaran Kepolisian Resor Penajam Paser Utara perlu ditingkatkan untuk menjadi perhatian bersama dalam meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2022. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara infrastruktur perhubungan, wajib memberikan dan berkoordinasi dengan seluruh tingkatan pemerintah untuk memberikan akses infrastruktur perhubungan yang memadai disertai dengan rambu – rambu peringatan, himbauan dan lain – lain pada titik – titik yang dianggap rawan kecelakaan. Kepolisian sebagai pihak penegak Peraturan Perundang – Undangan khususnya peraturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan perlu melakukan berbagai upaya, baik melalui sosialisasi maupun penindakan tegas terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas.

I. Komunikasi dan Informatika

Pada era modern saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin berkembang dengan sangat cepat. Penggunaan *gadget* saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Berbagai macam pekerjaan dan kegiatan dapat dilakukan melalui telepon genggam maupun laptop atau PC. Perkembangan teknologi yang cepat ini perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan dan pemerataan akses jaringan internet. Terlebih pasca Pandemi Covid-19, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi semakin massif digunakan.

Gambar 2. 51 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan *Gadget* Tahun 2022

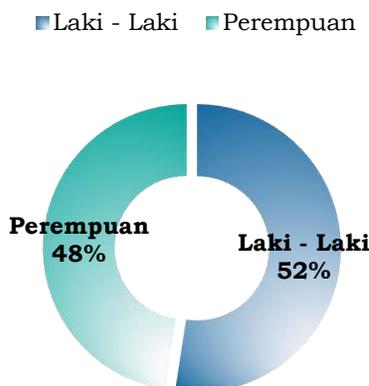


Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang berusia 5 tahun ke atas telah lebih banyak menggunakan

gadget. Penggunaan *gadget* ini dipengaruhi oleh tuntutan aktivitas yang lebih banyak memanfaatkan penggunaan *gadget*, mulai dari sekolah hingga bekerja saat ini dituntut untuk menggunakan *gadget*. Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa mayoritas penduduk laki - laki (52%) di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan *gadget* baik computer, laptop, ataupun HP. Dominasi penduduk laki - laki dalam penggunaan *gadget* ini tidak lepas dari tuntutan pekerjaan dan pendidikan serta penduduk laki - laki yang lebih banyak menggunakan HP untuk mencari hiburan seperti bermain *game online* dan sosmed lainnya.

Gambar 2. 52 Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Tahun 2022



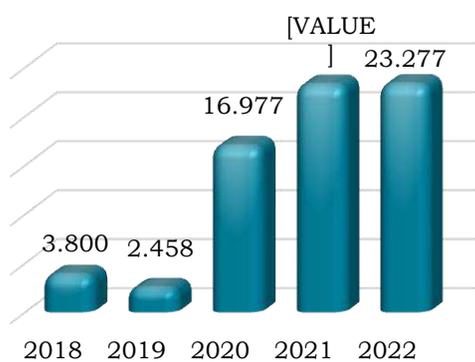
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa proporsi penduduk laki – laki dan perempuan yang mengakses internet sama dengan proporsi penduduk yang menggunakan *gadget*. Akses internet yang dimaksud adalah media sosial, seperti *Whatsapp, Facebook, Twitter*, dan lain – lain termasuk Youtube dan *game online*. Penduduk laki – laki yang mengakses internet di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, karena mayoritas penduduk laki – laki lebih banyak menghabiskan waktu dan melaksanakan kegiatan melalui *gadget* dengan memanfaatkan akses internet.

K. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perekonomian masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari perputaran ekonomi di tingkat UKM. Pada saat Pandemi Covid-19 memberikan dampak negative bagi mata pencaharian sebagian masyarakat, maka salah satu pilihan yang dilakukan masyarakat adalah dengan memulai untuk membuka usaha baru. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah disemua tingkatan baik Pusat maupun Daerah merespon untuk memberikan bantuan permodalan bagi UKM yang terkena dampak maupun bagi UKM yang akan dibentuk. Rangsangan perekonomian Pemerintah melalui bantuan permodalan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang terkena dampak dengan persyaratan yang cukup mudah. Berikut perkembangan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara:

Gambar 2. 53 Jumlah UMKM Tahun 2019 – 2022

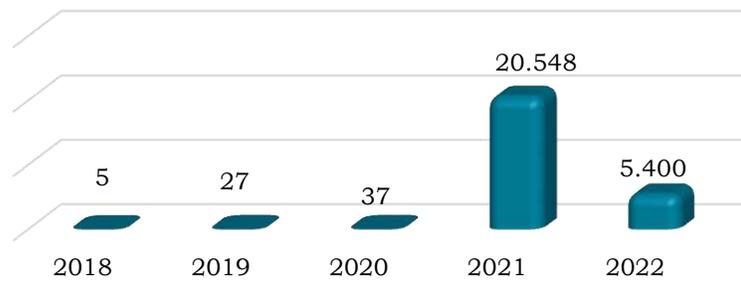


Sumber: Dinas KUKM Perindag, 2023

Berdasarkan diagram di atas, jumlah UMKM Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat pesat sejak tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah

UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 2.458 UMKM. Jumlah tersebut kemudian meningkat sangat pesat menjadi 16.977 UMKM pada tahun 2020. Hal ini tidak lepas akibat dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak pekerja yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mencoba untuk memulai usaha baru. Namun pada tahun 2021, jumlah UMKM tersebut kembali menurun pesat dengan hanya tinggal 6.250 UMKM dan jumlah ini bertahan hingga tahun 2022.

Gambar 2. 54 Jumlah UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas KUKM Perindag Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Bantuan permodalan usaha untuk UMKM telah menjadi program Pemerintah untuk memajukan perkembangan UMKM. Seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM yang terdaftar, maka total bantuan permodalan usaha juga meningkat. Pada tahun 2019 - 2020 jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan modal terbilang sangat kecil, yaitu hanya 27 UMKM dan 37 UMKM. Jumlah UMKM yang mendapat bantuan permodalan tahun 2021 meningkat signifikan yaitu sebanyak 20.548 UMKM. Peningkatan ini juga dikarenakan program Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi kerakyatan akibat Pandemi Covid-19.

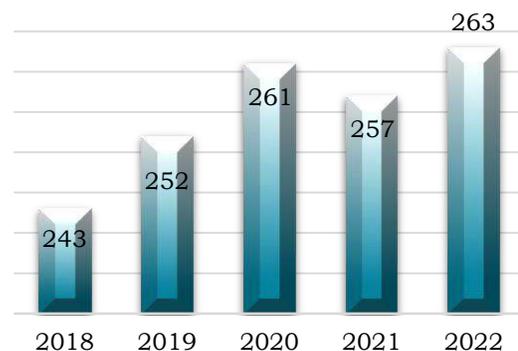
Koperasi merupakan salah satu media perekonomian kerakyatan yang memiliki salah satu fungsi sebagai penguatan ekonomi kerakyatan. Jumlah koperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 berjumlah 263 Koperasi. Jumlah ini meningkat 6 Koperasi dibanding tahun 2021. Dengan semakin meningkatnya jumlah koperasi, diharapkan dapat menjadi media untuk menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan terlebih ketika terjadi permasalahan perekonomian nasional maupun global.

O. Perizinan dan Penanaman Modal

Bidang perizinan dan penanaman modal memiliki efek yang cukup luas bagi daerah, mulai dari efek kondisi fiskal daerah, efek lapangan kerja, dan lainnya. Melalui

Tahun 2022 jumlah UMKM yang mendapat bantuan menurun hanya sebanyak 5.400 UMKM. Melalui bantuan permodalan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kelangsungan usaha UMKM.

Gambar 2. 55 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2018 - 2022



Sumber: Dinas KUKM Perindag Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

penanaman modal, kondisi fiskal daerah dapat meningkat melalui pajak atau retribusi yang menjadi hak dan wewenang daerah, begitu pula melalui penanaman modal dapat membuka

lapangan kerja untuk masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan di daerah.

Gambar 2. 56 Daya Serap Tenaga Kerja Pada Proyek PMDN dan PMA

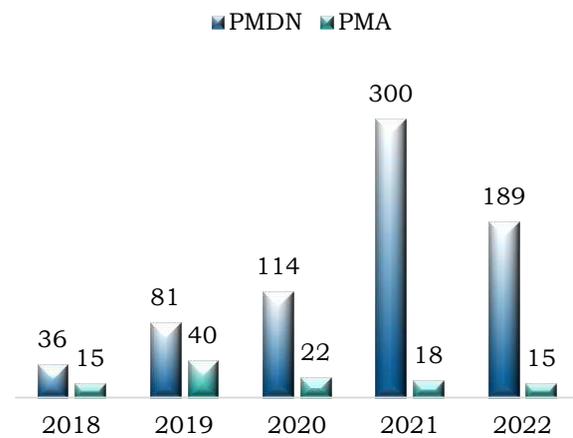
Tahun 2018 – 2022



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Paser Utara, 2022

Melalui data daya serap tenaga kerja pada proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) akan memberikan gambaran terkait keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek PMDN dan PMA. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal pada pelaksanaan proyek PMDN cukup dominan. Pada tahun 2019, tenaga kerja lokal yang terlibat dalam pengerjaan proyek PMDN sebanyak 2.647 tenaga kerja. Jumlah keterlibatan ini merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Namun sejak tahun 2020 hingga 2021 keterlibatan tenaga kerja menurun, dimana pada tahun 2020 sebanyak 850 tenaga kerja dan tahun 2021 sebanyak 171 tenaga kerja. Pada tahun 2022 seiring dengan berjalannya proyek pembangunan IKN, tenaga kerja lokal terserap lebih banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya sebanyak 697 tenaga kerja (sampai dengan Triwulan III Tahun 2022). Daya serap tenaga kerja lokal pada pengerjaan proyek PMA cenderung lebih kecil dibanding proyek PMDN. Serapan tenaga kerja lokal pada proyek PMA tertinggi ada pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.399 tenaga kerja. Namun sejak tahun 2019 – 2022 serapan tenaga kerja lokal pada proyek PMA tidak mencapai 100 orang. Serapan ini menandakan bahwa dalam pengerjaan proyek PMA masih didominasi oleh tenaga kerja asing. Serapan tenaga kerja yang masih didominasi tenaga kerja asing mengindikasikan bahwa spesifikasi tenaga kerja lokal belum mampu bersaing sepenuhnya dengan tenaga kerja asing. Perlu peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk dapat terserap lebih banyak dibandingkan tenaga kerja asing pada pelaksanaan proyek – proyek penanaman modal yang ada di Kabupaten Paser Utara.

Gambar 2. 57 Jumlah Proyek PMDN dan PMA Tahun 2018 – 2022



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Selama periode tahun 2018 – 2022, sejumlah proyek investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh investasi dalam negeri (PMDN). Selama kurun waktu 2018 – 2021 juga jumlah proyek PMDN terus meningkat hingga mencapai 300 proyek PMDN pada tahun 2021. Peningkatan jumlah proyek PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2021, dimana jumlah proyek meningkat 186 proyek dibanding tahun 2020.

Jika dibandingkan antara jumlah serapan tenaga kerja lokal dengan peningkatan jumlah proyek PMDN, jumlah serapan tenaga kerja lokal tidak seimbang dengan peningkatan jumlah proyek PMDN. Pada tahun 2018, dari total 36 proyek PMDN hanya menyerap 83 tenaga kerja lokal. Pada tahun 2019, serapan tenaga kerja lokal melonjak tinggi yaitu sebesar 2.647 tenaga kerja dari 81 proyek PMDN. Pada tahun 2020, serapan tenaga kerja kembali menurun yaitu sebesar 850 tenaga kerja dari 141 proyek PMDN. Berbanding terbalik pada tahun 2021, ketika jumlah proyek PMDN berada pada kondisi tertinggi serapan tenaga kerja lokal justru menurun signifikan dengan hanya menyerap 171 tenaga kerja lokal dari 300 proyek PMDN. Pada tahun 2022, jumlah proyek PMDN menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 6 proyek PMDN namun serapan tenaga kerja meningkat menjadi sebanyak 697 tenaga kerja. Pada proyek PMA juga tidak mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja lokal, dimana ini dibuktikan pada tahun 2022 dari total 15 proyek PMA hanya menyerap 8 tenaga kerja lokal. Serapan tertinggi adalah pada tahun 2018, dimana dari total 15 proyek PMDN mampu menyerap 1.399 tenaga kerja lokal. Diperlukan regulasi terkait proyek investasi yang wajib untuk menyerap tenaga kerja lokal, namun regulasi ini perlu diimbangi dengan peningkatan daya saing angkatan kerja Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga proyek investasi dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal.

2.3.3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan dalam menjalankan roda pemerintahan bukan berarti Pemerintah tidak perlu hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Urusan pilihan pemerintahan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dapat dikembangkan. Dengan menyelenggarakan urusan pilihan pemerintahan diharapkan mampu memperluas potensi perekonomian daerah.

A. Pertanian

Salah satu sektor unggulan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang sangat potensial untuk dikembangkan yaitu sektor pertanian. Hingga saat ini, sektor pertanian yang menjadi komoditas unggulan adalah komoditas padi. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara juga masih sangat bergantung pada padi untuk menjadi bahan pangan utama.

Tabel 2. 45 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2018 – 2022

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2018	11.084	38.039	3,43
2019	13.138	41.622	3,17
2020	13.712	46.497	3,39
2021	13.820	42.886	3,10
2022	15.616,74	48.897	3,13

Sumber: BPS, 2022

Luas panen tanaman pangan komoditas padi terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 – 2022. Pada tahun 2019, luas panen komoditas padi mencapai 13.138 Ha dan pada tahun 2022 berkembang menjadi 15.616,74 Ha. Tren peningkatan luas panen yang terjadi selama 4 tahun terakhir, berbanding terbalik dengan jumlah produksi tanaman padi pada tahun 2021. Jumlah produksi tanaman padi pada tahun 2021 sebanyak 42.886 ton, dimana jumlah produksi ini terbilang menurun jika dibandingkan dengan produksi tanaman padi tahun 2020 yang mencapai 46.497 ton atau menurun cukup signifikan sebanyak kurang lebih 4.000 ton. Penurunan jumlah produksi tanaman padi ini sangat mempengaruhi capaian produktivitasnya, dimana produktivitas tanaman padi untuk tahun 2021 sebesar 3,10 ton/Ha. Nilai produktivitas tersebut menurun sebesar 0,29 ton/Ha dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 3,39 ton/Ha, akan tetapi pada tahun 2022 luas panen komoditas padi ini kembali mengalami peningkatan sebesar 1.796,74 dari tahun 2021, begitu juga dengan produksi dan produktivitasnya. Walaupun demikian masih perlu adanya perbaikan kondisi di sektor tanaman pangan, agar pada tahun selanjutnya mampu untuk kembali meningkatkan produksi padi mengingat Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lumbung pangan tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan peningkatan jumlah produksi dan produktivitas tanaman padi, diperlukan peran berupa pendampingan dari Penyuluh Pertanian yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara kepada para petani di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 46 Jumlah Produksi Komoditas Palawija Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ubi Jalar	2.430	3.051	3.347	1.913	2.044
2	Kacang Tanah	15,9	7,5	12	16	3
3	Jagung	3.649,4	1.705	1.465	1.180	800
4	Ubi Kayu	2.028,6	1.563	2.732	3.034	2.341

Sumber: BPS, 2023

Selain komoditas padi, Kabupaten Penajam Paser Utara juga termasuk daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang memproduksi hasil pertanian dari komoditas palawija. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa produksi komoditas ubi kayu, ubi jalar dan jagung selalu berada pada kondisi ribuan ton per tahun. Ketiga komoditas tanaman palawija tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan agar dapat menjadi komoditas unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dalam rangka mendukung ketersediaan pangan IKN Nusantara. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan pupuk organik dan anorganik secara seimbang untuk menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah yang mampu menunjang perkembangan dan hasil panen dari komoditas palawija di atas. Meskipun selalu berada pada kondisi panen ribuan ton per tahun, komoditas kacang tanah dan jagung mengalami penurunan jumlah produksi pada tahun 2022. Penurunan pada kedua komoditas tersebut disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, sehingga petani kesulitan dalam proses penanaman kacang dan jagung di lahan yang cukup berair. Hal ini tentunya perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pertanian untuk dapat melakukan pendampingan kepada para petani untuk dapat melakukan optimalisasi hasil panen pada tahun – tahun berikutnya, sehingga harapan untuk dapat menjadi bagian dari pendukung ketersediaan pangan bagi IKN ke depannya dapat terwujud.

Sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu potensi perkebunan yang dapat menjadi daya tarik minat investasi selain sektor pertambangan. Kabupaten Penajam Paser Utara didukung dengan lahan yang sangat cocok untuk ditanami kelapa sawit, dimana hal ini dibuktikan luasnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara baik milik perorangan maupun perusahaan.

Tabel 2. 47 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2018 – 2022

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi (Ton)						
1	Kelapa Sawit	430,810	936,665	851,545	376,958	510,071.54
2	Kelapa	1,843	2,023	2,290	1,661	2,048.84
3	Karet	1,743	3,194	4,267	1,728	3,021.18
4	Kopi	6	4	4	1	2.25
5	Kakao	3	3	4	2	1.8
Luas Lahan (Ha)						
1	Kelapa Sawit	49,882	49,689	49,689	47,202	46,199.59
2	Kelapa	4,745	4,300	4,300	4,283	4,300.94
3	Karet	10,304	6,671	6,671	6,753	6,670.80
4	Kopi	16	15	14	14	13.76
5	Kakao	13	10	10	11	10.85
Produktivitas (Ton/Ha)						
1	Kelapa Sawit	8.64	18.85	17.14	7.99	11.04

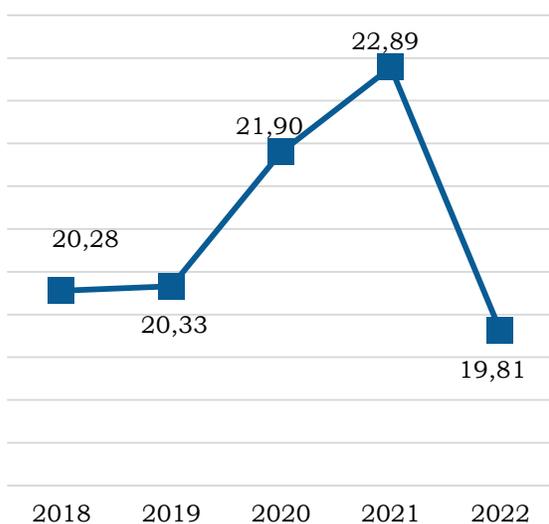
No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
2	Kelapa	0.39	0.47	0.53	0.39	0.47
3	Karet	0.17	0.48	0.64	0.26	0.45
4	Kopi	0.38	0.27	0.29	0.07	0.16
5	Kakao	0.23	0.30	0.40	0.18	0.16

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 komoditas utama di sektor perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari total 5 komoditas tersebut, kelapa sawit merupakan komoditas dengan total produksi terbesar selama 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan luas lahan perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh lahan perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan kelapa sawit milik masyarakat maupun milik perusahaan. Dominannya lahan perkebunan kelapa sawit ini, selain disebabkan kondisi tanah yang mendukung juga dirangsang oleh adanya perusahaan pengolahan kelapa sawit menjadi *Cruide Palm Oil* (CPO) yang terletak di Kecamatan Waru.

Secara umum, produksi 5 komoditas utama di atas mengalami penurunan total produksi pada tahun 2021, dan kembali sedikit mengalami peningkatan produksi ditahun 2022, Penurunan total produksi yang cukup ekstrim terjadi pada komoditas kelapa sawit, dimana penurunan produksi mencapai kurang lebih 500.000 ton. Selain komoditas kelapa sawit, komoditas lain yang mengalami penurunan produksi cukup tinggi adalah komoditas karet, dimana penurunannya mencapai kurang lebih 2.500 ton pada tahun 2021. Diharapkan pada tahun – tahun selanjutnya, komoditas – komoditas perkebunan dapat kembali meningkat sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani komoditas perkebunan di lingkungan masyarakat.

Gambar 2. 58 Kontribusi Sektor
Pertanian Terhadap PDRB
Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS, 2023

Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB target 12,50% dan realisasi 19,81%. Sedangkan tahun 2021 sebesar 22,89% dibanding target berhasil tapi dibandingkan realisasi tahun kemarin menurun. Ini disebabkan di sektor pertanian selain luas lahan begitu juga produksi menurun dibanding tahun 2021, dimana luas tahun 2021 sebesar 53.208 Ha menurun 3.311 Ha menjadi 48.897 Ha Tahun 2022 sedangkan produksi tahun 2021 sebesar 18.272 Ton menurun 2.655 ton menjadi 15.617 ton tahun 2022. Sedangkan Sektor

Perikanan mengalami peningkatan perikanan tangkap maupun perikanan produksi dibanding tahun 2021 baik budidaya.

Gambar 2. 59 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupsten Penajam Paser Utara, 2023

Laju pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara sempat mengalami kontraksi cukup ekstrim pada tahun 2020, dimana laju pertumbuhan sektor pertanian berada pada -2,5% setelah pada tahun 2019 berada pada puncak pertumbuhan selama 5 tahun terakhir yaitu 3,14%. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan sektor pertanian mulai membaik dengan berada pada 0,09%, kemudian kembali menurun -0,13% pada tahun 2022. Mengingat pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diharapkan laju pertumbuhan sektor pertanian dapat kembali pulih pada tahun – tahun berikutnya seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian global akibat dari Pandemi Covid-19. Untuk dapat terus konsisten dalam peningkatan laju pertumbuhan, diperlukan peran serta yang aktif dari *stakeholder* dibidang pertanian yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sektor pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak dapat dipisahkan pula dengan sektor peternakan. Sektor peternakan di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh peternakan ayam ras, baik pedaging maupun petelur. Selain ayam, Kabupaten Penajam Paser Utara juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui komoditas sapi dan kambing. Peningkatan kuantitas dan kualitas peternakan terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal.

Tabel 2. 48 Jumlah Populasi Ternak Tahun 2018 – 2022

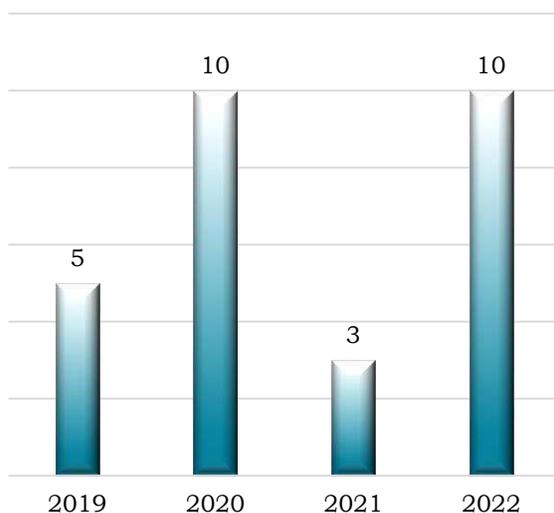
No	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerbau	N/A	549	488	468	402
2	Sapi Potong	17.479	17.191	16.454	16.481	15.303
3	Sapi Perah	N/A	10	9	8	2
4	Babi	N/A	615	425	647	217
5	Kambing	4.844	4.864	4.951	5.041	4.945

No	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
6	Ayam Buras	409,252	420.308	434.598	418.036	456.622
7	Ayam Ras Pedaging	N/A	1.902.561	1.978.187	1.978.187	1.815.681
8	Ayam Ras Petelur	409,252	75.117	67.071	67.071	46.757
9	Itik	20,936	20.195	20.026	18.582	20.226

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan data di atas, komoditas ternak ayam masih menjadi komoditas ternak yang mendominasi populasi ternak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Populasi ayam ras pedaging masih mendominasi dengan 1,97 juta ekor ternak. Total komoditas tersebut tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Populasi ternak ayam lainnya yang mendominasi adalah ayam buras dengan total 456.622 ekor, meskipun total populasi ini meningkat dibandingkan tahun 2021, total tersebut masih menjadi total populasi terbanyak kedua setelah ayam ras pedaging. Terdapat beberapa jenis ternak yang mengalami penurunan populasi pada tahun 2022 selain ayam buras, seperti kerbau, sapi perah dan itik. Diperlukan upaya peningkatan populasi guna mendukung kebutuhan pangan daging hewan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gambar 2. 60 Jumlah *Miniranch* Aktif Tahun 2019 – 2022



Sumber: Dinas Pertanian, 2022

Untuk mendukung dan mencapai upaya peningkatan populasi dan kualitas hewan ternah khususnya sapi, diperlukan suatu program yang dapat dikembangkan di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu pengembangan peternakan berbasis Mini Ranch. Mini Ranch adalah sebuah model pengelolaan budidaya sapi pedaging/potong yang dilakukan di lahan pengembalaan yang telah ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya melalui berbagai perlakuan ilmiah.

Pola ini mereduksi biaya produksi sehingga produknya memiliki keunggulan komperatif. Sapi-sapi ternak bisa dilepas bebas di kawasan eks lahan tambang dan perkebunan. Pada tahun 2022, terdapat 10 unit mini ranch yang masih aktif di Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui mini ranch, diharapkan pola penggembalaan sapi dapat lebih berkualitas karena sapi tidak selalu di kurung di dalam kendang namun dapat dilepas untuk pada sebuah hamparan tanah untuk mencari makannya sendiri. Sehingga sapi ternak dapat merasa berada dalam habitatnya.

B. Perikanan

Jenis produksi perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara ada 2 yaitu Perikanan laut dan perikanan darat. Sebagai daerah Ibukota Baru Negara Republik Indonesia, kebutuhan akan pangan bagi masyarakat yang bersumber dari ikan sangatlah besar. Terlebih Pemerintah Pusat sedang menggalakkan program konsumsi ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat agar kebutuhan protein dapat terpenuhi. Oleh karenanya dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung nelayan seperti modernisasi kapal, pusat pelelangan ikan, penyimpanan ikan (*cold storage*). Selain itu mengoptimalkan kelompok nelayan dalam pengolahan ikan baik ikan asin, rumput laut, dan keripik ikan. Cukup banyak sumber daya potensial ikan yang dapat dikelola karena Kabupaten Penajam Paser Utara berada digaris pantai yang menghadap Selat Makassar.

Tabel 2. 49 Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2020 – 2022

No	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)		
		2020	2021	2022
Perikanan Tangkap Laut				
1	Cakalang	104	161	184
2	Tongkol	399	490	581
3	Tuna	126	238	354
4	Udang	601	806	668
Perikanan Tangkap Perikanan Umum Daratan				
1	Udang	34	25	23
2	Ikan	268	211	133

Sumber: BPS, 2023

Komoditas perikanan tangkap di Kabupaten Penajam Paser Utara berbeda disetiap sektor. Pada sektor perikanan tangkap laut terdapat 3 komoditas utama, yaitu ikan cakalang, tongkol, tuna dan udang. Dari keempat komoditas utama dalam sektor perikanan tangkap laut, hasil tangkapan terbesar adalah komoditas udang. Pada tahun 2022 hasil tangkapan udang laut mencapai 668 ton, dimana hasil tangkapan ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya 601 ton hasil tangkapan. Umumnya seluruh komoditas perikanan tangkap laut mengalami peningkatan hasil tangkapan pada tahun 2022, hanya hasil tangkapan ikan tongkol yang mengalami penurunan hasil tangkapan dari 806 ton pada tahun 2021 menjadi 668 ton pada tahun 2022.

Untuk komoditas perikanan tangkap daratan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara hanya dibagi menjadi 2 komoditas utama, yaitu komoditas udang dan

ikan. . Berbeda dengan hasil tangkapan perikanan laut, hasil tangkapan perikanan umum daratan seluruhnya mengalami penurunan hasil tangkapan. Komoditas udang mengalami penurunan hasil tangkapan dari 25 ton pada tahun 2021 menjadi 22 ton pada tahun 2022 atau mengalami penurunan 3 ton. Hal serupa juga terjadi pada komoditas ikan pada perikanan tangkap umum daratan. Komoditas ikan juga mengalami penurunan hasil tangkapan pada tahun 2022, dimana hasil tangkapan komoditas ikan sebanyak 133 ton dari tahun sebelumnya sebanyak 211 ton atau menurun 78 ton. Tentunya hasil tangkapan dari berbagai komoditas pada masing – masing sektor perikanan perlu ditingkatkan dengan dukungan dari berbagai *stakeholder*. Peningkatan hasil tangkapan dari setiap komoditas selain diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan akan ikan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

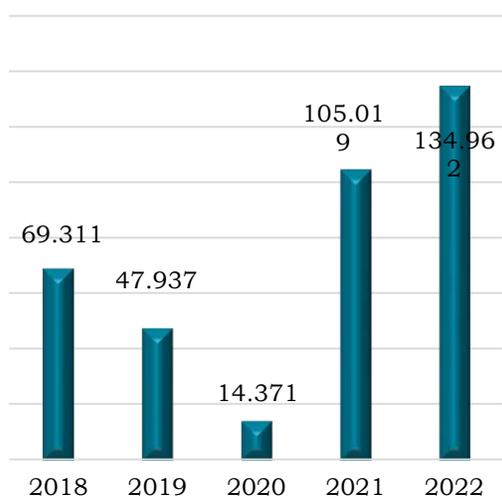
Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami perkembangan yang sangat baik. Pada tahun 2022 realisasi jumlah produksi perikanan budidaya jauh melampaui target yang diproyeksikan di tahun 2022. Dimana realisasi jumlah produksi perikanan budidaya yaitu sebanyak 23.809 ton yang mana di tahun 2022 hanya ditargetkan 6.600 ton. Pada tahun 2019 tidak ada data realisasi indikator kinerja. Dari tahun 2020-2021 realisasi mengalami penurunan jumlah produksi perikanan budidaya. Penurunan produksi ini terjadi akibat situasi pandemi covid-19 yang membawa dampak bagi kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dan berbagai kegiatan menjadi dibatasi oleh pemerintah. Akibatnya jumlah produksi perikanan mengimbangi kebutuhan konsumsi masyarakat yang mengalami penurunan. Akan tetapi, dampak tersebut tidak berlanjut di tahun 2022 dimana jumlah produksi perikanan budidaya mengalami perkembangan yang sangat baik jumlah produksi perikanan menjadi meningkat. Keadaan ini terjadi dikarenakan situasi pandemi yang mulai berkurang di tahun 2022 sehingga terjadi kembali keadaan yang normal. Konsumsi kebutuhan terhadap ikan juga mengalami peningkatan sejak ditahun 2022. Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Penajam Paser Utara juga menjadi perhatian oleh pemerintah untuk terus dikembangkan baik dari dukungan pelatihan dan bantuan peralatan yang terus di fasilitasi oleh pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan memperhatikan nilai realisasi jumlah produksi perikanan budidaya di tahun 2022 yang tercapai melampaui target.

C. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan melalui pelayanan pemerintah urusan pilihan. Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan dan berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Letak Kabupaten Penajam Paser Utara yang cukup strategis karena menjadi akses penghubung antara

Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan melalui jalur darat, sehingga berpotensi untuk menyediakan destinasi wisata. Potensi pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih kepada wisata alam dan bahari. Garis Pantai yang membentang sepanjang Kabupaten Penajam Paser Utara berpeluang untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Saat ini telah ada beberapa wisata pantai yang ramai dikunjungi wisatawan lokal, seperti Pantai Tanjung Jumalai di Kelurahan Tanjung Tengah, Pantai Istana Amal di Kelurahan Penajam dan Pantai Sipakario di Kelurahan Nipah – Nipah.

Gambar 2. 61 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 – 2022 (Orang)



Sumber: Disbudpar Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun 2021, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat pesat hingga mencapai 105.019 orang wisatawan. Kondisi ini selain disebabkan oleh mulai adanya pelonggaran kegiatan masyarakat, juga tidak terlepas dari ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai IKN Nusantara yang merangsang minat masyarakat luar daerah untuk berkunjung dan melihat lokasi pemindahan IKN. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara Kembali mengalami peningkatan dengan jumlah hanya sebesar 134.692 orang. Melihat tingginya minat wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara, menandakan bahwa potensi destinasi wisata Kabupaten Penajam Paser Utara sangat mungkin untuk dikembangkan. Jika wisata Penajam Paser Utara berkembang, maka potensi pertumbuhan perekonomian masyarakat tidak lagi bertumpu pada pertambangan dan pertanian saja namun juga dapat berasal dari pariwisata.

tergolong tinggi, dimana selama kurun waktu 2018 – 2021 selalu di atas 10.000 pengunjung. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Penajam Paser Utara menjadi yang terendah dalam 4 tahu terakhir yaitu sebanyak 14.371 orang wisatawan yang berkunjung. Penurunan jumlah wisatawan ini tidak lepas dari pembatasan kegiatan masyarakat untuk bepergian, berwisata dan di tutupnya beberapa objek wisata dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 yang pada tahun 2020 sedang berada pada puncak pandemi.

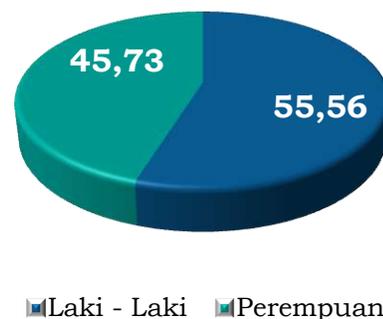
D. Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2022 sebanyak 3.562 Orang ada kenaikan 131 orang dibanding pada tahun 2021 sebanyak 3,431 orang. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci PNS berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan dan tingkat Pendidikan.

2.3.3.1 Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

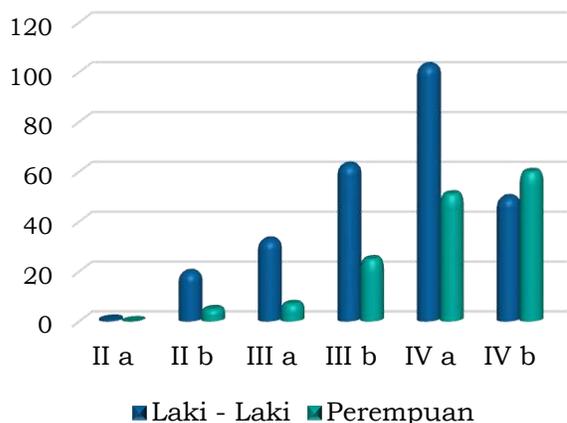
Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup Proporsional dan berimbang. Pada tahun 2022, dari 3.562 PNS, sebanyak 45,73 persen berjenis kelamin laki-laki dan 55,56 persen berjenis kelamin perempuan.

Gambar 2. 62 Presentase Jumlah PNS Laki – Laki dan Perempuan



Keseimbangan proporsi PNS laki-laki dan perempuan masih terus ditingkatkan untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam jajaran birokrasi, terutama dilihat dari aspek kualitas dalam kaitannya dengan kedudukan PNS perempuan sebagai pemimpin di perangkat daerah. Jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan Eselon IIa sampai dengan Eselon IVa masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan PNS laki-laki sebagaimana Gambar 2.63.

Gambar 2. 63 Jumlah PNS Menurut Eselon



Berdasarkan Gambar 2.63, pegawai yang menempati jabatan eselon/struktural strategis di lingkungan masih didominasi oleh PNS laki-laki, dimana untuk jabatan yang berperan besar dalam proses pengambilan keputusan seperti Kepala Dinas/Badan/Biro dijabat oleh 5 orang PNS perempuan sedangkan sisanya dijabat oleh PNS laki-laki sebanyak 21 orang.

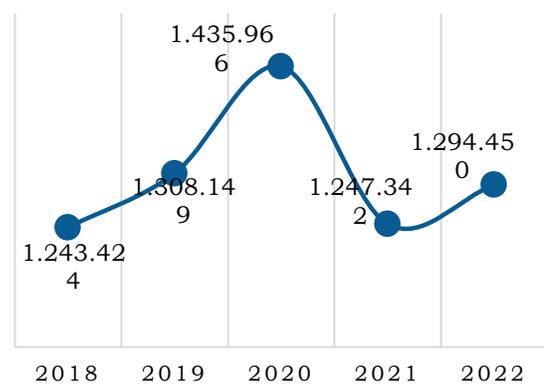
Sumber : BKPSDM, Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Namun sampai akhir tahun 2022 ada 7 badan/dinas yang kekosongan jabatan pimpinan yakni; Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Kekosongan ini karena mutasi, Batas Usia Pensiun (BUP). Pada Tahun 2022 Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak ada kegiatan uji kompetensi dan hanya fokus open bidding khusus untuk Sekretariat Daerah.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran rumah tangga per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dalam perhitungannya, pengeluaran rumah tangga per kapita dilakukan dengan memperhatikan pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran non makanan. Pengeluaran untuk makanan dihitung berdasarkan pengeluaran per minggu, sedangkan pengeluaran non makanan dihitung berdasarkan pengeluaran per bulan.



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

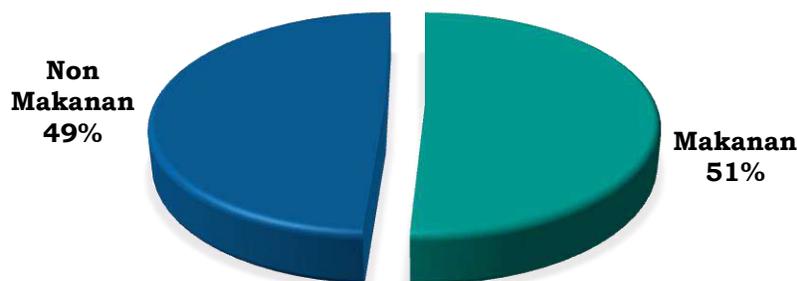
Gambar 2. 64 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan

Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Rata - rata pengeluaran per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 adalah sebesar kurang lebih 1.294 juta rupiah per bulan. Berdasarkan gambar grafik di atas, terlihat bahwa rata - rata pengeluaran per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022, rata - rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp1.294.540,- sedangkan pada tahun 2021

mencapai Rp1.247.342,-. Pengeluaran meningkat sebanyak Rp47.198,- per kapita pada tahun 2022 ini dibandingkan tahun 2021.

Gambar 2. 65 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Sebulan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Dalam komposisi pengeluaran per kapita tahun 2021 sebesar Rp1.294.540,-, terdapat pengeluaran yang digunakan untuk makanan dan non makanan. Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk makanan yaitu sebesar 51% (Rp658.444,-) sedangkan 49% (Rp636.096,-) lainnya untuk pengeluaran non makanan. Persentase ini menandakan hal baik, bahwa dari total pengeluaran yang dilakukan masyarakat sebanyak >50% pengeluaran digunakan untuk membeli makanan. Artinya dari total pengeluaran per bulan dapat memenuhi kebutuhan makanan dan masih dapat juga untuk memenuhi kebutuhan tambahan berupa non makanan.

Perekonomian makro Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum masih didominasi oleh sektor-sektor usaha primer, seperti pertambangan & penggalian, dan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kelompok sektor industri dan usaha barang & jasa juga mendominasi dalam proporsi yang lebih kecil dalam struktur perekonomian wilayah walaupun setiap tahun mengalami tren pertumbuhan yang positif.

Dilihat dari distribusi nilai sektor usaha penyusun dalam PDRB, menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi dari beberapa kelompok sektor usaha mengalami peningkatan. Tahun 2022 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 13.187 Trilyun Rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 10.087 Trilyun Rupiah. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi dan pengaruh yang relative besar dalam pembentukan nilai PDRB. Terjadinya selisih antara kedua nilai PDRB ADHB dengan pertambangan migas dan tanpa pertambangan migas mengindikasikan dominasi besaran kontribusi ekonomi makro dari sektor pertambangan migas. Kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2. 50 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

Kategori/Lapangan Usaha	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1800297.07	1855123.52	1982299.39	2308774.15	2.559.860.000
B. Pertambangan dan Penggalian	2733279.04	2680287.67	2290696.10	2371194.28	2.982.880.000
C. Industri Pengolahan	1410829.33	1413227.75	1467386.85	1635316.88	1.768.700.000
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6125.03	6585.04	7489.72	8113.63	8.760.000
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7882.30	8333.01	8529.68	8950.59	10.030.000
F. Konstruksi	939693.95	1038607.44	1131471.77	1440618.95	3.179.540.000
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	783392.00	840751.52	867188.09	913825.73	1.117.960.000
H. Transportasi dan Pergudangan	136738.08	146916.24	149956.25	164397.43	198.460.000
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49829.45	52125.64	49994.56	51463.67	56.920.000
J. Informasi dan Komunikasi	107847.83	121139.49	131085.78	141936.97	152.910.000
K. Jasa Keuangan	68364.99	73837.89	77731.84	82974.15	95.180.000
L. Real Estate	104371.10	110339.02	116334.12	123505.99	129.220.000
M,N. Jasa Perusahaan	1632.24	1689.73	1643.54	1717.93	1.880.000
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	345634.57	363769.65	332929.62	352015.31	398.680.000
P. Jasa Pendidikan	294917.92	319707.16	347369.16	383557.06	415.580.000
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2554.15	2723.50	3291.45	4038.43	4.460000
R,S,T,U. Jasa Lainnya	84445.04	89777.81	86733.38	94917.26	106.380.000
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8877834.10	9124942.07	9052131.30	10087318.41	13.187.390.000

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Pada tahun 2022 struktur ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh hasil produktivitas sektor konstruksi. Sejak tahun 2019 hingga 2021 sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dengan menyumbang 29,37%, 25,31%, dan 23.51 terhadap struktur ekonomi. Ini disebabkan harga ekspor komoditas terus menurun, untuk galian masih banyak tambang kecil yang belum memiliki perizinan karena rumitnya pengurusan. Sektor pertambangan dan penggalian terhadap struktur ekonomi secara makro dari sektor ini cukup besar, dan karena peranannya maka sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi secara umum di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 51 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

Kategori/Lapangan Usaha	[Seri 2010] Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.28	20.33	21.90	22.89	19,41
B. Pertambangan dan Penggalian	30.79	29.37	25.31	23.51	22,62
C. Industri Pengolahan	15.89	15.49	16.21	16.21	13,41
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.08	0.08	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.09	0.09	0.09	0,08
F. Konstruksi	10.58	11.38	12.50	14.28	24,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.82	9.21	9.58	9.06	8,48
H. Transportasi dan Pergudangan	1.54	1.61	1.66	1.63	1,5
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.56	0.57	0.55	0.51	0,43
J. Informasi dan Komunikasi	1.21	1.33	1.45	1.41	1,16
K. Jasa Keuangan	0.77	0.81	0.86	0.82	0,72
L. Real Estate	1.18	1.21	1.29	1.22	0,98
M,N. Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02	0.02	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.89	3.99	3.68	3.49	3,02
P. Jasa Pendidikan	3.32	3.50	3.84	3.80	3,15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.03	0.03	0.04	0.04	0,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.95	0.98	0.96	0.94	0,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Sementara itu laju pertumbuhan sektor komponen-komponen penyusun nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 52 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

Kategori/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.69	3.14	-2.08	0.44	-0,13
B. Pertambangan dan Penggalian	-0.88	0.04	-5.25	-14.09	3,29
C. Industri Pengolahan	-2.55	2.31	-7.01	-1.68	0,28
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-1.52	5.78	13.52	7.10	4,48
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.37	3.91	2.43	4.26	7,35
F. Konstruksi	8.06	6.98	7.10	22.64	89,82
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.70	4.27	1.51	2.56	5,82
H. Transportasi dan Pergudangan	4.49	4.04	-1.31	2.74	7,83

Kategori/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.85	3.92	-4.42	2.57	8,02
J. Informasi dan Komunikasi	7.23	9.08	10.09	7.72	6,13
K. Jasa Keuangan	3.69	6.29	5.65	1.66	5,79
L. Real Estate	6.45	3.62	2.17	-0.93	1,52
M,N. Jasa Perusahaan	2.61	1.82	-3.37	1.32	4,63
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.18	4.06	-6.26	-3.56	7,11
P. Jasa Pendidikan	4.19	2.56	2.27	2.96	3,28
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.11	3.59	19.25	18.56	4,3
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5.94	4.22	-3.47	0.25	6,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.28	2.61	-2.34	-1.69	14,49

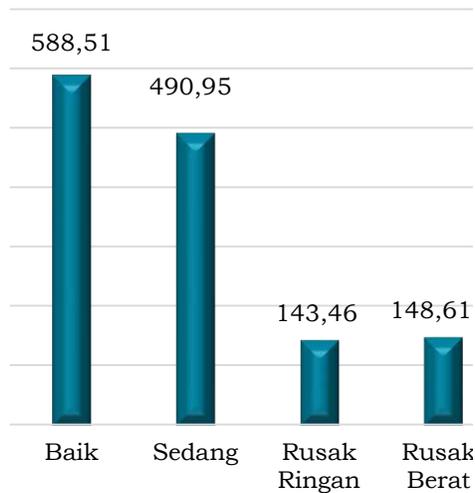
Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Dari data tabel di atas dapat diketahui secara umum, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami level yang fluktuatif setiap tahun. Pada tahun 2018 menjadi 1,28%. Tahun 2019 kembali meningkat pada level 2,61% dan kembali turun ke level -2,34% pada tahun 2020 yang sebagian besar disebabkan Pandemi Covid-19. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 berada pada level -1,69%. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 14,49. Hal ini tidak lepas dari meningkat dan menurunnya laju pertumbuhan dari masing-masing sektor, khususnya sektor yang menjadi penyumbang PDRB tertinggi, seperti sektor konstruksi.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Berdasarkan RTRW Nasional, Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Kawasan Andalan dari Kawasan Bontang – Samarinda – Tenggarong, Balikpapan - Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam), dengan sektor unggulan berupa industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pariwisata. Dengan masuknya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kawasan Andalan, maka Sistem transportasi yang lancar dan nyaman adalah yang terpenting demi memperlancar arus penumpang, barang dan jasa. Sistem transportasi Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik yang cukup kompleks dengan baik melalui darat maupun laut/perairan. Untuk transportasi udara, saat ini sistem angkutan dan pergerakannya mengikuti pengembangan sarana prasarana yang ada di Kota Balikpapan.

Gambar 2. 66 Kondisi dan Panjang Jalan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi darat dan memiliki peran penting dalam mobilitas antar 54 desa/kelurahan, 4 kecamatan, antar 3 Kabupaten serta Kota bahkan lintas propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Ruas jalan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi dalam 3 jenis klasifikasi ruas jalan, yaitu jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Total panjang ruas jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 1.388.80 Km yang terdiri dari 1.241.30 Km jalan kabupaten, 89 Km jalan provinsi dan 58.50 Km jalan

Rel Kereta Api juga akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat 2 jalur kereta api yakni pertama yang dibangun pihak swasta yaitu kereta api borneo (dibangun oleh *Russian railways*), yang kedua dibangun oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perkeretapihan. Kereta api yang digunakan untuk barang dan penumpang. Untuk jalur kereta api borneo melalui kawasan industri Buluminung menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Sedangkan jalur kereta api yang dibangun oleh kementerian perhubungan dari Kabupaten Kutai Timur, melalui Penajam menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan kota Balikpapan dipisahkan teluk. Pembangunan jembatan Pulau Balang, rencana pembangunan jembatan Nipah-

nasional. Infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara terbilang baik, hal ini dibuktikan dengan sebagian besar (41.09%) ruas jalan yang ada dalam kondisi baik (mantap) dan hanya sebesar 24.30% ruas jalan dalam kondisi rusak yang terdiri dari 16.83% kondisi rusak ringan dan 7.47% dalam kondisi rusak berat. Namun demikian tugas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memberikan pelayanan terbaik dalam bidang infrastruktur jalan masih cukup banyak, dimana masih terdapat 227.52 Km dan 102.80 Km ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Total ruas jalan rusak tersebut jauh lebih besar dibandingkan jalan rusak untuk klasifikasi jalan provinsi dan nasional. Pemerintahan di tingkat Desa juga memberikan andil dalam membuka aksesibilitas antar Desa, dalam hal ini UPT PU sebagai garda terdepan dalam mempercepat pelayanan infrastruktur di tingkat pedesaan/kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan.

Nipah – Melawai merupakan salah satu cara menghubungkan antar wilayah yang dipisahkan oleh teluk. Saat ini transportasi laut menuju dari dan ke Kota Balikpapan dilakukan dengan menaiki Fery, *Speed boat* dan perahu ketotok. Jumlah penumpang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penumpang yang melalui dermaga *speed* dan ketotok maka kebutuhan pelayanan penyeberangan sangat perlu ditingkatkan seiring kemajuan teknologi konstruksi guna memperpendek waktu tempuh berupa pembangunan jembatan penyeberangan antar kabupaten.

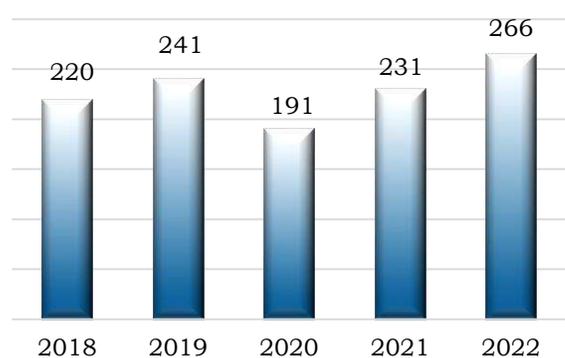
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Prinsip utama dalam pembangunan adalah membawa perubahan bagi daerah, khususnya kemajuan peradaban, peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Pembangunan dilakukan juga untuk dapat meningkatkan daya tarik investasi di daerah. Namun selain ketersediaan infrastruktur yang memadai, daya tarik investasi juga dipengaruhi oleh tingkat keamanan suatu daerah. Salah satu parameter dalam menilai tingkat keamanan daerah dapat ditinjau berdasarkan tindak kriminalitas yang terjadi di daerah berdasarkan hasil laporan – laporan masyarakat kepada pihak yang berwajib

Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022



Gambar 2. 67 Kasus Kriminalitas yang Dilaporkan di Kabupaten

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2023

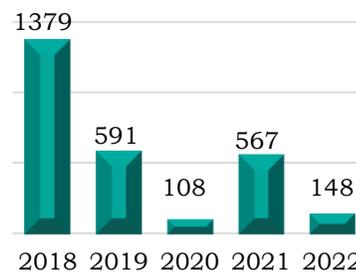
Kasus kriminalitas berdasarkan hasil laporan masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah kasus kriminalitas

Jika dilakukan perhitungan rata - rata, maka setiap 100.000 penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 148 penduduk yang rawan terkena tindak kejahatan kriminalitas pada tahun 2022. Total rata - rata tersebut menurun signifikan dibandingkan tahun 2021 567 penduduk yang rawan terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk.

Gambar 2. 68 Rata - Rata Penduduk Terkena Tindak Kejahatan Per

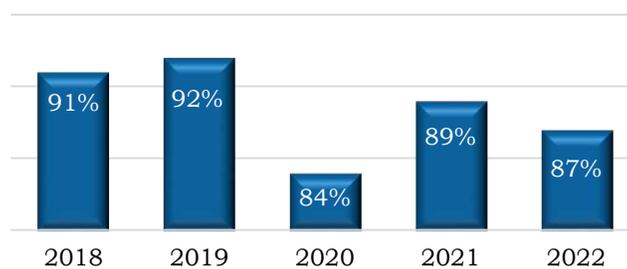
di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 231 laporan kejadian, sedangkan pada tahun 2022 kasus yang dilaporkan meningkat 35 kasus menjadi 266 kasus kriminalitas.

100.000 Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2022



Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2023

Gambar 2. 69 Persentase Penyelesaian Masalah Kriminalitas Terlapor di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2022



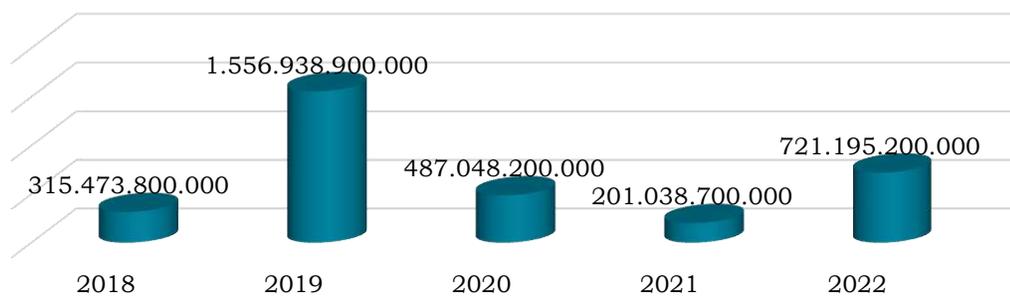
Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2023

Dari total 266 kasus kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaporkan, sebanyak 87% kasus atau sekitar 205 - 206 kasus telah diselesaikan. Capaian ini menjadi kabar cukup baik, karena jumlah kasus yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 menurun dari tahun 2021. Jumlah kasus yang terselesaikan ini tidak lepas dari peran serta pihak Kepolisian Resor Kabupaten Penajam Paser Utara yang terus berusaha memberikan pelayanan kamtibmas yang optimal kepada masyarakat. Diharapkan peningkatan ini terus konsisten pada tahun - tahun selanjutnya guna menciptakan kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Iklim Investasi Daerah

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah, maka perlu penciptaan iklim usaha berinvestasi yang sehat sebagai upaya untuk menarik investasi. Msalnya investasi dalam bentuk pembangunan inudstri daerah (hulu/hilir) diawali dengan pembangunan kluster industri dalam suatu wilayah terpusat, melalui pengembangan kawasan peruntukan industri seluas 5000 Ha di Kelurahan Buluminung. Untuk kemudahan investasi lainnya, dilakukan dengan pembangunan kelengkapan fasilitas infrastruktur serta kebijakan. Infrastruktur dimaksud diantaranya akses jalan, air baku untuk air bersih, dan energi listrik. Sedangkan kebijakan dilakukan untuk untuk memperbaiki iklim penanaman modal berupa pelayanan terpadu satu pintu yang sudah menerapkan *One Single Submission*.

Gambar 2. 70 Realisasi Investasi PMDN
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Realisasi investasi melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2022, realisasi investasi melalui PMDN meningkat dibandingkan tahun 2021.

Pasca Covid 19 terjadi kenaikan peningkatan realisasi investasi sebesar 520.156.500.000. Pada tahun 2024 diharapkan perekonomian regional, nasional dan internasional dapat kembali pulih sehingga dapat memicu peningkatan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara terlebih didukung dengan telah disahkannya Undang – Undang IKN di

sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gambar 2. 71 Realisasi Investasi PMA
Kabupaten Penajam Paer Utara Tahun 2019-2022 (US\$)



Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Seiring sejalan dengan realisasi investasi PMDN, realisasi investasi PMA juga mengalami penurunan realisasi. Pada tahun 2022, realisasi investasi PMA di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 8.304.600 US\$,-. pasca pandemic Covid -19 realisasi PMA mengalami peningkatan yang drastis dibandingkan tahun 2021 yang hanya 1.602.800 US\$. Diharapkan pada tahun 2024 dan berlangsungnya pembangunan IKN akan berdampak langsung pula pada kenaikan investasi PMA di Kabupaten Penajam Paser.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

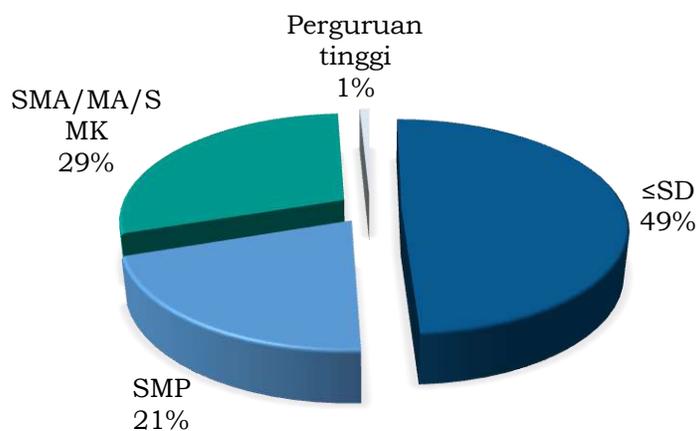
Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Gambar 2. 72 Rasio Lulusan SDM
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 (Persen)



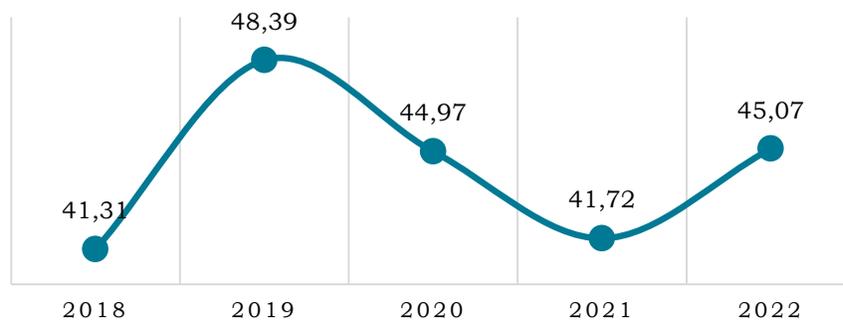
Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui gambaran kualitas SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari total jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagian besar hanya mengenyam pendidikan pada jenjang SD atau belum lulus SD sebanyak 49%. Masyarakat yang mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi sangat minim, dimana hanya 1% masyarakat Penajam Paser Utara yang menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Diploma, S1, dan S2. Dengan kondisi rasio lulusan SDM Kabupaten Penajam Paser Utara seperti pada diagram di atas, maka SDM Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diasumsikan untuk sulit bersaing dengan SDM dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih dapat melakukan peningkatan kapasitas SDM yang ada melalui berbagai kegiatan pelatihan, kursus atau sertifikasi bagi angkatan – angkatan kerja yang ada. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu melakukan terobosan – terobosan yang lebih inovatif lagi untuk mendorong anak – anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara ini untuk bersekolah dan menyelesaikan sekolahnya.

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Gambar 2. 73 Rasio Ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui rasio ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara secara *time series* tahun 2018 – 2022. Rasio ketergantungan pada tahun 2022 meningkat sekitar kurang lebih 4% dibanding tahun 2021 menjadi sebesar 45,07%. Rasio ketergantungan ini mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 – 2022 setelah mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2019. Penurunan rasio ketergantungan pada tahun 2022 ini menandakan hal negatif, karena menandakan bahwa masyarakat usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) yang menjadi tanggungan usia produktif (15 – 64 tahun) meningkat dan menandakan beban tanggungan dilingkungan masyarakat meningkat.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber – sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD beberapa tahun lalu.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang melalui analisis kinerja pelaksanaan realisasi anggaran daerah dan neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun terakhir.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sub bab berikut menguraikan mengenai pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.

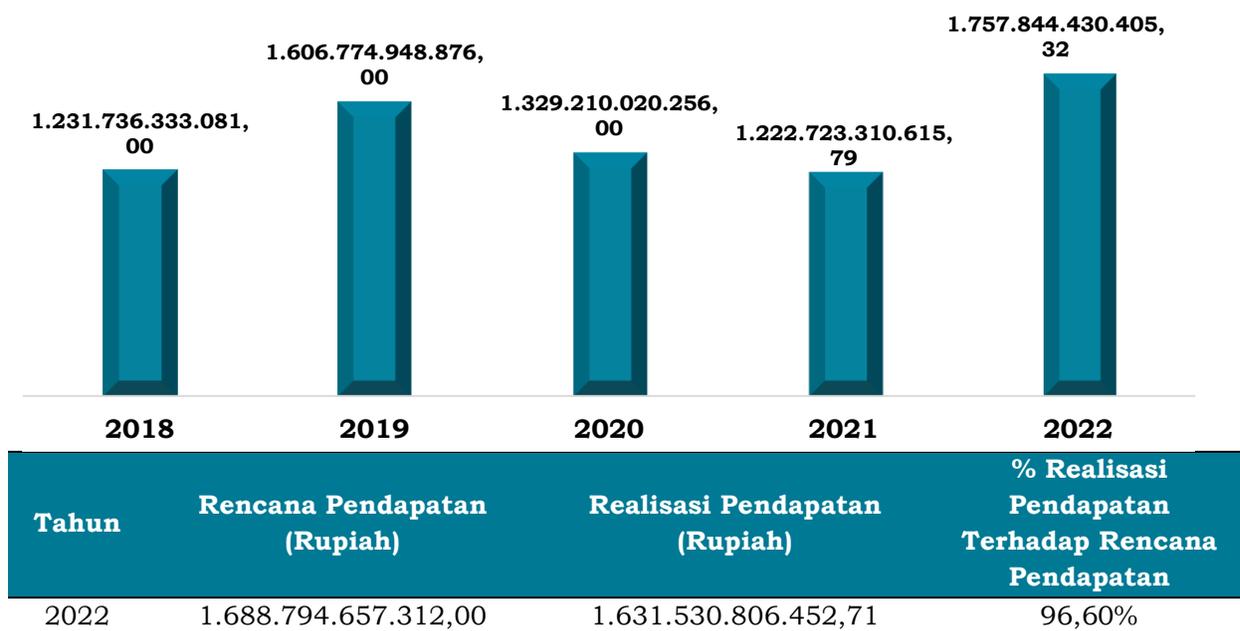
A. Perkembangan Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3. 1 Persentase Realisasi terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022

Tahun	Rencana Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	% Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan
2018	1.295.851.836.701,00	1.231.736.333.081,00	95,05%
2019	1.649.765.942.056,00	1.606.774.948.876,00	97,39%
2020	1.548.725.560.847,00	1.329.210.020.256,00	85,83%
2021	1.901.444.220.132,00	1.222.723.310.615,79	64,30%



Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022

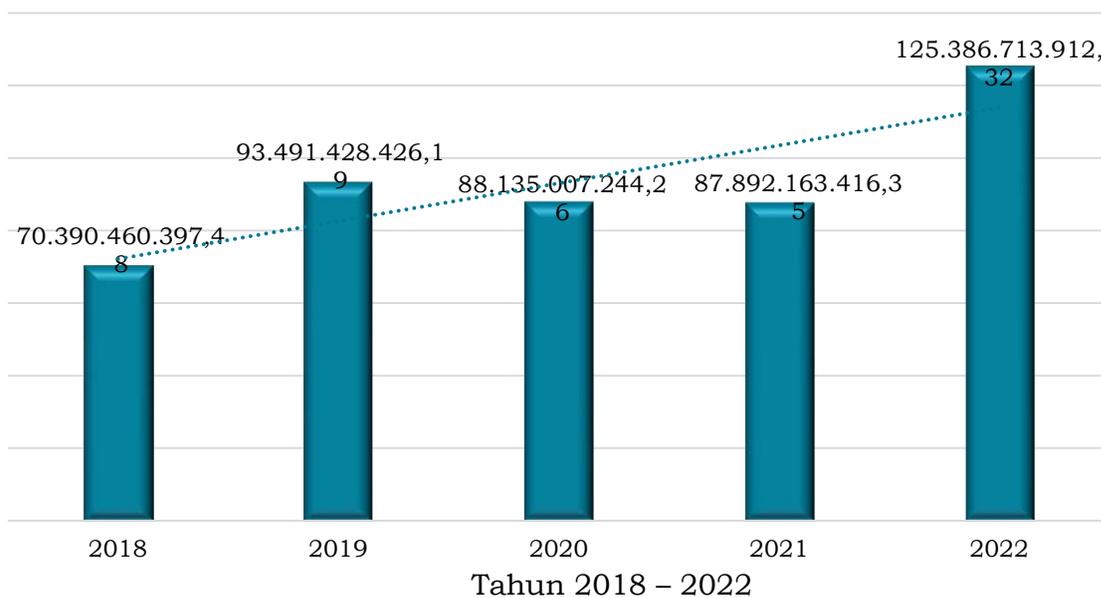
Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 – 2022 diketahui memiliki kondisi yang fluktuatif. Kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung menurun sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 yang kemudian meningkat lebih dari 400 Milliar di tahun 2022. Pada tahun 2018 – 2022, realisasi pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2022 yang mencapai lebih dari Rp 1,63 Trilliun. Sedangkan untuk pencapaian target tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai angka 97,39%.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang murni berasal dari pajak dan retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sumber pendapatan yang menjadi komponen PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, PAD Kabupaten Penajam Paser Utara lebih banyak ditopang oleh komponen Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Berikut realisasi PAD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022:

Gambar 3. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

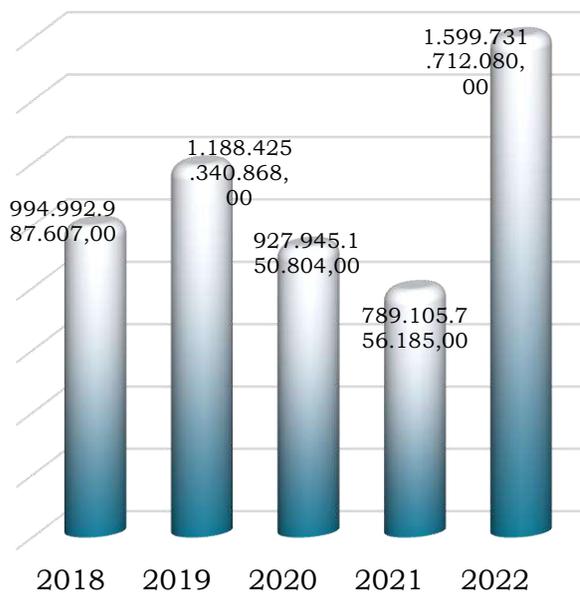
Selaras dengan realisasi pendapatan daerah, PAD Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung mengalami penurunan di dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Kemudian mulai meningkat kembali pada tahun 2022. Pada tahun 2022, mencatatkan realisasi PAD Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai Rp 125.386.713.912,32 atau naik sebesar Rp37.494.550.450,97 dari tahun 2021. Pada tahun 2022, PAD Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 29,90% setelah pada tahun 2021 hanya mampu tumbuh secara negatif sebesar -0,28%. Namun jika dirata - ratakan, PAD Kabupaten Penajam Paser Utara tumbuh positif sebesar 44,44% selama kurun waktu tahun 2018 - 2022. Pertumbuhan tersebut masih dapat terus berkembang, karena realisasai PAD tahun 2022 masih dapat berkembang hingga tahun 2022 berakhir. Berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya, realisasi PAD Kabupaten Penajam Paser Utara ditopang melalui Pajak Daerah dimana pendapatan melalui Pajak Daerah meningkat sekitar Rp 15 Miliar menjadi Rp41.383.106.084,00. Sedangkan komponen Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan realisasi sebesar kurang lebih Rp 3 Miliar menjadi Rp48.494.756.669,18, dimana pada tahun - tahun sebelumnya komponen ini selalu menjadi penopang utama PAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan melalui transfer merupakan sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 mencapai angka 93% dari keseluruhan pendapatan daerah. Melihat proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah, dapat diasumsikan jika pendapatan transfer Kabupaten Penajam Paser Utara menurun maka pendapatan daerah juga akan menurun.

Pendapatan transfer dibagi menjadi 2 sumber, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Gambar 3. 3 Pendapatan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, komponen Pendapatan Transfer terbesar bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bagi

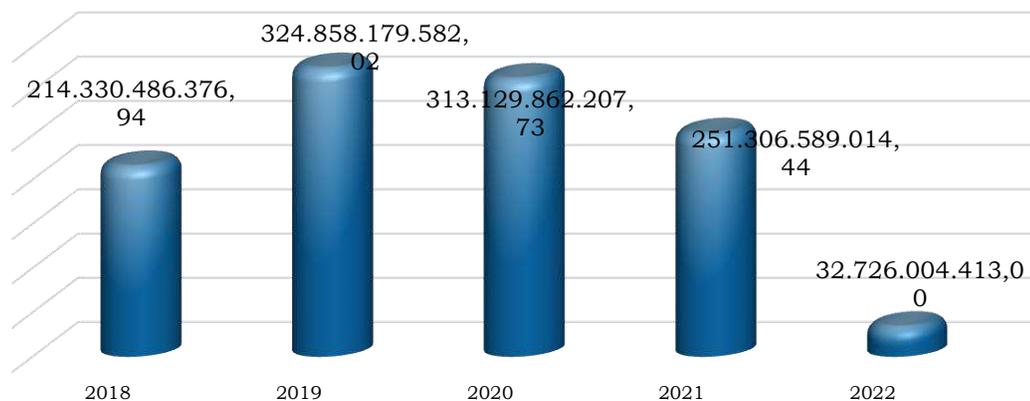
Hasil Bukan Pajak dimana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2021 menopang 50% dari total Pendapatan Transfer. Kondisi pendapatan transfer Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2021, yang kemudian meningkat cukup signifikan di tahun 2022. Pada tahun 2021 hingga 2022, peningkatan terjadi lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkisar di angka Rp 798 Miliar. Pada periode 2018 hingga 2022, diketahui bahwa pendapatan transfer tertinggi terjadi di tahun 2022 yang mencapai angka Rp1,48 Triliun.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga ditopang oleh Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan melalui Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi cukup besar dalam pembentukan Pendapatan Daerah. Lain – Lain PAD yang Sah disusun oleh beberapa sumber pendapatan, seperti Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya. Berikut tren realisasi Lain – Lain PAD yang Sah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Gambar 3. 4 Pendapatan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022



Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

Kontribusi Lain – Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Daerah cukup besar atau terbesar kedua setelah Pendapatan Transfer. Namun hingga bulan November tahun 2022, realisasi Lain – Lain PAD yang Sah masih sangat kecil yaitu sebesar Rp 32,7 Miliar. Nilai realisasi ini tentunya menurun jauh apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Rata – rata pertumbuhan pendapatan Lain – Lain PAD yang Sah sejak tahun 2018 – 2022 masih tumbuh secara negatif yaitu sebesar -5,55%.

B. Belanja Daerah

Belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut digambarkan Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022:

Tabel 3. 2 Persentase Realisasi terhadap Rencana Belanja Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja (%)
2018	1.660.544.721.815,00	1.505.316.439.337,01	90,65
2019	1.688.938.496.213,00	1.559.379.590.168,24	92,33
2020	1.590.603.214.655,00	1.387.350.959.181,71	87,22
2021	1.956.052.588.040,00	1.128.312.802.397,08	57,68
2022	1.660.708.529.132,00	1.542.125.982.201,20	92,9

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

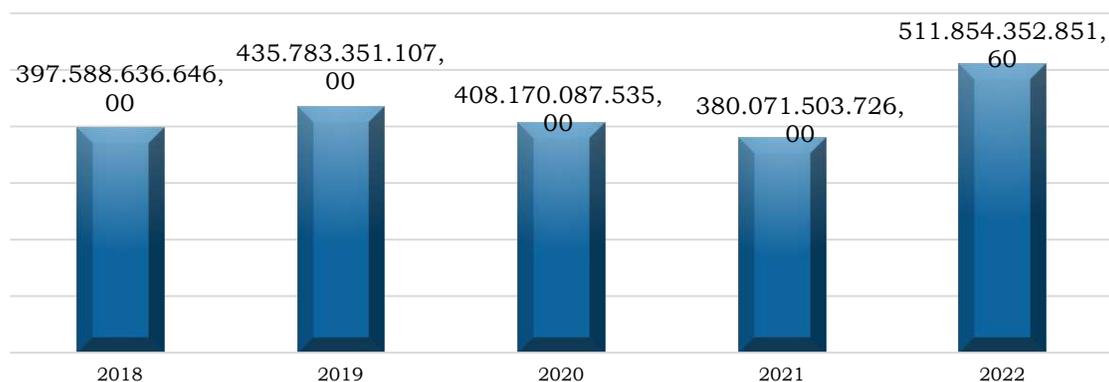
Alokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 adalah sebesar Rp1.660.708.529.132,00 namun realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru mencapai Rp1.542.125.982.201,20 atau sebesar 68,19%. Selama kurun waktu 2018 – 2022, realisasi belanja terkecil pada tahun 2021 sebesar Rp1.128.312.802.397,08 atau hanya 57,68% dari rencana belanja yang dianggarkan pada APBD Tahun 2021. Komponen belanja daerah secara umum dibagi menjadi 4 komponen. Berikut adalah realisasi komponen belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*
BELANJA					
Belanja Pegawai	397,588,636,646.00	435,783,351,107.00	408,170,087,535.00	380.071.503.726	511.854.352.851,60
Belanja Barang dan Jasa	187,517,234,638.46	270.000.735.893	290.481.608.693	382.521.030.936	482.164.061.155,34
Belanja Bunga	N.A.	25.913.448.052	10.784.834.528	16.637.316.584	22.653.806.633,00
Belanja Hibah	51,039,782,167.00	21.925.224.051	30.245.333.900	8.375.936.894	26.723.150.276,00
Belanja Bantuan Sosial	N.A.	248.200.000	1.088.000.000	2.692.443.365	10.013.670.000,00
Belanja Modal	647,844,022,766.55	550.169.583.691	361.340.242.743	235.384.436.357	342.529.909.461,26
Belanja Tidak Terduga	564,808,860.00	1.818.249.000	57.840.705.125	6.108.404.841	2.041.572.492,00
Belanja Bantuan Keuangan	120,817,911,710.00	144.173.031.322	116.293.066.415	96.521.729.694	144.145.459.332,00
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	339.628.678.318,74	84.976.526.830	93.192.379.650	13.216.714.882	41.679.216.371,00
Pengeluaran Pembiayaan	9.059.347.949,00	39.179.505.888	21.834.725.842	65.948.006.730	69.765.344.551,00

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari – hari yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam hal belanja operasi pemerintah, dibagi menjadi beberapa komponen belanja sebagai berikut:

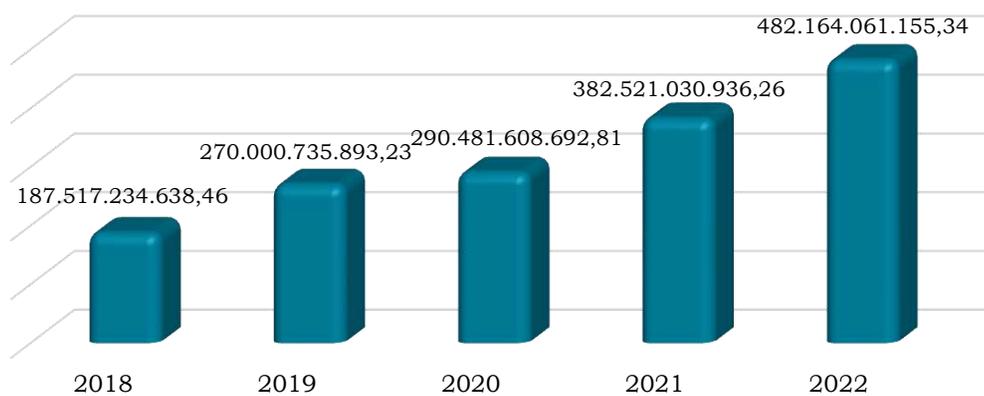


Gambar 3. 5 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 – 2022

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen dari Belanja Operasi Pemerintah. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp511.854.352.851,60, dimana realisasi ini tergolong realisasi belanja pegawai terbesar selama kurun waktu tahun 2018 – 2022. Tingginya realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 ini tidak terlepas dari adanya penambahan jumlah pegawai sebanyak kurang lebih 500 orang karena adanya penerimaan ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan secara serempak seluruh Indonesia. Realisasi belanja pegawai tahun 2022 meningkat 19,01% dibandingkan tahun 2021. Berbanding terbalik dengan realisasi belanja pegawai pada tahun 2022, realisasi belanja pegawai pada tahun 2021 merupakan realisasi terkecil selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp380.071.503.726,00. Meskipun realisasi belanja pegawai selama 5 tahun terakhir fluktuatif, namun rata – rata pertumbuhan realisasi belanja pegawai Kabupaten Penajam Paser Utara tumbuh secara positif sebesar 3,85%.

Gambar 3. 6 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 – 2022

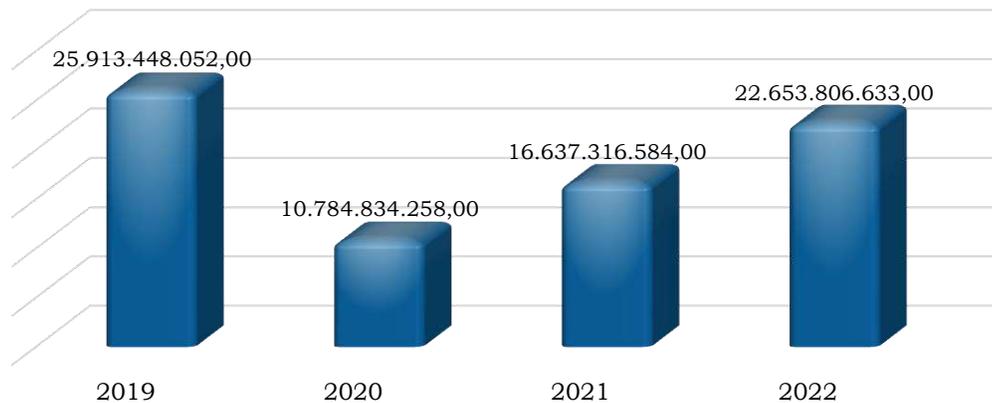


Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran, bahwa yang disebut belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang lain maupun pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah termasuk juga belanja perjalanan. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp482.164.061.155,34. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 merupakan realisasi belanja terbesar selama 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan tahun 2021 kondisi Pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya melandai dan kondisi perekonomian masih belum sepenuhnya membaik, sehingga masih diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan persebaran dan pemulihan ekonomi daerah melalui belanja – belanja barang dan jasa pemerintah. Melihat tingginya realisasi belanja

barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 – 2022, rata – rata pertumbuhan belanja barang dan jasa selama kurun waktu 5 tahun tersebut tergolong tinggi yaitu sebesar 17,59%.

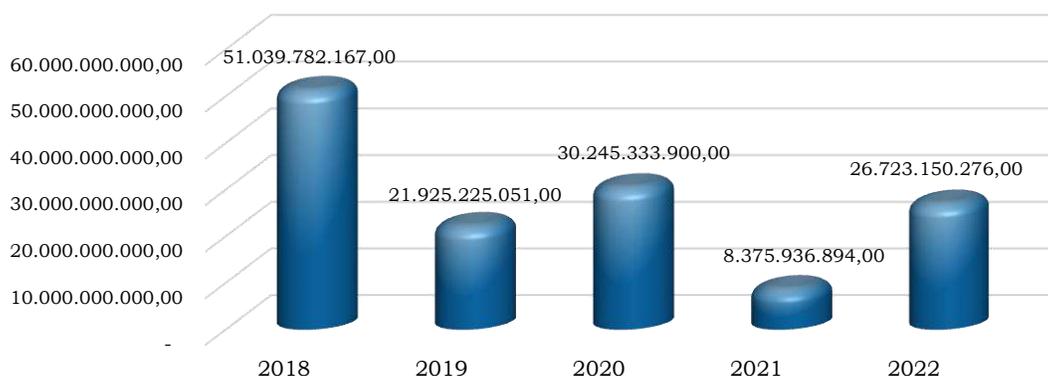
Gambar 3. 7 Realisasi Belanja Bunga Tahun 2019 – 2022



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang telah ada termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Realisasi pembayaran bunga utang Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat selama 3 tahun terakhir atau sejak tahun 2020 – 2022, dimana selama kurun waktu tersebut realisasi pembayaran bunga utang rata – rata meningkat 2,63% per tahun. Total pembayaran bunga utang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sebesar Rp22.653.806.633,00 dari total yang dianggarkan untuk belanja bunga sebesar Rp22.654.756.633,00 atau telah terealisasi hampir 100%. Realisasi belanja bunga pada tahun 2022 meningkat 12% dari tahun 2021. Dengan peningkatan kemampuan daerah dalam membayar bunga utang ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara perlahan mampu untuk membayar utang daerah.

Gambar 3. 8 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 – 2022

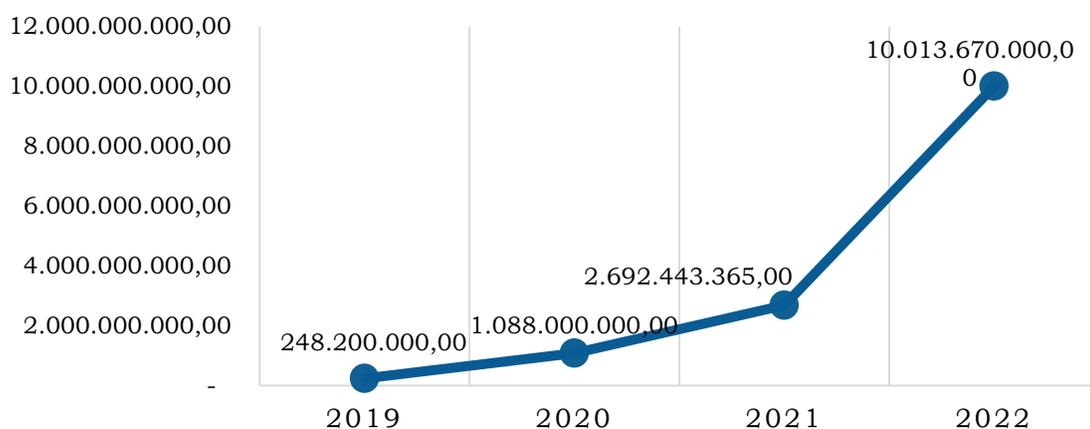


Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Belanja hibah merupakan belanja pemerintah dalam bentuk transfer uang atau barang yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak perlu dibayar kembali yang dilakukan melalui naskah perjanjian pengalihan hak antara pemberi dan penerima hibah. Kondisi belanja hibah Kabupaten Penajam Paser Utara

fluktuatif setiap tahunnya. Belanja hibah terbesar Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp51.039.782.167,00. Meskipun fluktuatif, namun jika dirata - ratakan perkembangan realisasi belanja hibah Kabupaten Penajam Paser Utara setiap tahun meningkat 20,14% dengan pertumbuhan terbesar ada pada tahun 2022 yaitu meningkat 171,96% atau meningkat 2,5 kali lipat dibanding tahun 2021. Melalui belanja hibah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar - besarnya bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gambar 3. 9 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 - 2022



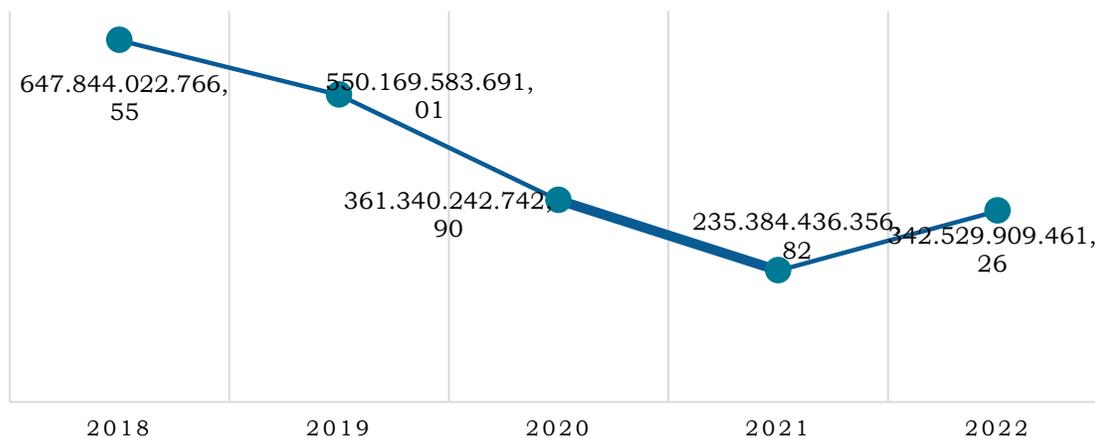
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Belanja bantuan sosial merupakan bentuk belanja pemerintah berupa transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat sebagai respon antisipasi atau penanganan dari terjadinya resiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan, olahraga, keagamaan dan lain - lain. Dalam hal resiko sosial yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulkan potensi kerentanan sosial yang ditanggung individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak merealisasikan belanja bantuan sosial. Namun pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merealisasikan belanja bantuan sosial sebesar Rp248.200.000,00 dan jumlah realisasi tersebut terus meningkat hingga tahun 2022. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 sebesar Rp1.088.000.000,00 tidak terlepas dari mulai masuknya Pandemi Covid-19 ke Indonesia dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Belanja bantuan sosial akibat Pandemi Covid-19 ini terus berlanjut hingga tahun 2021 sebesar Rp2.692.443.365,00 atau meningkat Rp1.541.443.365 dari tahun 2020. Realisasi belanja bantuan sosial pada tahun 2022 tidak terlepas dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai langkah pengendalian inflasi di daerah.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat berupa belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya. Perkembangan belanja modal Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat melalui informasi berikut:

Gambar 3. 10 Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 – 2022



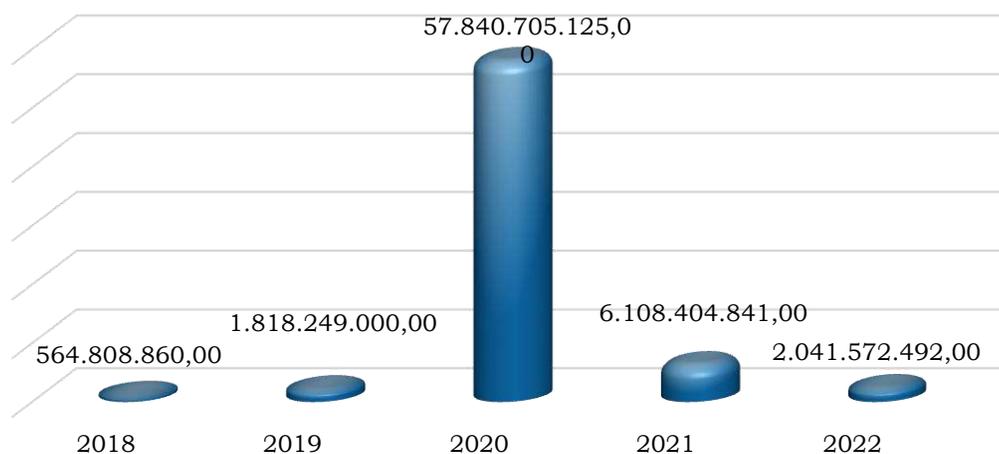
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa belanja modal Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan sejak tahun 2018 – 2022. Belanja modal daerah memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2020 – 2021 fokus belanja daerah lebih kepada pengendalian penyebaran kasus Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah melalui jenis belanja lain khususnya belanja bantuan sosial. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp381.153.673.161,00 dan padatahun 2022 terealisasi sebesar Rp342.529.909.461,26. Belanja modal tahun 2022 difokuskan untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp259.192.806.262,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan bentuk jenis pengeluaran anggaran pemerintah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi secara berulang, seperti bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah. BTT ini umumnya digunakan untuk penanganan dampak bencana alam dan bencana sosial. Tren realisasi BTT Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada informasi berikut:

Gambar 3. 11 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018 – 2022



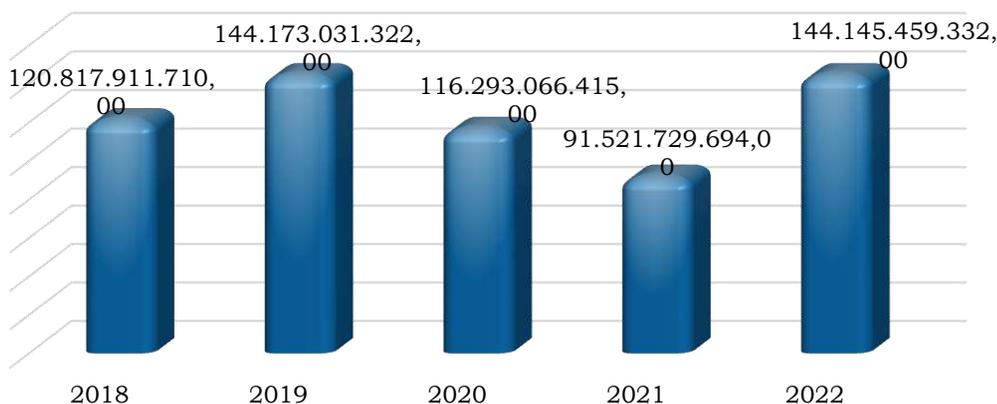
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Secara umum, realisasi BTT Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong kecil dalam 5 tahun terakhir. Realisasi terbesar adalah pada tahun 2020 ketika Pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar Rp57.840.705.125,00, sedangkan pada tahun – tahun lainnya realisasi BTT tidak pernah melebihi Rp10.000.000.000,00. Realisasi BTT pada tahun 2020 sangat tinggi akibat dari kondisi perekonomian masyarakat mengalami kontraksi karena pembatasan kegiatan dan menurunnya kemampuan ekonomi global dan nasional. Pada tahun 2021 dan 2022 kondisi Pandemi Covid-19 semakin dapat terkendali sehingga perlahan realisasi BTT menurun dan lebih fokus pada pemulihan ekonomi melalui bantuan – bantuan sosial dan hibah.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain atau kepada Pemerintah Desa di daerahnya. Belanja transfer Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang ada di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut tren realisasi belanja transfer Kabupaten Penajam Paser Utara:

Gambar 3. 12 Realisasi Belanja Transfer Tahun 2018 – 2022



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Belanja transfer Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tahun 2020 – 2022 menurun. Pada tahun 2022, realisasi belanja transfer sebesar Rp144.145.459.332,00 meningkat hamper 60%.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3. 4 Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2022

Tahun	Uraian Pembiayaan		Pembiayaan Netto
	Penerimaan	Pengeluaran	
2018	339.628.678.318,74	9.059.347.949,00	330.569.330.369,74
2019	84.976.526.830,15	39.179.505.888,00	45.797.020.942,15
2020	93.192.379.650,12	21.834.725.842,00	71.357.653.808,12
2021	13.216.714.882,40	65.948.006.730,00	(52.731.291.847,60)
2022*	41.679.216.371,00	69.765.344.551,00	(28.086.128.180,00)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Pembiayaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan atau yang perlu dibayarkan kembali pada tahun berjalan maupun tahun depan. Kondisi pembiayaan dapat bernilai positif maupun negatif atau surplus maupun defisit. Kondisi surplus akan didapatkan apabila penerimaan pembiayaan lebih besar daripada pengeluaran pembiayaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, kondisi pembiayaan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 – 2020 berada pada kondisi surplus dan pada tahun 2021 dan 2022 pada kondisi defisit. Kondisi surplus terbesar ada pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp330.569.330.369,74 dan kondisi defisit terbesar ada pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp52.731.291.847,60. Pada tahun 2022 pembiayaan Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada kondisi defisit terkecil sekaligus turun cukup signifikan dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp520.790.412,89 atau turun Rp52.210.501.434,71. Pembiayaan netto Kabupaten Penajam Paser Utara turun 99,01% pada tahun 2022 dengan rata – rata pertumbuhan pembiayaan per tahun sebesar -75,81% atau turun sebesar 75,81% per tahun.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau



dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah; yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.



Tabel 3. 5 Neraca Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Aset					
1.1	Aset Lancar	324.018.263.147	128.918.426.628	72.564.527.455	116.657.082.072	275.194.887.549
1.2	Investasi Jangka Panjang	105.855.645.156	104.695.129.191	110.294.802.472	133.593.658.764	127.741.658.764
1.3	Aset Tetap	3.988.415.966.969	4.113.861.361.626	4.086.405.020.953	4.171.087.421.611	4.200.585.035.047
1.4	Dana Cadangan	-	-	-		
1.5	Aset Lainnya	67.166.314.109	58.039.959.896	167.284.131.869	180.333.635.183	180.333.635.183
Jumlah Aset Daerah		4.485.456.189.382	4.405.514.877.343	4.436.548.482.750	4.595.819.797.631	4.789.707.216.545
2	Kewajiban					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	477.918.880.240	175.732.394.363	121.437.003.116	392.156.180.956	274.563.826.850
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	276.507.179.109	253.256.500.703	355.742.334.067	179.174.655.311	179.174.655.311
3	Ekuitas Dana	3.731.030.130.033	3.976.525.982.276	4.080.806.148.682	4.024.488.961.364	4.335.968.734.384
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		4.485.456.189.382	4.405.514.877.343	4.436.548.482.750	4.595.819.797.632	4.789.707.216.546

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Dalam Neraca Daerah terdapat beberapa komponen yang diperhatikan, yaitu aset (aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya), kewajiban (kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek), dan ekuitas dana. Sejak tahun 2018 - 2022 nilai total seluruh aset daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2022*, nilai komponen aset terbesar adalah aset tetap senilai Rp 4,20 Triliun dengan total keseluruhan aset Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 4,78 Triliun.

Kewajiban Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dimana pada tahun 2022 kewajiban jangka pendek Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 274 Miliar dan kewajiban jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 179 Miliar. Sementara dalam neraca daerah juga memperhatikan ekuiditas dana. Ekuiditas dana adalah selisih antara nilai aset daerah dengan nilai kewajiban pemerintah. Nilai ekuiditas dana Kabupaten Penajam Paser Utara selalu meningkat sejak tahun 2018 - 2022. Nilai ekuiditas dana tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 4,78 Triliun.

Untuk analisis neraca keuangan daerah, terdapat dua komponen yang menjadi perhatian yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Untuk mengukur rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rasio Solvabilitas terdapat rasio total hutang terhadap aset dan rasio total hutang terhadap modal. Rasio total hutang terhadap aset adalah bentuk perbandingan antara hutang daerah terhadap aset, sedangkan rasio total hutang terhadap modal adalah perbandingan antara hutang terhadap modal daerah. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas dan rasio solvabilitas neraca keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Analisis Neraca Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata (%)
1.	Rasio Lancar	67.80	73.36	59.75	29.75	100.23	66.18
2.	Rasio Cepat	67.80	73.36	59.75	29.75	100.23	66.18
3.	Rasio Total Hutang terhadap Aset		9.74	10.76	12.42	9.48	11.84
4.	Rasio Hutang terhadap Modal	20.22	10.79	11.69	14.20	10.46	13.47

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel 3.9 dapat terlihat bahwa rasio lancar Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Rasio lancar berada di angka 67.80 % pada tahun 2018 dan menjadi 100.23% pada tahun 2022. Rasio lancar digunakan untuk mengungkapkan jaminan keamanan terhadap kemampuan kabupaten untuk melunasi utang jangka pendeknya. Jika rasio lancar berada di bawah 100% dapat dikatakan kabupaten mengalami kesulitan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berada dalam kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Sama seperti rasio lancar, rasio cepat Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 sebesar 67.80% dan tahun 2022 sebesar 100.23%. Angka ini dapat memperlihatkan kecepatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membayar atau melunasi utang lancarnya. Kondisi komponen rasio solvabilitas Kabupaten Penajam Paser Utara bergerak secara fluktuatif, baik pada rasio hutang terhadap aset maupun rasio hutang terhadap modal. Pada tahun 2022, rasio total hutang terhadap aset Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 9,48%, dimana persentase ini menurun dibandingkan tahun 2018 dengan nilai rasio sebesar 9,74%. Rasio hutang terhadap modal Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan nilai rasio sebesar 14,98%, kondisi ini tentu berubah secara drastis.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan tren yang fluktuatif. Berikut adalah analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 -2022.

Tabel 3. 7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (a)/(b)x100%
		(a)	(b)	
1.	Tahun 2018	685.049.913.833	1.514.375.787.286	45,23
2.	Tahun 2019	815.131.854.052	1.598.559.096.056	50,99
3.	Tahun 2020	395.917.537.960	1.623.068.673.144	24,39
4.	Tahun 2021	380.071.503.726	1.901.444.220.132	19,98
5.	Tahun 2022*	541.200.337.323	1.688.794.657.312	32,04

Secara proporsi terhadap total pengeluaran, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2018 sampai dengan 2022 berfluktuasi dikisaran 19% hingga 50%. Hal ini menunjukkan kemampuan pengeluaran pemerintah untuk masyarakat masih terbatas. Guna meningkatkan anggaran belanja ke masyarakat, selain melakukan efisiensi belanja aparatur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga perlu mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

A. Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, melihat penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran sehingga diperoleh SiLPA.

Pada tabel 3.11 di atas, menunjukkan kondisi surplus defisit Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi surplus defisit didapatkan berdasarkan hasil pengurangan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Pada tahun 2020, Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit sebesar Rp58.140.938.926,-. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan tahun 2019, dimana pada tahun ini kondisi keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami surplus sebesar Rp47.395.358.708,-. Selama 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2018 – 2022, Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2020. Dan Kabupaten Penajam Paser Utara 3 kali mengalami surplus anggaran sejak tahun 2018 – 2022, yaitu pada tahun 2019, tahun 2021 serta tahun 2022. Pada tahun 2018 menjadi kondisi defisit anggaran terbesar dan pada tahun 2022 menjadi kondisi surplus anggaran terbesar Kabupaten Penajam Paser Utara

Kondisi defisit Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2018 – 2022 tertutupi dengan beberapa komposisi penutup, seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.12. Selama 5 tahun terakhir, komposisi penutup defisit Kabupaten Penajam Paser Utara rata – rata berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, komposisi penutup defisit Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan SiLPA tahun berkenaan. Sedangkan pada tahun 2020, komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan SiLPA tahun berkenaan.



Tabel 3. 8 Surplus Defisit Pembiayaan Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022 *	2023
A. Pendapatan	1.231.736.333.081	1.606.774.948.876	1.329.210.020.256	1.222.723.310.615	1.631.530.806.452	1.946.900.884.058
B. Belanja	1.505.316.439.337	1.559.379.590.168	1.387.350.959.182	1.128.312.802.397	1.258.914.590.010	1.891.770.208.418
Belanja Tidak Langsung	570.011.139.283	629.861.503.532	624.422.027.503	380.071.503.726	380.071.503.726	
Belanja Langsung	935.305.300.054	929.518.086.636	762.928.931.678	1.128.312.802.397	1.258.914.590.010	
Surplus (Defisit) (A-B)	(273.580.106.256)	47.395.358.708	(58.140.938.926)	94.410.508.218	372.616.216.442	55.130.675.640

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Tabel 3. 9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2023 (Rp)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	330.569.330.370	93.192.379.650	13.216.714.882	41.679.216.371	5.655.162.208	-
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4.723.091.852	4.078.067.769	2.318.899.829	-	-	2.318.899.829
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	309.688.045.059	27.987.302.716	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	56.989.224.114	93.192.379.650	13.216.714.882	210.675.034.023	-	-

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Pada tahun anggaran 2019 terlihat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp.93.192.379.650,-, sedangkan pada tahun anggaran 2022 terdapat surplus SiLPA sebesar Rp.5.655.162.208,-. Besaran SiLPA pada tahun 2019 merupakan besaran nilai SiLPA tertinggi sejak tahun 2018 – 2022. SiLPA Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir terdiri dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Adanya sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat baik. Namun, adanya SiLPA yang tinggi justru mengindikasikan buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tingginya SiLPA membuktikan bahwa penyerapan anggaran di daerah itu sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yakni lemahnya perencanaan program, kinerja birokrasi yang menurun serta upaya kesengajaan untuk memperbesar Silpa

Tabel 3. 10 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 (Rp)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah SILPA	56.989.224.114	93.192.379.650	13.216.714.882	41.679.216.371	5.655.162.208
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapat daerah yang sah	-	-	-	-	-
5.	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	29.940.633.260	56.989.224.114	93.192.379.650	-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	430.989.141.237	21.082.892.598	66.204.384.010	328.182.836.407	246.934.489.030
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2021

3.2.3 Anggaran Pencapaian TPB di Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran selama 3 tahun terakhir untuk pencapaian TPB di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai Rp 1,115,413,760,186 atau rata-rata mencapai Rp 425,129,965,991 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan terdapat 16 TPB yang mendapat alokasi dana 3 tahun terakhir di Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya satu TPB yang tidak mendapat alokasi anggaran yaitu Tujuan ke-14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan karena indikator-indikator yang ada pada tujuan ini merupakan kewenangan Provinsi. Proporsi anggaran terbesar terdapat pada pencapaian Tujuan pertama-Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun yaitu sebesar 27.9% sedangkan anggaran terendah pada Tujuan 8- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua hanya sebesar 0,26 % dari keseluruhan anggaran untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel 3. 11 Anggaran Pencapaian TPB

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Anggaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan			%
		Anggaran	Realisasi	Rata - Rata Tiap Tahun	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	355,847,544,770	327,330,269,110	118,615,848,257	27.90%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	22,329,734,125	19,558,317,956	7,443,244,708	1.75%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	110,091,152,447	71,633,269,379	36,697,050,816	8.63%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	284,175,274,122	260,263,856,910	94,725,091,374	22.28%
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	8,943,484,076	7,231,521,037	2,981,161,359	0.70%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	187,582,057,969	181,961,034,628	62,527,352,656	14.71%
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	22,420,881,870	16,563,083,785	7,473,627,290	1.76%
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	3,260,639,258	2,876,666,051	1,086,879,753	0.26%
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	76,839,363,550	63,709,430,245	25,613,121,183	6.02%
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	5,009,804,920	3,678,896,051	1,669,934,973	0.39%
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	77,322,188,452	65,505,902,210	25,774,062,817	6.06%
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	27,046,791,980	25,803,306,106	9,015,597,327	2.12%
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk	50,139,921,060	29,823,932,263	16,713,307,020	3.93%

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Anggaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan			%
		Anggaran	Realisasi	Rata - Rata Tiap Tahun	
	Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya				
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	0	0	0	0.00%
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	9,554,760,000	8,048,553,882	3,184,920,000	0.75%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	12,465,821,186	10,832,206,614	4,155,273,729	0.98%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	22,360,478,189	20,593,513,959	7,453,492,730	1.75%
	Jumlah	1,275,389,897,9	1,115,413,760,1	425,129,965,99	100.00
	Prosentase Dari Total Belanja Tahun 2020 (%)			31.98%	

Sumber: DLH, hasil analisis 2021

3.3 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan, salah satu unsur yang menjadi penentu adalah ketersediaan anggaran. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan proyeksi pendapatan yang mampu memberikan gambaran pendanaan selama lima tahun ke depan, dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan dan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2019-2023

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data tahun 2013-2018 dan potensi pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
4. Kebijakan dibidang keuangan negara

Sementara perkiraan belanja disusun dengan memperhatikan gambaran kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan



mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan serta belanja pembangunan daerah.



Tabel 3. 12 Proyeksi Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI APBD 2024 (Rp)	PROYEKSI APBD 2025 (Rp)	PROYEKSI APBD 2026 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.653.163.447.000,00	1.628.163.626.700,00	1.628.269.400.700,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.960.631.000,00	157.142.287.000,00	157.248.061.000,00
4 1 01	Pajak Daerah	45.071.574.000,00	81.398.576.000,00	81.504.350.000,00
4 1 02	Retribusi Daerah	13.511.355.000,00	13.511.355.000,00	13.511.355.000,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.671.835.000,00	2.671.835.000,00	2.671.835.000,00
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	59.705.867.000,00	59.560.521.000,00	59.560.521.000,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.532.202.816.000,00	1.471.021.339.700,00	1.471.021.339.700,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.315.217.998.000,00	1.290.985.092.700,00	1.290.985.092.700,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	216.984.818.000,00	180.036.247.000,00	180.036.247.000,00

Sumber: Bapenda, 2023

Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026 diproyeksikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara akan berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2024, pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan sebesar Rp1.653.163.447.000,-. Pendapatan Daerah tahun 2025 diproyeksikan menurun sebesar Rp24.999.820.300,- dari tahun 2024 sehingga Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp1.628.163.626.700,-. Pada tahun 2026, Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan meningkat sebesar Rp105.774.000,- menjadi sebesar Rp1.628.269.400.700,-. Fluktuatifnya perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan oleh 2 (dua) sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Sumber Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD, diproyeksikan akan terus meningkat. Peningkatan PAD terbesar diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2025 dengan jumlah peningkatan sebesar Rp36.181.656.000,-. PAD Kabupaten Penajam Paser Utara lebih banyak ditopang oleh komponen Lain - Lain PAD yang Sah dan Pajak Daerah. Pada tahun 2025, Pajak Daerah diproyeksikan akan meningkat cukup signifikan sebesar Rp36.327.002.000,- namun Lain - Lain PAD yang Sah menurun Rp145.346.000,-. PAD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 diproyeksikan meningkat Rp105.774.000,- dari tahun 2025, dimana peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya Pajak Daerah sedangkan Lain - Lain PAD yang Sah akan konstan. PAD Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan semakin berkembangnya sektor - sektor ekonomi daerah yang tidak lepas dari semakin meningkatnya proses pembangunan Kawasan IKN.

Selain bersumber dari PAD, Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga bersumber dari Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.532.202.816.000,- dan tahun 2025 diproyeksikan menurun Rp61.181.476.300,- menjadi Rp1.471.021.339.700,- sedangkan tahun 2026 diproyeksikan sama dengan tahun 2025. Pendapatan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara lebih banyak ditopang melalui transfer dari Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Perimbangan. Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga turut menopang Pendapatan Transfer yang diterima Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari sumber - sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Transfer secara keseluruhan diproyeksikan akan menurun pada tahun 2025 dengan jumlah penurunan yang cukup besar yaitu sebesar Rp61.181.476.300,-. Pada tahun 2026, Pendapatan Transfer yang diterima Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan akan tetap sama seperti Pendapatan Transfer yang diterima pada tahun 2025. Sehingga secara umum, peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2026 dipengaruhi oleh peningkatan PAD.



B. Rencana Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2019 sebesar Rp1.559.379.590.168,24 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.631.530.806.452,71*. Terdapat perbedaan realisasi belanja sebesar kurang lebih Rp 172 Miliar antara tahun 2019 dan tahun 2020. Tingginya realisasi belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2019 disebabkan oleh tingginya realisasi belanja langsung sebesar Rp929.518.086.636,24 yang dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang tinggi diantara komponen belanja langsung lainnya.

Proyeksi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Penurunan belanja tidak langsung yang cukup signifikan ialah pada belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, sedangkan penurunan belanja langsung ialah pada belanja modal. Jika diperhatikan dari sisi proporsionalitas, belanja tidak langsung masih lebih rendah dibandingkan belanja langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Penajam Paser Utara menyediakan alokasi lebih dari 50% yang diperuntukkan bagi belanja untuk masyarakat.

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai SiLPA sebesar Rp. 93.192.379.650,12,-, sementara pembayaran bunga pinjaman yang tertera pada tahun 2019 s.d 2023 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pinjaman kepada PT. SMI dengan jangka waktu selama 8 (delapan) tahun yang harus ditunaikan mulai 2018.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama tiga tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan dialokasikan



untuk memenuhi kebutuhan belanja yang belum dialokasikan ke dalam belanja Prioritas I, II, dan III sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 158.

- a. Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
- b. Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
- c. Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.



Tabel 3. 13 Proyeksi Pengeluaran Wajib Mengikat Tahun 2024 – 2026

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
A	BELANJA OPERASI	1.380.159.000.000,00	1.363.556.000.000,00	1.385.922.000.000,00
1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, dan KDH KDH)	537.146.000.000,00	550.575.000.000,00	564.339.000.000,00
2	Operasional KDH WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
3	Alokasi Dana Desa	121.164.000.000,00	118.741.000.000,00	118.741.000.000,00
4	BLUD	40.697.000.000,00	40.697.000.000,00	40.697.000.000,00
5	BPJS PBI	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00
6	Pemenuhan SPM	50.002.000.000,00	50.002.000.000,00	50.002.000.000,00
7	Gaji Honorer/THL/RT/Janda Veteran dan belanja jasa lainnya	171.149.000.000,00	174.899.000.000,00	178.743.000.000,00
8	Pemilu	36.000.000.000,00	0	0
	Pembayaran Bunga Hutang	21.330.000.000,00	21.330.000.000,00	21.330.000.000,00
9	Operasional dan kegiatan wajib SKPD	185.668.000.000,00	190.309.000.000,00	195.067.000.000,00
10	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.021.000.000,00	44.021.000.000,00	44.021.000.000,00
11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	59.552.000.000,00	59.552.000.000,00	59.552.000.000,00
12	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	75.030.000.000,00	75.030.000.000,00	75.030.000.000,00
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.631.000.000,00	55.631.000.000,00	55.631.000.000,00
1	Pembayaran Pokok Utang	55.631.000.000,00	55.631.000.000,00	55.631.000.000,00
2	Penyertaan modal			
	Total Belanja Wajib & Mengikat	1.435.790.000.000,00	1.419.187.000.000,00	1.441.553.000.000,00

Sumber: Analisis Bapelitbang, 2023

Belanja wajib dan mengikat Kabupaten Penajam Paser Utara untuk 3 (tiga) tahun ke depan berkembang secara fluktuatif menyesuaikan dengan perkembangan proyeksi pendapatan. Total Belanja Wajib dan Mengikat tahun 2024 adalah sebesar Rp1.435.790.000.000,-, tahun 2025 direncanakan menurun menjadi sebesar Rp1.419.187.000.000,- dan tahun 2026 kembali meningkat menjadi sebesar Rp1.441.553.000.000,-. Belanja Wajib dan Mengikat secara umum digunakan untuk beberapa komponen belanja, yaitu Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada tahun 2024 rencana belanja operasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp1.380.159.000.000,-. Seiring dengan menurunnya proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2025, total rencana Belanja Wajib dan Mengikat juga turut disesuaikan. Pada tahun 2025, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.363.556.000.000,-. Tahun 2026, dengan meningkatnya proyeksi Pendapatan Daerah maka rencana alokasi Belanja Operasi juga turut menyesuaikan sehingga secara keseluruhan juga meningkat menjadi Rp1.385.922.000.000,-. Dalam hal fluktuatifnya proyeksi Pendapatan Daerah, terdapat beberapa komponen Belanja Operasi yang mengalami penyesuaian, seperti:

1. Belanja Pegawai
2. Gaji Honorer/Gaji RT/Janda Veteran dan belanja jasa lainnya
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Alokasi Dana Pemilu Tahun 2024 (hanya dialokasikan tahun 2024)
5. Belanja operasional dan wajib Perangkat Daerah

Dari total 5 (lima) komponen Belanja Operasi yang mengalami penyesuaian di atas, penyesuaian dilakukan dengan tetap memperhatikan proyeksi kebutuhan, sedangkan komponen Belanja Operasi lainnya direncanakan dengan alokasi yang konstan setiap tahunnya. Dalam komponen Belanja Wajib dan Mengikat, selain Belanja Operasi juga terdapat Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan ini rencana besaran yang dialokasikan konstan setiap tahun, yaitu sebesar Rp55.631.000.000,- yang merupakan pembayaran pokok utang.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2024 – 2026 seperti tabel berikut:

Tabel 3. 14 Proyeksi Kapasitas Riil Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Pendapatan	1.653.163.447.000,00	1.628.163.626.700,00	1.628.269.400.700,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-
Total Penerimaan		1.653.163.447.000,00	1.628.163.626.700,00	1.628.269.400.700,00
<u>Dikurangi</u>				
4.	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	1.435.790.000.000,00	1.419.187.000.000,00	1.441.553.000.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		217.373.447.000,00	208.976.626.700,00	186.716.400.700,00

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah didapatkan melalui hasil selisih antara total Pendapatan Daerah dengan total rencana alokasi Belanja Wajib dan Mengikat. Kapasitas Riil ini akan digunakan untuk memenuhi rencana program – program prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis, Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sebesar Rp217.373.447.000,-. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2025 menurun disbanding tahun 2024 menjadi sebesar Rp208.976.626.700,-. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2026 diproyeksikan kembali menurun menjadi sebesar Rp186.716.400.700,-. Penurunan Kapasitas Riil ini disebabkan oleh menurunnya proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2025. Kapasitas Riil tahun 2026 diproyeksikan menurun meskipun Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat, karena peningkatan proyeksi Pendapatan Daerah tidak sebesar peningkatan rencana alokasi Belanja Wajib dan Mengikat.

Dalam mendukung kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga memanfaatkan peluang pendanaan yang bersumber dari dana *earmark*. Pendanaan yang bersumber dari dana *earmark* ini akan sangat membantu dalam hal memenuhi pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat melalui pembangunan – pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Berikut tren alokasi pendanaan pembangunan melalui dana *earmark* di Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3. 15 Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2023

Tahun	DAK Fisik	DAK Non Fisik
2018	83.122.150.000	63.622.778.000
2019	54.582.996.000	60.305.298.000
2020	47.912.112.912	63.942.430.559
2021	35.589.115.363	59.263.258.049

Tahun	DAK Fisik	DAK Non Fisik
2022	39.234.088.112	92.052.305.058
2023	62.117.813.000	95.838.239.000

Sumber: Bapelitbang, 2023

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. DAK dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan fisik di daerah, baik pembangunan infrastruktur maupun pengadaan – pengadaan peralatan untuk menunjang pelayanan publik. Sedangkan DAK Non Fisik merupakan pendanaan yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung atau meningkatkan performa pelayanan publik, baik berupa dana operasional ataupun berupa bimbingan teknis untuk aparatur pelayan publik.

Tren alokasi DAK di Kabupaten Penajam Paser Utara baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik berkembang secara fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan data di atas, alokasi DAK Fisik terbesar adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp83.122.150.000,-, sedangkan untuk alokasi DAK Non Fisik terbesar pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp95.838.239.000,-. Pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) Perangkat Daerah yang menerima DAK Fisik, yaitu:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.594.911.000,-
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp34.324.878.000,-
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp100.781.000,-
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.097.243.000,-

Keempat Perangkat Daerah di atas termasuk Perangkat Daerah yang selalu mendapatkan DAK Fisik setiap tahunnya. Sedangkan untuk DAK Non Fisik, pada tahun 2023 terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah yang menerima DAK Non Fisik yaitu:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp81.430.263.000,-
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp10.604.121.000,-
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.675.805.000,-
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp417.400.000,-
5. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp710.650.000,-

Mengingat besarnya peran alokasi DAK Fisik maupun DAK Non Fisik bagi pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka berdasarkan data alokasi DAK baik Fisik maupun Non Fisik selama 5 (lima) tahun terakhir dilakukan proyeksi pendapatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Berikut



proyeksi pendapatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk tahun 2024 – 2026:

Tabel 3. 16 Proyeksi Pendapatan DAK Fisik dan Non Fisik

Tahun 2024 – 2026		
Tahun	DAK Fisik	DAK Non Fisik
Dasar Proyeksi	55.025.000.000	59.552.000.000
2024	44.021.000.000	59.552.000.000
2025	44.021.000.000	59.552.000.000
2026	44.021.000.000	59.552.000.000

Sumber: Analisis Bapelitbang, 2023

Proyeksi pendapatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik menggunakan data alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik selama 5 (lima) tahun terakhir yang kemudian di rata – ratakan untuk menjadi data dasar proyeksi. Setelah data dasar proyeksi telah didapatkan, maka dilakukan perhitungan untuk proyeksi tahun 2024 dengan mengasumsikan bahwa pada tahun 2024 alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik adalah sebesar 80% dari rata – rata alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik selama 5 tahun terakhir. Untuk tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan untuk alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik bergerak secara datar (*flat*) sehingga alokasinya sama seperti tahun 2024. Dengan demikian maka diproyeksikan alokasi DAK Fisik untuk tahun 2024 – 2026 sebesar Rp44.021.000.000,- dan untuk DAK Non Fisik tahun 2024 – 2026 sebesar Rp59.552.000.000,-.

Selain bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, pendanaan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga memanfaatkan dana *earmark* yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi. Pendanaan yang bersumber dari Bankeu Provinsi adalah alokasi dana yang diperoleh dari dana transfer Pemerintah Provinsi yang ditujukan untuk mendukung pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Berikut tren pendapatan daerah yang bersumber dari Bankeu Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3. 17 Tren Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2018 - 2023

Tahun	Bankeu Provinsi
2018	56.250.000.000
2019	143.800.000.000
2020	115.760.002.756
2021	110.556.484.000
2022	112.748.950.000
2023	72.070.000.000

Sumber: Bapelitbang, 2023

Alokasi pendanaan dari Bankeu Provinsi cenderung lebih besar dibandingkan dengan DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Alokasi Bankeu terbesar yang pernah diperoleh Kabupaten Penajam Paser Utara adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp143.800.000.000,-. Pada tahun 2023, Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi Bankeu sebesar Rp72.070.000.000,- yang tersebar pada 5 (lima) Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dinas Pertanian sebesar Rp2.850.000.000,-
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.920.000.000,-

3. Inspektorat Daerah sebesar Rp250.000.000,-
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp62.050.000.000,-
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.000.000.000,-

Mengingat tidak kalah pentingnya pendanaan yang bersumber dari Bankeu Provinsi, maka dilakukan proyeksi pendapatan yang bersumber dari Bankeu Provinsi dengan memperhatikan alokasi Bankeu Provinsi untuk Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir. Berikut proyeksi alokasi Bankeu Provinsi tahun 2024 – 2026:

Tabel 3. 18 Proyeksi Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2024 - 2026

Tahun	Proyeksi Bankeu Provinsi
Dasar Proyeksi	93.786.672.331
2024	75.030.000.000
2025	75.030.000.000
2026	75.030.000.000

Sumber: Analisis Bapelitbang, 2023

Mekanisme proyeksi yang dilakukan untuk memproyeksikan alokasi Bankeu Provinsi sama halnya seperti yang dilakukan untuk memproyeksikan alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Tren alokasi Bankeu Provinsi selama 5 (lima) tahun terakhir dirata – ratakan untuk menjadi data dasar proyeksi.

Dari rata – rata alokasi tersebut diasumsikan alokasi untuk tahun 2024 adalah sebesar 80% dari rata – rata alokasi. Kemudian untuk tahun 2025 dan 2026 diproyeksikan alokasi akan bergerak secara datar (*flat*) atau sama seperti tahun 2024. Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan, maka didapatkan hasil proyeksi alokasi Bankeu Provinsi untuk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 – 2026 adalah sebesar Rp75.030.000.000,-.

Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan terhadap alokasi DAK baik Fisik maupun Non Fisik dan Bankeu Provinsi, maka hasil proyeksi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk melakukan pembangunan dengan didukung oleh Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan yang telah diproyeksikan. Berikut kemampuan fiskal daerah yang bersumber dari Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dan Dana *Earmark*:

Tabel 3. 19 Kapasitas Riil dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Bankeu Tahun 2024 – 2026

Pendapatan	2024	2025	2026
Kapasitas Riil	217.373.447.000	208.976.626.700	186.716.400.700
DAK Fisik	44.021.000.000	44.021.000.000	44.021.000.000
DAK Non Fisik	59.552.000.000	59.552.000.000	59.552.000.000
Bankeu	75.030.000.000	75.030.000.000	75.030.000.000
Total	395.976.447.000	387.579.626.700	365.319.400.700

Sumber: Analisis Bapelitbang, 2023

Berdasarkan hasil analisa di atas, terlihat bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Penajam Paser Utara semakin menguat dengan ditunjang melalui proyeksi dari sumber pendanaan *earmark*. Pada tahun 2024, total kapasitas fiskal daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan sebesar

Rp395.976.447.000,-. Namun meskipun telah didukung dengan sumber pendanaan *earmark*, kemampuan fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan tetap semakin menurun dari tahun 2025 – 2026. Pada tahun 2025 kemampuan fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan sebesar Rp387.579.626.700,- dan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp365.319.400.700,-.

Berikut rencana pendanaan yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas yang bersifat mandatori:

Tabel 3. 20 Rencana Alokasi Mandatori Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan dan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 – 2026

Jenis Mandatori	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
Alokasi Pendidikan	308.077.500.00 0	18,6 %	308.077.500.00 0	18,9 %	308.077.500.000	18,9 %
Alokasi Kesehatan	281.292.000.00 0	29,7 %	281.292.000.00 0	30,9 %	284.292.000.000	31,7 %
Pengawasan	10.000.000.000	0,6%	10.000.000.000	0,6%	10.000.000.000	0,6%
ADD	121.164.499.80 0	10,0 %	118.741.209.27 0	10,0 %	118.741.209.270	10,0 %
Alokasi Peningkatan kompetensi ASN	4.692.540.600,0 0	0,34 %	4.636.090.400,0 0	0,34 %	4.712.134.800.00	0,34 %
Total	725.226.540.4 00,00	59,24 %	722.746.799.6 70,00	60,74 %	1.192.324.189.2 70,00	61,54 %

Sumber: Analisis Bapelitbang, 2023

Dalam pengalokasian pendanaan, perlu untuk memperhatikan atau mengalokasikan terlebih dahulu beberapa belanja yang bersifat mandatori seperti mandatori bidang pendidikan, kesehatan, pengawasan dan Pemerintahan Desa. Mandatori untuk belanja bidang pendidikan adalah sebesar 20% dari total pendapatan daerah. Kemudian mandatori belanja bidang kesehatan adalah sebesar 10% dari Dana Transfer Umum (DTU) dikurangi dengan belanja gaji pegawai. Selanjutnya mandatori untuk belanja pengawasan adalah sebesar 0,75% dari total pendapatan atau setidaknya 1% jika pendapatan daerah lebih dari Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 10% dari total DTU. Selain itu, belanja mandatory juga dialokasikan untuk peningkatan kompetensi ASN sebesar 0.34% dari belanja daerah.

Berdasarkan rencana alokasi pendanaan di atas, beberapa jenis belanja mandatori ada yang telah memenuhi mandatori namun ada juga yang belum memenuhi mandatori. Total belanja mandatori yang direncanakan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp720.533.999.800,- atau sebesar 58,92% dari total pendapatan, tahun 2025 sebesar Rp718.110.709.270,- atau sebesar 60,43% dari total pendapatan daerah dan tahun 2026 sebesar Rp721.110.709.270,- atau sebesar 61,24% dari total pendapatan daerah. Untuk alokasi belanja dibidang kesehatan dan ADD telah memenuhi mandatori, namun untuk belanja dibidang pendidikan dan pengawasan masih belum sepenuhnya memenuhi mandatori yang ditentukan. Belanja bidang pendidikan, masih kurang sekitar 1,4% dari mandatori yang ditentukan dan belanja pengawasan kurang 0,15% dari mandatori yang ditentukan.



Selain belanja mandatori, dalam pengalokasian belanja juga perlu memperhatikan atau memprioritaskan beberapa belanja yang merupakan dukungan dalam suksesnya target pembangunan nasional. Pada pengalokasian belanja ini, tidak terpaku pada aturan mandatori dalam penentuan alokasi pendanaannya. Berikut rencana alokasi belanja prioritas nasional:



Tabel 3. 21 Rencana Alokasi Belanja Prioritas Nasional Tahun 2024 – 2026

Tahun	SPM	Persentase	Penanggulangan Kemiskinan	Persentase	Stunting	Persentase	Alokasi Infrastruktur	Persentase
2024	28.137.545.000,00	1,70%	5.642.000.000,00	0,34%	750.000.000,00	0,05%	349.827.433.418,00	21,16%
2025	28.137.545.000,00	1,73%	5.642.000.000,00	0,35%	750.000.000,00	0,05%	350.177.433.418,00	21,51%
2026	28.137.545.000,00	1,73%	5.642.000.000,00	0,35%	750.000.000,00	0,05%	350.177.433.418,00	21,51%

Sumber: Analisis Bapelitbang, 2023



Beberapa jenis belanja prioritas nasional yang diamanatkan untuk didukung melalui belanja oleh Pemerintah Daerah adalah seperti belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting dan infrastruktur. Dari total rencana pendanaan yang dialokasikan, belanja infrastruktur mendapatkan porsi yang besar. Hal ini dikarenakan infrastruktur memiliki peran yang cukup vital dan dapat memberikan intervensi pada capaian target nasional terhadap belanja – belanja prioritas lainnya. Melalui pengalokasian rencana pendanaan tersebut, diharapkan target – target pembangunan daerah dan nasional mampu tercapai. Selain itu, menyikapi adanya pelaksanaan Pilkada Serentak yang berlangsung secara nasional pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengalokasikan prioritas belanja Tahun 2024 untuk pemberian hibah pada beberapa instansi terkait dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 tersebut.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Selain itu, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis Daerah. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

4.1.1 Permasalahan Terkait Indikator Makro Daerah

Permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari hasil kinerja indikator makro daerah. Pembahasan permasalahan makro daerah dengan mengidentifikasi ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu: permasalahan umum, akar masalah, masalah dan masalah pokok. Klasifikasi dimaksud akan diuraikan lebih lanjut pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 1 Permasalahan Terkait Indikator Makro Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Indeks Pembangunan Manusia Sebesar 72,55%	Belum tercapainya target rata – rata lama sekolah	Kurangnya pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Rendahnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan
		Belum tercapainya target Angka Harapan Hidup	Belum optimalnya sistem dalam menjalankan SPM Kesehatan Belum meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas Masih terbatasnya kesiagaan pelayanan kesehatan yang terjangkau
2.	Kemiskinan	Meningkatnya kemiskinan dibanding tahun sebelumnya	Melemahnya kondisi perekonomian Tingkat pengangguran
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Lapangan kerja	Terbatasnya lapangan pekerjaan
		Pendidikan	Ketidak cocokan antara pendidikan dengan



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya LPE non migas	ketersediaan lapangan pekerjaan Rendahnya daya saing produk selain komoditas migas
		Belum optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk unggulan Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana dasar
5	Rawan Pangan	Belum optimalnya penyediaan pangan	Masih terdapat pravelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang hingga berat masih ditemukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pada tahun 2019 sebesar 16 desa dan pada tahun 2020 sebesar 11 desa

4.1.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan disajikan pada tabel di ini



Tabel 4. 2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Aspek	Masalah	Akar Masalah
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
Pendidikan		
Belum meratanya pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara	Angka Melek Huruf Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sebesar 96,57%.	Masih tingginya keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengenyam pendidikan PAUD/KB/TK
	Persentase APK (85,73-106,15%) dan APM (70,11-99,91%) Pada tahun 2022	
	Angka RLS dan HLS berada di peringkat 2 terendah diantara Kabupaten/Kota lainnya, angka RLS dan HLS sebesar 8,51 tahun dan 12,7 berada dibawah angka capaian Provinsi yaitu RLS sebesar 9,92 tahun dan HLS sebesar 13,84 tahun	Kurangnya pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Rendahnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan
Kesehatan		
Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan prasarana kesehatan	Masih belum maksimalnya infrastruktur penunjang pembangunan Kesehatan sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah	Masih terbatasnya kesiagaan pelayanan kesehatan yang terjangkau Belum meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas Belum optimalnya sistem dalam menjalankan SPM Kesehatan
	Tingginya Angka stunting 21%	Masih terbatasnya kesiagaan pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dasar	Konektivitas & Aksesibilitas belum terhubung dengan baik (Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 26,43%)	Masih terdapat jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berkondisi rusak sepanjang 137,29 km dan berkondisi rusak berat sepanjang 147,606 km Kualitas jalan terbangun masih rendah (jenis permukaan jalan masih didominasi untuk tanah timbunan dan agregat) Belum meratanya Penerangan Jalan Umum (PJU) Rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi
	Masih rendahnya ketersediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air (Persentase cakupan air bersih 30,18%)	Belum tersedianya data dasar daerah irigasi beserta jaringannya yang berbasis teknologi informasi Belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air Belum terlaksananya peraturan tentang sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu



Aspek	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal	Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodir dinamika pembangunan
	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur	Belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan Masih minimnya kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
Perumahan Rakyat dan Permukiman		
Belum optimalnya penyediaan permukiman layak huni	Penyediaan permukiman yang layak masih belum optimal (RLH 25%)	Masih banyaknya rumah penduduk yang belum layak huni Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Masih banyak bidang tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Terbatasnya kemampuan penanganan kawasan kumuh
	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang belum optimal	Persentasi kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan kategori baik belum mencapai 100%. Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum Maksimalnya Tingkat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Infrastruktur penanganan bencana dan kebakaran belum tersedia maksimal Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih terkendala keterbatasan jumlah layanan pos pemadam
	Terbatasnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih Masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana
Belum Optimalnya pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kondisi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cakupan wilayah yang cukup luas merupakan kendala bagi Satuan Pamong Praja untuk melakukan pemantauan secara maksimal Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mematuhi peraturan. Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban belum memadai
Sosial		
Kemiskinan	Keterbatasan pemerintah daerah dalam upaya penjangkauan dan pendampingan PMKS	Ketidakpastian kehidupan yang layak dan bermartabat bagi kelompok rentan



Aspek	Masalah	Akar Masalah
	Masih ditemukannya data tidak valid dalam DTKS	Lemahnya sumber daya pembangunan bidang kesejahteraan sosial
	Belum adanya fasilitas penenangan kesejahteraan sosial pada level desa dan kelurahan	Lemahnya sumber daya pembangunan bidang kesejahteraan sosial
	Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi pada berbagai sektor	Lemahnya sumber daya pembangunan bidang kesejahteraan sosial
		Tidak meratanya kesempatan bagi kelompok rentan dalam peningkatan sosial ekonomi
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
Tenaga Kerja		
Pengangguran	Tingginya Jumlah Pengangguran (SD: 16%, SMP: 15%, SMA/SMK: 44%, S1: 25%)	<p>Belum adanya intervensi yang maksimal terhadap pembinaan dan pengembangan kualitas calon tenaga kerja</p> <p>Masih minimnya lapangan kerja yang tersedia di wilayah sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>Fasilitas pengembangan kualitas tenaga kerja masih minim</p> <p>Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar</p> <p>Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja</p> <p>Minimnya kesempatan kerja</p> <p>Kurangnya <i>link and match</i> angkatan kerja dengan Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI)</p>
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belum Optimalnya Kesetaraan Gender	<p>Belum maksimalnya pemberdayaan gender (PPU: 49,85%, Provinsi Kaltim 86,61%)</p> <p>Belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG dan PPA lembaga</p>	<p>Rendahnya capaian IDG dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur dengan capaian sebesar 49,75 pada tahun 2020 dan berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 65,54</p> <p>Peranan aktif perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal</p> <p>Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum berperan secara maksimal</p> <p>Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan</p>
Pangan		



Aspek	Masalah	Akar Masalah
Adanya potensi kerawanan pangan	Belum optimalnya penyediaan pangan	Masih terdapat pravelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang hingga berat masih ditemukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pada tahun 2019 sebesar 16 desa dan pada tahun 2020 sebesar 11 desa
		Penyebaran daerah sentra produksi tidak merata di setiap desa
		Terbatasnya infrastruktur sektor pertanian dalam arti luas
		Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan
Lingkungan Hidup		
Belum terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan memperhatikan perubahan iklim	Belum maksimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Peran serta masyarakat dan sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan air limbah
		Tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Tingginya potensi peningkatan emisi GRK akibat kebakaran lahan
		Minimnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana
		Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan memperkecil resiko bencana
	Terbatasnya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Data kependudukan belum akurat dan mutakhir	Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pencatatan sipil
	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa	Kurang optimalnya pendampingan terhadap lembaga- lembaga kemasyarakatan dan kelompok usaha ekonomi pedesaan	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal	Kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemerintahan Desa
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa



Aspek	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemerintahan Desa
	Terdapatnya beberapa wilayah kelurahan yang berdasarkan kriteria pemekaran wilayah perlu diubah menjadi desa	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
	Teknologi tepat guna belum dimanfaatkan secara optimal	Kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemerintahan Desa
	Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
	Lemahnya Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
	Lemahnya Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
	Stagnasi pencapaian program dan melemahnya implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Lini Lapangan.	Kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemerintahan Desa
	Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga dan pembangunan keluarga.	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
	Masih rendahnya akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB	Kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemerintahan Desa
	Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
		Kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemerintahan Desa



Aspek	Masalah	Akar Masalah
Perhubungan		
Belum Oprimalnya pelayanan perhubungan	Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan	<p>Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas pendukung perhubungan.</p> <p>Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat.</p> <p>Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dll).</p>
Komunikasi dan Informatika		
Belum maksimalnya layanan berbasis Teknologi Informasi	Belum tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi lingkup pemerintah daerah yang memadai (<i>Data Center, server, hardware</i> , sistem jaringan, dsb)	Masih rendahnya pemanfaatan IT dalam menjalankan manajemen pemerintahan
	Masih kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM pengelola Teknologi Informasi di lingkup pemerintah daerah	Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima
	Masih terdapat wilayah yang kesulitan akses jaringan komunikasi	Terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi
	Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai	Masih rendahnya pemanfaatan IT dalam menjalankan manajemen pemerintahan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Belum optimalnya kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah	Belum adanya penilaian kesehatan bagi koperasi maupun usaha kecil dan menengah.	
	Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola dan kesadaran anggota koperasi.	Rendahnya kualitas SDM Koperasi
	Minimnya pendampingan yang bersifat menyeluruh/terintegrasi bagi UMKM, mulai dari sisi kualitas SDM pelaku UMKM, akses terhadap sumber daya produktif, permasalahan infrastruktur, pemasaran hingga kualitas dan kuantitas SDM aparatur dalam pembinaan dan pendampingan UMKM.	<p>Masih lemahnya daya saing produk UMKM.</p> <p>Masih minimnya pelaku UMKM memanfaatkan aplikasi IT dalam pemasaran</p> <p>Belum optimalnya kinerja kelembagaan Koperasi dan UMKM</p> <p>rendahnya akses permodalan dalam pengembangan usaha</p> <p>Masih lemahnya pengelolaan pasar sebagai sarana promosi, distribusi dan pembentuk harga barang</p>
	Inovasi dan penerapan teknologi masih tergolong rendah.	Masih minimnya pelaku UMKM memanfaatkan aplikasi IT dalam pemasaran
	Rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan koperasi	Rendahnya kualitas SDM Koperasi



Aspek	Masalah	Akar Masalah
Penanaman Modal		
Belum Optimalnya pelayanan penanaman modal	Kurangnya data potensi unggulan daerah	Terbatasnya sumber daya manusia
	Data potensi penanaman modal belum memadai.	Masih minimnya pemanfaatan IT dalam pelayanan investasi daerah
	Dibutuhkan dukungan infrastruktur dan regulasi.	Masih minimnya pemanfaatan IT dalam pelayanan investasi daerah
	Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral antar Perangkat Daerah	Kebijakan investasi daerah belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan realisasi investasi daerah
Kebudayaan dan Pariwisata		
Belum optimalnya pemanfaatan budaya dan pariwisata daerah	Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dari luar daerah dan dunia internasional.	Masih terbatasnya SDM penunjang kepariwisataan daerah Minimnya sarana prasarana pendukung kepariwisataan
	Kurangnya promosi objek wisata.	Minimnya promosi produk wisata daerah
	Destinasi pariwisata belum dikembangkan secara optimal.	Masih terbatasnya SDM penunjang kepariwisataan daerah Minimnya sarana prasarana pendukung kepariwisataan Minimnya promosi produk wisata daerah
	Masih kurangnya sarana dan prasana penyelenggaraan seni dan budaya daerah.	Minimnya sarana prasarana pendukung kepariwisataan
	Keterbatasan aksesibilitas dalam menjangkau obyek wisata.	Minimnya sarana prasarana pendukung kepariwisataan
	Peran serta masyarakat masih cukup rendah dalam pengembangan obyek wisata setempat	Masih terbatasnya SDM penunjang kepariwisataan daerah
	Perpustakaan	
Belum optimalnya pelayanan perpustakaan	Kondisi geografis yang luas menyebabkan minat masyarakat (terutama kecamatan dengan jarak yang jauh) ke Perpustakaan daerah kurang	Belum optimalnya infrastruktur perpustakaan
	Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.	Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima
	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan yang masih harus ditingkatkan.	Belum optimalnya infrastruktur perpustakaan
	Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai	Belum optimalnya pelayanan perpustakaan



Aspek	Masalah	Akar Masalah
	wahana pembelajaran masyarakat	
Fokus Layanan Urusan Pilihan		
Perikanan dan Kelautan		
Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan daerah	Peningkatan produksi perikanan belum diikuti dengan penggunaan sarana tangkap yang ramah lingkungan	Masih rendahnya pengelolaan pasca panen dan nilai tambah produksi perikanan Rendahannya pemanfaatan teknologi dalam budidaya perikanan
	Sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan masih terbatas.	Belum optimalnya produksi benih perikanan dalam menunjang produksi perikanan daerah Rendahannya pemanfaatan teknologi dalam budidaya perikanan
	Keterbatasan tenaga penyuluh.	
	Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan dan kelautan	Masih rendahnya pengelolaan pasca panen dan nilai tambah produksi perikanan Rendahannya pemanfaatan teknologi dalam budidaya perikanan
Pertanian		
Belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian daerah	Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.	Belum optimalnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air pada lahan pertanian.	Terbatasnya kapasitas irigasi teknis dalam mendukung produktifitas pertanian
	Produktivitas peternakan masih belum optimal.	Produksi Hijauan Pakan Ternak yang masih rendah, reproduksi ternak yang belum optimal, ketersediaan indukan yang belum mencukupi
	Rendahannya kualitas produk peternakan dan nilai tambah dari pengolahan hasil peternakan masih sangat rendah.	Masih rendahnya nilai jual produk pertanian
	Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal.	Masih rendahnya nilai jual produk pertanian
Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk	Terbatasnya kapasitas SDM pertanian	



Aspek	Masalah	Akar Masalah
	meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang, antara lain dikarenakan menurunnya minat generasi muda bekerja pada sektor pertanian	
Ketahanan Pangan		
Adanya potensi permasalahan ketahanan pangan	Ketergantungan terhadap konsumsi pangan beras lebih tinggi daripada jenis pangan karbohidrat lainnya	Belum optimalnya jenis pangan karbohidrat lainnya
	Rendahnya ketahanan pangan terutama masyarakat miskin	Masih rendahnya ketahanan pangan
Fokus Layanan Penunjang Urusan		
Pengawasan		
Belum optimalnya fungsi pengawasan	Dari aspek Efektifitas dampak pemeriksaan, masih belum efektif terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
	Kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.	Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima
	Masih rendahnya penerapan pengendalian internal pemerintah pada tiap Perangkat Daerah	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
Belum optimalnya fungsi perencanaan dan pengendalian	Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dokumen perencanaan belum optimal.	Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
	Proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi belum terlaksana dengan baik.	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi
	Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.	Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
	Proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang	Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah



Aspek	Masalah	Akar Masalah
	lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.	
Belum optimalnya fungsi penelitian	Belum adanya tenaga peneliti dan standar baku mutu penelitian.	Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima
	Masih minimnya database kajian yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga untuk ditindak lanjuti menjadi suatu kebijakan belum terpantau.	Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
Belum optimalnya fungsi pengembangan	Belum terbangunnya sinergi dengan stake holder terkait penanganan keberlanjutan atau pengembangan program dan kegiatan	Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
Keuangan		
Belum optimalnya pendapatan daerah	Pengelolaan aset daerah masih belum optimal.	Belum optimalnya Perencanaan, Pengembangan dan Sistem layanan Informasi Pendapatan
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memberikan kontribusi yang memadai terhadap Pendapatan Daerah karena sangat tergantung potensi dan kompetensi daerah.	Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain
		Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah
		Tidak tertagihnya Piutang Pajak Daerah
	Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah	Tidak tertagihnya Piutang Pajak Daerah
Kepegawaian		
Kepegawaian	Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) masih relatif rendah.	Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan
	Distribusi dan jumlah ASN belum seimbang dengan beban kerja.	Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan
	Masih terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan
	Masih terbatasnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.	Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan



Aspek	Masalah	Akar Masalah
	Jumlah jabatan fungsional masih sangat terbatas	Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan
Pemerintahan Umum		
Belum optimalnya fungsi pelayanan pemerintahan umum	Fungsi koordinasi untuk Kerjasama dan sinergi pada seluruh instansi vertikal maupun instansi pemerintah daerah masih perlu dioptimalkan.	Belum optimalnya fungsi koordinasi dalam pemerintahan
	Kondisi geografis yang luas dan dengan beragamnya corak budaya masyarakat membuat upaya deteksi dini penanganan konflik sosial perlu upaya yang lebih kuat.	Terbatasnya sarana dan prasarana
	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan fungsi pemantauan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat	Terbatasnya sarana dan prasarana

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Isu strategis global mengambil sumber salah satunya dari *Sustainable Development Goal's (SDG's)* sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun TPB dimaksud memberikan panduan dalam pembangunan secara global yang berkelanjutan yang mencakup 4 (empat) dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan, yaitu:



Adapun indikator TPB berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim.
- 15) Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- 16) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- 17) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Selain SDG's, isu strategis global yang relevan dalam pembangunan daerah adalah implementasi dari pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku sejak tahun 2016. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah-daerah di Indonesia untuk mengembangkan produk dan jasa yang berkualitas dan berstandar internasional sehingga mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara tetangga. Di saat ini kita memiliki keunggulan komparatif, yaitu Bonus Demografi sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di daerah.

Pada dimensi yang lain, percepatan transformasi digital menjadi suatu keniscayaan dalam pembangunan di daerah. Adanya revolusi industri 4.0 dan society 5.0 merubah paradigma kita dalam berinteraksi dengan masyarakat dunia (netizen) melalui wahana internet ataupun media teknologi komunikasi dan infomasi yang sampai dengan saat ini masih terus berkembang dengan pesat. Revolusi industri ini sendiri lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi tinggi (high tech) dalam penyelesaian terhadap suatu pekerjaan, seperti: penggunaan kecerdasan buatan (artificial intellegent), komputasi awan (cloud computing), internet of things (IoT), pemanfaatan big data maupun augmented reality (AR) dan virtual reality (VR). Begitu pula dari sisi keuangan, dimana penggunaan virtual account dalam transaksi pembayaran juga sudah jamak dimanfaatkan di saat ini. Ditambah lagi dengan adanya transaksi keuangan dengan menggunakan cryptocurrency yang saat ini telah mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang di Indonesia untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun untuk society 5.0 lebih berfokus pada komponen manusia selaku pelaku maupun

pemanfaat dari revolusi industri 4.0. Sehingga, hal ini menuntut tersedianya sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan melek teknologi guna mampu berkompetisi dan unggul secara global (compete and win globally).

4.2.1.3 Pasca Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 ini masih kita rasakan dampaknya sampai dengan saat ini. Bidang kesehatan dan ekonomi merupakan dua sektor yang merasakan dampaknya paling dalam, dimana sektor-sektor yang lain pun mengalami imbas yang tidak sedikit pula. Pemerintah telah berupaya maksimal guna menganggulangi dampak luar biasa dari pandemi ini. Konsekuensinya adalah dibutuhkan adanya adaptasi dan penyesuaian terhadap kebijakan ini, terutama pada pembiayaan pembangunan di daerah. Realokasi dan refokusing anggaran daerah di tahun 2020 dan 2021 menjadi bukti yang nyata dampak serius dari adanya pandemi Covid-19 yang sampai dengan saat ini pun kita masih rasakan eksistensinya.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 RPJMN 2020-2024

Isu strategis nasional mengambil sumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, dimana terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya memuat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional. Adapaun agenda pembangunan dimaksud adalah:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- c. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- d. membangun kebudayaan dan karakter bangsa
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- f. mebangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- g. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Selain itu dengan dikeluarkannya instruksi presiden no 4 tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berisi tentang Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pada penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan Nota Keuangannya pada 16 Agustus 2022 yang lalu, Presiden Jokowi telah menyampaikan kebijakan fiskal tahun 2023, yaitu untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang mana agenda utama APBN 2023 akan difokuskan pada:

- a. Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial;
- b. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi;
- d. Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor; dan
- e. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Penguatan kualitas SDM masih menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan pada tahun 2023. Selain itu, percepatan penurunan stunting juga akan diperluas cakupannya pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

4.2.2.2 Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur

Ibu Kota Negara bernama Nusantara (Ibu Kota Nusantara) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada: Bagian Utara pada 117° O' 3L.292" Bujur Timur dan 0' 38'44.912" Lintang Selatan; Bagian Selatan pada 117° 1L' 51.903" Bujur Timur dan 1° 15'25.260" Lintang Selatan; Bagian Barat pada 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0° 59'22.510" Lintang Selatan; dan Bagian Timur pada 117° 1L' 2a.084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.398" Lintang Selatan.

Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare). Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara meliputi:

- a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare).

Batas wilayah Ibu Kota Nusantara yaitu:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
2. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
4. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:
 1. menjadi kota berkelanjutan di dunia;
 2. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
 3. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan Khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Serambi IKN. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan khususnya pada Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap nasional.

Pada tahun 2024, progres pengembangan kawasan IKN direncanakan akan selesai pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN seluas 5.600 Ha. Pembangunan jaringan jalan berupa jaringan jalan mikro dan RTH, sarana dan prasarana pendukung seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III dan IV), listrik (Tahap III) di kawasan IKN akan memberikan dampak pada kawasan disekitar IKN. Hal ini tentunya akan berdampak positif dan berpeluang terhadap iklim investasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara.

4.2.2.3 Inmendagri Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023, pasal 201 ayat 9 menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 atau pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

4.2.2.4 Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2045 Indonesia diproyeksikan akan menjadi bangsa yang maju dan kuat atau dikenal dengan istilah Indonesia Emas, salah satu faktor utamanya adalah penduduk Indonesia saat itu akan mengalami bonus demografi dimana jumlah penduduk Indonesia sangat produktif, yaitu angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun). Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam rangka menyongsong era tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah melakukan:

- a. Mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan.
- b. Meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah.
- c. Meningkatkan proses belajar mengajar siswa.
- d. Sangat menekankan pendidikan vokasi untuk mempersiapkan revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan.

Sumber Daya Manusia adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak *high-income growth*. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas human capital, yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan kesetaraan gender, dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain; bidang pendidikan, pemerintah percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Dalam menghadapi isu pembangunan digital, pemerintah memperkenalkan beberapa kebijakan strategis yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja, kedua meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, dan ketiga, meningkatkan kualifikasi, kebutuhan dan pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di seluruh negeri. Indonesia siap berkontribusi dan bekerjasama, karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasi human capital. Indonesia akan berkontribusi dalam kemitraan global melalui kerjasama Selatan-Selatan dan program kerjasama Triangular.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Buletin Konsumsi

Pangan Volume 12 Nomor 1 Tahun 2012, KONsumsi beras per kapita Indonesia cenderung menurun dari 107,71 kg/kapita/tahun pada tahun 202 menjadi 93,78 kg/kapita/tahun. Kondisi ini diperkirakan terjadi akibat peningkatan diverifikasi pangan, pengembangan pangan pokok local maupun meningkatnya konsumsi pangan dari produk lainnya. Akan tetapi melihat dari konsumsi beras domestic masih terus meningkat walaupun dilihat dari nilai per kapita menunjukkan penurunan. Konsumsi beras dan produk pangan lainnya yang terus meningkat harus diimbangi ketersediaan pasokan pangan. Kondisi ini sejalan dengan Undang Undang Pangan yang menyebutkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan keadaulatan pangan, kemandirian pangan serta ketahanan pangan. Selain itu, pemenuhan pangan di Indonesia juga berkaitan dengan bagaimana seluruh rakyat Indonesia hingga tingkat perseorangan dapat mendapatkan pangan dengan harga wajar (food security) yang juga didapatkan dengan memanfaatkan secara optimal semua sumber daya (food resiliency) dan menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan berdaulat (food sovereignty). Ketahanan pangan di Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan terus membaik. Pada tahun 2018 Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) mencapai angka 62,6 dan membawa Indonesia berada pada posisi ke 62 dunia. Penilaian GFSI sendiri terdiri dari aspek (!) Affordability, (2) Availabillity dan (3) quality and safe.

Kondisi pangan di Indonesia yang dapat dikatakan cukup baik, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang diantaranta;

1. Berkurangnya lahan pertanian akibat konversi lahan yang berdampak pada keberlanjutan produksi dan kualitas pangan
2. Supply and demand dari komoditas pangan yang belum seimbang
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan penguasaan teknologi serta kurangnya manajemen usaha tani dan pemasaran hasil
4. Adanya potensi keilangan hasil panen akibat tidak tepatnya penanganan mulai dari saat panen hingga pemasaran
5. Luas lahan pertanian per kapita yang terbatas
6. Sedikitnya jumlah penduduk yang berminat untuk bekerja di sektor pertanian
7. Industri agro masih di dominasi oleh perkebunan sawit
8. Adanya perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian

Selain permasalahan dan tantangan dalam perwujudan ketahanan pangan, masalah terkait krisis energi juga sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Pada tahun 2018, total produksi energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara, dan energi terbarukan mencapai 411,6 MTOE. Sebesar 64% atau 261,4 MTOE dari total produksi tersebut diekspor terutama batubara dan LNG. Selain itu, Indonesia juga melakukan impor energi terutama minyak mentah dan produk BBM sebesar 43,2 MTOE serta sejumlah kecil batubara kalori tinggi yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri. Data Kementerian ESDM mencatat konsumsi energi Indonesia pada 2017 mencapai 1,23 miliar Barrels Oil Equivalent (BOE) naik 9% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut yang berbentuk BBM mencapai 356,33 juta BOE atau 28,88% dari total konsumsi. Total konsumsi energi final (tanpa biomasa tradisional) tahun 2018 sekitar 114 MTOE terdiri dari sektor transportasi 40%, kemudian industri 36%, rumah tangga 16%, komersial dan sektor lainnya masing-masing 6% dan 2%.

Dalam upaya penyediaan akses dan pemerataan energi, Indonesia berupayabuntuk menyediakan energi terbarukan dalam rangka mengejar target pemanfaatan energi terbarukan sebesar 23%. Akan tetapi, upaya tersebut masih menghadapi banyak permasalahan dan tantangan yang diantaranya adalah

1. Biaya produksi listrik dari pembangkit energi terbarukan masih dinilai lebih tinggi dan dianggap kurang kompetitif dibandingkan epembangkit konvensional
2. Beberapa komponen pembangkit listrik energi terbarukan masih didapatkan dari proses impor sehingga mempengaruhi harga produksi serta pemeliharaan
3. Belum maksimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pemeliharaan dan perawatan
4. Kebijakan dalam negeri dinilai belum dapat menarik investor di sektor energi terbarukan
5. sifat beberapa sumber energi terbarukan yang intermittent (tidak kontinyu) dan tidak dapat ditransportasikan sehingga harus dibangkitkan di lokasi setempat

Adanya reformasi demokrasi menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Reformasi demokrasi pada akhirnya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah. Komitmen pemerintah untuk dapat mewujudkan reformasi birokrasi yaitu dengan cara mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Prinsip – prinsip tersebut tentunya harus diadaptasi dan diterapkan pada berbagai aspek pemerintahan mulai dari aparatur hingga pelaksanaan kelembagaan. Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi, tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan seperti :

1. Perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan
2. Perlu adanya penyesuaian struktur organisasi dan jumlah pegawai untuk memaksimalkan pelayanan
3. Masih perlu mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi
4. Pembentukan terkait budaya kerja yang harus mengedepankan sikap profesionalisme bagi aparatur

Pemerintah telah memiliki strategi nasional ekonomi digital untuk memastikan berbagai inisiatif dan program terkait dapat terimplementasi dengan

efektif. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi di berbagai sektor seperti infrastruktur *fiber optic*, pembuatan prototipe *low earth satellite*, pengembangan data center, serta digitalisasi sektor industri, kesehatan, dan pendidikan. Dalam bentuk sektoral digitalisasi, Indonesia telah meluncurkan industri 4.0 di tahun 2018 lalu yang ke depannya juga dapat menjadi *game changer* karena antara industri dan *service* akan tergabung dengan adanya digitalisasi. Di sektor kesehatan, Indonesia berhasil menangani Covid-19 dengan memanfaatkan digitalisasi yaitu melalui aplikasi PeduliLindungi yang telah diinstall oleh lebih dari 10 juta masyarakat. Di tahun kedua pandemi Covid-19, Indonesia menangani Covid-19 menggunakan *digital health service* atau *telemedicine*. Upaya Indonesia dalam melakukan digitalisasi telah diakui berbagai negara. Utamanya tentang Program Kartu Prakerja sebagai salah satu bentuk sistem *financial inclusion* dalam bentuk *Government to Public* yang dilakukan Indonesia. Selain itu sektor pendidikan sangat penting untuk penciptaan *digital talent* dalam mendukung berbagai langkah digitalisasi yang tengah gencar dilakukan oleh Indonesia. Melalui kemajuan digitalisasi di berbagai sektor, terutama di sektor Pendidikan, kesehatan, industri dan ekonomi serta bisnis, Indonesia bisa segera keluar dari masalah kesejahteraan, kesehatan, dan kualitas SDM yang relatif rendah. Sebab, kunci kemajuan dan penguatan daya saing global Indonesia ada sepenuhnya di tangan warga/penduduk yang sehat, sejahtera dan berkualitas, dalam arti memiliki kompetensi dan skill yang sesuai dengan tren kehidupan umat manusia yang semakin digital.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur

Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.

Permasalahan pembangunan yang muncul pada pulau Kalimantan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam;
- b. Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana terutama kebakaran hutan dan lahan, serta banjir;

- c. Tingginya ancaman kerusakan hutan yang mengakibatkan terancamnya peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia;
- d. Belum optimalnya peran daerah perbatasan;
- e. Menurunnya penerimaan daerah akibat ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah sehingga perekonomian Kalimantan rentan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar global; dan
- f. Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.

Oleh karena itu, strategi pembangunan Wilayah Kalimantan akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*)

- 1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
 - Peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
 - Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
 - Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
 - Pelaksanaan pembangunan afirmatif
- 2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain:
 - Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP;
 - pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
 - revitalisasi kawasan transmigrasi;
 - pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
 - pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan pada Kawasan Industri (KI) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
 - pengembangan kawasan

- perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan
 - dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;
 - pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan
 - penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
- peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
 - pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat
 - pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
 - percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.
- 4) Penguatan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan dilakukan melalui antara lain:
- pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan
 - pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
- peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
 - peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan;
 - adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
 - peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
 - peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten/Kota Berbatasan

4.2.4.1 Kota Balikpapan

Penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain memperhatikan vertikalitas dokumen perencanaan pemerintahan di atasnya, perlu untuk memperhatikan arah pembangunan dari daerah yang berbatasan dengannya. Oleh karenanya, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu untuk meninjau arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan pembangunan antar kedua daerah dalam menggarap sektor-sektor potensial.

Dalam proses perencanaan pembangunannya, Kota Balikpapan merumuskan beberapa isu strategis, berikut adalah penjabarannya:

1. Menyediakan Pelayanan Dasar Dalam Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
2. Penyediaan Kebutuhan Dasar Sarana dan Prasarana;
3. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengendalian Pencemaran;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Menyediakan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat; dan
6. Peningkatan Ekonomi Bagi SDA dan SDM di Kota Balikpapan.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka disusunlah visi pembangunan daerah sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun visi daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”. Untuk mewujudkan visi daerah Kota Balikpapan, maka disusun beberapa misi untuk mencapai visi tersebut. Berikut adalah penjabaran misi tersebut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan; dan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Berdasarkan telaah RPJMD Kota Balikpapan, isu strategis yang berkaitan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut

- Peningkatan akses Jembatan Tol Teluk Balikpapan dengan pembangunan jalan *Coastal Road* sehingga akses jalan tersebut dapat menyatu dengan jalan pada Kawasan Coastal Area yang akan dibangun oleh Kota Balikpapan.
- Pembangunan jembatan Pulau Balang, jembatan Nipah-Nipah-Melawai yang merupakan salah satu cara menghubungkan antar-wilayah yang dipisahkan oleh teluk.
- pembangunan *Crude Central Terminal* (CCT) di Kelurahan Lawe-lawe untuk pengembangan industri kelapa sawit. Pembangunan CCT Lawe-lawe ini dapat mendistribusikan hasil minyak dari dua kilang yang berdekatan, yakni pengembangan kilang "*Refinery Development Master Plan*" (RDMP) Balikpapan.

4.2.4.2. Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain memperhatikan vertikalitas dokumen perencanaan pemerintahan di atasnya, perlu untuk memperhatikan arah pembangunan dari daerah yang berbatasan dengannya. Oleh karenanya, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu untuk meninjau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dimaksudkan agar terjadi

keselarasan pembangunan antar kedua daerah dalam menggarap sektor-sektor potensial. Dalam proses perencanaan pembangunannya, Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan beberapa isu strategis, berikut adalah penjabarannya:

1. Implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh;
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya;
4. Pengembangan perekonomian berkelanjutan;
5. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
6. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah;
7. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan; dan
8. Penataan ruang dan sumber daya air (air baku dan irigasi).

Berdasarkan isu strategis tersebut maka disusunlah visi pembangunan daerah sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun visi daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia”. Untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disusun beberapa misi untuk mencapai visi tersebut. Berikut adalah penjabaran misi tersebut:

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah; dan
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Kabupaten Kukar menjadi salah satu *pilot project* khususnya sebagai daerah *Cultural Heritage*, selain pengembangan kawasan Pangan dan Holtikultura di Kecamatan Loa Kulu. Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mendukung pengembangan kawasan tersebut, dimana arah pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu mengembangkan agrobisnis subsistem hulu dan Agroindustri.

4.2.4.3. Kabupaten Paser

Penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain memperhatikan vertikalitas dokumen perencanaan pemerintahan di atasnya, perlu untuk memperhatikan arah pembangunan dari daerah yang berbatasan dengannya. Oleh karenanya, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu untuk meninjau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Paser. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan pembangunan antar kedua daerah dalam menggarap sektor-sektor potensial.

Dalam proses perencanaan pembangunannya, Kabupaten Paser merumuskan beberapa isu strategis, berikut adalah penjabarannya:

1. Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah
2. Kualitas pembangunan manusia yang dilihat melalui IPM dengan pertumbuhan yang cenderung melambat
3. Kinerja tata Kelola pemerintahan yang belum optimal
4. Tidak berkembangnya ekonomi local melihat dari kewirausahaan yang redah, intervensi pemerintah yang tidak tepat dan pasar yang belum tampak
5. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Rencana Pembangunan Bendungan Lambakan dan Telake di Kecamatan Long Kali
7. Pengembangan Food Estate dan Mini Ranch
8. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Isu strategis tersebut berkaitan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, rencana pembangunan bendungan lambakan dan telake di Kecamatan Long Kali serta rencana pengembangan *food estate* atau perkampungan industry pangan. Status Kabupaten Paser sebagai daerah mitra IKN akan menarik masyarakat untuk datang dan tinggal di Kabupaten Paser, yang mana hal ini membutuhkan persiapan dalam aspek pengembangan SDM, pendidikan, sarana dan prasarana maupun pengawasan terhadap lingkungan. Untuk mendukung kebutuhan pangan di ibu kota baru yang direncanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan *food estate*. Lahan yang disiapkan yaitu untuk *food estate* itu terbagi di dua kabupaten yang berdekatan dengan ibu kota Negara, Berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Selain itu, terdapat pula rencana pengembangan *mini ranch* (kandang penggembalaan mini) ternak sapi di Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Barat dan Penajam Paser Utara. Selain itu Pembangunan Bendungan Telake berada di Kabupaten Penajam Paser Utara direncanakan menjadi sumber pengairan. Bendungan ini direncanakan dibangun di atas lahan seluas 166.415 hektare beserta saluran irigasinya. Bendung ini diproyeksikan memakan biaya Rp 1,7 triliun bersumber APBN dengan dengan skema pekerjaan multi years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dengan target selesai 2023 atau 2024. Jika rampung, Bendungan ini berpotensi mengairi sawah seluas 21.000 hektare pada dua kabupaten yakni PPU dan Paser. Selain sawah, 15 desa di dua kabupaten itu juga menggantungkan kebutuhan air dengan Bendungan Telake.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka disusunlah visi pembangunan daerah sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun visi daerah dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah “Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Paser,

maka disusun beberapa misi untuk mencapai visi tersebut. Berikut adalah penjabaran misi tersebut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang professional, partisipatif, dan transparan;
3. Mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

4.2.4.4. Kabupaten Kutai Barat

Penyusunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain memperhatikan vertikalitas dokumen perencanaan pemerintahan di atasnya, perlu untuk memperhatikan arah pembangunan dari daerah yang berbatasan dengannya. Oleh karenanya, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu untuk meninjau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Barat. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan pembangunan antar kedua daerah dalam menggarap sektor-sektor potensial. Dalam proses perencanaan pembangunannya, Kabupaten Kutai Barat merumuskan beberapa isu strategis, berikut adalah penjabarannya:

1. Kemiskinan dan ketimpangan
2. Kebijakan inovasi daerah
3. Peningkatan kesempatan kerja
4. Peningkatan kualitas kesehatan
5. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan

Berdasarkan isu strategis tersebut maka disusunlah visi pembangunan daerah sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun visi daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 adalah “Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera, Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia”. Untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Kutai Barat, maka disusun beberapa misi untuk mencapai visi tersebut. Berikut adalah penjabaran misi tersebut:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel; dan
4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.

4.2.5 Isu Strategis Lokal

4.2.5.1. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025, yaitu:

- a. Kabupaten Penajam Paser Utara juga mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar dan dapat dijadikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi baru berdiri pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara ini sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Pasir karena telah terpenuhinya berbagai persyaratan dan pertimbangan berdasarkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

4.2.5.2. Isu strategis kewilayahan bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten PPU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PPU Tahun 2013-2033, sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal
- b. Pengembangan industri lokal dan agroindustri yang berdaya saing dan berpotensi
- c. Pengembangan perikanan tangkap dengan memperhatikan aspek ekologis
- d. Pengembangan potensi pertambangan yang berlandaskan pada aspek keseimbangan ekologis dan sosial budaya lingkungan sekitar
- e. Pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana
- f. Pengembangan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan
- g. Pengendalian secara ketat pada kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan negara

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi isu strategis internasional, nasional, provinsi dan dapat dipetakan sebagaimana dalam Tabel 4.3.



Tabel 4. 3 Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten

ISU STRATEGIS				
INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN (LOKAL)	
			JANGKA PANJANG	KEWILAYAHAN
<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa kemiskinan • Tanpa kelaparan • kehidupan sehat dan sejahtera • pendidikan berkualitas • kesetaraan gender • air bersih dan sanitasi layak • energi bersih dan terjangkau • pekerjaan layak dan • pertumbuhan ekonomi • industri, inovasi dan infrastruktur • berkurangnya kesenjangan • kota dan permukiman yang berkelanjutan • konsumsi dan produksi yang berkelanjutan • penanganan perubahan iklim • ekosistem lautan • ekosistem daratan • perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang • Tangguh • kemitraan untuk mencapai tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> • memperkuat ketahanan ekonomi pertumbuhan berkualitas • mengembangkan wilayah mengurangi untuk yang untuk kesenjangan • meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • membangun kebudayaan dan karakter bangsa • memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim • memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik • Pemindahan IKN • Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 • Peningkatan kualitas SDM • Pasokan energi dan pangan • Reformasi Birokrasi Digitalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; • Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana terutama kebakaran hutan dan lahan, serta banjir; • Tingginya ancaman kerusakan hutan yang mengakibatkan terancamnya peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia; • Belum optimalnya peran daerah perbatasan; • Menurunnya penerimaan daerah akibat ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah sehingga perekonomian Kalimantan rentan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar global; dan • Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Penajam Paser Utara juga mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal • Pengembangan industri lokal dan agroindustri yang berdaya saing dan berpotensi • Pengembangan perikanan tangkap dengan memperhatikan aspek ekologis • Pengembangan potensi pertambangan yang berlandaskan pada aspek keseimbangan ekologis dan sosial budaya lingkungan sekitar • Pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana • Pengembangan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan • Pengendalian secara ketat pada kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan • Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan negara

4.2.6 Perumusan Isu Strategis

Dari kajian terhadap permasalahan yang telah digambarkan pada uraian sebelumnya serta memperhatikan isu strategis internasional, nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2026 adalah sebagai berikut:



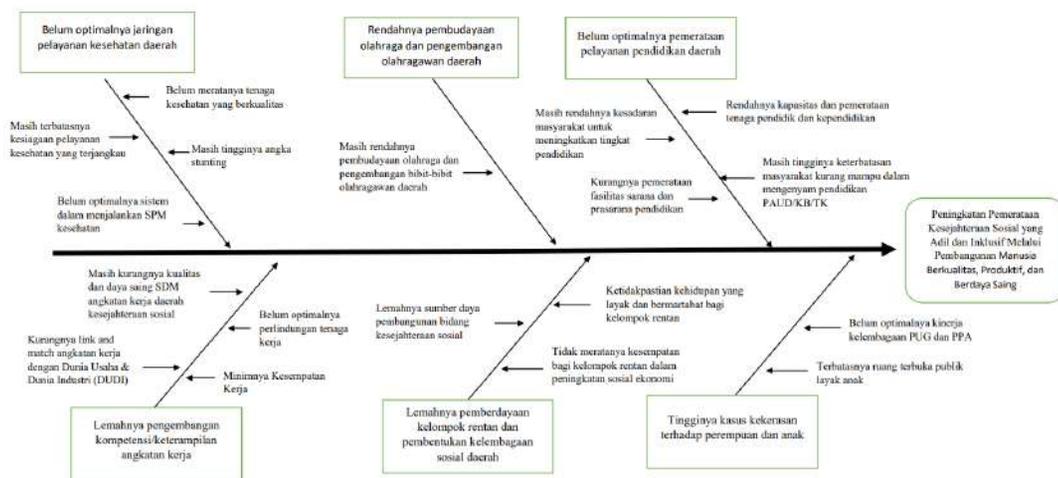
Sumber : Bappedalitbang, 2023

1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif

Penduduk Penajam Paser Utara pada berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 tercatat 178.681 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 92.506 Jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 86.175 jiwa. Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur diketahui bahwa penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh penduduk usia muda. Jumlah penduduk dengan usia produktif cukup mendominasi dalam komposisi penduduk secara keseluruhan sehingga dapat menjadi modal penting terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia secara umum di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi ini juga menandai bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara juga relatif lebih besar dan dominan sehingga perlu dipikirkan mengenai jumlah dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berpengaruh terhadap produktivitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu jumlah penduduk dengan rentang usia balita hingga remaja juga cukup besar sehingga dapat menjadi fokus utama terhadap peningkatan sektor pendidikan yang akan menjadi modal dalam peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam pembangunan daerah. Aspek tersebut menjadi begitu penting karena tingginya kualitas, daya saing serta produktivitas sumber daya manusia dapat menentukan bagaimana kondisi daerah kedepannya. Sebagai upaya peningkatan kualitas, daya saing serta produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan optimalisasi bidang pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan non formal. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang muncul seiring dengan adanya potensi pertanian yaitu dari segi produksi

pertanian hingga pemasaran produk pertanian. Para petani, khususnya petani padi di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan sistem sawah tadah hujan, yang dimana sistem tersebut sangat mengandalkan kondisi alam dalam pemenuhan kebutuhan pengairan. Sehingga pada kondisi musim yang tidak menentu seperti kekeringan atau curah hujan tinggi, kemungkinan gagal panen akan semakin tinggi atau meningkat. Permasalahan lainnya adalah ketersediaan pupuk yang digunakan para petani sering kali terjadi kelangkaan yang diiringi dengan meningkatnya harga pupuk. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap biaya produksi petani yang tentunya berpengaruh terhadap harga jual (gabah atau beras). Selain itu, saat masa panen dengan produksi melimpah, petani seringkali kesulitan dalam memasarkan hasil panennya. Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah maupun non pemerintah untum dapat membantu dari segi pemasaran hasil pangan.

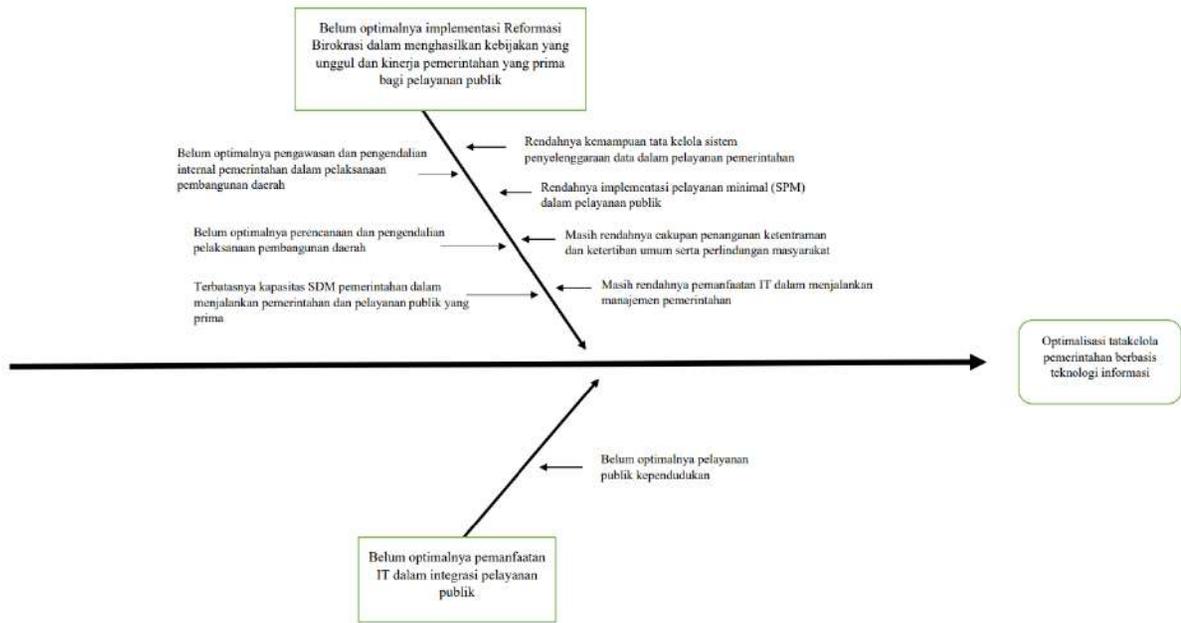


2. Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi

Pelayanan publik menjadi hal penting dalam penerapan good governance di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelayanan publik yang murah, cepat, mudah serta didukung dengan teknologi informasi yang maksimal perlu diupayakan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara masih mengalami beberapa permasalahan utama yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan publik. Masih kurangnya tingkat keefektifan dan efisiensi dari segi waktu dan biaya pelayanan serta transparansi alur dan proses pelayanan menjadi permasalahan yang perlu segera ditingkatkan. Proses pelayanan publik dinilai masih belum efektif dan efisien khususnya dari segi waktu karena waktu pelayanan dapat mencapai waktu 1 bulan pada beberapa instansi. Selain itu, proses pelayanan terkesan rumit dan tidak transparan. Kondisi ini ditunjukkan dari tidak jelasnya alur pelayanan dan terkesan berbelit belit.

Pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri sudah didukung dengan adanya sistem informasi berupa Aplikasi GO PPU. Aplikasi tersebut dikelola oleh Disdukcapil yang diluncurkan pada bulan april tahun 2022. Akan tetapi,

adanya aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.



3. Peningkatan pelayanan infrastruktur yang berorientasi pelayanan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan

Infrastruktur dasar pada umumnya terdiri dari infrastruktur listrik, telekomunikasi, jalan, sanitasi, air bersih dan drainase. Ketersediaan infrastruktur dasar yang optimal dapat mendukung dan meningkatkan akses masyarakat dalam menjangkau sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

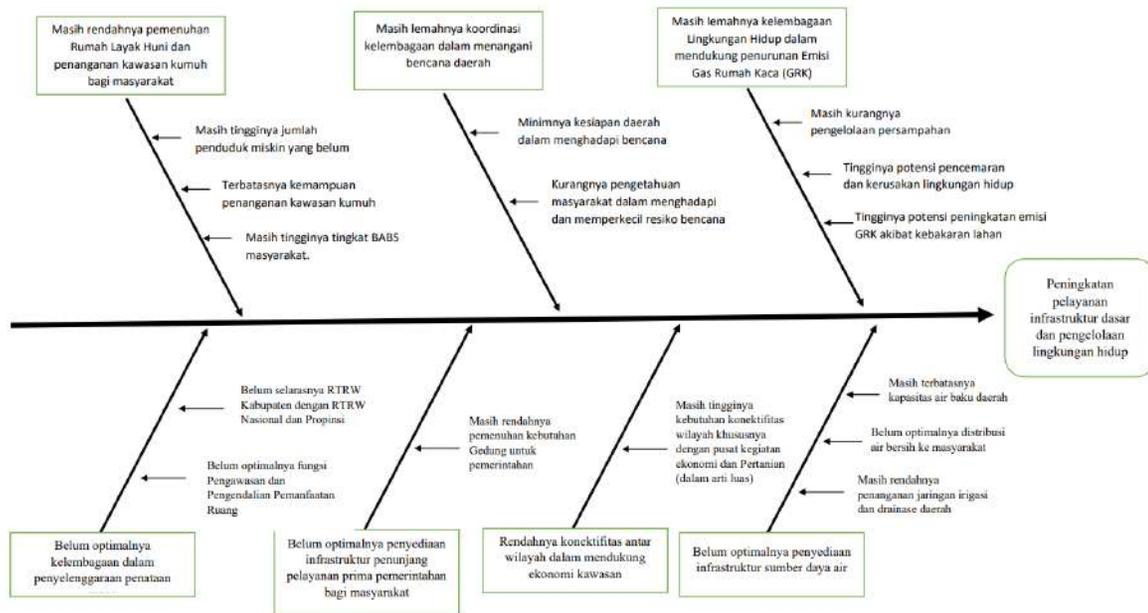
Infrastruktur air bersih di Kecamatan Penajam Paser Utara masih dinilai belum maksimal. Kondisi tersebut dapat diketahui dari persentase pelayanan air minum perpipaan di tahun 2022 yang masih berkisar di angka 25%. Hal ini terjadi karena masyarakat yang berada diluar cakupan PDAM yang tidak mendapatkan akses air bersih memilih untuk menggunakan sumber air lainnya seperti mata air, sumur, embung, penampungan air dan WTP. Pelayanan air bersih perlu ditingkatkan baik dari segi peningkatan cakupan rumah tangga yang terlayani maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Sedangkan untuk infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Alam menunjukkan kondisi yang belum maksimal. Melihat dari kondisi jalannya, hanya sekitar 35% jalan yang memiliki kondisi jalan baik (mantap) sedangkan 65% lainnya masih termasuk kedalam kondisi jalan sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Berdasarkan kondisi tersebut tentunya perlu diusahakan untuk meningkatkan kondisi jalan menjadi kondisi baik yang bertujuan untuk meningkatkan aksibilitas antar wilayah dan mendorong pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan hampir diseluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui keberadaan UPT-PU di keempat

kecamatan. Mekanisme UPT-PU sangat membantu mewujudkan kehadiran pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik pada sektor infrastruktur bagi masyarakat. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, daya saing dan iklim investasi.

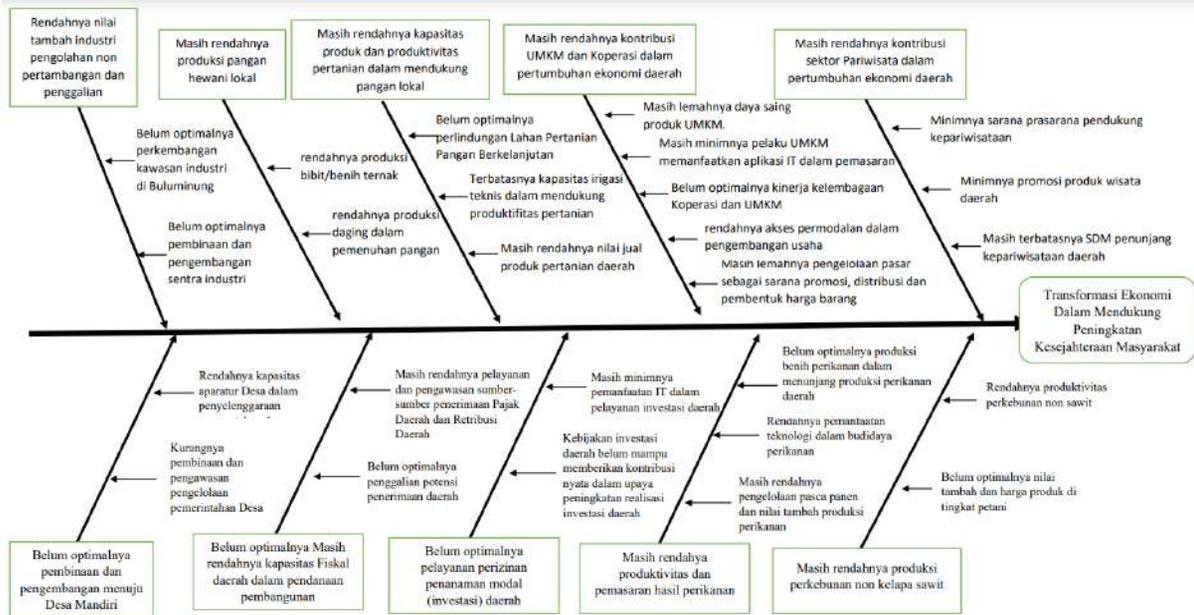
Pembangunan Infrastruktur dasar akan menarik investasi masuk ke kawasan industri Buluminung (KIB) dan menjadikannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Kalimantan Timur.



4. Transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 sebesar 6,49 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2020 sebesar 6,60 triliun rupiah. Kondisi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami penurunan dapat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga diperlukan adanya perbaikan sistem perekonomian yang dapat dipercepat oleh perbaikan kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang diikuti oleh peningkatan pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Selain itu dapat juga didukung dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan

dorongan bantuan pendampingan dan stimulan dana. Menanggulangi Kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok Masyarakat minoritas, terpinggirkan dan terpinggirkan melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan pedesaan dan kelurahan.



Guna menjamin keterkaitan antara permasalahan daerah dan isu strategis daerah, maka akan disajikan dalam Tabel 4.4.



Tabel 4. 4 Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Isu Strategis
1	Masih rendahnya daya saing SDM dan angkatan kerja APM SD : 99,91 % APM SMP : 83,07% , SMA: 70,11% (2022) HLS : 12.7 Tahun (2021) Prestasi Olahraga : 8 Medali (2021) IPM : 72.55 (Provinsi 77.44; Nasional 72.29) (2022)	Belum optimalnya pemerataan pelayanan pendidikan daerah	Kurangnya pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Rendahnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan Masih tingginya keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengenyam pendidikan PAUD/KB/TK Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan	Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif
		Masih rendahnya pembudayaan olahraga dan pengembangan bibit-bibit olahragawan daerah	Masih rendahnya pembudayaan olahraga dan pengembangan bibit-bibit olahragawan daerah	
		Belum optimalnya jaringan pelayanan kesehatan daerah	Belum meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas Masih terbatasnya kesiagaan pelayanan kesehatan yang terjangkau Belum optimalnya sistem dalam menjalankan SPM Kesehatan	
		Lemahnya pengembangan kompetensi/keterampilan angkatan kerja	Masih tingginya angka stunting Masih kurangnya kualitas dan daya saing SDM angkatan kerja daerah Kurangnya <i>link and match</i> angkatan kerja dengan Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja Minimnya kesempatan kerja	
2	Masih tingginya angka kemiskinan	Lemahnya pemberdayaan kelompok rentan dan pembentukan kelembagaan sosial daerah	Ketidakpastian kehidupan yang layak dan bermartabat bagi kelompok rentan Tidak meratanya kesempatan bagi kelompok rentan dalam peningkatan sosial ekonomi Lemahnya sumber daya pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
3	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan hidup	Masih lemahnya kelembagaan Lingkungan Hidup dalam mendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Masih kurangnya pengelolaan persampahan Tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Tingginya potensi peningkatan emisi GRK akibat kebakaran lahan	Peningkatan pelayanan infrastruktur yang berorientasi pelayanan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan
		Masih lemahnya koordinasi kelembagaan dalam menangani bencana daerah	Minimnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan	



		memperkecil resiko bencana	
	Masih rendahnya pemenuhan Rumah Layak Huni dan penanganan kawasan kumuh bagi masyarakat	Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni	
		Terbatasnya kemampuan penanganan kawasan kumuh	
		Masih tingginya tingkat BABS masyarakat.	
	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur sumber daya air	Masih terbatasnya kapasitas air baku daerah	
		Belum optimalnya distribusi air bersih ke masyarakat.	
		Masih rendahnya penanganan jaringan irigasi dan drainase daerah	
	Rendahnya konektifitas antar wilayah dalam mendukung ekonomi kawasan	Masih tingginya kebutuhan konektifitas wilayah khususnya dengan pusat kegiatan ekonomi dan Pertanian (dalam arti luas)	
	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur penunjang pelayanan prima pemerintahan bagi masyarakat	Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan Gedung untuk pemerintahan	
	Belum optimalnya kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Belum selarasnya RTRW Kabupaten dengan RTRW Nasional dan Propinsi	
		Belum optimalnya fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Masih rendahnya kontribusi sektor Pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Minimnya sarana prasarana pendukung kepariwisataan	
		Minimnya promosi produk wisata daerah	
		Masih terbatasnya SDM penunjang kepariwisataan daerah	
		Masih lemahnya daya saing produk UMKM.	
	Masih rendahnya kontribusi UMKM dan Koperasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Masih minimnya pelaku UMKM memanfaatkan aplikasi IT dalam pemasaran	
		Belum optimalnya kinerja kelembagaan Koperasi dan UMKM.	
		rendahnya akses permodalan dalam pengembangan usaha	
		Masih lemahnya pengelolaan pasar sebagai sarana promosi, distribusi dan pembentuk harga barang	
		Belum optimalnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
4	Belum optimalnya transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terbatasnya kapasitas irigasi teknis dalam mendukung produktifitas pertanian	Transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Masih rendahnya kapasitas produk dan produktivitas pertanian dalam mendukung pangan lokal	Masih rendahnya nilai jual produk pertanian	
	Masih rendahnya produksi pangan hewani lokal	1. rendahnya produksi bibit/benih ternak	
		2. rendahnya produksi daging dalam pemenuhan pangan	
	Masih rendahnya produksi perkebunan non kelapa sawit	Rendahnya produktivitas perkebunan non sawit	
		Belum optimalnya nilai tambah dan harga produk di tingkat petani	



	Masih rendahnya produktivitas dan pemasaran hasil perikanan	<p>Belum optimalnya produksi benih perikanan dalam menunjang produksi perikanan daerah</p> <p>Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam budidaya perikanan</p> <p>Masih rendahnya pengelolaan pasca panen dan nilai tambah produksi perikanan</p>	
	Belum optimalnya pelayanan perizinan penanaman modal (investasi) daerah	<p>Masih minimnya pemanfaatan IT dalam pelayanan investasi daerah</p> <p>Kebijakan investasi daerah belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan realisasi investasi daerah</p>	
	Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non pertambangan dan penggalian	<p>Belum optimalnya perkembangan kawasan industri di Buluminung</p> <p>Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan sentra industri</p>	
	Masih rendahnya kapasitas Fiskal daerah dalam pendanaan pembangunan.	<p>Masih rendahnya pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Belum optimalnya penggalian potensi penerimaan daerah</p>	
5	Tata kelola pemerintahan belum bertransformasi optimal dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan menuju Desa Mandiri	Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi
	Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dalam menghasilkan kebijakan yang unggul dan kinerja pemerintahan yang prima bagi pelayanan publik	<p>Rendahnya implementasi pelayanan minimal (SPM) dalam pelayanan publik</p> <p>Masih rendahnya cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</p> <p>Masih rendahnya pemanfaatan IT dalam menjalankan manajemen pemerintahan</p> <p>Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima</p> <p>Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah</p> <p>Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah</p>	



Belum optimalnya pemanfaatan IT
dalam integrasi pelayanan publik

Tingginya kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Kasus KDRT : 40 Kasus (2022*)

Belum optimalnya pelayanan publik kependudukan

Belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG dan PPA

Terbatasnya ruang terbuka publik layak anak



Tabel 4. 5 Konsep Perumusan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024(Perpres No.18 Th 2020)	Misi RPJPD Kab. PPU Tahun 2005 – 2025 (Perda No. 1 Th. 2012)	Misi RPJMD Kab. PPU Tahun 2018 - 2023 (Perda No. 1 Th. 2019)	Prioritas Pembangunan RPD Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026	Prioritas Pembangunan RPD Kab. PPU Tahun 2024 - 2026
Meningkatkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik	Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Mewujudkan revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi			
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat	Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas		
Meningkatkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Percepatan transformasi ekonomi	Transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustry	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran Mengakselerasi laju mesin - mesin pertumbuhan dalam proses agribisnis, agroindustri, pariwisata, perdagangan dan jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan		
Memperkuat infrastruktur dengan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Mewujudkan jaringan infrastruktur transportasi dan prasarana utiliti yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan serta industri terpadu	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur	Peningkatan pelayanan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman		
Membangun lingkungan	Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan		Menjaga kualitas	



Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024(Perpres No.18 Th 2020)	Misi RPJPD Kab. PPU Tahun 2005 – 2025 (Perda No. 1 Th. 2012)	Misi RPJMD Kab. PPU Tahun 2018 - 2023 (Perda No. 1 Th. 2019)	Prioritas Pembangunan RPD Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026	Prioritas Pembangunan RPD Kab. PPU Tahun 2024 - 2026
hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	lingkungan		lingkungan hidup	
Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima	<p>Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas</p> <hr/> <p>menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas</p> <hr/> <p>Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah</p> <hr/> <p>Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religious</p>	Pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan.

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah. Berdasarkan pemahaman dasarnya, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 meliputi 5 tujuan dan 14 sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

5.1. Tujuan

Penentuan tujuan ini sekurangnya harus mencakup empat kriteria berikut:

- 1) Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah;
- 2) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
- 3) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah; dan
- 4) Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi pemerintah daerah.

Tujuan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan;
2. Peningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatkan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing; dan
5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.



Gambar 5.1 Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2024 - 2026

Penjelasan singkat tujuan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

5.1.1 Tujuan 1: Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Secara sederhana kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tersebut ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kedua, semakin jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin berkurang kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk pada Kabupaten Penajam Paser Utara.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan indikasi bahwa sejalan dengan semakin tingginya tingkat ketimpangan, tensi sosial juga akan semakin meningkat. Lingkungan dengan tensi sosial yang tinggi secara umum memiliki tingkat kerawanan konflik dan tindakan kriminal. Situasi ini pada akhirnya akan menurunkan keramahan lingkungan bagi dunia usaha, investasi tidak akan berkembang, sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan lainnya. Ketimpangan juga menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena ketika pertumbuhan terjadi di suatu konteks perekonomian yang tidak inklusif atau timpang, maka hasil pertumbuhan ekonomi cenderung semu dan hanya dinikmati oleh pelaku ekonomi dengan tingkat pendapatan teratas saja.

Oleh karena itu diperlukan langkah terobosan dalam mengatasi ketimpangan melalui langkah afirmatif untuk “meredistribusi pendapatan dari kalangan teratas

ke kalangan terbawah, melalui serangkaian kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menempatkan pemerataan sebagai penjurunya. Penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan.



Gambar 5. 1 Tujuan dan Sasaran 1

5.1.2 Tujuan 2 : Peningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, Kabupaten Penajam Paser Utara juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lain yang telah lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan, mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia.

Konsep indikator pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan lajur pertumbuhan. Peningkatan kualitas SDM sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia sebagai insan manusiayang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah kepribadian dan kejuangan.

Upaya peningkatan SDM sangat berkaitan dengan beberapa hal. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani serta kualitas kehidupan seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya;

Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK; serta Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.

Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang tangguh dan berkualitas secara fisik dan mental akan berdampak pada peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, serta berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain: peningkatan sistem pendidikan yang baik dan bermutu; peningkatan sistem layanan kesehatan; peningkatan kesejahteraan keluarga dan responsif gender; serta peningkatan peran setara kelembagaan dan budaya. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK.



Gambar 5. 2 Tujuan dan Sasaran 2

5.1.3 Tujuan 3 : Peningkatkan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan dengan aparatur pemerintah termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuntut dipraktikkannya prinsip-prinsip *good governance*. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai abdi masyarakat. *Good governance* merupakan salah satu upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi. *Good governance* merupakan suatu terminologi yang diharapkan dapat mengatasi kompleksitas persoalan pelayanan, mengingat semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sengan demikian, pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah beserta aparaturnya kepada *stakeholder* dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan *stakeholder* sekaligus memberikan kepuasan kepada *stakeholder* yang dilayani. Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah daerah beserta aparaturnya kepada *stakeholder* dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah saatu esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah daerah yang diarahkan untuk masyarakat.



Gambar 5. 3 Tujuan dan Sasaran 3

5.1.4 Tujuan 4 : Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing

Transformasi ekonomi diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Transformasi ekonomi dahulunya diarahkan pada peralihan tenaga kerja dari sektor berbasis sumber daya alam (SDA) ke sektor yang menciptakan nilai tambah, misalnya industri, sehingga

mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Transformasi ekonomi saat ini berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui transformasi ekonomi, petani dan pelaku usaha dapat dengan lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian pembeli produk pertaniannya dengan harga yang baik.

Kebijakan transformasi ekonomi terdiri atas 5 (lima) pilar utama, yaitu (1) Optimalisasi pembangunan infrastruktur, (2) Penguatan implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi, (3) Minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, (4) Efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta (5) Konfigurasi Investasi untuk mendukung pertumbuhan. Agar kelima pilar berjalan baik, pemerintah memperkuat koordinasi dan dukungan kebijakan dari seluruh sektor di bidang ekonomi, mulai dari kebijakan fiskal, moneter dan keuangan, serta kebijakan dari kementerian teknis.



Gambar 5. 4 Tujuan dan Sasaran 4

5.1.5 Tujuan 5 : Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan konsep infrastruktur berwawasan lingkungan yang mencakup sistem alamiah dan solusi teknis, dimana sejak tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan memperhatikan seluruh aspek yang terkait dalam upaya perlindungan dan penghematan penggunaan sumber daya alam.

Infrastruktur ramah lingkungan yang dapat diterapkan di antaranya dalam pembangunan bangunan gedung dan jalan, serta penyediaan infrastruktur dasar

permukiman. Sejalan dengan agenda internasional SDGs, serta RPJMN 2020 – 2024 mengarahkan pembangunan infrastruktur pada 3 (tiga) kerangka utama, yaitu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan. Infrastruktur pelayanan dasar terwujud dalam beberapa hal yakni akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, pengelolaan air tanah, dan air baku aman berkelanjutan, akses air minum dan sanitasi, keamanan dan keselamatan transportasi, serta ketahanan kebencanaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar bertujuan untuk pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah agar ketimpangan antarwilayah dapat diminimalisasi.

Gambar 5. 5 Tujuan dan Sasaran 5



5.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Lebih jauh, kriteria penentuan target kinerja sasaran strategis tersebut harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting berikut:

- 1) *Specific*; sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- 2) *Measurable*; target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- 3) *Achievable*: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
- 4) *Relevant*: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
- 5) *Time Bond*: waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Dari kelima tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara di Tahun 2024-2026 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 14 (empat belas) sasaran pembangunan yaitu:



1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada masyarakat Miskin dan rentan;
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja;
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender;
7. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Yang Berwawasan Kebangsaan;
8. Penguatan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien;
9. Peningkatan Pelayanan Prima kepada Publik;
10. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian;
11. Optimalisasi Capaian Investasi/Penanaman Modal di Daerah;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
13. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan; dan
14. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur.



Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026

Tujuan/Sasaran (Menjadi)	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Target			Indikasi Major Project Sasaran
			2024	2025	2026	
Tujuan 1: Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan	Persentase Kemiskinan	7,25%	6,76%	6,75%	6,62%	
	Rasio Gini	0,263	0,260	0,268	0,255	
Sasaran 1 : Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	38,40%	43,10%	47,80%	52,50%	1. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0% tahun 2024 2. Peningkatan cakupan masyarakat miskin dan rentan miskin yang mendapat bantuan sebanyak 2.752 KPM 3. Operasional Puskesmas di 54 Desa/Kelurah
Sasaran 2 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Mandiri: 12 Maju 15 Berkembang: 3 Tertinggal: 0 Sangat Tertinggal: 0	Mandiri: 14 Maju 14 Berkembang: 2 Tertinggal: 0 Sangat Tertinggal: 0	Mandiri: 17 Maju 12 Berkembang: 1 Tertinggal: 0 Sangat Tertinggal: 0	Mandiri: 20 Maju 10 Berkembang: 0 Tertinggal: 0 Sangat Tertinggal: 0	1. Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat 2. 50 KUBE di 54 Desa/Kelurahan



Tujuan/Sasaran (Menjadi)	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Target			Indikasi Major Project Sasaran
			2024	2025	2026	
Sasaran 3 : Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,12%	2,05%	2%	<2.00%	1. Pelatihan kompetensi/kewirausahaan 150 orang (target se Propinsi 5.000 orang dan 26.000 lulusan SMK). 2. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Ahli) 300 orang (target se Propinsi 8.000 orang) 3. Pemberian bantuan BPJS ketenaga kerjaan 1500 pekerja rentan kategori miskin
	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Hidup SDM	IPM	72,55	73,30	73,45	73,85
Sasaran 4 : Peningkatan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,7	12,95	13,45	13,85	1. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan jumlah guru SD/SMP tersertifikasi 3. Operasional Sekolah Penggerak
	Rata - Rata Lama Sekolah	8,51	8,95	9,35	9,85	4. Pemberian beasiswa siswa sekolah dan sarjana 10000 orang 5. Pemberian subsidi Peserta Kejar Paket 150 orang
Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	71,71	72,05	72,65	72,98	1. Peningkatan pemenuhan Sarpras/Alkes di 11 Puskesmas & 1 RS Pratama



Tujuan/Sasaran (Menjadi)	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Target			Indikasi Major Project Sasaran
			2024	2025	2026	
						2. Pemenuhan Universal Health Coverage menjadi 100% 3. Peningkatan Tipe Rumah Sakit melalui pemenuhan kelengkapan Alkes serta Upgrading Ruang rawat jalan dan rawat inap 4. Peningkatan Intervensi stunting terutama di Desa/Kelurahan lokus prioritas (Layanan kesehatan ibu hamil dan BMT)
Sasaran 6 : Peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,57	86,9	87,3	87,85	1. Perluasan cakupan kampung KB aktif di 54 Desa/Kelurahan 2. Peningkatan sarana prasarana pendukung Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak
Sasaran 7 : Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	25%	33%	45%	55%	1. Penyelenggaraan even kebudayaan sebagai agenda Kabupaten (2 agenda) 2. Pembinaan organisasi kepemudaan & kemasyarakatan yang berwawasan kebangsaan di 4 kecamatan



Tujuan/Sasaran (Menjadi)	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Target			Indikasi Major Project Sasaran
			2024	2025	2026	
kebangsaan						<p>3. Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan (Lapangan Tenis Semi Indoor)</p> <p>4. Sukses POPDA Kaltim Tahun 2024</p>
Tujuan 3: Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,45)	B (62,85)	B (63,70)	B (65,50)	
	Indeks SPBE	2,14 (Cukup)	2,24 (Cukup)	2,33 (Cukup)	2,42 (Cukup)	
Sasaran 8 : Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B	<p>1. Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah memiliki predikat minimal nilai SAKIP B (70 - 80)</p> <p>2. Penetapan Zona Integritas</p> <p>3. Peningkatan kompetensi & kapasitas ASN (perencana, penganggaran, auditor dan JFT) 200 orang</p> <p>4. Penyusunan Standar Pelayanan untuk 29 penyelenggaran Pelayanan Publik</p> <p>5. Sukses Pemilu dan Pemilihan Serenta</p>



Tujuan/Sasaran (Menjadi)	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Target			Indikasi Major Project Sasaran
			2024	2025	2026	
						6. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan standar kompetensi jabatan (SKJ) melalui Perda/Perbup di seluruh Perangkat Daerah
	Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah	6%	7,30%	8,50%	9,50%	7. Penyusunan kebijakan dalam meningkatkan PAD
Sasaran 9 : Peningkatan pelayanan prima kepada publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,52%	83,55%	85,88%	90,07%	1. Pelaksanaan program prioritas pendukung PPU menuju Smart City (5 program Quick Wins) 2. Penerapan SPBE di 34 Perangkat Daerah 3. Penguatan perencanaan pembangunan berbasis data 4. Peningkatan nilai indikator 6 bidang SPM 5. Pemekaran wilayah Kecamatan/Kelurahan/ Desa 6. Pengadaan gedung kantor atau bangunan 7. Pengadaan dan Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah



Tujuan/Sasaran (Menjadi)	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Target			Indikasi Major Project Sasaran
			2024	2025	2026	
Tujuan 4: Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing	LPE	14,49%	14,42%	2,63%	2,82%	
						1. Mendukung penguatan sektor perkebunan masyarakat (Sawit, Lada) berbasis korporasi (3 korporasi) Babulu, Waru, Penajam
						2. Pengembangan kampung budidaya perikanan
						3. Pembangunan Pasar Ikan Modern & Cold Storage
						4. Pengembangan desa korporasi ternak Sapi (5 Desa Korporasi)
						5. Pengembangan Food Estate berbasis padi (1.5
						6. Peningkatan Daya Tarik Wisata (3 destinasi)
						7. Peningkatan daya saing produk UMKM
						8. Penguatan sentra industri kecil menengah
						9. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif (2 unit pasar)
Sasaran 10 : Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian	LPE Non Migas	10,86%	4,81	4,82	4,83	



Tujuan/Sasaran (Menjadi)	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Target			Indikasi Major Project Sasaran
			2024	2025	2026	
Sasaran 11 : Optimalisasi Capaian Investasi/penanaman modal investor di daerah	Nilai Realisasi PMDN & PMA (Juta Rupiah)	840.366	1.040.366	1.053.366	1.068.366	1. Pembentukan Perda RTRW Kabupaten 2. Penyusunan RDTR 3. Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Informasi Potensi Investasi
Tujuan 5: Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	N/A	65 (cukup)	67 (cukup)	70 (cukup)	
	Persentase Penurunan Emisi GRK	N/A	23,3	24,4	25,5	
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,1	71,755	71,855	71,955	1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2. Penyusunan KLHS untuk RPJP dan RPJMD 3. Pemantauan kualitas lingkungan 5 sungai 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA
Sasaran 13 : Peningkatan Ketahanan Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	151,67 (tinggi)	149,77	147,66	145,8	1. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan, penyelamatan dan penanggulangan kebakaran



Tujuan/Sasaran (Menjadi)	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Target			Indikasi Major Project Sasaran
			2024	2025	2026	
Sasaran 14 : Peningkatan pelayanan infrastruktur	persentase pemenuhan rumah layak huni	59,69%	64%	65%	67%	<p>2. Pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat dalam penanggulangan bencana di 54 desa/kelurahan</p> <p>3. Peningkatan kualitas 12 desa tangguh bencana</p> <p>4. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi</p>
	persentase jalan Mantap	26,43%	28%	30%	32%	<p>1. Perbaikan dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni 25 Unit/Tahun</p> <p>2. Bantuan RTLH tidak berjangka</p> <p>3. Revitalisasi ruang terbuka layak anak (2 lokasi)</p> <p>4. Peningkatan cakupan layanan air bersih</p> <p>5. Pencapaian Jalan Mantap Kabupaten 500 Km</p> <p>6. Penyediaan Perlengkapan Jalan</p> <p>7. Rencana Umum Drainase per Kecamatan</p>

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program prioritas Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program ini selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

6.1. Strategi Pembangunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan serta pembangunan yang akan dijalankan selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, pada tahap ini akan dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), serta faktor eksternal yang meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Berikut adalah analisis SWOT yang telah dilakukan

Tabel 6. 2 Analisis SWOT

Faktor Internal/Eksternal	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Pengangguran Terbuka yang rendah sebesar 2,12%2. Peningkatan indikator usia harapan hidup3. Adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia4. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja5. Adanya potensi daya tarik wisata alam dan bahari6. Pengembangan Agroindustri	<ol style="list-style-type: none">1. Kemiskinan Peringkat 5 dari 10 kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7.25%2. Pertumbuhan ekonomi rendah sebesar 14,9%3. Angka Melek huruf sebesar 96,57%4. Adanya disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang disebabkan oleh kurang meratanya infrastruktur kesehatan5. Rendahnya aksesibilitas jika dilihat dari kondisi jalan (terdapat jalan dengan kondisi rusak sepanjang 143,46 km dan rusak berat sepanjang 148,61 km6. Belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung dan infrastruktur Teknologi Informasi untuk lingkup pemerintahan7. Rendahnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (sebesar 86,57%)8. Terdapat desa dengan kerawanan pangan, serta terbatasnya sarana dan prasarana penyediaan pangan9. Rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none">1. Posisi geografis yang strategis, Kab. PPU merupakan	<ol style="list-style-type: none">9. Peningkatan daya saing tenaga kerja10. Peningkatan Kemandirian Pangan Daerah11. Peningkatan Potensi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa dan kelurahan2. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan3. Peningkatan upaya kemandirian

<p>penghubung antara Kalimantan Timur dan Kalsimantan Selatan</p> <p>2. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang mencakup 4 (empat) dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan)</p> <p>3. Implementasi dari pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)</p> <p>4. Adanya kebijakan fiskal tahun 2023, yaitu untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”</p>	<p>Daerah</p> <p>12. Revitalisasi Pembinaan, Pengelolaan dan Pola Pengembangan UMKM</p> <p>13. Peningkatan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar</p>	<p>keuangan pembangunan daerah</p> <p>4. Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi</p> <p>5. Pemantapan Kebijakan Kemudahan Investasi Daerah</p> <p>6. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>7. Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Mengurangi Resiko Bencana</p>
---	--	---

Tantangan (Threats)	Strategi ST	Strategi WT
<p>1. Kebijakan IKN</p> <p>2. Kebijakan nasional terkait penghapusan kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran</p> <p>3. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang mencakup 4 (empat) dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan)</p> <p>4. Implementasi dari pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)</p> <p>5. Dampak Pandemi Covid-19</p> <p>6. Adanya kebijakan nasional terkait peningkatan kualitas SDM dan pengurangan stunting</p>	<p>1. Perkuatan identitas warisan budaya daerah</p> <p>2. Mengembangkan daya saing organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan</p>	<p>1. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu</p> <p>2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>3. Peningkatan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Responsif Gender</p> <p>4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul</p> <p>5. Peningkatan Nilai Perdagangan & Jasa Daerah</p>

Adapun hasil dari analisis SWOT terkait dengan strategi pembangunan yang akan dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Strategi penanggulangan kemiskinan secara terpadu diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang

mencapai 7.61% (peringkat 5 dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur). Strategi ini juga merupakan bentuk kontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara regional Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Hal ini dapat dicapai dengan penyaluran BLT tepat sasaran dan perluasan perlindungan sosial terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Desa dan Kelurahan

Strategi kedua dalam rencana pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah terkait dengan pembinaan dan pengembangan kemandirian desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Mengingat sampai dengan tahun 2022 hanya terdapat 3 desa dengan status mandiri mK sibusuhkan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat.

3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu aspek yang menentukan daya saing daerah. Adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan potensi yang dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan tenaga kerja jika diimbangi dengan tingginya daya saing tenaga kerja. Daya saing tenaga kerja dapat dicapai dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja, sertifikasi angkatan kerja, dan penyediaan jaminan kesehatan ketenagakerjaan.

4. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Kualitas pembangunan ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia pada wilayah tersebut. Ketidakmerataan sebaran pelayanan fasilitas Pendidikan menyebabkan masih terdapatnya masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum melek huruf. Oleh karena itu arah kebijakannya adalah Peningkatan dan rehabilitasi sarpras pendidikan, beasiswa kejar paket, siswa sekolah dan mahasiswa, sertifikasi tenaga pendidik.

5. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek dasar yang harus dipenuhi dalam rangka pembangunan suatu daerah. Kemudahan akses terhadap layanan Kesehatan harus dirasakan oleh semua masyarakat. Selain itu, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan disuatu daerah adalah prevalensi stunting, dimana angka ini termasuk memiliki tren yang meningkat sejak tahun 2018 hingga 2021. Oleh karena itu, arah kebijakan dalam strategi ini adalah peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dan penurunan angka stunting.

6. Peningkatan Pembangunan yang Berkeadilan dan Responsif Gender

Strategi peningkatan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender perlu dilakukan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat bahwa pemerintah

daerah bertanggungjawab atas pembangunan kota layak anak. Selain itu, adanya penurunan persentase kesadaran masyarakat untuk ber-KB yang cukup signifikan juga menjadi perhatian dalam rangka pengendalian jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu arah kebijakan pada strategi ini difokuskan untuk perluasan cakupan kampung KB aktif dan optimalisasi pembangunan kota layak anak

7. Perkuatan Identitas Warisan Budaya Daerah

Identitas budaya merupakan ciri khas atau kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Identitas warisan budaya daerah juga dapat menjadi daya tarik wisata bagi penduduk didalam maupun diluar daerah. Penguatan identitas warisan budaya daerah dapat dilakukan dengan penyelenggaraan even budaya daerah secara berkala.

8. Pengembangan Daya Saing Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peran organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan sangatlah penting. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan daya saing organisasi kepemudaan dan kemsyarakatan diperlukan pengembangan potensi kepemudaan dan kemasyarakatan.

9. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul

Pada strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul ini diarahkan pada peningkatan tata kelola organisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

10. Peningkatan Upaya Kemandirian Keuangan Pembangunan Daerah

Dalam upaya peningkatan kemandirian keuangan pembangunan daerah. Pemerintah perlu melakukam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

11. Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dengan Dukungan Teknologi Informasi

Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan dengan dukungan teknologi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Adapun arah kebijakannya adalah dengan peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis teknologi infomasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

12. Peningkatan Kemandirian Pangan Daerah

Peningkatan kemandirian pangan daerah dapat dilakukan dengan pengembangan daya saing komoditas unggulan perkebunan masyarakat, pengembangan produktivitas dan daya saing perikanan masyarakat, peningkatan daya saing produk ternak unggulan, serta peningkatan ketersediaan pangan.

13. Peningkatan Potensi Pariwisata Daerah

Peningkatan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat menjadi sektor pendorong peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di daerah sekitar lokasi objek daya tarik wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah pengembangan destinasi wisata khas lokal Kabupaten Penajam Paser Utara.

14. Revitalisasi Pembinaan, Pengelolaan dan Pola Pengembangan UMKM

UMKM merupakan salah satu kekuatan dalam perekonomian daerah. Revitalisasi pembinaan, pengelolaan, dan pola pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing pasar produk UMKM unggulan daerah.

15. Peningkatan Nilai Perdagangan & Jasa Daerah

Pemantapan jaringan distribusi dan stabilitas harga pasar bahan pokok dibutuhkan dalam rangka peningkatan nilai perdagangan dan jasa daerah, sehingga dapat berdampak positif bagi sektor perdagangan dan jasa maupun masyarakat.

16. Pemantapan Kebijakan Kemudahan Investasi Daerah

Pemantapan kebijakan kemudahan investasi daerah diharapkan akan meningkatkan nilai investasi daerah dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di antara lain adalah penyelenggaraan tata ruang dan pelayanan investasi. Oleh karena itu arah kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, serta peningkatan kualitas pelayanan investasi/penanaman modal berbasis elektronik.

17. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan tujuan utama dari pembangunan. Dalam peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pengelolaan persampahan.

18. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Mengurangi Resiko Bencana

Adanya potensi bencana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari di setiap daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi resiko dari bencana tersebut. Dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi resiko bencana diperlukan peningkatan sarana prasarana siaga bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat siaga bencana.

19. Peningkatan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pembangunan daerah dapat dinilai baik apabila kebutuhan dasar semua masyarakatnya terpenuhi. Oleh karena itu, peningkatan cakupan pembangunan infrastruktur dasar dapat dilakukan dengan penataan permukiman daerah, penataan kawasan kumuh, pemantapan

layanan infrastruktur sumber daya air, serta peningkatan kualitas konektivitas kewilayahan.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara serta mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan dalam RPD 2024-2026 sesuai dengan **kondisi dan peraturan yang berlaku yaitu adalah Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri dan mewujudkan masyarakat Penajam Paser Utara yang sejahtera.**

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara serta mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Penetapan arah kebijakan pembangunan ini menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan yang ditetapkan akan menjadi pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara per tahun selama periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dengan tahapan sebagai berikut :



1. Arah kebijakan Tahun 2024

Pembangunan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan arah **Peningkatan Daya Saing dan Pelayanan Publik dengan Optimalisasi Potensi Menuju PPU Serambi Nusantara.** Arah kebijakan ini difokuskan pada *pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan daya saing SDM, terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak, serta peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.* Adapun arah kebijakan terkait berupa penyaluran

BLT tepat sasaran, perluasan perlindungan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat, peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja, sertifikasi angkatan kerja, jaminan kesehatan ketenagakerjaan, peningkatan dan rehabilitasi sarpras pendidikan, beasiswa kejar paket, siswa sekolah dan mahasiswa, sertifikasi tenaga pendidik, peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penurunan angka stunting, perluasan cakupan kampung KB aktif, optimalisasi pembangunan kota layak anak, penyelenggaraan even budaya daerah, mengembangkan potensi kepemudaan dan kemasyarakatan, pengembangan daya saing komoditas unggulan perkebunan masyarakat, pengembangan produktivitas dan daya saing perikanan masyarakat, peningkatan daya saing produk ternak unggulan, peningkatan ketersediaan pangan, pengembangan destinasi wisata khas lokal, peningkatan daya saing pasar produk UMKM unggulan daerah, pemantapan jaringan distribusi dan stabilitas harga pasar bahan pokok, peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan investasi/ penanaman modal berbasis elektronik.

2. Arah kebijakan Tahun 2025

Pembangunan pada tahun 2025 diselenggarakan dengan arah **Peningkatan ketahanan daerah melalui transformasi ekonomi dan optimalisasi tata kelola pemerintahan**. Arah kebijakan tersebut berfokus pada *Transformasi Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik*. Adapun arahan kebijakannya meliputi peningkatan tata kelola organisasi pemerintahan, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

3. Arah kebijakan Tahun 2026

Pembangunan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan arah **Pemantapan sektor strategis Menuju Kemandirian Ekonomi Untuk PPU Serambi Nusantara**. Arah kebijakan tersebut berfokus pada *Kemandirian Ekonomi, dan Pemantaapan Sektor Strategis*. Kemandirian ekonomi yaitu menggerakkan roda ekonomi melalui ekonomi kreatif yakni sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan menciptakan ide dan gagasan yang bisa dikembangkan guna meningkatkan perekonomian. Adapun arah kebijakan pada pemantapan sector strategis Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu pada sector agribisnis, agroindustry, pariwisata, perdagangan dan jasa serta Kerjasama local regional dan berkelanjutan, yang meliputi Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan, Peningkatan sarana prasarana siaga bencana, Peningkatan kapasitas masyarakat siaga bencana, Penataan

Permukiman Daerah, Penataan Kawasan Kumuh, Pemanfaatan layanan infrastruktur sumber daya air, Peningkatan kualitas konektivitas kewilayahan. Selain itu pada setiap tahunnya juga akan rutin difokuskan pembangunan pada bidang pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur. Perumusan tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. 6 Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan sebagai Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran tahun 2024 - 2026

ISU STRATEGIS/TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing		
Tujuan 1: Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan		
Sasaran 1: Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran BLT tepat sasaran 2. Perluasan perlindungan sosial
Sasaran 2: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa dan kelurahan	Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat
Sasaran 3 : Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja 2. Sertifikasi angkatan kerja 3. Jaminan kesehatan ketenagakerjaan
Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Hidup SDM		
Sasaran 4 : Peningkatan kualitas Pendidikan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan rehabilitasi sarpras Pendidikan 2. Beasiswa Kejar Paket, Siswa Sekolah dan Mahasiswa 3. Sertifikasi tenaga Pendidik
Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Kesehatan	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2. Penurunan angka Stunting
Sasaran 6 : Peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender	Peningkatan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Responsif Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan cakupan kampung KB aktif 2. Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan pembangunan Kota Layak Anak



ISU STRATEGIS/TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Sasaran 7 : Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan</p>	1. Perkuatan identitas warisan budaya daerah	Penyelenggaraan even budaya daerah
	2. Mengembangkan daya saing organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan	Mengembangkan potensi keolahragaan, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan
Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi		
Tujuan 3: Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
<p>Sasaran 8 : Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien</p>	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	1. Peningkatan pendidikan demokrasi masyarakat dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 2. Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan
	2. Peningkatan upaya kemandirian keuangan pembangunan daerah	3. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Pembangunan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah
<p>Sasaran 9 : Peningkatan pelayanan prima kepada publik</p>	Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi	1. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3. Pengamanan Aset Tanah Pemerintah daerah secara Fisik dan Administrasi
Transformasi Ekonomi Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		
Tujuan 4: Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing		
<p>Sasaran 10 : Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian</p>	Peningkatan Kemandirian Pangan Daerah	1. Pengembangan daya saing komoditas unggulan perkebunan masyarakat 2. Pengembangan produktifitas dan daya saing perikanan masyarakat 3. Peningkatan daya saing produk ternak unggulan 4. Peningkatan ketersediaan pangan
	Peningkatan Potensi Pariwisata Daerah	Pengembangan destinasi wisata khas lokal



ISU STRATEGIS/TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Revitalisasi Pembinaan, Pengelolaan dan Pola Pengembangan UMKM	Peningkatan daya saing pasar produk UMKM unggulan daerah
	Peningkatan Nilai Perdagangan & Jasa Daerah	1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 2. Pemantapan jaringan distribusi dan stabilitas harga pasar bahan pokok
Sasaran 11 : Optimalisasi Capaian Investasi/penanaman modal di daerah	Pemantapan Kebijakan Kemudahan Investasi Daerah	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 2. Peningkatan kualitas pelayanan investasi/ penanaman modal berbasis elektronik 3. Pengembangan hilirisasi industri Kawasan buluminung, perlindungan areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan dan pemasaran serta amenitas pariwisata dalam rangka mendukung IKN
Peningkatan pelayanan infrastruktur yang berorientasi pelayanan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan		
Tujuan 5: Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		
Sasaran 12 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
Sasaran 13 : Peningkatan Ketahanan Kebencanaan	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Mengurangi Resiko Bencana	1. Peningkatan sarana prasarana siaga bencana 2. Peningkatan kapasitas masyarakat siaga bencana 3. Pemantapan pengendali banjir pada daerah irigasi.
Sasaran 14 : Peningkatan Pelayanan Infrastruktur	Peningkatan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1. Penataan bangunan perkantoran 2. Penataan permukiman daerah 3. Pemantapan layanan infrastruktur sumber daya air 4. Peningkatan kualitas konektivitas kewilayahan





6.3. Program Prioritas Daerah

Program-program yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program prioritas sesuai dengan hasil penjabaran isu-isu strategis. Program prioritas dikelompokkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didukung, serta diintegrasikan dengan rumusan Kegiatan Strategis Daerah sebagai bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan.

Tabel 6. 3 Program Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing									
Tujuan 1: Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan									
Sasaran 1 : Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan									
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL									
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber daya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	99%	210.000.000	99%	210.000.000	99%	210.000.000	DINAS SOSIAL
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Penanganan	99%	300.000.000	99%	300.000.000	99%	300.000.000	DINAS SOSIAL
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Tepat Sasaran	90%	3.840.000.000	92%	3.840.000.000	94%	3.840.000.000	DINAS SOSIAL
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan dan Penanganan Sosial	89%	100.000.000	89%	100.000.000	89%	100.000.000	DINAS SOSIAL
Sasaran 2: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
5	PROGRAM	Jumlah fasilitasi	10 Desa	100.000.000	10 Desa	100.000.000	10 Desa	100.000.000	DINAS



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	kerjasama desa							PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah kawasan pedesaan terbangun	1 Kawasan	100.000.000	1 Kawasan	100.000.000	1 Kawasan	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya status desa	Mandiri = 15; Maju = 15 ; Berkemban g = 0	560.000.000	Mandiri = 20; Maju = 10; Berkembang = 0	560.000.000	Mandiri = 25; Maju = 5; Berkembang = 0	560.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Capaian Bumdes berdasarkan klasifikasi	maju=7; berkembang=16; tumbuh = 7	750.000.000	maju = 8; berkembang=18; tumbuh = 4	750.000.000	maju = 9; berkembang = 20; tumbuh = 1	750.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah desa baru	38 Desa	500.000.000	46 Desa	500.000.000	50 Desa	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sasaran 3 : Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

9	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kesesuaian RTKD terhadap Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan	90%	250.000.000	93%	250.000.000	95%	250.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	15%	772.000.000	25%	772.000.000	35%	772.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
11	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	40%	100.000.000	42%	100.000.000	45%	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan	20%	2.366.000.000	22%	2.366.000.000	24%	2.366.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%		100%		100%		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10%		15%		20%		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
13	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan dan Bersertifikat (%)	22,22%	1.000.000.000,00	33,33%	1.000.000.000,00	44,44%	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Hidup SDM

Sasaran 4 : Peningkatan kualitas Pendidikan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	40.562.000.000	100%	40.562.000.000	100%	40.562.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		dan laki-laki							
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD							
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	97%		98%		99%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	97%		98%		99%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	82%		83%		84%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95%		96%		97%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	95%		96%		97%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0%		0%		0%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0%		0%		0%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Buta Aksara)							
		Persentase Guru Penggerak Jenjang PAUD	4,83%		6,44%		7,24%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Guru Penggerak Jenjang SD/MI	7%		9%		11%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Guru Penggerak Jenjang SMP/MTs	9%		11%		13%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMP/MTs	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Sekolah Penggerak Jenjang PAUD	6,41%		9,61%		12,82%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Sekolah Penggerak Jenjang SD/MI	10%		12%		14%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Sekolah Penggerak Jenjang SMP/MTS	20%		22%		24%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		menamatkan Sekolah Dasar							OLAHRAGA
		Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar	6,1		6,1		6,1		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	6,1		6,1		6,1		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	95%		95,50%		96%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	99%		99,50%		99,50%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Kearifan Lokal	5%	250.000.000,00	10%	250.000.000,00	15%	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
16	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/Jenjang PAUD	98%	48.442.000.000	90,30%	48.442.000.000	98,50%	48.442.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/Jenjang SD/MI	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/Jenjang SMP/MTs	100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Kesehatan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Bagi	100%	96.868.000.000	100%	96.868.000.000	100%	96.868.000.000	DINAS KESEHATAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	Masyarakat							
		Angka Kematian Neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	11 Kasus		10 Kasus		9 Kasus		DINAS KESEHATAN
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit malaria	100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kematian Ibu	3 Kasus		3 Kasus		3 Kasus		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna	2 Unit		0 Unit		0 Unit		DINAS KESEHATAN
		Presentase Desa ODF	85%		92%		100%		DINAS KESEHATAN
		Persentase Capaian SPM RS	80%	2.260.000.000	90%	2.260.000.000	90%	2.260.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan sesuai standar	40%	500.000.000	60%	500.000.000	85%	500.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
		Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	63%	700.000.000	72%	700.000.000	81%	700.000.000	DINAS KESEHATAN
19	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tersedianya Izin Apotik dll, Pemberian Sertifikat Produksi Alkes dan Probelkes, Sertifikat Produksi Pangan dan PIRT, Serta Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi	83%	3.200.000.000	88%	3.200.000.000	92%	3.200.000.000	DINAS KESEHATAN
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Posyandu Aktif	95%	200.000.000	98%	200.000.000	100%	200.000.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DINAS KESEHATAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	BIDANG KESEHATAN	terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Pengembangan Promosi Kesehatan, GERMAS dan UKBM							
Sasaran 6 : Peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
21	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan	33 Kampung	100.000.000	35 Kampung	100.000.000	37 Kampung	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	6 Rumah Data		7 Rumah Data		8 Rumah Data		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
22	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	28,55%	2.224.000.000	29,55%	2.224.000.000	30,55%	2.224.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
									KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya CPR (Contraception Prevalence Rate)	80,25%		80,45%		80,65%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Program Bangga Kencana	70%		75%		80%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Menurunnya angka putus pakai (DO)	17,58%		17,56%		17,54%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Menurunnya angka TFR (Total Fertility Rate)	2,09%		2,08%		2,07%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
									PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Menurunnya angka Unmeed Need	17,58%		17,56%		17,54%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Fasilitas Pembinaan di Kampung KB	2 Rumah Data		3 Rumah Data		4 Rumah Data		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)P ercontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	4 Kelompok UPPKA	500.000.000	5 Kelompok UPPKA	500.000.000	6 Kelompok UPPKA	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Keluarga dengan Baduta yang	5168 Keluarga		5685 Keluarga		6685 Keluarga		DINAS PEMBERDAYAAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Mendapatkan Fasilitas Pembinaan 1000 HPK							PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Kampung KB yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan Dalam Rangka Penurunan Stunting	1 Kampung		2 Kampung		3 Kampung		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
24	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta	15%	400.000.000	20%	400.000.000	25%	400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	8%		8%		8%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
									KELUARGA BERENCANA
25	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya pelayanan Puspaga	250 Keluarga	100.000.000	350 Keluarga	100.000.000	450 Keluarga	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
27	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebij akan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di lintas SKPD	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
28	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Penilaian Kabupaten layak Anak	580 Poin	200.000.000	590 Poin	200.000.000	600 Poin	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
29	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sasaran 7 : Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

30	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional	3 Kegiatan	350.000.000	3 Kegiatan	350.000.000	3 Kegiatan	350.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
31	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
32	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Objek Cagar Budaya yang Telah di Tetapkan	1 Cagar Budaya Tak Benda	100.000.000	1 Cagar Budaya Tak Benda	100.000.000	1 Cagar Budaya Tak Benda	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Objek Cagar Budaya yang Telah di Tetapkan	1 Cagar Budaya Benda		1 Cagar Budaya Benda		1 Cagar Budaya Benda		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

33	PROGRAM	Persentase Organisasi	47 Organisasi	200.000.000	94 Organisasi	200.000.000	188 Organisasi	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN,
----	---------	-----------------------	---------------	-------------	---------------	-------------	----------------	-------------	-------------------



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pemuda yang aktif							PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase Wirausaha Muda	60 Orang		120 Orang		240 Orang		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
34	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikat	30 Orang	2.300.000.000	60 Orang	10.000.000.000	120 Orang	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Cakupan Pembinaan atlet muda	471 Orang		942 Orang		1884 Orang		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Cakupan Pembinaan Olahraga	16 Orang		32 Orang		64 Orang		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah atlet berprestasi	186 Orang		372 Orang		744 orang		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah prestasi olahraga	23 Cabang		46 Cabang		92 Cabang		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara	4 Gedung		4 gedung		4 Gedung		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	10 Organisasi	600.000.000	10 Organisasi	600.000.000	10 Organisasi	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan 3: Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran 8 : Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
36	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	70%	2.500.000.000	75%	2.500.000.000	80%	2.500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70%	250.000.000	75%	250.000.000	80%	250.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
38	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70%	100.000.000	75%	100.000.000	80%	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
39	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	70%	250.000.000	75%	250.000.000	80%	250.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
40	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	70%	37.879.000.000	75%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERENCANAAN									
41	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Capaian Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah	85%	3.500.000.000	90%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEUANGAN									
42	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan	WTP	180.491.000.000	WTP	180.491.000.000	WTP	180.491.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
43	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	WTP	1.250.000.000	WTP	1.250.000.000	WTP	1.250.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
44	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,30%	3.000.000.000	8,50%	3.000.000.000	9,50%	3.000.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Peningkatan PAD	112.176.570.244,00		157.142.287.000,00		157.248.061.000,00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPEGAWAIAN									



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
45	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang telah mengikuti Assesment	93%	1.300.000.000	95%	1.300.000.000	99%	1.300.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	38:377		45:377		50:377		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Pelayanan Pendampingan Hukum	85%	100.000.000	85%	100.000.000	85%	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
INSPEKTORAT DAERAH									
46	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	95%	4.419.000.000	100%	4.419.000.000	100%	4.419.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	95%		100%		100%		INSPEKTORAT KABUPATEN
		Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	100%		100%		100%		INSPEKTORAT KABUPATEN
47	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Reformasi Birokrasi	75	4.139.000.000	85	4.139.000.000	90	4.139.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Predikat Kapabilitas APIP	Level 3		Level 3		Level 3		INSPEKTORAT KABUPATEN
		Predikat Maturitas SPIP	Level 3		Level 3		Level 3		INSPEKTORAT KABUPATEN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sasaran 9 : Peningkatan pelayanan prima kepada publik									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
48	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi	95%	300.000.000	96%	300.000.000	98%	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
49	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks kepuasan layanan	95%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
		Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	95%		96%		98%		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
50	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan Konflik Tanah Pemerintah	30 Bidang	350.000.000	30 Bidang	350.000.000	30 Bidang	350.000.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Transformasi Ekonomi Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat									
Tujuan 4: Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing									
Sasaran 10 : Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
51	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pertanian	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	DINAS PERTANIAN
		Persentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan	100%		100%		100%		DINAS PERTANIAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
52	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Dokumen Izin Perusahaan Perkebunan yang Dimitrakan dan Dinilai	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	DINAS PERTANIAN
53	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	48 Kelompok	667.000.000	48 Kelompok	667.000.000	48 Kelompok	667.000.000	DINAS PERTANIAN
54	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	51004 Ton	985.000.000	51542 Ton	985.000.000	52085 Ton	985.000.000	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian	29100 Ton		29411 Ton		29727 Ton		DINAS PERTANIAN
55	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Peningkatan Populasi Ternak	16626 Ekor	267.000.000	16959 Ekor	267.000.000	17291 Ekor	267.000.000	DINAS PERTANIAN
56	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Petani dan Penyuluh	604 Kelompok	627.000.000	604 Kelompok	627.000.000	604 Kelompok	627.000.000	DINAS PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
57	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Diintervensi Dalam Rangka Stabilisasi Harga dan Stock	23 Produk	250.000.000	23 Produk	250.000.000	23 Produk	250.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
58	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Peningkatan Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	200 Alat UTTP	200.000.000	250 Alat UTTP	200.000.000	300 Alat UTTP	200.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
59	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Perdagangan yang Representatif	12 Unit	2.036.000.000	14 Unit	2.036.000.000	16 Unit	2.036.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
60	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Jumlah Industri yang Memiliki Izin Berusaha (%)	10%	100.000.000	15%	100.000.000	20%	100.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
61	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Data Industri yang Masuk Dalam SINAS (%)	10%	100.000.000	15%	100.000.000	20%	100.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
62	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Pengembangan Industri	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Sentra IKM yang Dikuatkan	3 Sentra	200.000.000	3 Sentra	200.000.000	3 Sentra	200.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
63	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Menurunnya Jumlah Kasus Pelanggaran Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	DINAS PERIKANAN
64	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	6568 Ton	924.000.000	6667 Ton	924.000.000	6766 Ton	924.000.000	DINAS PERIKANAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
65	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	11000 Ton	500.000.000	12100 Ton	500.000.000	13310 Ton	500.000.000	DINAS PERIKANAN
66	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang Mandiri	400 kelompok	350.000.000	450 Ton	350.000.000	500 Ton	350.000.000	DINAS PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
67	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Capaian Kunjungan Wisatawan	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
68	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Destinasi Wisata yang Dikembangkan	1 Objek	100.000.000	1 Objek	100.000.000	1 Objek	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
69	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Sub Sektor Prioritas Ekonomi Kreatif yang Di Kembangkan	3 Kegiatan	100.000.000	3 Kegiatan	100.000.000	3 Kegiatan	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
70	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Capaian SDM yang dibina	50 Orang	63.000.000	50 Orang	63.000.000	50 Orang	63.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran 11 : Optimalisasi Capaian Investasi/penanaman modal investor di daerah									
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Sedang	1.000.000.000	Sedang	1.000.000.000	Baik	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program Prioritas	Indikator (Baik/Sedang/Buruk)	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
72	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	260.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
73	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor PMA	1 Investor	250.000.000	1 Investor	250.000.000	1 Investor	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah investor PMDN	30 Investor		30 Investor		20 Investor		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
74	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	80%	100.000.000	82%	100.000.000	85%	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
75	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan nilai realisasi investasi PMA/PMDN	10.000.000.000	334.000.000	13.000.000.000	334.000.000	15.000.000.000	334.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
76	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan/Non Perizinan yang Diterbitkan Online	50%	100.000.000	75%	100.000.000	100%	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan									

No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tujuan 5: Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan									
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
77	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	100%	3.253.000.000	100%	3.253.000.000	100%	3.253.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
78	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Nominasi Penghargaan Kalpataru	1 Orang	100.000.000	1 Orang	100.000.000	1 Orang	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
79	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	5%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
80	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	80%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH, Rencana Induk Persampahan/RIP), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah/DIKPLHD	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
81	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,755	250.000.000	71,855	250.000.000	71,955	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
82	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Kampung Iklim yang Terbina	5 Kampung Iklim	100.000.000	8 Kampung Iklim	100.000.000	10 Kampung Iklim	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
83	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Menghasilkan Limbah B3 yang Menyampaikan Laporan	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
84	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Capaian Pengawasan dan Pembinaan (%)	80%	100.000.000	90%	100.000.000	100%	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
85	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Teridentifikasinya Kawasan Masyarakat Hutan Adat (MHA)	80 MHA	100.000.000	90 MHA	100.000.000	100 MHA	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
86	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan Adiwiyata (Sekolah/Lembaga)	1 Sekolah/Lembaga	100.000.000	2 Sekolah/Lembaga	100.000.000	3 Sekolah/Lembaga	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
87	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH yang dikelola (%)	92%	3.500.000.000	93%	3.500.000.000	95%	3.500.000.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sasaran 13 : Peningkatan Ketahanan Kebencanaan									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
88	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	Cakupan Satuan Linmas yang terbina dengan baik	85%	1.000.000.000	85%	1.000.000.000	85%	1.000.000.000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	DAN KETERTIBAN UMUM								PENYELAMATAN
		Persentase Penyelesaian Penegakan Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda Dan Perkada	100%		100%		100%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
89	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%		100%		100%		DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
90	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Respon Cepat Kejadian Bencana	6 Jam	1.150.000.000	5 Jam	1.150.000.000	4 Jam	1.150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase Desa/Kelurahan Tanggung Bencana	30%	500.000.000	50%	500.000.000	80%	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sasaran 14 : Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

91	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB dan Memiliki Sertifikat Laik Fungsi	88,05%	1.000.000.000,00	91,19%	1.000.000.000,00	94,34%	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Rumah Tangga Sanitasi Tidak	9,65%	500.000.000,00	9,32%	500.000.000,00	8,99%	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Layak (%)							PENATAAN RUANG
93	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Terhadap Kebutuhan Pengembangan Pemukiman (%)	70%	350.000.000,00	75%	350.000.000,00	80%	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
94	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Yang Merupakan Kewenangan Kabupaten (%)	78,82%	24.920.000.000,00	80,66%	24.920.000.000,00	81,59%	25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
95	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih (%)	35,67%	36.202.000.000,00	45,10%	36.202.000.000,00	60,54%	36.202.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
96	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Pembuang Yang Baik (%)	24,19%	14.000.000.000,00	34,99%	14.000.000.000,00	47,33%	14.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
97	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)	4 Kawasan	5.000.000.000,00	4 Kawasan	5.000.000.000,00	4 Kawasan	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
98	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	40,54%	94.564.000.000,00	45,85%	94.564.000.000,00	51,49%	100.831.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
99	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Relokasi Program Pemerintah dan Relokasi Bencana	10 Unit	250.000.000,00	15 Unit	250.000.000,00	20 Unit	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



No.	Program Prioritas	Indikator	2024		2025		2026		Perangkat Daerah
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		(Unit)							
100	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (%)	1%	400.000.000,00	1%	400.000.000,00	1%	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi Penyediaan PSU Perumahan (Lokasi)	2 Lokasi	10.570.000.000,00	2 Lokasi	10.570.000.000	2 Lokasi	10.570.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
102	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Masyarakat	25 Unit	12.400.000.000	35 Unit	12.750.000.000	50 Unit	12.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	100%	2.950.000.000	100%	2.950.000.000	100%	2.950.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
104	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal	85%	750.000.000	85%	750.000.000	90%	750.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Penajam Paser Utara berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program pembangunan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Adapun yang termasuk dalam struktur pembiayaan pembanguan adalah terkait dengan penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada rencana pembanguan daerah tahun 2024 – 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki fokus pembangunan pada peningkatan perekonomian masyarakat, pengembangan dan pemenuhan infrastruktur, serta penataan birokrasi yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dapat mempertimbangkan beberapa alternatif pendaan sesuai dengan arah kebijakan yang sudah ditentukan, diantaranya adalah pinjaman daerah, obligasi daerah, kolaborasi dengan swasta melalui Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), skema Hak Pengelolaan Terbatas, serta skema *Land Value Capture* (LVC) atau pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan. Berikut adalah penjelasan terkait skema pendanaan tersebut:

a. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan alternatif instrumen pendanaan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah serta untuk percepatan pencapaian target program pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) yang merupakan BUMN dibawah Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pinjaman PEN Daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah dalam bentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan.

b. Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah

Skema pembiayaan ini merupakan pinjaman jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur public yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat.

c. Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

d. Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility

Alternatif keempat yang dapat dijadikan pertimbangan sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah dengan mengoptimalkan penyaluran dana CSR oleh pihak swasta kepada masyarakat. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

e. *Land Value Capture (LVC)*

Implementasi skema LVC diharapkan dapat membawa berbagai manfaat ekonomi, diantaranya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah, pengembangan kawasan perkotaan yang lebih tertata, mengendalikan pertumbuhan ekonomi kawasan, dan melakukan pemerataan ekonomi di kawasan perkotaan. Berdasarkan konsepnya, skema LVC terdiri dari 3 siklus utama yaitu penciptaan nilai kawasan, penangkapan nilai, dan pendanaan nilai. Kegiatan pembangunan yang dianggap menciptakan suatu nilai investasi dari penyediaan infrastruktur disebut sebagai pencipta nilai kawasan karena berpotensi meningkatkan nilai kawasan menjadi lebih baik. Peningkatan nilai tersebut kemudian ditangkap oleh Pemerintah yang akan digunakan untuk membayar kembali investasi infrastruktur. (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Siaran Pers: HM.4.6/306/SET.M.EKON.3/6/2022).



Gambar 7. 1 Kerangka alternatif Pendanaan yang dapat di implementasikan pada kurun waktu 2024 – 2026

Tabel 7. 1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023-2026

URAIAN	PROYEKSI APBD 2024 (Rp)	PROYEKSI APBD 2025 (Rp)	PROYEKSI APBD 2026 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.653.163.447.000,00	1.628.163.626.700,00	1.628.269.400.700,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.960.631.000,00	157.142.287.000,00	157.248.061.000,00
Pajak Daerah	45.071.574.000,00	81.398.576.000,00	81.504.350.000,00
Retribusi Daerah	13.511.355.000,00	13.511.355.000,00	13.511.355.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.671.835.000,00	2.671.835.000,00	2.671.835.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	59.705.867.000,00	59.560.521.000,00	59.560.521.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.532.202.816.000,00	1.471.021.339.700,00	1.471.021.339.700,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.315.217.998.000,00	1.290.985.092.700,00	1.290.985.092.700,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	216.984.818.000,00	180.036.247.000,00	180.036.247.000,00

Tabel 7. 2 Proyeksi Pengeluaran Wajib Mengikat Tahun 2024 – 2026

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
A	BELANJA OPERASI	1.380.159.000.000,00	1.363.556.000.000,00	1.385.922.000.000,00
1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, dan KDH KDH)	537.146.000.000,00	550.575.000.000,00	564.339.000.000,00
2	Operasional KDH WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
3	Alokasi Dana Desa	121.164.000.000,00	118.741.000.000,00	118.741.000.000,00
4	BLUD	40.697.000.000,00	40.697.000.000,00	40.697.000.000,00
5	BPJS PBI	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00
6	Pemenuhan SPM	50.002.000.000,00	50.002.000.000,00	50.002.000.000,00
7	Gaji Honorerer/THL/RT/Janda Veteran dan belanja jasa lainnya	171.149.000.000,00	174.899.000.000,00	178.743.000.000,00
8	Pemilu	36.000.000.000,00	0	0
	Pembayaran Bunga Hutang	21.330.000.000,00	21.330.000.000,00	21.330.000.000,00
9	Operasional dan kegiatan wajib SKPD	185.668.000.000,00	190.309.000.000,00	195.067.000.000,00
10	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.021.000.000	44.021.000.000	44.021.000.000
11	Dana Alokasi Khusus (DAK)	59.552.000.000	59.552.000.000	59.552.000.000



No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
A	BELANJA OPERASI	1.380.159.000.000,00	1.363.556.000.000,00	1.385.922.000.000,00
	Non Fisik			
12	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	75.030.000.000	75.030.000.000	75.030.000.000
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.631.000.000,00	55.631.000.000,00	55.631.000.000,00
1	Pembayaran Pokok Utang	55.631.000.000,00	55.631.000.000,00	55.631.000.000,00
2	Penyertaan modal			
Total Belanja Wajib & Mengikat		1.435.790.000.000,00	1.419.187.000.000,00	1.441.553.000.000,00

7.2. Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini menyajikan rumusan program pembangunan 2024-2026 kedepan baik program yang bersifat strategis maupun program yang bersifat operasional. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional.

Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Tabel 7. 3 Rencana Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah		
					2024		2025		2026					
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga										Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
						304.774.000.000,00		304.774.000.000,00		304.774.000.000,00				
1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	CC (70)	B	215.520.000.000,00	B	215.520.000.000,00	A	215.520.000.000,00	A	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	81,5	82		83		84		84	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	100	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	100	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	90	95		96		97		97	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	80	95		96		97		97	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	0	97	40.562.000.000,00	98	40.562.000.000,00	99	40.562.000.000,00	99	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	0	97		98		99		99	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,01	0		0		0		0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,06	0		0		0		0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	99,99	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik	Persen	95	95		95,5		96		96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi bangunan baik	Persen	99	99		99,5		99,5		99,5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rasio Guru/Murid sekolah pendidikan dasar	ratio	0,05416666 7	6,1		6,1		6,1		6,1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	ratio	0,05555555 6	6,1		6,1		6,1		6,1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	0	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	0	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,98	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Guru Penggerak Jenjang PAUD	Persen	0	4,83		6,44		7,24		7,24	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Guru Penggerak Jenjang SD/ MI	Persen	0	7		9		11		11	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Guru Penggerak Jenjang SMP/ Mts	Persen	0	9		11		13		13	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Sekolah Penggerak Jenjang PAUD	Persen	0	6,41		9,61		12,82		12,82	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		Persentase Sekolah Penggerak Jenjang SD/ MI	Persen	0	10		12		14		14	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Sekolah Penggerak Jenjang SMP/ MTs	Persen	0	20		22		24		24	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD	Persen	0	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI	Persen	0	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMP/MTs	Persen	0	100		100		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	0 1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persen	0	5	250.000.000,00	10,00	250.000.000	15	250.000.000	15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	0 1 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persen	98	98		98,30		98,5		98,5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD	Persen	100	100	48.442.000.000,00	100,00	48.442.000.000,00	100	48.442.000.000,00	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/ MI	Persen	100	100		100,00		100		100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	0 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
		Dinas Kesehatan				178.527.000.000,00		178.527.000.000,00		181.527.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	0 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persen		85	77.459.000.000,00	86	77.459.000.000,00	87	77.459.000.000,00	87	Dinas Kesehatan
1	0 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persen	41	100	96.868.000.000,00	100	96.868.000.000,00	100	99.868.000.000,00	100	Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah		
					2024		2025		2026					
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
		Jumlah Kematian Ibu	Angka	5	3		3		3		3	Dinas Kesehatan		
		Angka Kematian Neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	Kasus	9,3	11		10		9		9	Dinas Kesehatan		
		Presentase Desa ODF	Persen	78	85		92		100		100	Dinas Kesehatan		
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna	Unit	0	2		0		0		2	Dinas Kesehatan		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit malaria	%	100	100		100		100		100	Dinas Kesehatan		
1	0 2	0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	55	63	700.000.000,00	72	700.000.000,00	81	700.000.000,00	81	Dinas Kesehatan
1	0 2	0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase tersedianya Izin Apotik dll, Pemberian Sertifikat Produksi Alkes dan Probelkes, Sertifikat Produksi Pangan dan PIRT, Serta Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi	Persen	75	83	3.200.000.000,00	88	3.200.000.000,00	92	3.200.000.000,00	92	Dinas Kesehatan
1	0 2	0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Pengembangan Promosi Kesehatan, GERMAS dan UKBM	Persen	42,5	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	Dinas Kesehatan
				Presentase Posyandu Aktif	Persen	91,2	95	200.000.000,00	98	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	Dinas Kesehatan
			Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung					102.765.000.000,00		102.765.000.000,00		102.765.000.000,00		Rumah Sakit Umum Daerah
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS	Persen	70	70	100.005.000.000,00	80	100.005.000.000,00	90	100.005.000.000,00	90	Rumah Sakit Umum Daerah
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM RS	Persen	78	80	2.260.000.000,00	90	2.260.000.000,00	90	2.260.000.000,00	90	Rumah Sakit Umum Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1 0 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan sesuai standar	Persen	31%	40%	500.000.000,00	60%	500.000.000,00	85%	500.000.000,00	85%	Rumah Sakit Umum Daerah
1 0 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					246.967.000.000,00		250.728.000.000,00		254.314.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentasi Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat (%)	Persen	3,33	22,2	1.000.000.000,00	33,33	1.000.000.000,00	44,44	1.000.000.000,00	99,998774	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja Pelayanan Publik (%)	Persen	95,37	96	26.221.000.000,00	97	26.221.000.000,00	98	26.221.000.000,00	98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Capaian Kebutuhan Gedung Pemerintah yang Terbangun (%)	Persen	0	33,33	41.210.000.000,00	33,33	44.971.000.000,00	33,33	42.210.000.000,00	99,996	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase pelayanan Uji Lab terhadap permintaan konsumen (%)	Persen	84,66	85	1.000.000.000,00	85	1.000.000.000,00	90	1.000.000.000,00	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang ber IMB dan dan memiliki sertifikat laik fungsi	Persen	23,54	88,05	1.000.000.000,00	91,19	1.000.000.000,00	94,34	1.000.000.000,00	94,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Predikat Kinerja penyelenggaraan penataan ruang (Baik/Sedang/buruk)	Predikat	Sedang	Sedang	1.000.000.000,00	Sedang	1.000.000.000,00	Baik	1.000.000.000,00	Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penataan bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)	Kawasa n	4	4	5.000.000.000,00	4	5.000.000.000,00	4	5.000.000.000,00	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase layanan terhadap kebutuhan pengembangan permukiman (%)	Persen	21,25	70	350.000.000,00	75	350.000.000,00	80	350.000.000,00	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga sanitasi tidak layak (%)	Persen	9,98	9,65	500.000.000,00	9,32	500.000.000,00	8,99	500.000.000,00	8,994901628	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih (%)	Persen	30,13	35,67	36.202.000.000,00	45,10	36.202.000.000,00	60,54	36.202.000.000,00	60,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1 0 3 0 1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik yang merupakan kewenangan kabupaten (%)	Persen	37,56	78,82	24.920.000.000,00	80,66	24.920.000.000,00	81,59	25.000.000.000,00	81,58518977	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%)	Persen	14,72	24,19	14.000.000.000,00	34,99	14.000.000.000,00	47,13	14.000.000.000,00	47,13156954	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 3 1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Persen	26,43	40,54	94.564.000.000,00	45,86	94.564.000.000,00	51,49	100.831.000.000,00	51,49481588	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 0 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan					32.507.000.000,00		32.857.000.000,00		32.857.000.000,00		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 0 4 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	95	95	8.887.000.000,00	96	8.887.000.000,00	97	8.887.000.000,00	97	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 0 4 0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah relokasi program pemerintah dan relokasi bencana (Unit)	Unit	10	10	250.000.000,00	15	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 0 4 0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat	Unit	25	25	12.400.000.000,00	35	12.750.000.000,00	50	12.750.000.000,00	50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 0 4 0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh (%)	Persen	1	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 0 4 0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah lokasi penyediaan PSU perumahan (lokasi)	Lokasi	2	2	10.570.000.000,00	2	10.570.000.000,00	2	10.570.000.000,00	8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 0 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					17.450.000.000,00		17.450.000.000,00		17.450.000.000,00		Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
1 0 5 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	84	16.100.000.000,00	85,00	16.100.000.000,00	90	16.100.000.000,00	90	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
1 0 5 0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Satuan Linmas yang terbina dengan baik	Persen	50	85	1.000.000.000	85,00	1.000.000.000,00	85	1.000.000.000,00	85	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
							2024		2025		2026			
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	0	0	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	Persen	80	100	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persen	90	100		100,00		100			
Satuan Polisi Pamong Praja							14.790.000.000,00		14.790.000.000,00		14.790.000.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja	
1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip	Predikat	B	B	13.440.000.000,00	B	13.440.000.000,00	B	13.440.000.000,00	B	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda Dan Perkada	Presentase	100	100	850.000.000,00	100	850.000.000,00	100	850.000.000,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Penyelesaian Penegakan Keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase	100	100		100		100			
1	0	0	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tanggung Bencana	Persentase	23	30	500.000.000,00	50	500.000.000,00	80	500.000.000,00	80	Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							6.945.000.000,00		6.945.000.000,00		6.945.000.000,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah	Persen	95	95	5.795.000.000,00	96	5.795.000.000,00	97	5.795.000.000,00	97	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Respon Cepat Kejadian Bencana	jam	6	6	1.150.000.000,00	5	1.150.000.000,00	4	1.150.000.000,00	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
Dinas Sosial							9.246.000.000,00		9.246.000.000,00		9.246.000.000,00		Dinas Sosial	
1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	Nilai	B	B (80)	4.796.000.000,00	B (85)	4.796.000.000,00	A (90)	4.796.000.000,00	A (90)	Dinas Sosial
1	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber daya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	Persen	90	99	210.000.000,00	99,00	210.000.000,00	99	210.000.000,00	99,00	Dinas Sosial



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
							2024		2025		2026			
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	0	0	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Penanganan	Persen	1459 Orang	99	300.000.000,00	99	300.000.000,00	99	300.000.000,00	99	Dinas Sosial
1	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Tepat Sasaran	Persen	31987 Orang	90	3.840.000.000,00	92	3.840.000.000,00	94	3.840.000.000,00	94	Dinas Sosial
1	0	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan dan Penanganan Sosial	Persen	2178 Orang	89	100.000.000,00	89	100.000.000,00	89	100.000.000,00	89	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	0	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					8.030.000.000,00		8.030.000.000,00		8.030.000.000,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82	84	4.542.000.000,00	85,00	4.542.000.000,00	86	4.542.000.000,00	86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kesesuaian RTKD terhadap Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan	Persen	N/A	90	250.000.000,00	93,00	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	Persen	3,13	15	772.000.000,00	25,00	772.000.000,00	35	772.000.000,00	35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	38	40	100.000.000,00	42,00	100.000.000,00	45	100.000.000,00	45	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	2.366.000.000,00	100,00	2.366.000.000,00	100	2.366.000.000,00	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	7,2	20		22,00		24		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	1,8	10		15,00		20		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	0	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				8.467.000.000,00		8.467.000.000,00		8.767.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,18	90	7.167.000.000,00	92	7.167.000.000,00	95	7.167.000.000,00	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta	Persen	7	15	400.000.000,00	20	400.000.000,00	25	400.000.000,00	25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	4	8		8		8		8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	87,5	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	400.000.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20804	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya pelayanan Puspaga	Keluarga	0	250	100.000.000,00	350	100.000.000,00	450	100.000.000,00	1050	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20805	PROGRAM SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di lintas SKPD	Dokumen	0	1	100.000.000,00	2	100.000.000,00	3	100.000.000,00	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Penilaian Kabupaten layak Anak	Poin	520	580	200.000.000,00	590	200.000.000,00	600	300.000.000,00	600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
20807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	110	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	Dinas Ketahanan Pangan					6.232.000.000,00		6.232.000.000,00		6.232.000.000,00		Dinas Ketahanan Pangan
20901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,34	88,5	5.277.000.000,00	88,7	5.277.000.000,00	88,9	5.277.000.000,00	88,9	Dinas Ketahanan Pangan
20902	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tersedianya fasilitas stock pangan yang memadai	Unit	10	0	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	12	Dinas Ketahanan Pangan
20903	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81,8	85	400.000.000,00	87	400.000.000,00	90	400.000.000,00	90	Dinas Ketahanan Pangan
20904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	7 Desa rawan Pangan	42,8	250.000.000,00	28,6	250.000.000,00	28,6	250.000.000,00	28,6	Dinas Ketahanan Pangan
20905	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase peningkatan Jumlah jenis pangan segar yang tersertifikasi	Persen	1 Komoditas	20	185.000.000,00	27	185.000.000,00	27	185.000.000,00	27	Dinas Ketahanan Pangan
210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
210	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21004	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan Konflik Tanah Pemerintah	Bidang	30	30	350.000.000,00	30	350.000.000,00	30	350.000.000,00	90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan					3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH yang dikelola (%)	Persen	92	92	3.500.000.000,00	93	3.500.000.000,00	95	3.500.000.000,00	95	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Dinas Lingkungan Hidup					17.063.000.000,00		17.063.000.000,00		17.063.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
21101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Persen	100	100	12.460.000.000,00	100	12.460.000.000,00	100	12.460.000.000,00	100	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah	
					2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
2	1 1 0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan hidup (%)	Persen	60	80	80		80		80	Dinas Lingkungan Hidup	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ RPPLH, Rencana Induk Persampahan/RIP), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah/ DIKPLHD	Dokumen	1	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	6	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	68,1	71,755	250.000.000,00	71,855	250.000.000,00	71,955	250.000.000,00	72,51	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Kampung Iklim yang Terbina	kampung iklim	0	5	100.000.000,00	8	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persentase usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang menyampaikan laporan	Persen	0	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengawasan dan Pembinaan (%)	Persen	0	80	100.000.000,00	90	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 0 7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Teridentifikasinya Kawasan Masyarakat Hutan Adat (MHA)	MHA	60	80	100.000.000,00	90	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Nominasi Penghargaan kalpataru	Orang	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
2 1 0 1 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan Adiwiyata (Sekolah/Lembaga)	Sekolah / Lembaga	0	1	100.000.000,00	2	100.000.000,00	3	100.000.000,00	6	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 0	PROGRAM PENANGANGAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan yang tertangani	Persen	48	5	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	25	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	Persen	80	100	3.253.000.000,00	100	3.253.000.000,00	100	3.253.000.000,00	100	Dinas Lingkungan Hidup
2 1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					6.747.000.000,00		6.747.000.000,00		7.100.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 1 2 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	84,77	87	5.847.000.000,00	91	5.847.000.000,00	95	6.000.000.000,00	95	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 1 2 0 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 1 2 0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persen	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 1 2 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	Persen	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 1 2 0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan yang tersusun	Dokumen	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					6.433.000.000,00		6.433.000.000,00		6.433.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 1 3 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80	85	4.423.000.000,00	85	4.423.000.000,00	90	4.423.000.000,00	B	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 1 3 0 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Capaian Bumdes berdasarkan klasifikasi	Klasifikasi	Maju : 5 Berkembang : 15 Tumbuh : 10	Maju : 7 Berkembang : 16 Tumbuh : 7	750.000.000,00	Maju : 8 Berkembang : 18 Tumbuh : 4	750.000.000,00	Maju : 9 Berkembang : 20 Tumbuh : 1	750.000.000,00	Maju : 9 Berkembang : 20 Tumbuh : 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 1 0	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah fasilitasi kerjasama desa	Desa	0	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah	
					2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
3	3	Jumlah kawasan pedesaan terbangun	Kawasa n	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	1 3 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya status desa	Klasifika si	Mandiri : 12 Maju : 15 Berkemban g : 3	Mandiri : 15 Maju : 15 Berkemban g : 0	560.000.000,00	Mandiri : 20 Maju : 10 Berkembang : 0	560.000.000,00	Mandiri : 25 Maju : 5 Berkembang : 0	560.000.000,00	Mandiri : 25 Maju : 5 Berkembang : 0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1 3 5	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah desa baru	Desa	30	38	500.000.000,00	46	500.000.000,00	50	500.000.000,00	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					2.824.000.000,00		2.824.000.000,00		2.824.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 4 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan	Kampun g	32	33	100.000.000,00	35	100.000.000,00	37	100.000.000,00	37	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	Rumah Data	0	6	7		8		21		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1 4 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya angka Unmeed Need	Persen	23,4	17,58	2.224.000.000,00	17,56	2.224.000.000,00	17,54	2.224.000.000,00	17,54	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Menurunnya angka TFR (Total Fertility Rate)	Persen	2,45	2,09	2,08		2,07		2,07		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Menurunnya angka putus pakai (DO)	Persen	12	17,58	17,56		17,54		17,54		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya CPR (Contraception Prevalence Rate)	Persen	62	80,25	80,45		80,65		80,65		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Persen	28	28,55	29,55		30,55		30,55		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah	
					2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Program Bangsa Kencana	Persen	60	70		75		80		80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Tersedianya Fasilitas Pembinaan di Kampung KB	Rumah Data	0	2		3		4		9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1 4 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas Pembinaan 1000 HPK	Keluarga	2822	5168		5685		6685		17538	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok UPPKA	0	4	500.000.000,00	5	500.000.000,00	6	500.000.000,00	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Kampung KB yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan Dalam Rangka Penurunan Stunting	Kampung	0	1		2		3		6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
		Dinas Perhubungan				14.573.000.000,00		14.573.000.000,00		14.573.000.000,00		Dinas Perhubungan	
2	1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Nilai	N/A	70	10.873.000.000,00	75	10.873.000.000,00	80	10.873.000.000,00	80	Dinas Perhubungan
2	1 6 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Persen	100	100	2.950.000.000,00	100	2.950.000.000,00	100	2.950.000.000,00	100	Dinas Perhubungan
2	1 6 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	80	85	750.000.000,00	85	750.000.000,00	90	750.000.000,00	90	Dinas Perhubungan
2	1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
		Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian				8.684.000.000,00		8.684.000.000,00		8.684.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian	
2	1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Persen	90	98	6.384.000.000,00	98	6.384.000.000,00	98	6.384.000.000,00	98	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
							2024		2025		2026			
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
2	1	0	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi	Persen	80	95	300.000.000,00	96	300.000.000,00	98	300.000.000,00	98	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian
2	1	0	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	Persen	90	95	2.000.000.000,00	96	2.000.000.000,00	98	2.000.000.000,00	98	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian
				Indeks kepuasan layanan	Persen	78,95	95		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian
2	1	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											
			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan					9.057.000.000,00		9.057.000.000,00		9.057.000.000,00		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	82,72	82,97	7.622.000.000,00	83,22	7.622.000.000,00	83,47	7.622.000.000,00	83,47	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO KECIL	Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas	Persen	50	55	100.000.000,00	60	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persen	50	55	100.000.000,00	60	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1	0	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	Persen	33	37	100.000.000,00	41	100.000.000,00	44	100.000.000,00	44	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persen	33	37	1.135.000.000,00	41	1.135.000.000,00	44	1.135.000.000,00	44	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					7.458.000.000,00		7.458.000.000,00		7.458.000.000,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	87,86	88	6.414.000.000,00	88,2	6.414.000.000,00	88,4	6.414.000.000,00	88,4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANG IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah kebijakan penanaman modal	Kebijakan (Perda/Perbup)	1	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor PMDN	Persen	56	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	20	250.000.000,00	80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah investor PMA			1		1		1		3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah	
					2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
2	1 8 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Persen	77	80	100.000.000,00	82	100.000.000,00	85	100.000.000,00	85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1 8 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan nilai realisasi investasi PMA/PMDN	Rupiah	1394	10.000.000.000	334.000.000,00	13.000.000.000	334.000.000,00	15.000.000.000	334.000.000,00	38.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1 8 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Perizinan/Non Perizinan yang diterbitkan Online	Persen	N/A	50	100.000.000,00	75,0	100.000.000,00	100,0	100.000.000,00	100,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAA											
		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					3.100.000.000,00		10.800.000.000,00		3.300.000.000,00		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	1 9 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	0	47	200.000.000,00	94,00	200.000.000,00	188	200.000.000,00	188	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase Wirausaha Muda	Orang	0	60		120,00		240		240	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	1 9 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPSITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabang	0	16	2.300.000.000,00	32,00	10.000.000.000,00	64	2.500.000.000,00	64	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Cakupan Pelatih yang bersertifikat	Orang	0	30		60,00		120		120	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Cakupan Pembinaan atlet muda	Orang	0	471		942,00		1884		1884	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	1 9 4		Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	186		372,00		744		744	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah prestasi olahraga	Cabang	0	23		46,00		92		92	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara	Gedung	4	4		4,00		4		4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	1 9 5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Organisasi	10	10	600.000.000,00	10,00	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	2 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
		Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian
2	1 6 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemenuhan data prioritas	Persen	85	98	250.000.000,00	98	250.000.000,00	98	250.000.000,00	98	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian
2	2 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
		Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian					674.000.000,00		674.000.000,00		674.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
2	1 6 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persen	90	95	674.000.000,00	96	674.000.000,00	98	674.000.000,00	98	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian
2	2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				4.905.000.000,00		4.905.000.000,00		4.905.000.000,00		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	80	80,5	4.355.000.000,00	80,5	4.355.000.000,00	80,75	4.355.000.000,00	80,75	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2 2 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kegiatan	2	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2 2 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persen	50	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	80	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2 2 4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Objek Cagar Budaya Tak Benda	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Objek Cagar Budaya Benda		1		1		1		3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
		Dinas Perpustakaan dan Arsip				7.143.000.000,00		7.143.000.000,00		7.243.000.000,00		Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	85,82	85,84	6.643.000.000,00	85,85	6.643.000.000,00	85,88	6.643.000.000,00	85,88	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2 3 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PERPUSTAKAAN	Persen	85,82	85,84	500.000.000,00	85,85	85,88	600.000.000,00	85,88	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			TINGKAT IPLM(INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT)	Persen	53	53,7		53,75			53,8	53,8



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah		
					2024		2025		2026					
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENERIMA MANFAAT PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	Persen	80	82		83		84		84	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
		Dinas Perpustakaan dan Arsip				200.000.000,00		200.000.000,00		467.000.000,00		Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2	2	0	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Arsip	Persen	0	5,5	100.000.000,00	5,5	100.000.000,00	5,5	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2	2	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Arsip	Persen	0	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	267.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
		Dinas Perikanan					8.025.000.000,00		8.025.000.000,00		8.025.000.000,00	Dinas Perikanan		
3	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	Persen	N/A	80	6.151.000.000,00	85	6.151.000.000,00	90	6.151.000.000,00	Dinas Perikanan	
3	2	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Ton	6.411	6.568	924.000.000,00	6667	924.000.000,00	6766	924.000.000,00	20001	Dinas Perikanan
3	2	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	9.236	11.000	500.000.000,00	12100	500.000.000,00	13310	500.000.000,00	36410	Dinas Perikanan
3	2	0	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan	5	4	100.000.000,00	3	100.000.000,00	2	100.000.000,00	9	Dinas Perikanan
3	2	0	PROGRAM PENGOLAHAN DAN HASIL PEMASARAN PERIKANAN	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang mandiri	Ton	300	400	350.000.000,00	450	350.000.000,00	500	350.000.000,00	1350	Dinas Perikanan
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					363.000.000,00		363.000.000,00		363.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
3	2	0	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Destinasi Wisata yang dikembangkan	Objek	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2	0	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Capaian kunjungan wisatawan	Persen	134.962,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Capaian SDM yang dibina	Orang	-	50	63.000.000,00	50	63.000.000,00	50	63.000.000,00	150	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
3 2 0 6 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Sub sektor prioritas ekonomi kreatif yang di kembangkan	Kegiatan	-	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	Dinas Pertanian					24.312.000.000,00		24.312.000.000,00		24.312.000.000,00		Dinas Pertanian
3 2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	84,8	85	21.166.000.000,00	87	21.166.000.000,00	90	21.166.000.000,00	90	Dinas Pertanian
3 2 7 2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase tertanganinya gangguan usaha perkebunan	Persen	80	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	Dinas Pertanian
		Prosentase pengendalian serangan organisme pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pertanian	Persen	80	100		100		100		100	Dinas Pertanian
3 2 7 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah peningkatan hasil produksi pertanian	Ton	48897	51004	985.000.000,00	51542	985.000.000,00	52085	985.000.000,00	154631	Dinas Pertanian
		Jumlah Peningkatan produksi perkebunan	Ton	21026	29100		29411		29727		59138	Dinas Pertanian
3 2 7 4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna	Kelompok	48	48	667.000.000,00	48	667.000.000,00	48	667.000.000,00	48	Dinas Pertanian
3 2 7 5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah pembinaan kelembagaan petani dan penyuluh	Kelompok	604	604	627.000.000,00	604	627.000.000,00	604	627.000.000,00	604	Dinas Pertanian
3 2 7 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	jumlah perusahaan Perkebunan yang dimitrakan dan dinilai	Dokumen	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	Dinas Pertanian
3 2 7 7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah peningkatan populasi tenak	Ekor	15303	16626	267.000.000,00	16959	267.000.000,00	17291	267.000.000,00	50876	Dinas Pertanian
3 3 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan					2.486.000.000,00		2.486.000.000,00		2.486.000.000,00		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 3 0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Perdagangan yang Representatif	Unit	10	12	2.036.000.000,00	14,00	2.036.000.000,00	16	2.036.000.000,00	16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3 3 0 3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Kebutuhan pokok dan barang penting yang diintervensi dalam	Produk	23	23	250.000.000,00	23,00	250.000.000,00	23	250.000.000,00	23	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah	
					2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
		rangka stabilisasi harga dan stock											
3	3 0 4	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Peningkatan alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Alat UTTP	90	200	200.000.000,00	250,00	200.000.000,00	300	200.000.000,00	300	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 1 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Pengembangan Industri	Dokumen	1	1	200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Sentra IKM yang dikuatkan	Sentra	9	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 1 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA	Persentase Peningkatan Jumlah Industri yang memiliki izin berusaha (%)	Persen	35	10	100.000.000,00	15,00	100.000.000,00	20	100.000.000,00	80	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 1 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Data Industri yang masuk dalam SIINAS (%)	%	15	10	100.000.000,00	15,00	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3 2 2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase status tanah restan di kawasan transmigrasi yang teridentifikasi	Persen	N/A	50	100.000.000	60,00	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	0 1	SEKRETARIAT DAERAH											
		Sekretariat Daerah				51.047.000.000,00		51.047.000.000,00		51.047.000.000,00			Sekretariat Daerah
4	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100	Sekretariat Daerah
			Persentase SKPD yang menyusun dokumen SAKIP sesuai ketentuan	Persen	60	60	39.959.000.000,00	70	39.959.000.000,00	80	39.959.000.000,00	80	Sekretariat Daerah
			Nilai Indeks Kepuasan	Nilai IKM	84,77	86		87		88		88	Sekretariat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah	
					2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
		Masyarakat Pada Sekretariat Daerah											
		Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi	Persen	100	100		100		100		100	Sekretariat Daerah	
4	0 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Yang Dihasilkan	Persen	90	92	9.388.000.000,00	93	9.388.000.000,00	95	9.388.000.000,00	93	Sekretariat Daerah
			Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Persen	90	92		93		95		95	Sekretariat Daerah
			Persentase terlaksananya penyusunan produk hukum daerah serta penanganan litigasi, non litigasi dan HAM	Persen	95	95		95		95		95	Sekretariat Daerah
4	0 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen	87,48	92	1.700.000.000,00	93	1.700.000.000,00	95	1.700.000.000,00	95	Sekretariat Daerah
			Peningkatan Kontribusi PAD oleh BUMD	Persen	N/A	15		15		20		50	Sekretariat Daerah
			Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level	3	3		3		3		3	Sekretariat Daerah
		Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI				1.146.000.000,00		1.146.000.000,00		1.146.000.000,00		Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	
4	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian IKM Set.Korpri	Predikat	N/A	B	1.046.000.000,00	B	1.046.000.000,00	B	1.046.000.000,00	B	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
5	0 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Pendampingan Hukum	Persen (%)	N/A	85	100.000.000,00	85	100.000.000,00	85	100.000.000,00	85	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
4	0 2	SEKRETARIAT DPRD											
		Sekretariat DPRD				52.094.000.000,00		52.094.000.000,00		52.094.000.000,00		Sekretariat DPRD	
4	0 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	-	C	18.190.000.000,00	B	18.190.000.000,00	B	18.190.000.000,00	B	Sekretariat DPRD
4	0 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Persen	75	80	33.904.000.000,00	82	33.904.000.000,00	85	33.904.000.000,00	85	Sekretariat DPRD
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah		
					2024		2025		2026					
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
5	0	1	PERENCANAAN											
			Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan									Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan		
5	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM			8.569.000.000,00		8.569.000.000,00		8.569.000.000,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan		
5	0	0	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Capaian Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah			3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan		
5	0	0	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah			1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan		
5	0	2	KEUANGAN											
			Badan Keuangan dan Aset Daerah									Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Persen	77,17	78,03	82.675.000.000,00	78,53	82.675.000.000,00	79,22	82.675.000.000,00	79,22	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan	Opini BPK	WDP	WTP	180.491.000.000,00	WTP	180.491.000.000,00	WTP	180.491.000.000,00	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK	WDP	WTP	1.250.000.000,00	WTP	1.250.000.000,00	WTP	1.250.000.000,00	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Badan Pendapatan Daerah										Badan Pendapatan Daerah	
5	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	81,02	81,04	8.833.000.000,00	81,07	8.833.000.000,00	81,1	8.833.000.000,00	81,1	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan PAD	Rupiah	106.342.276.702,96	112.176.570.244,71	3.000.000.000,00	157.142.287.000,00	3.000.000.000,00	157.248.061.000,00	3.000.000.000,00	157.248.061.000,00	Badan Pendapatan Daerah
				Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	6	7,3		8,5		9,5		9,5	Badan Pendapatan Daerah
5	0	3	KEPEGAWAIAN											
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia										Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) BKPSDM	Persen	B	B	6.023.000.000,00	B	6.023.000.000,00	A	6.023.000.000,00	A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat	Rasio	36:377	38 : 377	1.300.000.000,00	45 : 377	1.300.000.000,00	50 : 377	1.300.000.000,00	133 : 377	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah		
					2024		2025		2026					
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
		Kompetensi												
		Persentase ASN yang telah mengikuti Assesment	Persen	91,88	93		95		99		99	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				4.500.000.000,00		4.500.000.000,00		4.500.000.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio ASN yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	Rasio	349:456	355 : 456		370 : 456		390 : 456	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Persentase penyelesaian kasus pelanggaran Disiplin ASN	Persen	70,37	80	4.500.000.000,00	85	4.500.000.000,00	90	4.500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan						1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01	INSPEKTORAT DAERAH												
		Inspektorat Daerah						17.605.000.000,00		17.605.000.000,00		Inspektorat Daerah		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian IKM Inspektorat	Nilai	B	B	9.047.000.000,00	B	9.047.000.000,00	A	9.047.000.000,00	Inspektorat Daerah	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Persen	91,5	95		100		100		100	Inspektorat Daerah
				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	Persen	90,7	95	4.419.000.000,00	100	4.419.000.000,00	100	4.419.000.000,00	100	Inspektorat Daerah
				Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100	100		100		100		100	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,01	75		85		90		90	Inspektorat Daerah
				Predikat Kapabilitas APIP	Predikat	Level 3	Level 3	4.139.000.000,00	Level 3	4.139.000.000,00	Level 3	4.139.000.000,00	Level 3	Inspektorat Daerah
				Predikat Maturitas SPIP	Predikat	Level 2	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	Inspektorat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah		
					2024		2025		2026					
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
7	URUSAN KEWILAYAHAN													
7	0	1	KECAMATAN											
			Kecamatan Penajam				42.400.000.000,00		42.400.000.000,00		42.400.000.000,00	Kecamatan Penajam		
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kecamatan Penajam	Predikat	B	B	28.494.000.000,00	B	28.494.000.000,00	A	28.494.000.000,00	A	Kecamatan Penajam
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata - rata capaian IKM kelurahan	Predikat	N/A	B	10.566.000.000,00	B	10.566.000.000,00	A	10.566.000.000,00	A	Kecamatan Penajam
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Persen	80	85	3.040.000.000,00	90	3.040.000.000,00	95	3.040.000.000,00	95	Kecamatan Penajam
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi pelaksanaan agenda nasional	Persen	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	Kecamatan Penajam
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persen	50	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	Kecamatan Penajam
				Persentase usulan pemekaran desa yang difasilitasi	Persen	N/A	30		50		20		100	Kecamatan Penajam
			Kecamatan Waru				6.401.000.000,00		6.401.000.000,00		6.401.000.000,00	Kecamatan Waru		
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kecamatan Waru	Predikat	B	B	5.032.000.000,00	B	5.032.000.000,00	A	5.032.000.000,00	Baik	Kecamatan Waru
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata - rata capaian IKM kelurahan	Predikat	Baik	Baik	1.009.000.000,00	B	1.009.000.000,00	A	1.009.000.000,00	Baik	Kecamatan Waru
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Persen	80	85	160.000.000,00	90	160.000.000,00	95	160.000.000,00	95	Kecamatan Waru
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi pelaksanaan agenda nasional	Predikat	Baik	Baik	100.000.000,00	Baik	100.000.000,00	Baik	100.000.000,00	Baik	Kecamatan Waru
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persen	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	Kecamatan Waru
				Persentase usulan pemekaran desa yang difasilitasi	Persentase	-	30		50		20		100	Kecamatan Waru
			Kecamatan Babulu				4.103.000.000,00		4.103.000.000,00		4.103.000.000,00	Kecamatan Babulu		
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Predikat	B	B	3.753.000.000,00	A	3.753.000.000,00	A	3.753.000.000,00	A	Kecamatan Babulu



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
							2024		2025		2026			
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Persen	80	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	95	Kecamatan Babulu
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan	Persen	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	Kecamatan Babulu
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persen	50	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	Kecamatan Babulu
				Persentase usulan pemekaran desa yang difasilitasi	Persen	-	30		50		20		100	Kecamatan Babulu
Kecamatan Sepaku								10.436.000.000,00	10.436.000.000,00	10.436.000.000,00	10.436.000.000,00	10.436.000.000,00	Kecamatan Sepaku	
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM kecamatan	Predikat	B	B	7.719.000.000,00	B	7.719.000.000,00	A	7.719.000.000,00	A	Kecamatan Sepaku
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata - rata capaian IKM kelurahan	Predikat	N/A	B	50.000.000,00	B	50.000.000,00	A	50.000.000,00	A	Kecamatan Sepaku
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Persen	80	85	2.517.000.000,00	90	2.517.000.000,00	95	2.517.000.000,00	95	Kecamatan Sepaku
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi pelaksanaan agenda nasional	Persen	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	Kecamatan Sepaku
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persen	80	85	50.000.000,00	90	50.000.000,00	95	50.000.000,00	95	Kecamatan Sepaku
				Persentase usulan pemekaran desa yang difasilitasi	Persen	-	30		50		20		100	Kecamatan Sepaku
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	0	1	Kesatuan Bangsa dan Politik											
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					44.680.000.000,00		7.801.000.000,00		7.801.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Nilai	N/A	85	3.701.000.000,00	88	3.701.000.000,00	90	3.701.000.000,00	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	Persen	70	70	2.500.000.000,00	75	2.500.000.000,00	80	2.500.000.000,00	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
8 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	%	70	70	250.000.000,00	75	250.000.000,00	80	250.000.000,00	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 0 1 4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	61	70	100.000.000,00	75	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 0 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	%	70	70	250.000.000,00	75	250.000.000,00	80	250.000.000,00	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 0 1 6	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	%	70	70	37.879.000.000,00	75	1.000.000.000,00	80	1.000.000.000,00	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi

8.2. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

8.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga.

8.2.2. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, serta inovasi dan kreativitas daerah.

8.2.3. Aspek Pelayanan Umum

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek Pelayanan Umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan



Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke-		
				1	2	3
1	Persentase Kemiskinan	Persen	7,25	6,76	6,75	6,62
2	Rasio Gini	Nilai	0,263	0,260	0,258	0,255
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72,55	73,30	73,45	73,85
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	60,45 (Baik)	62,85 (Baik)	63,70 (Baik)	65,50 (Baik)
5	Indeks SPBE	Nilai	2,14 (Cukup)	2,24 (Cukup)	2,33 (Cukup)	2,42 (Cukup)
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	14,49	14,42	2,63	2,82
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	65 (cukup)	67 (cukup)	70 (cukup)
8	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	N/A	23,30	24,40	25,50
9	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	Persen	38,4	43,10	47,80	52,50
10	Indeks Desa Membangun	Nilai/Klasifikasi Desa	0,7769 (Maju Mandiri: 12 Maju 15 Berkembang: 3 Tertinggal: 0 Sangat Tertinggal: 0)	0,7790 (Maju Mandiri: 14 Maju 14 Berkembang: 2 Tertinggal: 0 Sangat Tertinggal: 0)	0,7850 (Maju Mandiri: 17 Maju 12 Berkembang: 1 Tertinggal: 0 Sangat Tertinggal: 0)	0,7895 (Maju Mandiri: 20 Maju 10 Berkembang: 0 Tertinggal: 0 Sangat Tertinggal: 0)
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,12	2,05	2,00	1,95
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,7	12,95	13,45	13,85
13	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,51	8,95	9,35	9,85
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,71	72,05	72,65	72,98
15	Prevalensi Stunting	Persen	11,97	11,55	10,92	10,05
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	86,57	86,9	87,3	87,85
17	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	Persen	25	33	45	55
18	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B
19	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	6,00	7,30	8,50	9,50
20	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	Persen	18,59	4,81	4,82	4,83
21	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rupiah	840.366.207.948	1.040.366.000.000	1.053.366.000.000	1.068.366.000.000
22	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	68,1	73,18	73,28	73,38
23	Indeks Resiko Bencana	Nilai	151,67	149,77	147,66	145,8
24	Persentase pemenuhan rumah layak huni	Persen	59,69	64,00	65,00	67,00
25	Persentase jalan Mantap	Persen	26,43	28,00	30,00	32,00



Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Persentase Kemiskinan	Persen	7,25	6,94	6,75	6,62	6,62
1.2	Rasio Gini	Nilai	0,263	0,260	0,268	0,255	0,255
1.3	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	Persen	38,40	43,10	47,80	52,50	52,50
1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,12	2,05	2	<2,00	<2,00
2 Kesejahteraan Sosial							
2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72,55	72,95	73,45	73,85	73,85
2.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,7	12,95	13,45	13,85	13,85
2.3	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,51	8,95	9,35	9,85	9,85
2.4	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,74	72,05	72,65	72,98	72,98
2.5	Prevalensi Stunting	Persen	21,8	11,55	10,92	10,05	10,05
2.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	86,57	86,9	87,3	87,85	87,85
2.7	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	Persen	25	33	45	55	55
Aspek Pelayanan Umum Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1 Pendidikan							
1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	81,5	82	83	84	84
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	100	100	100	100	100
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	100	100	100	100	100
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	90	95	96	97	97
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	80	95	96	97	97
1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	0	97	98	99	99
1.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	0	97	98	99	99
1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,01	0	0	0	0
1.9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,06	0	0	0	0
1.10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
1.1 1	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
1.1 2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	99,99	100	100	100	100
1.1 3	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik	Persen	95	95	95,5	96	96
1.1 4	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi bangunan baik	Persen	99	99	99,5	99,5	99,5
1.1 5	Rasio Guru/Murid sekolah pendidikan dasar	ratio	0,054	6,1	6,1	6,1	6,1
1.1 6	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	ratio	0,056	6,1	6,1	6,1	6,1
1.1 7	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	0	100	100	100	100
1.1 8	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	0	100	100	100	100
1.1 9	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,98	100	100	100	100
1.2 0	Persentase Guru Penggerak Jenjang PAUD	Persen	0	4,83	6,44	7,24	7,24
1.2 1	Persentase Guru Penggerak Jenjang SD/ MI	Persen	0	7	9	11	11
1.2 2	Persentase Guru Penggerak Jenjang SMP/ Mts	Persen	0	9	11	13	13
1.2 3	Persentase Sekolah Penggerak Jenjang PAUD	Persen	0	6,41	9,61	12,82	12,82
1.2 4	Persentase Sekolah Penggerak Jenjang SD/ MI	Persen	0	10	12	14	14
1.2 5	Persentase Sekolah Penggerak Jenjang SMP/ MTs	Persen	0	20	22	24	24
1.2 6	Persentase Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD	Persen	0	100	100	100	100
1.2 7	Persentase Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI	Persen	0	100	100	100	100
1.2 8	Persentase Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMP/MTs	Persen	0	100	100	100	100
1.2 9	Persentase pengembangan kurikulum kearifan lokal	Persen	0	5	10	15	15
1.3 0	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD	Persen	98	98	98,3	98,5	98,5
1.3 1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/ MI	Persen	100	100	100	100	100
1.3 2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/ MTs	Persen	100	100	100	100	100
2	Kesehatan						
2.1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan bagi masyarakat	Persen	41	100	100	100	100



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
2.2	Jumlah Kematian Ibu	Angka	5	3	3	3	3
2.3	Angka Kematian Neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	Kasus	9,3	11	10	9	9
2.4	Presentase Desa ODF	Persen	78	85	92	100	100
2.5	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna	Unit	0	2	0	0	2
2.6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit malaria	Persen	100	100	100	100	100
2.7	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	55	63	72	81	81
2.8	Persentase tersedianya Izin Apotik dll, Pemberian Sertifikat Produksi Alkes dan Probelkes, Sertifikat Produksi Pangan dan PIRT, Serta Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi	Persen	75	83	88	92	92
2.9	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Pengembangan Promosi Kesehatan, GERMAS dan UKBM	Persen	42,5	100	100	100	100
2.10	Presentase Posyandu Aktif	Persen	91,2	95	98	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Presentasi Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat (%)	Persen	3,33	22,20	33,33233	44,444444	44,44
3.2	Persentase bangunan gedung yang ber IMB dan dan memiliki sertifikat laik fungsi	Persen	23,54	88,05031447	91,19496855	94,33962264	94,34
3.3	Predikat Kinerja penyelenggaraan penataan ruang (Baik/Sedang/buruk)	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik
3.4	Penataan bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)	Kawasan	4	4	4	4	4,00
3.5	Persentase layanan terhadap kebutuhan pengembangan pemukiman (%)	Persen	21,25	70	75	80	80,00
3.6	Persentase rumah tangga sanitasi tidak layak (%)	Persen	9,98	9,65	9,32	8,994901628	8,99
3.7	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih (%)	Persen	30,18	35,67	45,10	60,54	60,54
3.8	Presentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik yang merupakan kewenangan kabupaten (%)	Persen	37,56	78,8160066	80,66212871	81,58518977	81,59
3.9	Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%)	Persen	14,72	24,19052802	34,99415804	47,13156954	47,13
3.1	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Persen	26,43	40,53847207	45,85552127	51,49481588	51,49



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
0							
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
4.1	Jumlah rumah relokasi program pemerintah dan relokasi bencana (Unit)	Unit	10	10	15	20	20
4.2	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat	Unit	25	25	35	50	50
4.3	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh (%)	Persen	1	1	1	1	3
4.4	Jumlah lokasi penyediaan PSU perumahan (lokasi)	Lokasi	2	2	2	2	8
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan Satuan Linmas yang terbina dengan baik	Persen	50	85	85	85	85
5.2	Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	Persen	80	100	100	100	100
5.3	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persen	90	100	100	100	100
5.4	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda Dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100
5.5	Persentase Penyelesaian Penegakan Keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100
5.6	Jumlah Sosialisasi penanggulangan bencana yang di laksanakan	Kegiatan	23	40	40	40	40
5.7	Respon Cepat Kejadian Bencana	jam	6	6	5	4	4
6	Sosial						
6.1	Persentase Potensi Sumber daya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	Persen	90	99	99	99	99
6.2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Penanganan	Persen	1459 Orang	99	99	99	99
6.3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Tepat Sasaran	Persen	31987 Orang	90	92	94	94
6.4	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan dan Penanganan Sosial	Persen	2178 Orang	89	89	89	89
	Aspek Pelayanan Umum Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja						



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
1.1	Presentase kesesuaian RTKD terhadap Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan	Persen	0	90	93	95	95
1.2	Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	Persen	3,13	15	25	35	35
1.3	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	38	40	42	45	45
1.4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	100	100	100
1.5	Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	7,24	20	22	24	24
1.6	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	1,79	10	15	20	20
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta	Persen	7	15	20	25	25
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	4	8	8	8	8
2.3	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	87,5	100	100	100	100
2.4	Meningkatnya pelayanan Puspaga	Keluarga	0	250	350	450	1050
2.5	Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di lintas SKPD	Dokumen	0	1	2	3	6
2.6	Capaian Penilaian Kabupaten layak Anak	Poin	520	580	590	600	600
2.7	Cakupan anak korban kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	110	100	100	100	100
3 Pangan							
3.1	Tersedianya fasilitas stock pangan yang memadai	Unit	10	0	1	1	12
3.2	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81,8	85	87	90	90
3.3	persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	Persen	7 Desa rawan Pangan	42,8	28,6	28,6	28,6



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
3.4	persentase peningkatan Jumlah jenis pangan segar yang tersertifikasi	Persen	1 Komoditas	20	27	27	27
4	Pertanahan						
4.1	Penanganan Konflik Tanah Pemerintah	Bidang	30	30	30	30	90
5	Lingkungan Hidup						
5.1	Persentase luas RTH yang dikelola (%)	Persen	92	92	93	95	95
5.2	Persentase Peningkatan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan hidup (%)	Persen	60	80	80	80	80
5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH, Rencana Induk Persampahan/RIP), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah/ DIKPLHD	Dokumen	1	2	2	2	6
5.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	71,50	71,755	71,855	71,955	71,955
5.5	Capaian Kampung Iklim yang Terbina	kampung iklim	0	5	8	10	10
5.6	Persentase usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang menyampaikan laporan	Persen	0	10	10	10	10
5.7	Persentase Capaian Pengawasan dan Pembinaan (%)	Persen	0	80	90	100	100
5.8	Teridentifikasinya Kawasan Masyarakat Hutan Adat (MHA)	MHA	60	80	90	100	100
5.9	Nominasi Penghargaan kalpataru	Orang	0	1	1	1	1
5.10	Penghargaan Adiwiyata (Sekolah/Lembaga)	Sekolah/Lembaga	0	1	2	3	6
5.11	Persentase penanganan pengaduan yang tertangani	Persen	48	5	10	10	25
5.12	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	Persen	80	100	100	100	100
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	100	100	100	100	100
6.2	Persentase kepemilikan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persen	100	100	100	100	100
6.3	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	Persen	100	100	100	100	100
6.4	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	3
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
7.1	Capaian Bumdes berdasarkan klasifikasi	Klasifikasi	Maju : 5 Berkembang : 15 Tumbuh : 10	Maju : 7 Berkembang : 16 Tumbuh : 7	Maju : 8 Berkembang : 18 Tumbuh : 4	Maju : 9 Berkembang : 20 Tumbuh : 1	Maju : 9 Berkembang : 20 Tumbuh : 1
7.2	Jumlah fasilitasi kerjasama desa	Desa	0	10	10	10	30
7.3	Jumlah kawasan pedesaan terbangun	Kawasan	0	1	1	1	3
7.4	Meningkatnya status desa	Klasifikasi	Mandiri : 12 Maju : 15 Berkembang : 3	Mandiri : 15 Maju : 15 Berkembang : 0	Mandiri : 20 Maju : 10 Berkembang : 0	Mandiri : 25 Maju : 5 Berkembang : 0	Mandiri : 25 Maju : 5 Berkembang : 0
7.5	Jumlah desa baru	Desa	30	38	46	50	50
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1	Meningkatnya Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan	Kampung	32	33	35	37	37
8.2	Meningkatnya Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	Rumah Data	0	6	7	8	21
8.3	Menurunnya angka Unmeed Need	Persen	23,4	17,58	17,56	17,54	17,54
8.4	Menurunnya angka TFR (Total Fertility Rate)	Persen	2,45	2,09	2,08	2,07	2,07
8.5	Menurunnya angka putus pakai (DO)	Persen	12	17,58	17,56	17,54	17,54
8.6	Meningkatnya CPR (Contraception Prevalence Rate)	Persen	62	80,25	80,45	80,65	80,65
8.7	Meningkatnya akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Persen	28	28,55	29,55	30,55	30,55
8.8	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Program Bangga Kencana	Persen	60	70	75	80	80
8.9	Tersedianya Fasilitas Pembinaan di Kampung KB	Rumah Data	0	2	3	4	9
8.1 0	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas Pembinaan 1000 HPK	Keluarga	2822	5168	5685	6685	17538
8.1 1	Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok UPPKA	0	4	5	6	15
8.1 2	Kampung KB yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan Dalam Rangka Penurunan Stunting	Kampung	0	1	2	3	6



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
9 Perhubungan							
9.1	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Persen	100	100	100	100	100
9.2	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	80	85	85	90	90
10 Komunikasi dan Informatika							
10.1	Persentase jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi	Persen	80	95	96	98	98
10.2	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	Persen	90	95	96	98	98
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas	Persen	50	55	60	65	65
11.2	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	Persen	33	37	41	44	44
12 Penanaman Modal							
12.1	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	Dokumen	1	1	2	1	4
12.2	Jumlah investor PMDN	Investor	56	50	60	70	180
12.3	Jumlah investor PMA	Investor		1	1	1	3
12.4	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Persen	77	80	82	85	85
12.5	Kenaikan nilai realisasi investasi PMA/PMDN	Rupiah	1394	10.000.000.000	13.000.000.000	15.000.000.000	38.000.000.000
12.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	87,86	88	88,2	88,4	88,4
13 Kepemudaan dan Keolahragaan							
13.1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	0	47	94	188	188
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Orang	0	60	120	240	240
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabang	0	16	32	64	64
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikat	Orang	0	30	60	120	120
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Orang	0	471	942	1884	1884
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	186	372	744	744
13.7	Jumlah prestasi olahraga	Cabang	0	23	46	92	92
13.8	Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara	Gedung	4	4	4	4	4
13.9	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Organisasi	10	10	10	10	10



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
14 Statistik							
14.1	Persentase pemenuhan data prioritas	Persen	85	98	98	98	98
15 Persandian							
15.1	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	90	95	96	98	98
16 Kebudayaan							
16.1	Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional	Kegiatan	2	3	3	3	11
16.2	Persentase Peningkatan Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	50	10	10	10	80
16.3	Objek Cagar Budaya yang telah ditetapkan	Objek Cagar Budaya Tak Benda	0	1	1	1	3
		Objek Cagar Budaya Benda		1	1	1	3
17 Perpustakaan							
17.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan	Persen	85,82	85,84	85,85	85,88	85,88
17.2	Tingkat IPLM	Persen	53	53,7	53,75	53,8	53,8
17.3	Persentase Peningkatan Jumlah Penerima Manfaat Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Persen	80	82	83	84	84
18 Kearsipan							
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Arsip	Persen	0	5,5	5,5	5,5	5,5
18.2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Arsip	Persen	0	50	50	50	50
Aspek Pelayanan Urusan Pilihan							
1 Kelautan dan Perikanan							
1.1	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Ton	6411	6568	6667	6766	20001
1.2	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	9236,4	11000	12100	13310	36410



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
1.3	Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan	5	4	3	2	9
1.4	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang mandiri	Kelompok	300	400	450	500	1350
2	Pariwisata						
2.1	Destinasi Wisata yang dikembangkan	Objek	0	1	1	1	3
2.2	Capaian kunjungan wisatawan	Persen	134.962	10	10	10	30
2.3	Capaian SDM yang dibina	Orang	0	50	50	50	150
2.4	Sub sektor prioritas ekonomi kreatif yang di kembangkan	Kegiatan	0	3	3	3	9
3	Pertanian						
3.1	Presentase tertanganinya gangguan usaha perkebunan	Persen	80	100	100	100	100
3.2	Prosentase pengendalian serangan organisme pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pertanian	Persen	80	100	100	100	100
3.3	Jumlah peningkatan hasil produksi pertanian	Ton	48.897	51.004	51.542	52.085	154.631
3.4	Jumlah Peningkatan produksi perkebunan	Ton	21.026	29.100	29.411	29.727	59.138
3.5	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna	Kelompok	48	48	48	48	48
3.6	Jumlah pembinaan kelembagaan petani dan penyuluh	Kelompok	604	604	604	604	604
3.7	jumlah perusahaan Perkebunan yang dimitrakan dan dinilai	Dokumen	4	4	4	4	4
3.8	Jumlah peningkatan populasi tenak	Ekor	15.303	16.626	16.959	17.291	50.876
4	Perdagangan						
4.1	Jumlah Sarana Perdagangan yang Representatif	Unit	10	12	14	16	16
4.2	Jumlah Kebutuhan pokok dan barang penting yang diintervensi dalam rangka stabilisasi harga dan stock	Produk	23	23	23	23	23
4.3	Jumlah Peningkatan alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Alat UTTP	90	200	250	300	300
5	Perindustrian						
5.1	Jumlah Dokumen Pengembangan Industri	Dokumen	1	1			
5.2	Jumlah Sentra IKM yang dikuatkan	Sentra	9	3	3	3	3
5.3	Persentase Peningkatan Jumlah Industri yang memiliki izin berusaha (%)	Persen	35	10	15	20	80
5.4	Persentase Peningkatan Data Industri yang masuk dalam SIINAS (%)	%	15	10	15	20	20
6	Transmigrasi						



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
6.1	Presentase status tanah restan di kawasan transmigrasi yang teridentifikasi	Persen	0	50	60	70	70
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
1 Perencanaan							
1.1	Rata-Rata Capaian Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah						
1.2	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah						
2 Keuangan							
2.1	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.3	Peningkatan PAD	Rupiah	106.342.276.703	112.176.570.245	157.142.287.000	157.248.061.000	157.248.061.000
2.4	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	6	7,3	8,5	9,5	9,5
3 Kepegawaian							
3.1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	Rasio	36:377	38 : 377	45 : 377	50 : 377	133 : 377
3.2	Persentase ASN yang telah mengikuti Assesment	Persen	91,88	93	95	99	99
4 Pendidikan dan Pelatihan							
4.1	Rasio ASN yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	Rasio	349:456	355 : 456	370 : 456	390 : 456	394 : 456
4.2	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran Disiplin ASN	Persen	70,37	80	85	90	90
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
1 Inspektorat							
1.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Persen	91,5	90	90	90	90
1.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	Persen	90,7	90	90	90	90
1.3	Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100	100	100	100	100
1.4	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,01	75	75	75	75
1.5	Predikat Kapabilitas APIP	Predikat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
1.6	Predikat Maturitas SPIP	Predikat	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Aspek Daya Saing							
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	14,49	2,42	2,63	2,82	2,82
1.2	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	Persen	18,59	4,81	4,82	4,83	4,83



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Tahun Ke-			Kondisi Akhir RPD
				1	2	3	
1.3	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	6	7,3	8,5	9,5	9,5
1.4	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rupiah	840.366.207.948	1.040.366.000.000	1.053.366.000.000	1.068.366.000.000	1.068.366.000.000
1.5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	65 (cukup)	67 (cukup)	70 (cukup)	70 (cukup)
1.6	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	N/A				
1.7	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	68,1	71,755	71,855	71,955	71,955
1.8	Indeks Resiko Bencana	Nilai	151,67	149,77	147,66	145,8	145,8
1.9	Persentase pemenuhan rumah layak huni	Persen	59,69	64	65	67	67
1.10	Persentase jalan Mantap	Persen	26,43	28	30	32	32



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah setentak pada tahun 2024-2025. RPD ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode kelima RPJPD (2005-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM





Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2024-2026

Tahun 2023